

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berpegang teguh pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggungjawab adalah melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berisi upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan secara sistematis dan terstruktur yang disusun dan disajikan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD serta membantu menentukan ketaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Secara spesifik, tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- w. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- x. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- y. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- z. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- aa. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- bb. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- cc. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 186 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1.1. Pendapatan-LRA
- 5.1.2. Belanja
- 5.1.3. Transfer
- 5.1.4. Pembiayaan
- 5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 5.1.6. Aset
- 5.1.7. Kewajiban
- 5.1.8. Ekuitas
- 5.1.9. Pendapatan-LO
- 5.1.10. Beban
- 5.1.11. Surplus/Defisit dari Operasi
- 5.1.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 5.1.13. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.1.14. Pos Luar Biasa
- 5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional
- 5.1.16. Laporan Arus Kas
- 5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.2. *Subsequent Event*

- 5.2.1. Piutang Transfer Antar Daerah
- 5.2.2. Dana Cadangan

BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah
- 6.2. Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
- 6.3. Pertumbuhan Ekonomi
- 6.4. Kewajiban Kontinjensi
- 6.5. Penjelasan Non Keuangan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan yang dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Secara umum, penerapan ekonomi makro bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonomi suatu negara sedangkan secara lebih khusus, tujuan penerapan kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dalam negeri, menstabilkan kondisi ekonomi, menyeimbangkan neraca pembayaran seimbang serta meratakan pendapatan penduduk. Sementara itu, Indonesia memiliki tujuan penerapan ekonomi makro tersendiri yaitu untuk menambah pendapatan nasional, menambah kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, mengendalikan inflasi, mewujudkan kestabilan ekonomi, dan membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi seimbang.

a. Ekonomi Global

Perekonomian global pada tahun 2022 secara keseluruhan diestimasi tumbuh 3,6 persen, melambat dibandingkan proyeksi sebelumnya yang sebesar 6,1 persen. Proyeksi yang melambat didasarkan pada perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia, baik melalui dampak langsung pada kedua negara maupun dampak global secara tidak langsung. Penurunan proyeksi ekonomi ini terjadi di hampir seluruh negara maju maupun negara berkembang. Pertumbuhan diestimasi melanjutkan perlambatan pada tahun 2023.

Setelah pemulihan yang kuat pada tahun 2021, berbagai faktor jangka pendek menunjukkan bahwa aktivitas global mengalami perlambatan. Pemulihan global yang sangat terhambat, disebabkan oleh perang di Ukraina yang telah menyebabkan hilangnya banyak nyawa dan memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Kejadian ini terjadi tepat saat ancaman varian Omicron memudar, dengan banyak bagian dunia bergerak melewati fase akut pandemi.

Tabel 2.1
Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara (Persen)

Kawasan	2022	2023
Negara Maju		
Amerika Serikat	3,7	2,3
Kawasan Euro	2,8	2,3
Jerman	2,1	2,7
Inggris	3,7	1,2

Kawasan	2022	2023
Jepang	2,4	2,3
Negara Berkembang		
Tiongkok	4,4	5,1
India	8,2	6,9
ASEAN-5	5,3	5,9
Brazil	0,8	1,4
Meksiko	2,0	2,5
Afrika Selatan	1,9	1,4
Global	3,6	3,6

Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2022

Sementara itu, sebagian besar harga komoditas diproyeksi akan mengalami peningkatan tajam yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina, terutama komoditas dimana Rusia dan Ukraina menjadi eksportir utama. Harga komoditas tersebut diprediksi akan tetap tinggi dalam jangka menengah, komoditas itu antara lain minyak mentah, gandum, dan komoditas non energi. Sementara tekanan harga diperkirakan akan mereda pada tahun 2023, harga komoditas akan tetap jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya.

Tabel 2.2
Proyeksi Harga Komoditas Global

Komoditas	Unit	2022	2023
Energi			
Batu Bara	USD/mt	250,0	170,0
Minyak Mentah	USD/bbl	100,0	92,0
Gas Alam, AS	USD/mmbtu	5,2	4,8
Non Energi			
Minyak Kelapa Sawit	USD/mt	1.650	1.400
Karet	USD/kg	2,10	2,20
Nikel	USD/mt	28.000	22.000
Emas	USD/toz	1.880	1.700

Sumber: World Bank, Commodity Markets Outlook, April 2022

b. Ekonomi Nasional

Ekonomi Makro merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi sebuah negara dimana indikator utamanya yaitu Asumsi Dasar Ekonomi Makro digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN, baik sisi pendapatan maupun belanja. Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro mengacu pada sasaran pembangunan namun tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional.

Tabel 2.3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2017 – 2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7 – 4,5	5,0 – 5,5
Inflasi (% ,yoy)	3,6	3,1	2,7	1,7	1,8 – 2,5	3,0
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.384	14.247	14.146	14.577	14.200 – 14.600	14.350

Indikator	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)*	n.a	n.a	n.a	n.a	6,34 – 7,24	6,82
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,98	4,97	5,62	3,19		
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	51	67	62	40	55 - 65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	804	778	746	707	680 – 1.007	703'
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.142	1.145	1.057	983	987 – 1.007	1.036

*Sebelum Tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 bulan
 Proyeksi PDB Nominal 2022 sekitar Rp17.897,3 triliun
 Sumber: Menteri Keuangan

Kebijakan reformasi struktural diarahkan untuk meningkatkan peran investasi dan ekspor sebagai roda pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan reformasi struktural yang konsisten mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Tingginya investasi akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang formal dan berproduktivitas tinggi sehingga menaikkan level pendapatan. Dalam jangka menengah, Pemerintah berkomitmen untuk mengupayakan laju inflasi bergerak rendah dan stabil sehingga mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan yang realistis dan efisien. Untuk mendukung hal tersebut, peta jalan pengendalian inflasi nasional sebagai rencana aksi dalam mencapai target pengendalian inflasi nasional telah dirancang dan didukung dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Dalam pengendalian inflasi nasional, empat strategi utama mencakup aspek Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi agar tetap positif. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, laju inflasi pada periode 2023–2025 diperkirakan mencapai kisaran 1,5 – 4,0 persen.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2023 – 2025

Indikator	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%.yoy)	5,3-6,1	5,4-6,3	5,5-6,5
Inflasi (%.yoy)	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.800-15.000	13.600-15.000	13.500-15.000
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,32-7,48	6,32-7,63	6,30-7,72
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	55-70	55-70	55-70
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	652-750	616-778	575-808
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.082-1.195	1.097-1.292	1.047-1.365

Sumber: Kementerian Keuangan

APBN disusun dengan menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro, namun volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik berpotensi memberi dampak terhadap risiko

fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Dampak dari deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasi kondisi ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi bertambahnya besaran defisit APBN.

Terdapat beberapa indikator ekonomi makro atau asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas kondisi dinamika perekonomian saat ini dan estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pengaruh perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN dapat bersifat langsung maupun tidak langsung maupun bersifat positif maupun negatif karena setiap indikator dapat saling mempengaruhi dalam konteks perekonomian secara luas.

c. Ekonomi Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2022 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh sebesar 5,68% (yoy). Capaian yang sangat baik tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini yang membaik menyusul tingginya mobilitas masyarakat yang berdampak positif pada permintaan domestik.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada konsumsi rumah tangga sejalan dengan berbagai aktivitas seperti sekolah tatap muka, *work from office*, dan *leisure* yang kembali bergairah dimana berbagai destinasi wisata mulai ramai dikunjungi, baik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Adapun dari sisi eksternal, ekspor masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat sehubungan dengan permintaan negara mitra yang mulai menurun sebagai dampak dari penurunan kondisi ekonomi global.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di triwulan III 2022 ditopang oleh kinerja positif pada sektor utama antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar & eceran, sektor pertanian, serta sektor transportasi & pergudangan. Secara struktural, sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian Jawa Barat dengan pangsa mencapai 41,76% pada triwulan III 2022, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar & eceran dengan pangsa sebesar 14,36%.

Berbanding terbalik dengan perekonomian yang tumbuh positif, inflasi Jawa Barat pada akhir Triwulan III 2022 tercatat sebesar 6,12% (yoy), tertinggi dalam 3 tahun terakhir serta berada diatas rentang target nasional. Tingginya inflasi pada akhir triwulan III 2022 terutama didorong

oleh lonjakan harga kelompok transportasi, khususnya bensin, tarif angkutan dalam kota, dan tarif jasa kendaraan roda 2 *online*. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh peningkatan harga bahan bakar rumah tangga dan tarif pendidikan, khususnya pendidikan tinggi (akademi/perguruan tinggi).

Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi di Jawa Barat, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah di Jawa Barat terus melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi secara konsisten dan responsif dengan berlandaskan pada strategi 4K. Upaya pengendalian inflasi yang telah dan akan terus dilakukan diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2022. GNPIP menjadi salah satu aksi nyata untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Berbagai kegiatan pengendalian inflasi tersebut, tidak hanya menasar stabilitas harga, namun turut serta mendukung upaya pemulihan ekonomi Jawa Barat. Kegiatan dan program pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi tersebut ini dilakukan sesuai dengan koridor strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

APBD Provinsi Jawa Barat TA 2022 diarahkan untuk terus melanjutkan upaya percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas sistem kesehatan daerah, dan peningkatan konektivitas dan infrastruktur. Fokus belanja pemerintah daerah pada tahun 2022 ditujukan pada 6 (enam) aspek, yaitu: (1) Pembangunan 11 (sebelas) prioritas daerah Provinsi Jawa Barat; (2) Pemenuhan pelayanan standar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar; (3) Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*); (4) Pemenuhan alokasi pendanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi infrastruktur, dsb; (5) Pemenuhan alokasi pendanaan untuk penanganan *Covid-19* berupa alokasi untuk pemulihan ekonomi, kesehatan, dan sosial Penanganan *Covid-19*; dan (6) Pendukung pelaksanaan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, Realisasi APBD 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada triwulan III tahun anggaran 2022 mengalami surplus total sebesar Rp 11,25 triliun. Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi mencatatkan surplus APBD pada triwulan III 2022 terbesar dengan surplus masing-masing sebesar Rp1,41 triliun dan Rp1,34 triliun. Adapun Kabupaten/Kota yang mengalami defisit anggaran pada realisasi triwulan III 2022 terbesar adalah Kabupaten Bekasi, yakni mencapai Rp391,96 miliar. Performa anggaran Kabupaten/Kota berkaitan erat dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah dan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat *Covid-19*. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Kabupaten/Kota dengan sektor utama seperti industri manufaktur dan pariwisata berpotensi mengalami kenaikan penerimaan pendapatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara kabupaten/kota

dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan didominasi oleh pekerja formal yang berpenghasilan tetap akan memiliki daya tahan fiskal yang relatif lebih kuat.

d. Ekonomi Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 yaitu Akselerasi Sumedang Simpati melalui Inovasi dan Kolaborasi. Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan kajian permasalahan dan isu strategis Kabupaten Sumedang yaitu Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal/Prioritas Akselerasi Pelayanan Dasar, Prioritas Penguatan Sumedang Agamis, Prioritas Penguatan Ketahanan Daerah, Prioritas Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Prioritas Penguatan Inovasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022.

Pemulihan Ekonomi Daerah sejalan dengan pemulihan ekonomi Nasional (PEN) yaitu melalui; optimalisasi pemberdayaan UMKM (formal dan non formal), dengan bertumpu pada 17 sektor lapangan usaha, terutama pertanian, pariwisata dan pengolahan; meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kecil menengah; meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan revitalisasi pasar tradisional; menguatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan, meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis, dan mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif.

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No	Uraian	Capaian dalam 3 Tahun			Penjelasan capaian (2020 s.d 2022)
		2022	2021	2020	
1	Tingkat Pengangguran (%)	7.72	9.18	9.89	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumedang juga dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di tahun 2020. Setelah itu, TPT kembali menurun lebih cepat, bahkan di tahun 2021 sudah mendekati kondisi sebelum pandemi. Adapun TPT di tahun 2022 mengalami penurunan pengangguran paling tinggi dibanding 2020 dan 2021. Hal ini diduga karena adanya lapangan pekerjaan baru atau ada penambahan lapangan pekerjaan dan didukung oleh masa pandemic yang berakhir sehingga pemulihan ekonomi di berbagai sektor Kembali bangkit yang berperan terhadap banyaknya lapangan pekerjaan.

No	Uraian	Capaian dalam 3 Tahun			Penjelasan capaian (2020 s.d 2022)
		2022	2021	2020	
2	Gini Rasio (Poin)	0.39	0.359	0.384	Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang diukur dengan gini ratio mengalami peningkatan di tahun 2020 karena adanya pandemi, dan seiring upaya pemulihan ekonomi maka gini ratio di tahun 2021 kembali menurun dan tetap berada di level rendah. Adapun peningkatan di tahun 2022 diduga karena masih dalam proses masa pemulihan ekonomi pasca pandemic sehingga kondisi ekonomi setiap masyarakat masih belum stabil. Walaupun demikian peningkatan di tahun 2022 dalam jumlah sedikit dan berada pada kisaran nilai dengan kategori rendah.
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72.69	71.80	71.64	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang konsisten meningkat setiap tahun meskipun sedikit melambat di masa pandemi Covid-19. Namun, ditahun 2022 mampu kembali meningkat cukup tinggi (0,89 poin) hingga mencapai 72,69 poin. Kondisi ini diduga karena dalam proses masa pemulihan ekonomi pasca pandemic sehingga meningkatkan IPM Kabupaten Sumedang.
4	Angka Kemiskinan (%)	10.14%	10.71%	10.26%	Dampak pandemi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin kembali bertambah selama 2020-2021, dan pada 2022 kembali dapat diturunkan menjadi 10,14%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kesiapan masyarakat, dan kestabilan ekonomi pasca pandemic sehingga pemulihan ekonomi terjadi dan faktor-faktor tersebut berperan dalam penurunan angka kemiskinan.

Sumber: Bappppeda Sumedang

IPM Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 berada pada peringkat 12 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat atau peringkat 3 dibanding Kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang lebih baik dibandingkan Kabupaten lainnya. Sementara itu, tingkat pertumbuhan kemiskinan di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut masih berada dibawah rata-rata kenaikan se-Jawa Barat. Berbanding terbalik dengan menurunnya tingkat pertumbuhan kemiskinan, tingkat pengangguran mengalami penurunan lebih baik dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan perekonomian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang meliputi *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Government (G2G)*, *Government to Employees (G2E)*, dan *Government to Non-Profit (G2N)*. Pentingnya penerapan SPBE didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain:

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja;
2. Semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program paperless;
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu *update*;
4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik;
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah; dan
6. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

Berikut adalah beberapa penerapan SPBE di Kabupaten Sumedang Tahun 2022:

Tabel 2.6
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang Tahun 2022

No.	Nama Aplikasi	Uraian Pemanfaatan Aplikasi
1	<i>e-office</i> ASN	<i>e-office</i> ASN merupakan aplikasi yang mengusung konsep <i>single sign on</i> (satu akun untuk berbagai layanan). Aplikasi ini diperuntukan untuk ASN dengan tujuan memberikan layanan kepada ASN untuk mempermudah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aplikasi ini merupakan gabungan dari berbagai aplikasi dan saling terintegrasi. Fitur-fitur yang disediakan <i>e-office</i> antara lain layanan persuratan (Tata Naskah Dinas) mulai dari penciptaan sampai pengarsipan, manajemen kepegawaian, manajemen kinerja, layanan ASN, manajemen talenta, e-sakip, RB-ZI, Analisis Jabatan, Pengelolaan inovasi Daerah, Monitoring Tapem dan lain-lain. Aplikasi tersedia dalam <i>mobile App</i> Android dan <i>Web Base</i> .
2	<i>e-office</i> Desa	Super aplikasi <i>e-office</i> desa merupakan sistem yang menyeluruh untuk perangkat desa dengan data yang saling terintegrasi untuk semua sektor layanan pemerintahan desa yang meliputi layanan <i>Government to Government</i> , <i>Government to Employee</i> , <i>Government to Citizen</i> dan <i>Government to Business</i> . Mengusung konsep SSO (<i>Single Sign On</i>), dan OSS (<i>One Stop Services</i>), yaitu cukup menggunakan satu akun maka semua layanan yang dibutuhkan tersedia, tanpa harus berganti aplikasi dan duplikasi data. Semua perangkat desa cukup login ke <i>e-office</i> desa maka semua layanan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya akan tersedia mulai dari urusan surat menyurat dan kearsipan, tanda tangan digital, manajemen kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, kependudukan, <i>web site desa</i> , SAKIP Desa, pendataan keluarga dan layanan masyarakat, dll
3	Tahu Sumedang	Aplikasi layanan masyarakat (<i>Government to Citizen</i>) yang menggabungkan berbagai layanan dan informasi untuk masyarakat Sumedang. Aplikasi ini merupakan gabungan antar muka berbagai aplikasi layanan masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai gateway untuk masyarakat dalam memperoleh layanan dari pemerintah. Secara bertahap kedepannya semua aplikasi yang diperuntukan untuk masyarakat dapat di akses dari aplikasi Tahu. Mengusung konsep <i>single sign on</i> dimana masyarakat cukup menggunakan satu akun dapat mengakses berbagai layanan. Saat ini baru tersedia versi <i>web base</i> dan dalam waktu dekat akan diluncurkan versi <i>mobile app</i> android. Layanan yang diberikan diantaranya layanan kependudukan, layanan pengaduan, layanan ketenagakerjaan dll.

No.	Nama Aplikasi	Uraian Pemanfaatan Aplikasi
4.	Aplikasi e-simpati	Aplikasi ini khusus dipergunakan untuk penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. Pengguna aplikasi ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penanganan stunting mulai dari kader posyandu sampai pemerintah daerah. Aplikasi memiliki kemampuan mencatat data balita, data hasil pengukuran tinggi dan berat badan balita, sinkronisasi dengan aplikasi EPPGBM Kemenkes, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk penanganan <i>stunting</i> .
5.	<i>Command Center</i>	Merupakan dashboard untuk pimpinan-pimpinan dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Aplikasi memproses data-data berbagai macam indikator-indikator pembangunan baik secara <i>real time</i> yang bersumber dari sistem-sistem yang tersedia maupun diupdate secara periodik. Data-data tersebut diolah untuk dijadikan bahan sebagai penunjang bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan. Data-data tidak hanya terbatas dari internal pemerintah Kabupaten Sumedang tapi juga dari instansi di luar pemerintahan seperti BPJS Kesehatan.
6.	Sigeol (Sistem Informasi Geospasial <i>online</i>)	Aplikasi untuk mewujudkan Sumedang satu data dan satu peta, Pemanfaatan geospasial sebagai dasar untuk <i>overlay</i> peta dasar maupun citra foto udara dengan data <i>statistic sectoral</i> . Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan data ke dalam peta sehingga pengguna memiliki gambaran nyata terhadap kondisi riil lapangan. Sigeol menampung data-data dari berbagai sektor mulai dari tingkat desa sampai tingkat OPD dengan memanfaatkan peta dasar yang terstandar dengan baik. Dari sigeol banyak kebijakan-kebijakan yang dapat diambil berdasarkan pemanfaatan aplikasi ini.
6	Sijagur	Sistem informasi kinerja pembangunan terukur merupakan aplikasi yang mengintegrasikan data mulai dari SIRUP LKPP, data pencatatan dokumen kontrak, data monitoring evaluasi pekerjaan, sampai dengan data proses pembayaran. Data-data tersebut selanjutnya di proses dan di visualisasikan menjadi <i>executive dashboard</i> untuk disajikan ke <i>stakeholder</i> terkait.
7.	Open data	Aplikasi mengatur penyelenggaraan tata Kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Tujuan aplikasi adalah sebagai <i>single source of truth</i> pengelolaan data pembangunan. Aplikasi berbasis <i>web base</i> dan memuat <i>data sheet</i> yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak termasuk masyarakat.

Sumber: Bappppeda Sumedang

Penyelenggaran pembangunan daerah Kabupaten Sumedang dibantu dengan diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak tahun 2021 hingga sekarang. Penerapan SIPD ini bertujuan untuk menyediakan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Penggunaan SIPD di Kabupaten Sumedang telah meliputi Perencanaan dan Penganggaran, dimana pada Perencanaan, SIPD digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, Musrenbang Kecamatan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sedangkan pada Penganggaran, SIPD digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, Raperda dan Raperbup APBD serta DPPA SKPD. Sementara itu, proses Penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya menggunakan SIPD dan masih menggunakan aplikasi pendamping yaitu Aplikasi SIPKD (SIPASTI). Adapun proses penatausahaan yang telah dilaksanakan melalui SIPD adalah:

1. Proses pelimpahan paket/kegiatan oleh akun PA (dari PA ke KPA bagi SKPD ber KPA);
2. Pembuatan *template* gaji dan TPP;
3. Pembuatan SPP oleh akun BP/BPP;
4. Pembuatan SPTJM SPP oleh akun PA/KPA;
5. Verifikasi SPP oleh Akun PPK SKPD;
6. Pembuatan SPM oleh Akun PPK SKPD;
7. Pembuatan SPTJM SPM oleh akun PA/KPA;
8. Pembuatan SP2D oleh akun KBUD;
9. Proses input SPJ untuk belanja LS/TUP; dan
10. Proses input TBP untuk belanja UP/GU sampai proses validasi SPJ dan pengajuan Kembali GU selanjutnya.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan proses penatausahaan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan melalui SIPD, yaitu:

1. Kendala Sistem
 - a. Pada fitur *template* Gaji, terdapat *error* setelah *upload* berhasil dilakukan dimana muncul notifikasi nomor rekening tidak valid pada saat proses validasi rekening masing-masing pegawai, meskipun nomor rekening tersebut telah sesuai, sehingga menyebabkan proses penerbitan SPP tidak dapat dilanjutkan;
 - b. Belum tersedianya menu pembatalan pada proses pelimpahan Uang Persediaan (UP), sehingga ketika terjadi *human error* harus meminta Tim Admin Pusat untuk melakukan pembatalan tersebut;
 - c. Tidak terdapat menu *reset* pada akun tingkatan yang tinggi ketika SKPD tidak mengingat *password* akun SIPD-nya;
 - d. Pada register (cetakan) tidak terdapat register SPP – SPM – SP2D; dan
 - e. Belum tersedianya cetakan laporan yang dibutuhkan seperti pada aplikasi pendamping.
2. Kendala Diluar Sistem
 - a. Proses perekaman tidak maksimal dikarenakan masih digunakannya dua aplikasi sehingga penginputan harus dilakukan pada dua aplikasi tersebut; dan
 - b. Keterbatasan SDM dalam mengoperasikan SIPD, terutama pembuatan *template* pembayaran gaji dan TPP.

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dan melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Ketentuan terkait Pendapatan Transfer dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa peraturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai acuan awal dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam penyusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif dapat diimplementasikan dengan baik maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian dari Belanja Negara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan instrumen bagi daerah untuk membangun kemandirian sebagai pondasi otonomi daerah. Dalam struktur APBD, TKDD dari Pemerintah Pusat masuk ke dalam Pendapatan Transfer. TKDD terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. Alokasi TKDD dalam APBN 2022 jumlahnya mencapai Rp769,61 Triliun yang terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp701,61,48 Triliun dan Dana Desa sebesar Rp68 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp105,26 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp53,86 triliun, DBH SDA sebesar Rp43,50 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp7,90 triliun, anggaran Kurang Bayar DBH merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan memperhatikan kondisi keuangan negara;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp378,00 triliun atau 28,5% PDN Neto, dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja pelaporan dan mempertimbangkan kinerja pengelolaan APBD;
3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp60,87 triliun, yang mencakup 6 (enam) Bidang DAK Fisik Reguler dan 12 (dua belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, termasuk penambahan 2 (dua) bidang baru, yakni: (i) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan (ii) Bidang Perdagangan;
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sebesar Rp128,72 triliun, yang mencakup 16 (enam belas) jenis dana, dengan penambahan 1 dana baru, yakni Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM);
5. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,76 triliun;
6. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp7,00 triliun yang terdiri dari DID Kinerja tahun sebelumnya dan DID Kinerja tahun berjalan; dan
7. Dana Desa sebesar Rp68,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.960 desa dan penggunaannya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa, dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan melalui kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta pembiayaan setiap usulan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik melalui mekanisme Kewilayahan maupun melalui forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan.

Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah; dan
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dilakukan sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem *online* terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui:
 - a) Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - b) Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB; dan
 - c) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
 - 1) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - 2) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan; dan
 - 3) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a) Wajib pajak *self assessment*;
 - b) Wajib pajak PBB-KB; dan
 - c) Wajib pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a) Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b) PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya; dan
 - c) Melakukan cleansing data terhadap piutang pajak.
5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

b. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Ekstensifikasi:

1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah:
 - a) Melakukan penambahan objek pajak;
 - b) Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir; dan

- c) Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame.
- 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - a) Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM; dan
 - b) Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.
- c. Untuk peningkatan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - 1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui:
 - a) Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c) Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d) Menerapkan *cashless* dalam pembayaran retribusi dengan banking system;
 - e) Memulai menerapkan *e-ticketing*; dan
 - f) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
 - 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui:
 - a) Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah; dan
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- d. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan upaya sebagai berikut:
 - 1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 - 2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
 - 3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan
 - 4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.
- e. Untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya sebagai berikut:
 - 1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
 - 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - 3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

f. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Tabel 2.7
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2022	Perubahan Proyeksi Pendapatan	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	537.973.563.766,00	531.458.638.880,00	(6.514.924.886,00)	(1,21)
4.1.01.	Pajak Daerah	273.224.000.000,00	237.977.066.250,00	(35.246.933.750,00)	(12,90)
4.1.02.	Retribusi Daerah	188.163.813.042,00	16.129.543.526,00	(172.034.269.516,00)	(91,43)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.603.089.374,00	12.638.338.095,00	1.035.248.721,00	8,92
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.982.661.350,00	264.713.691.009,00	199.731.029.659,00	307,36
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.235.460.131.257,00	2.445.472.895.778,00	210.012.764.521,00	9,39
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.094.100.548.986,00	2.106.844.724.840,00	12.744.175.854,00	0,61
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.359.582.271,00	338.628.170.938,00	197.268.588.667,00	139,55
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.773.433.695.023,00	2.976.931.534.658,00	203.497.839.635,00	7,34

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

Klasifikasi Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Belanja Operasi; yang terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial;
- b. Belanja Modal; yang terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya;
- c. Belanja Tidak Terduga; yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. BUMD;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi
- f. Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia; dan
- g. Partai Politik.

Pemberian Hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2021, antara lain:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. Kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Partai politik; dan/atau
 4. Ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan;
- d. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. Memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial, lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial. Pemberian Bantuan Sosial harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan bahwa belanja yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- b. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang ditujukan untuk Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi;
- c. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Memenuhi program-program yang bersifat mengikat seperti program-program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDG's dan program-program urusan wajib pelayanan dasar;
- e. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2022;

- f. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan, dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2022.

Program-program dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat, kedua adalah program perangkat daerah yang terkait dengan perwujudan visi dan misi serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib Pelayanan dasar serta yang ketiga adalah program-program penyelenggaraan urusan lainnya sebagai penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.

Program-Program untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang pemerintah daerah terdiri dari program urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disajikan berdasarkan urusan dan fungsi penunjang serta program yang bersifat rutin (generik) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan kinerja para aparatur dalam proses penyelenggaraan pemeritahan Daerah.

Pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun.

Tabel 2.8
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022

Uraian	Proyeksi 2022 (dalam Rupiah)
Total Belanja Tidak Langsung	1.796.833.172.672,40
Belanja Pegawai	1.181.701.627.626,61
Belanja Bunga	0,00
Belanja Subsidi	0,00
Belanja Hibah	58.778.364.475,87
Belanja Bantuan Sosial	4.313.141.152,56
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	691.647.852.666,55
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	34.330.769.431,61
Belanja Tidak Terduga	1.700.000.000,00

Sumber: PERDA Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Adapun Perubahan Proyeksi Belanja Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2022	Perubahan Proyeksi Belanja	Rp	%
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA OPERASI	2.023.359.388.122,00	2.174.405.964.869,00	151.046.576.747,00	7,47
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.285.677.808.177,00	1.236.237.935.089,00	(49.439.873.088,00)	(3,85)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	674.313.659.045,00	852.462.461.630,00	178.148.802.585,00	26,42
5.1.04.	Belanja Subsidi	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
5.1.05.	Belanja Hibah	59.564.160.000,00	78.151.107.250,00	18.586.947.250,00	31,20
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	3.803.760.900,00	7.374.460.900,00	3.570.700.000,00	93,87
5.2.	BELANJA MODAL	326.120.232.038,00	559.478.453.307,00	233.358.221.269,00	71,56
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	7.786.737.139,00	27.617.607.139,00	19.830.870.000,00	254,67
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.746.049.702,00	205.796.306.905,00	102.050.257.203,00	98,37
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.078.438.577,00	134.848.591.707,00	62.770.153.130,00	87,09
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.249.951.730,00	168.281.110.039,00	65.031.158.309,00	62,98
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.259.054.890,00	22.339.837.517,00	(16.919.217.373,00)	(43,10)
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	595.000.000,00	595.000.000,00	100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	26.056.380.703,00	56.399.750.921,00	30.343.370.218,00	116,45
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	26.056.380.703,00	56.399.750.921,00	30.343.370.218,00	116,45
5.4	BELANJA TRANSFER	385.568.021.000,00	390.568.021.000,00	5.000.000.000,00	1,30
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	29.487.295.000,00	29.487.295.000,00	0,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	356.080.726.000,00	361.080.726.000,00	5.000.000.000,00	1,40
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.761.104.021.863,00	3.180.852.190.097,00	419.748.168.234,00	15,20

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan prioritasnya terutama dalam menangani dampak pandemi *Covid-19* adalah dengan pinjaman PEN. Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN juga sebagai salah satu instrumen atau modalitas pembiayaan alternatif yang potensial dalam rangka mengatasi

defisit APBD dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk menutup defisit APBD;
- b. Membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. Membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
- d. Membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di daerah; dan
- e. Membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Kegiatan yang didanai oleh pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program atau Pinjaman Kegiatan dengan jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun. Biaya pengelolaan pinjaman per tahun adalah sebesar 0,815% dengan biaya provisi sebesar 1% dari jumlah Pinjaman PEN Daerah. Untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman yang ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% sedangkan untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman yang ditandatangani pada tahun 2021, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Alokasi pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp10 Triliun dan dana pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur adalah sebesar Rp5 Triliun sehingga total alokasi pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp15 Triliun.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 yang direncanakan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa penerimaan pembiayaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD tetapi untuk penganggarannya dilakukan di PPKD.

Sementara Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 meliputi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD dan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD. Rincian Penyertaan Modal kepada BUMD TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD TA 2022

NO	BUMD	PERDA PENYERTAAN MODAL	NILAI PENYERTAAN MODAL TA 2022	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENYERTAAN MODAL TA 2022
1	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	Rp4.329.673.160,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun Anggaran 2022
2	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang	Rp1.500.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022
3	Bank Perkreditan Rakyat Sumedang	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang	Rp 5.500.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Tahun Anggaran 2022
4	PT LKM Sumedang	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang	Rp1.000.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang Tahun Anggaran 2022

Adapun Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2022	Perubahan Proyeksi Pembiayaan	Rp	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	231.430.328.599,00	231.430.328.599,00	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	231.430.328.599,00	231.430.328.599,00	100,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.329.673.160,00	27.509.673.160,00	15.180.000.000,00	123,12
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	12.329.673.160,00	12.509.673.160,00	180.000.000,00	1,46
	PEMBIAYAAN NETTO	(12.329.673.160,00)	203.920.655.439,00	216.250.328.599,00	(1.753,90)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi, sebagai berikut:

Tabel 2.12
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD menurut Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi TA 2022

Kode	Uraian	Realisasi Keuangan (%)
01.	Pelayanan Umum	90,18
01.1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	98,18
01.2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	94,31
01.2.20.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	97,52
01.2.21.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	96,25
01.2.24.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	84,46
01.3.31.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	96,89
01.3.32.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	94,83
01.4.01.	Sekretariat Daerah	97,17
01.4.02.	Sekretariat DPRD	96,03
01.5.01.	Perencanaan	96,59
01.5.02.	Keuangan	86,60
01.5.03.	Kepegawaian	90,24
01.5.05.	Penelitian dan Pengembangan	89,80
01.6.01.	Inspektorat Daerah	98,61
01.7.01.	Kecamatan	96,23
03.	Ketertiban dan ketentraman	92,20
03.8.01.	Kesatuan Bangsa dan Politik	92,20
04.	Ekonomi	96,06
04.2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	94,56
04.2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	99,12
04.2.13.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97,66
04.2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	98,05
04.2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	97,09
04.2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	93,21
04.3.25.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	97,94
04.3.27.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	94,78
04.3.28.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	99,83
04.3.30.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	93,54
05.	Lingkungan Hidup	96,46
05.2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	96,47
05.2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	96,44
06.	Perumahan dan fasilitas umum	76,12
06.1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,04
06.1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	93,07
07.	Kesehatan	93,50
07.1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	93,46
07.2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,51
08.	Pariwisata dan Budaya	94,84

Kode	Uraian	Realisasi Keuangan (%)
08.2.22.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	99,91
08.3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	94,24
10.	Pendidikan	96,28
10.1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	96,25
10.2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	99,28
10.2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	94,75
11.	Perlindungan Sosial	92,41
11.1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	92,12
11.2.08.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96,86
11.2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,17

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.887.971.103.743,84 dibandingkan Anggaran Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp2.976.931.534.658,00 kurang dari anggaran sebesar (Rp88.960.430.914,16) (-3,14%). Realisasi Pendapatan Daerah ini berasal dari:

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2022, dapat dijelaskan oleh tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk PAD

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pendapatan Pajak Daerah	237.977.066.250,00	221.379.897.839,00	93,03	(16.597.168.411,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.129.543.526,00	9.276.092.781,00	57,51	(6.853.450.745,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.638.338.095,00	12.643.497.231,00	100,04	5.159.136,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	264.713.691.009,00	275.687.324.303,84	104,15	10.973.633.294,84
Jumlah		531.458.638.880,00	518.986.812.154,84	97,65	(12.471.826.725,16)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp531.458.638.880,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp518.986.812.154,84 mengalami penurunan penerimaan sebesar (Rp12.471.826.725,16) atau turun (-2,35%) dari anggaran.

3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer memiliki peranan terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Transfer dari target Tahun 2022 sebesar Rp2.445.472.895.778,00 telah terealisasi sebesar Rp2.365.573.220.560,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp79.899.675.218,00) (-3,27%). sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.831.712.363.840,00	1.765.132.904.738,00	96,37	(66.579.459.102,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	275.132.361.000,00	274.422.186.800,00	99,74	(710.174.200,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	338.628.170.938,00	326.018.129.022,00	96,28	(12.610.041.916,00)
Jumlah		2.445.472.895.778,00	2.365.573.220.560,00	96,73	(79.899.675.218,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan kurang sebesar (Rp79.899.675.218,00) dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan.

Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	70.353.885.062,00	67.220.420.048,00	95,55	(3.133.465.014,00)
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	32.514.584.778,00	36.225.796.565,00	111,41	3.711.211.787,00
3	Dana Alokasi Umum	1.058.905.256.000,00	1.052.231.192.000,00	99,37	(6.674.064.000,00)
4	Dana Alokasi Khusus	669.938.638.000,00	609.455.496.125,00	90,97	(60.483.141.875,00)
Jumlah		1.831.712.363.840,00	1.765.132.904.738,00	96,37	(66.579.459.102,00)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp36.225.796.565,00 (111,41%) dari target anggaran sebesar Rp32.514.584.778,00. Sementara Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terealisasi kurang dari target anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Dana Penyesuaian	37.001.635.000,00	37.001.635.000,00	100,00	0,00
2	Dana Desa	238.130.726.000,00	237.420.551.800,00	99,70	(710.174.200,00)
Jumlah		275.132.361.000,00	274.422.186.800,00	99,74	(710.174.200,00)

Dana Penyesuaian terealisasi 100% sebesar target anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp37.001.635.000,00 sementara Dana Desa terealisasi kurang Rp710.174.200 (0,30%) dari target anggarannya.

Tabel 3.5
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	165.125.099.330,00	164.239.295.900,00	99,46	(885.803.430,00)
2	Bantuan Keuangan	173.503.071.608,00	161.778.833.122,00	93,24	(11.724.238.486,00)
Jumlah		338.628.170.938,00	326.018.129.022,00	96,28	(12.610.041.916,00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan terealisasi kurang dari anggaran yang telah ditetapkan dengan masing-masing selisih sebesar (Rp885.803.430,00) dan (Rp11.724.238.486,00) dengan masing-masing tingkat capaian sebesar 99,46% dan 93,24%.

3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah berupa Pendapatan Hibah tidak dianggarkan pada TA 2022 namun terealisasi sebesar Rp3.411.071.029,00.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari program/kegiatan pada setiap SKPD pada urusan wajib serta urusan pilihan.

Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan wajib pada setiap SKPD dilakukan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pelaksanaan belanja tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.930.935.975.245,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp3.180.852.190.097,00 kurang dari anggaran sebesar (Rp249.916.214.852,00) atau (-7,86%). Realisasi Belanja Daerah ini berasal dari:

3.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan akuntabilitas belanja untuk kelompok Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Operasi

No	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Pegawai	1.236.237.935.089,00	1.169.624.519.375,00	94,61	(66.613.415.714,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	852.462.461.630,00	803.235.286.510,00	94,23	(49.227.175.120,00)
3	Subsidi	180.000.000,00	95.782.500,00	53,21	(84.217.500,00)
4	Hibah	78.151.107.250,00	78.047.993.016,00	99,87	(103.114.234,00)
5	Bantuan Sosial	7.374.460.900,00	6.712.957.200,00	91,03	(661.503.700,00)
Jumlah		2.174.405.964.869,00	2.057.716.538.601,00	94,63	(116.689.426.268,00)

Berdasarkan tabel 3.6. diatas terlihat bahwa Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp2.057.716.538.601,00 dari anggaran perubahan sebesar Rp2.174.405.964.869,00 terdapat selisih kurang sebesar (Rp116.689.426.268,00) atau kurang (-5,37%).

3.1.2.2 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk melihat dengan lebih jelas, anggaran dan realisasi mengenai Belanja Modal Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Modal

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Tanah	27.617.607.139,00	27.007.255.100,00	97,79	(610.352.039,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	205.796.306.905,00	189.446.017.112,00	92,06	(16.350.289.793,00)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	134.848.591.707,00	129.969.430.312,00	96,38	(4.879.161.395,00)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	168.281.110.039,00	116.084.739.946,00	68,98	(52.196.370.093,00)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.339.837.517,00	17.526.966.056,00	78,46	(4.812.871.461,00)
6	Belanja Aset Lainnya	595.000.000,00	543.850.955,00	91,40	(51.149.045,00)
Jumlah		559.478.453.307,00	480.578.259.481,00	85,90	(78.900.193.826,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp480.578.259.481,00 dari anggaran perubahan sebesar Rp559.478.453.307,00 terdapat selisih kurang sebesar (Rp78.900.193.826,00) atau kurang (14,10%).

3.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.786.124.220,00 bila dibandingkan dengan anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp56.399.750.921,00 terdapat selisih kurang sebesar (Rp53.613.626.701,00) atau kurang (95,06%).

3.1.3 Transfer

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer merupakan bagian dari Belanja. Jenis transfer menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yaitu Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Transfer Tahun 2021 sebesar Rp389.855.052.943,00 bila dibandingkan dengan anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp390.568.021.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar (Rp712.968.057,00) atau (-0,18%).

Tabel 3.8
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Transfer

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Bagi Hasil Pajak	27.322.400.000,00	27.321.453.500,00	100,00	(946.500,00)
2	Bagi Hasil Retribusi	2.164.895.000,00	2.164.870.000,00	100,00	(25.000,00)
3	Bantuan Keuangan ke Desa	361.080.726.000,00	360.368.729.443,00	99,80	(711.996.557,00)
Jumlah		390.568.021.000,00	389.855.052.943,00	99,82	(712.968.057,00)

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan tetap melanjutkan kebijakan yang telah ada yaitu pengamanan kemungkinan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.009.696.280,90 dengan tingkat capaian 100,53% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp203.920.655.439,00. Realisasi Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3.9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Penggunaan SILPA	231.430.328.599,00	232.339.367.075,90	100,39	909.038.476,90
Jumlah		231.430.328.599,00	232.339.367.075,90	100,39	909.038.476,90

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp232.339.367.075,90 dengan tingkat capaian 100,39% dari target anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp231.430.328.599,00 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3.10
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Berdasarkan Aspek Pembiayaan Untuk Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2022		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	-
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.509.673.160,00	12.329.670.795,00	98,56	(180.002.365,00)
Jumlah		27.509.673.160,00	27.329.670.795,00	99,35	(180.002.365,00)

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp27.329.670.795,00 dibandingkan dengan anggaran perubahan yang ditetapkan sebesar Rp27.509.673.160,00 atau realisasinya mencapai 99,35% yang berasal dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3.1.5 *Mandatory Spending*

Mandatory Spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah serta pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, yang meliputi:

1. Bidang pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

2. Bidang Kesehatan

- a. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah mengalokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar Belanja Gaji dan Tunjangan Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- b. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (Lima Puluh persen) untuk Mendanai Pelayanan Kesehatan dan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat digunakan untuk sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

3. Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa

Sebagaimana Diatur dalam Undang – Undan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Yang memiliki desa harus menganggarkan paling sedikit 10 (sepuluh) persen untuk dana transfer ke pemerintah desa dengan uraian sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK; dan
- b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Rencana Pendapatan pajak dan retribusi daerah.

4. Belanja Pegawai dan Infrastuktur

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan Belanja Pegawai dan Belanja infrastuktur dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;

b. Belanja infrastuktur

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

Dalam hal persentase belanja Pegawai dan infrastruktur pelayanan publik belum memenuhi ketentuan prosentase yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja Pegawai dan infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan atau paling lama pada Tahun 2026

Berikut realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terkait *Mandatory Spending*:

Tabel 3.11
Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 terkait *Mandatory Spending*

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pendapatan Pajak dan Retribusi	254.106.609.776,00	230.656.000.020,00
2	Pendapatan - Dana Alokasi Umum	1.058.905.256.000,00	1.052.231.192.000,00
3	Pendapatan - Dana Alokasi Khusus	669.938.638.000,00	609.455.496.125,00
4	Pendapatan - Dana Bagi Hasil	102.868.469.840,00	114.693.737.586,00

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
5	Pendapatan - Dana Desa	238.130.726.000,00	237.420.551.800,00
6	Belanja Bidang Pendidikan	1.050.705.789.255,00	1.011.337.480.494,00
7	Belanja Bidang Kesehatan	478.769.174.897,00	444.657.188.465,00
8	Belanja Bidang Perlindungan Sosial	6.174.557.600,00	5.149.242.480,00
9	Belanja Pembangunan Infrastruktur	370.783.653.135,00	305.088.575.433,00
10	Belanja Gaji	761.855.217.319,00	744.476.164.572,00
11	Belanja Transfer ke Desa	390.568.021.000,00	389.855.052.943,00
12	Total Pendapatan Daerah	2.976.931.534.658,00	2.899.217.620.617,84
13	Total Belanja Daerah	3.180.852.190.097,00	2.930.935.980.687,00

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah diantaranya adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum Optimal

Kualitas Sumber Daya Manusia membawa dampak terhadap kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dalam segi wawasan dan kemampuan untuk manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dirasakan belum optimal. Kurangnya SDM yang mampu menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik

Kecenderungan kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dalam peningkatan pendapatan, akan berdampak terhadap tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak/Retribusi sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pendapatan.

3. Kurangnya Kesadaran dari Wajib Pajak/Retribusi

Masih banyak Wajib Pajak/Retribusi yang belum sadar dan belum mematuhi/memahami Peraturan Perundang Undangan tentang Perpajakan akan kewajiban dalam membayar Pajak/retribusi terkesan menghindari kewajiban dalam pembayaran Pajak/retribusi Daerah dengan berbagai alasan antara lain pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan pengeluaran akibat banyaknya pesaing, serta banyak Wajib Pajak/retribusi yang tidak operasional lagi (tutup) diantaranya karena terdampak pandemi *Covid-19*.

4. Penegakan dan Penerapan Sanksi Hukum yang belum Optimal

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penerapan sanksi hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan/auditor Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan penegakan Peraturan Perundangan belum optimal

Adapun solusi dari permasalahan diatas, antara lain:

- a. Telah menyusun basis data pendapatan melalui kegiatan pemutakhiran basis data dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang penetapan formulasi perhitungan estimasi pendapatan;
- b. Telah melaksanakan bimbingan teknis kepada pemeriksa pajak sebagai tenaga untuk memeriksa petugas dan WP khususnya untuk jenis pajak yang sifatnya *self assesment*;
- c. Menyediakan ruangan pelayanan pajak terpadu seluruh jenis pajak daerah dengan sistem pembayaran *host to host* BJB gratis, dengan tujuan memudahkan pelayanan yang cepat dan tanpa dipungut biaya apapun kepada masyarakat;
- d. Menyediakan mobil keliling jemput bola pembayaran pajak ke desa-desa bekerjasama dengan BJB dan BRI;
- e. Melaksanakan dan mengembangkan sistem E-SPTPD, dimana WP bisa melakukan pendaftaran sebagai WP baru dan mengetahui besaran pajak yang harus dibayar hanya melalui ponsel serta dapat mengetahui realisasi pembayaran pajak *real time*;
- f. Melakukan MoU dengan kejelasan untuk membantu mediasi dengan WP yang macet melakukan pembayaran pajak;
- g. Melakukan pemutakhiran basis data PBB P2 diawali dengan penilaian Zona Nilai Tanah sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah 5 tahun belum disesuaikan;
- h. Peningkatan kapasitas aparatur pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional, bimbingan teknis pengelolaan Pajak Daerah;
- i. Perbaiki sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja, diantaranya yaitu dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik sehingga pelayanan bisa cepat, mudah, terjangkau dan nyaman;
- j. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak; dan
- k. Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dan media sosial lainnya.

Selanjutnya dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditempuh melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah mengacu kepada arah kebijakan umum dan rencana strategis bidang pendapatan yang telah ditetapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan;

2. Perencanaan target penerimaan daerah diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada;
3. Transparansi dalam proses penetapan dan pembayaran pajak/retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan dalam rangka mengamankan target pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pemungutan.

3.2.2. Permasalahan dan Solusi Belanja

Penentuan besaran Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya jumlah kebutuhan daerah baik dari sisi belanja tidak langsung maupun dari sisi belanja langsung yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan dalam realisasinya, Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Apabila dianalisa lebih jauh, peningkatan anggaran dan realisasi belanja daerah semata-mata lebih merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun 2022 mengacu kepada anggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, maka diharapkan APBD dimaksud dapat lebih memaksimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran untuk membiayai aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai bagian untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dibiayai dari dana masyarakat yaitu APBD dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sumedang. Pemilahan akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari penggunaan anggaran pemerintah ke dalam struktur APBD merupakan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya sampai dengan hari ini masih terus dikaji dan dikembangkan dengan melihat kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan Konsolidasian adalah unit pemerintahan yang melakukan proses konsolidasi seluruh laporan keuangan entitas pelaporan menjadi laporan keuangan daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis akrual, maka setiap entitas wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Serta Peraturan lainnya yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 98 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Dengan demikian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah:

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu pendapatan diakui pada

saat diterima di rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Pendapatan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode akuntansi sebelumnya dicatat sebagai pengurangan kas dan ekuitas dana lancar. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja diakui dengan basis kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan dimuka (*face*) Laporan Keuangan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) yang meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban diakui pada saat: (a) timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar, (b) terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran beban menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan

surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan diakui dengan basis kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Pembiayaan disajikan sampai dengan jenis pembiayaan.

6) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer terdiri atas transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dilaporkan sebagai pendapatan transfer dan disajikan sampai dengan jenis. Transfer keluar dilaporkan sampai dengan jenis. Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan

segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan. Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara. Kas dan Setara Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Kas dan Setara Kas disajikan sesuai pos-pos buku besar Kas dan Setara Kas, rincian lebih lanjut Kas dan Setara Kas berikut informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang meliputi antara lain piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya. Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang dengan terbitnya Surat Keputusan tentang Piutang atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Tata cara penghapusan piutang dan penyisihan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Piutang Lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang tidak tertagih disajikan secara terpisah dalam Aset Lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dilakukan penyisihan terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*), yang dibedakan menurut jenis piutang sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa: Barang atau Perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kembali kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat terdiri dari: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan Metode Perpetual, yaitu pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama perangkat daerah dan berkelanjutan serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan dinas yang membidangi urusan kesehatan, blanko kependudukan di dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pupuk di dinas yang membidangi urusan pertanian dan karcis di SKPD pengelola pendapatan.

Persediaan disajikan/dicatat di neraca sebesar:

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
- harga wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas, dan berisiko rendah. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2022 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

(i) Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Nonpermanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang pemilikannya oleh pemerintah hanya sampai dengan tanggal jatuh tempo, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yaitu untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Permanen yang dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh

pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode penilaian investasi pemerintah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas, dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (extra compatable), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Aset Tetap dinilai dengan **biaya perolehan**. Apabila tidak memungkinkan dengan biaya perolehan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran berkaitan dengan ketentuan bagaimana suatu pengeluaran dinyatakan sebagai belanja modal yaitu yang bersifat menambah nilai aset tetap. Perubahan nilai aset tetap yang sudah ada dapat disebabkan oleh **penambahan** yaitu peningkatan aset tetap karena diperluas atau diperbesar; **pengurangan** yaitu penurunan nilai aset karena berkurangnya kuantitas; **pengembangan** yaitu peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap; dan **penggantian utama** yaitu memperbaiki bagian utama aset tetap.

Pengeluaran untuk pengadaan, baru dikapitalisasi menjadi aset tetap apabila:

- (a) Nilai pengadaan untuk tanah yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1,00 (satu rupiah);
- (b) Nilai pengadaan untuk per satuan barang peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (c) Nilai pengadaan untuk per satuan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (d) Nilai pengadaan untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (e) Nilai pengadaan untuk aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (f) Nilai pengadaan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- (g) Nilai pengadaan untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1,00 (satu rupiah);

Pengeluaran terhadap aset tetap yang sudah ada dinyatakan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) apabila kegiatan pengeluaran tersebut memenuhi kriteria penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contohnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*), biaya pemasangan (*instalation cost*), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, biaya konstruksi, biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sehingga aset siap digunakan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Atribusi biaya administrasi dan biaya umum untuk kegiatan yang khusus belanja modal, maka semua komponen biaya baik itu belanja pegawai maupun barang dan jasa diatribusikan dalam harga perolehan aset tetap secara proporsional.

Atribusi biaya administrasi dan biaya umum untuk kegiatan yang bukan khusus belanja modal, tapi di dalamnya terdapat belanja modal maka belanja umum yang diatribusikan hanya belanja pegawai untuk honorarium panitia/pejabat pengadaan.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Estimasi masa manfaat dan Tarif Penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
a. Tanah	-	-
b. Peralatan dan Mesin	5 Tahun	20%
c. Gedung dan Bangunan	20 Tahun	5%
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	10 Tahun	10%
e. Aset Tetap Lainnya	-	-
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan ialah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dana Cadangan diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan jumlah realisasi Pencairan Dana Cadangan. Dana Cadangan yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat transaksi dana cadangan direalisasikan. Dana Cadangan disajikan dalam angka keseluruhan dan rincian dana cadangan sesuai tujuan pembentukannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya meliputi Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Tidak Lancar dan Aset Lain-Lain.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi. Aset tak berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (*copyright*), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai asset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan asset yang dibangun yaitu sebesar nilai asset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah asset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun asset tersebut.

Piutang Tidak Lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan.

Aset Lain-Lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut. Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

8) Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri atas antara lain bunga pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, bagian lancar utang jangka panjang dan utang perhitungan Pihak ketiga (PFK).

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian lancar Utang Jangka Panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo diakui pada saat reklasifikasi pada akhir periode pelaporan.

Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan.

Penyajian Kewajiban yang perlu diungkapkan dalam Penjelasan Pos-pos Neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah: Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas Rincian dan informasi tambahan dalam Penjelasan Pos-Pos Neraca. Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan utang. Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga dan masa tenggang atas pinjaman.

9) Ekuitas Dana

Ekuitas dana ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a) Ekuitas
Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
- b) Ekuitas untuk dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di Perangkat Daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Akuntansi Berbasis Akruwal) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akruwal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal dan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akruwal pada Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 2 Oktober 2015, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 98 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang sudah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi SIPASTI sebagai pendamping SIPD, yaitu SIPASTI Keuangan dan SIPASTI BMD;
- 3) Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada setiap SKPD yang dilakukan setiap triwulan; dan
- 4) Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akruwal dimana pesertanya sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap SKPD yaitu PPTK, Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang. Pelatihan tersebut dilakukan diakhir tahun anggaran.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran (TA) 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya pos-pos dalam laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan-LRA

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	2.976.931.534.658,00	2.887.971.103.743,84	(88.960.430.914,16)	2.835.865.125.275,29

Realisasi Pendapatan-LRA yang diperoleh selama TA 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai sebesar Rp2.887.971.103.743,84 lebih besar dari realisasi Pendapatan-LRA TA 2021 sebesar Rp2.835.865.125.275,29. Jumlah pendapatan daerah merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp518.986.812.154,84, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.365.573.220.560,00, Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp3.411.071.029,00.

Adapun rincian dari pendapatan dimaksud adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	531.458.638.880,00	518.986.812.154,84	(12.471.826.725,16)	470.281.819.936,29
a) Pendapatan Pajak Daerah	237.977.066.250,00	221.379.897.839,00	(16.597.168.411,00)	198.326.131.839,00
b) Pendapatan Retribusi	16.129.543.526,00	9.276.092.781,00	(6.853.450.745,00)	6.731.513.966,00
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.638.338.095,00	12.643.497.231,00	5.159.136,00	11.164.520.965,00
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.713.691.009,00	275.687.324.303,84	10.973.633.294,84	254.059.653.166,29

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp518.986.812.154,84 lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2021 sebesar Rp470.281.819.936,29. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar 97,65% dari APBD Perubahan sebesar Rp531.458.638.880,00 atau kurang sebesar Rp12.471.826.725,16 (-2,35%). Pendapatan Asli Daerah-LRA terdiri dari:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	237.977.066.250,00	221.379.897.839,00	(16.597.168.411,00)	198.326.131.839,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp221.379.897.839,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp198.326.131.839,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 93,03% dari APBD Perubahan sebesar Rp237.977.066.250,00 atau kurang sebesar Rp16.597.168.411,00 (-6,97%). Rinciannya seperti dalam tabel dibawah ini:

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	3.200.000.000,00	4.023.931.148,00	823.931.148,00	2.112.051.027,00
2.	Pajak Restoran	20.000.000.000,00	20.225.354.236,00	225.354.236,00	13.619.943.506,00
3.	Pajak Hiburan	2.500.000.000,00	2.721.750.482,00	221.750.482,00	499.254.969,00
4.	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.582.896.575,00	82.896.575,00	2.246.373.883,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	80.500.000.000,00	81.201.927.451,00	701.927.451,00	76.873.595.549,00
6.	Pajak Parkir	1.200.000.000,00	1.223.357.875,00	23.357.875,00	703.323.400,00
7.	Pajak Air Tanah	9.700.000.000,00	10.091.300.272,00	391.300.272,00	9.932.175.995,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.824.019.204,00	324.019.204,00	1.800.808.593,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	62.000.000.000,00	61.530.120.063,00	(469.879.937,00)	57.812.376.879,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	54.874.816.250,00	35.952.990.533,00	(18.921.825.717,00)	32.723.978.038,00
Jumlah		237.977.066.250,00	221.379.897.839,00	(16.597.168.411,00)	198.326.131.839,00

1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp4.023.931.148,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp823.931.148,00 atau lebih 25,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000,00. Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hal ini terjadi karena adanya penambahan wajib pajak baru sebanyak 23 wajib pajak diantaranya yaitu Easton Park/PT Bandung Inti Gemilang, Wisma Tampomas, Wisma Tampomas, PT Surya Menggala Abadi/Hotel Scarlet, Youth Hostel Putri Dafisa, Pondok Reiza, Pondok Casa De Is, Pondok Kaca Piring, Pondok UP2U, dan Casa De Aminda, serta tingkat kesadaran wajib pajak yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Hotel berasal dari:

- a. Hotel sebesar Rp3.515.805.148,00;
- b. Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari sepuluh sebesar Rp508.126.000,00.

2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp20.225.354.236,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp225.354.236,00 atau lebih 1,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Adanya wajib pajak baru sebanyak 115 wajib pajak diantaranya yaitu Mixue Ice Cream Tea, Kopi Kenangan/ PT Bumi Berkah Boga, CV Citra Rasa Terkini/ 3 Second, Clover Leaf, Menantea, Dandy's Coffee & Eatery, Burger Bangor, Clemmons Jatos, Dimsum Boss Jatinangor, PT Rekso Nasional Food / Mc.Donald's Jatinangor Sumedang;
- b. Adanya kenaikan tingkat konsumsi/transaksi di objek pajak restoran yang dilakukan masyarakat;
- c. Tingkat operasional Wajib Pajak Restoran mulai meningkat, dengan banyak objek-objek Restoran, Rumah Makan, Kafe, dan sejenisnya yang mulai beroperasi kembali.

Pendapatan Pajak Restoran berasal dari:

- a. Restoran sebesar Rp8.437.330.501,00;
- b. Rumah Makan sebesar Rp2.141.750.093,00;
- c. Kafetaria sebesar Rp5.378.654.029,00;
- d. Warung sebesar Rp1.871.817,00; dan
- e. Jasa Boga/Katering sebesar Rp4.265.747.796,00.

3. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp2.721.750.482,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp221.750.482,00 (8,87%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Menurut Bapenda kenaikan ini disebabkan adanya penambahan lima wajib pajak baru yaitu PT Jaswita Lestari Jaya/Insidentil, Joy Playground, Happy Kids, Story Land Ria Busana, Story Land Pasar Sandang.

4. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame TA 2022 sebesar Rp2.582.896.575,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp82.896.575,00 (3,32%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Adanya penambahan 85 wajib pajak baru, diantaranya yaitu Rocket Chicken, PT Imperia Media Kreasi, CV Putra Sakti Express, CV Kirana First Companies, CV Fareen Mafaza Prima, PT Citraboga Kumala/ Hoka Hoka Bento, Sixer, Mixue (Reklame), SPBU 34.45.322, Rensa Wallpaper Sumedang;
- b. Tingkat Kesadaran wajib pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022 sebesar Rp81.201.927.451,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp701.927.451,00 atau lebih 0,87% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp80.500.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Industri di Kabupaten Sumedang mulai kembali pulih sehingga penggunaan tenaga listrik meningkat;
- b. Banyaknya investor masuk ke Kabupaten Sumedang sehingga meningkatnya pembangunan di Kabupaten Sumedang seperti perumahan-perumahan baru sehingga meningkatnya pemasangan daya listrik baru;
- c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta kerja sama dengan PT PLN (Persero);
- d. Intensifnya penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat akan pentingnya pajak penerangan jalan bagi pembangunan Kabupaten Sumedang.

6. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir TA 2022 sebesar Rp1.223.357.875,00 melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp23.357.875,00 (1,95%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Menurut Bapenda kelebihan dari target ini disebabkan oleh:

- a. Intensifikasi;
- b. Ektensifikasi, berupa penambahan wajib pajak baru sebanyak delapan wajib pajak yaitu Parkir BCA Jatinangor, Parkir Prime Apartemen Skyland, Parkir Easton Park Residence Jatinangor, PT Langen Kridha Pratyangga/ Jatinangor National Park, Parkir Cabang Bank BJB Sumedang, Parkir Kroso, Parkir Alfamart Kebonkol, Parkir Biotama; serta
- c. Tingkat kesadaran wajib pajak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022 sebesar Rp10.091.300.272,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp391.300.272,00 atau lebih 4,03% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp9.700.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Adanya penambahan titik-titik sumur baru di wajib Pajak yang sudah terdaftar;
- b. Terjadinya kenaikan volume Pengambilan air tanah oleh wajib pajak;
- c. Adanya penambahan wajib pajak baru sebanyak 13 wajib pajak yang secara langsung akan menambah titik sumur dan volume pengambilan air tanah diantaranya yaitu PT Tomo Food Industri, PT Global Indo Pangan, CV Zahra, PT Kurnia Agung Sejati Ancora, Yayasan Al Masoem Bandung, PT Ratansha Purnama Abadi, PT Kurnia Agung Sejati Ancora, PT Ratansha Purnama Abadi, CV Suma Agung Djaya, dan CV Amanda.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 sebesar Rp2.250.000,00 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan realisasinya tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.250.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari para pengusaha Pajak Sarang Burung Walet semakin meningkat.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 sebesar Rp1.824.019.204,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp324.019.204,00 atau lebih 21,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Menurut Bapenda hal ini dikarenakan:

- a. Terjadinya peningkatan volume pengambilan bahan-bahan minerba oleh wajib Pajak Minerba;
- b. Penambahan wajib pajak baru, yaitu Berkah Alfi Sadikin.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2022 sebesar Rp61.530.120.063,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp469.879.937,00 (-0,76%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp62.000.000.000,00. Menurut Bapenda kekurangan dari target ini disebabkan oleh:

- a. Terdapat beberapa wajib pajak yang belum disiplin dan taat terhadap pembayaran pajak yang telah ditetapkan besaran pajak terhutangnyanya sehingga pembayaran pajaknya mengalami keterlambatan dengan alasan produk dan usahanya belum mengalami kemajuan/usahanya belum stabil;
- b. Khususnya dalam pengelolaan PBB-P2, para wajib pajak/penanggung pajak tidak berada di tempat usaha/objek pajak (guntay), sehingga masih sulit dalam penagihannya mengakibatkan pajak sulit bayar;
- c. Masih terdapat beberapa wajib pajak daerah yang belum aktif/sadar dalam melakukan pembayaran pajak daerah sehingga masih diperlukan adanya jemput bola; dan
- d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pajak daerah khususnya para petugas dalam proses penindakan pajak daerah seperti Petugas Pemeriksa Pajak, Petugas Juru Sita, Petugas Penilai Pajak/PBB-P2, dan sebagainya.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Realisasi BPHTB TA 2022 sebesar Rp35.952.990.533,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.921.825.717,00 (-34,48%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp54.874.816.250,00. Menurut Bapenda kekurangan dari target ini disebabkan oleh:

- a. Perolehan pada tahun 2022 banyak dilakukan pada sektor perumahan bersubsidi dan wajib pajak perseorangan, sedangkan untuk sektor usaha wajib pajak PT atau perusahaan masih kecil;
- b. Masih kurangnya transaksi jual beli tanah; dan

c. BPHTB sangat dipengaruhi oleh iklim investasi daerah dan perkembangan ekonomi.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	16.129.543.526,00	9.276.092.781,00	(6.853.450.745,00)	6.731.513.966,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp9.276.092.781,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp6.731.513.966,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 57,51% dari APBD Perubahan sebesar Rp16.129.543.526,00 atau kurang sebesar Rp6.853.450.745,00 (-42,49%). Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dapat dilihat pada **Lampiran PAD – Retribusi Daerah**.

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 sebesar Rp1.258.873.000,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp28.603.000,00 atau lebih 2,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.230.270.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Kondisi pandemi Covid 19 berangsur membaik dan jumlah masyarakat yang terinfeksi semakin menurun sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap aktivitas masyarakat sehingga perekonomian masyarakat kembali berangsur pulih, kawasan objek wisata mulai beroperasi dengan normal;
- b. Adanya penambahan luas layanan pelayanan persampahan dan kebersihan setelah melakukan sosialisasi pelayanan kebersihan dan persampahan.

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 sebesar Rp2.173.390.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.914.573.000,00 atau kurang (-57,28%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5.087.963.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kurang pedulinya masyarakat pada aktivitas yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang khususnya berkaitan dengan pengelolaan parkir di tepi jalan umum berlangganan.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2022 sebesar Rp466.403.150,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp147.862.450,00 atau kurang (-24,07%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp614.265.600,00. Hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Pandemi Covid-19 masih berdampak pada pelaksanaan ekonomi di beberapa pasar daerah, pada awal-awal tahun banyak kios dan los yang masih buka tutup tidak dipungut retribusi dan kurang bayar retribusinya;
- b. Kurangnya pengunjung ke pasar khususnya pada Pasar Wado dan Darmaraja karena berkurangnya jumlah penduduk yang di relokasi ke luar wilayah dampak pembangunan Waduk Jatigede serta adanya pasar dadakan tiap hari Minggu;
- c. Adanya revitalisasi Pasar Inpres Sumedang Kota, sehingga para pedagang yang terkena dampak pembangunan yang direlokasi ke TPS (Tempat Penjualan Sementara) dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 tidak dipungut retribusi selama pembangunan berjalan.

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp340.746.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp359.254.000,00 atau kurang (-51,32%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Tidak semua kendaraan yang sebelumnya melaksanakan uji di periode yang akan datang melaksanakan uji kembali terutama untuk kendaraan baru;
- b. Banyaknya kendaraan wajib uji yang lokasinya jauh dari gedung atau kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan wajib uji bagi keselamatan di jalan raya; dan
- d. Kurangnya pengawasan terhadap kendaraan wajib uji di lapangan.

5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2022 sebesar Rp12.846.000,00, melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.846.000,00 atau lebih 28,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Hal ini disebabkan banyaknya wajib retribusi yang mendaftar untuk pemeriksaan alat kebakaran.

6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2022 sebesar Rp66.628.500,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.517.000,00 atau lebih 20,90% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp55.111.500,00. Hal ini karena adanya beberapa perusahaan baru muncul sebagai dampak pembangunan jalan tol, sehingga perlu dilakukan tera ulang untuk jembatan timbangannya dan ada beberapa perusahaan yang baru meminta pelayanan tera pada tahun ini.

7. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022 sebesar Rp1.128.341.340,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.466.590,00 atau lebih 4,78%

dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.076.874.750,00. Hal ini karena adanya penambahan pembangunan menara telekomunikasi baru.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp330.836.966,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp269.809.810,00 atau kurang (-44,92%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp600.646.776,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Masih sedikitnya pihak ketiga yang menyewa aset milik pemerintah daerah, salah satunya penyewaan tanah dan tangunan;
- b. Banyaknya laboratorium yang sudah ber-SNI di daerah lain, sedangkan pada UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang belum SNI, alat-alat laboratorium tidak memadai (kurang lengkap), serta tidak adanya tenaga ahli yang bersertifikat.

9. Retribusi Terminal

Realisasi Retribusi Terminal TA 2022 sebesar Rp44.936.600,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.936.600,00 atau lebih 28,39% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan adanya perbaikan sistem kerja, semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan instansi vertikal lainnya sehingga target retribusi terminal bisa tercapai.

10. Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2022 sebesar Rp29.009.000,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp460.500,00 atau lebih 1,61% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp28.548.500,00. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah pemotongan unggas dan ternak kecil di UPT dan UPTD wilayah Dinas Perikanan dan Peternakan.

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022 sebesar Rp51.935.400,00 dengan tingkat capaian 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.935.400,00, berasal dari retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta bibit atau benih ikan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2022 sebesar Rp2.998.520.725,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.915.607.275,00 atau kurang (-49,30%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp5.914.128.000,00, hal ini diantaranya disebabkan:

- a. Adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat; dan

- b. Perubahan Regulasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dan penerapan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) belum optimal sepenuhnya dilaksanakan bersamaan dengan proses sosialisasi.

13. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum TA 2022 sebesar Rp96.714.100,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.314.100,00 atau lebih 11,94% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp86.400.000,00. Hal ini diantaranya disebabkan telah dilakukannya perencanaan target penerimaan retribusi bidang perhubungan yang diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada, serta adanya beberapa pengusaha/pemilik kendaraan yang mengajukan izin penyelenggaraan angkutan.

14. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2022 sebesar Rp276.912.000,00 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp361.488.000,00 atau kurang (-56,62%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp638.400.000,00. Hal ini disebabkan:

- a. karena keterlibatan pihak luar (Penggunaan Tenaga Kerja Asing) masih kurang, realisasi sebesar Rp276.912.000,00 berasal dari kontrak per tahun dari 15 orang TKA dan akan habis kontrak pada tahun 2024.
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 yang menjadi dasar pemungutan retribusi IMTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang baru disahkan tanggal 8 September 2022. Sehingga, pemungutan retribusi IMTA pada masa Januari sampai dengan Agustus 2022 dialihkan ke Kementerian Tenaga Kerja sebagai PNBK. Pada rentang Januari sampai dengan Agustus 2022, aplikasi Sistem Pelayanan TKA Kabupaten Sumedang ditutup oleh Kementerian Tenaga Kerja berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Retribusi Daerah yang berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA atas Pengesahan Rencana Penggunaan TKA Perpanjangan dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan TKA.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.638.338.095,00	12.643.497.231,00	5.159.136,00	11.164.520.965,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.563.299.487,00	12.640.008.120,00	76.708.633,00	11.160.553.625,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0,00	3.489.111,00	3.489.111,00	3.967.340,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	75.038.608,00	0,00	(75.038.608,00)	0,00
Jumlah		12.638.338.095,00	12.643.497.231,00	5.159.136,00	11.164.520.965,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp12.643.497.231,00 lebih besar dari realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp11.164.520.965,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,04% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.638.338.095,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.159.136,00 atau lebih 0,04%.

1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) realisasinya sebesar Rp12.640.008.120,00 dengan tingkat capaian 100,61% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.563.299.487,00 melebihi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp76.708.633,00 atau lebih 0,61%, yaitu berasal dari:

- a. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp4.880.970.568,00;
- b. PT Lembaga Keuangan Mikro Sumedang (LKM) sebesar Rp76.708.633,00;
- c. Bank Sumedang sebesar Rp7.682.328.919,00.

2. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) realisasinya sebesar Rp3.489.111,00, yaitu dari *Geothermal Energy* berupa bonus produksi sebagai bentuk bagi hasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum), yaitu dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang realisasinya sebesar Rp0,00 atau tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp75.038.608,00. Seharusnya PDAM menyetorkan bagian laba Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Pasal 96 Ayat 1 Huruf a, disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 50% dari laba bersihnya.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.713.691.009,00	275.687.324.303,84	10.973.633.294,84	254.059.653.166,29

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp275.687.324.303,84 lebih besar dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 sebesar Rp254.059.653.166,29. Tingkat capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 104,15% dari APBD Perubahan sebesar Rp264.713.691.009,00 atau lebih sebesar Rp10.973.633.294,84 (4,15%), rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	565.000.000,00	638.078.382,00	73.078.382,00	431.087.596,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	220.700.000,00	44.700.000,00	(176.000.000,00)	49.768.000,00
3.	Jasa Giro	3.000.000.000,00	5.103.813.567,25	2.103.813.567,25	2.962.491.171,87
4.	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	2.492.589.446,59	(507.410.553,41)	4.671.994.944,42
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	39.000.000,00	29.000.000,00	(10.000.000,00)	27.122.500,00

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	268.281.758,00	268.281.758,00	17.289.065,00
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	112.205.100,00	3.767.794.655,00	3.655.589.555,00	4.268.610.128,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	2.001.823.841,00	2.001.823.841,00	690.441.011,00
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.323.200,00	6.793.400,00	1.470.200,00	7.614.880,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	215.572.520,00	215.572.520,00	528.409.355,00
11.	Pendapatan BLUD	257.771.462.709,00	261.107.025.934,00	3.335.563.225,00	240.005.286.931,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	11.850.800,00	11.850.800,00	399.537.584,00
Jumlah		264.713.691.009,00	275.687.324.303,84	10.973.633.294,84	254.059.653.166,29

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara umum mengalami kenaikan. Dari dua belas objek pendapatan hanya Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, dan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang tidak mencapai target.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	2.445.472.895.778,00	2.365.573.220.560,00	(79.899.675.218,00)	2.233.686.395.115,00
a) Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan	1.831.712.363.840,00	1.765.132.904.738,00	(66.579.459.102,00)	1.619.635.326.253,00
b) Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya	275.132.361.000,00	274.422.186.800,00	(710.174.200,00)	272.381.591.000,00
c) Transfer Pemerintah Provinsi	338.628.170.938,00	326.018.129.022,00	(12.610.041.916,00)	341.669.477.862,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp2.365.573.220.560,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp2.233.686.395.115,00. Tingkat capaian realisasi Pendapatan Transfer sebesar 96,73% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.445.472.895.778,00 atau kurang sebesar Rp79.899.675.218,00 (-3,27%). Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 meliputi:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat– Dana Perimbangan	1.831.712.363.840,00	1.765.132.904.738,00	(66.579.459.102,00)	1.619.635.326.253,00

Realisasi Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.765.132.904.738,00 lebih besar dari Realisasi Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp1.619.635.326.253,00. Tingkat capaian realisasi Dana Perimbangan sebesar 96,37% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.831.712.363.840,00 atau kurang sebesar Rp66.579.459.102,00 (-3,63%). Dana Perimbangan TA 2022 terdiri dari:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp67.220.420.048,00 dengan tingkat capaian 95,55% dari APBD Perubahan sebesar Rp70.353.885.062,00 atau kurang sebesar Rp3.133.465.014,00 (-4,45%), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.414.049.378,00	8.396.339.031,00	(1.017.710.347,00)	10.878.132.279,00
2.	DBH PPh Pasal 21	40.774.489.684,00	34.464.996.164,00	(6.309.493.520,00)	43.290.506.097,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	2.729.480.054,00	2.729.480.054,00	3.227.485.292,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	20.165.346.000,00	21.629.604.799,00	1.464.258.799,00	25.865.875.171,00
Jumlah		70.353.885.062,00	67.220.420.048,00	(3.133.465.014,00)	83.261.998.839,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp39.288.902.605,00 tingkat capaiannya 120,83% dari APBD Perubahan sebesar Rp32.514.584.778,00 atau lebih sebesar Rp6.774.317.827,00 (20,83%), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DBH SDA Minyak Bumi	4.431.958.000,00	6.486.579.939,00	2.054.621.939,00	3.490.313.900,00
2.	DBH SDA Gas Bumi	2.425.421.000,00	5.751.385.967,00	3.325.964.967,00	192.486.100,00
3.	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	22.141.718.332,00	20.613.333.652,00	(1.528.384.680,00)	41.471.203.341,00
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.250.557.768,00	1.151.910.612,00	(98.647.156,00)	801.467.418,00
5.	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	306.618.678,00	264.275.395,00	(42.343.283,00)	290.231.022,00
6.	DBH SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	0,00	1.674.500.150,00
Jumlah		32.514.584.778,00	36.225.796.565,00	3.711.211.787,00	47.920.201.931,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.058.905.256.000,00	1.052.231.192.000,00	(6.674.064.000,00)	1.058.905.256.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 sebesar Rp1.052.231.192.000,00 lebih kecil dari Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2021 sebesar Rp1.058.905.256.000,00. Tingkat capaiannya sebesar 99,37% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.058.905.256.000,00 atau kurang sebesar Rp6.674.064.000,00 (-3,02%), hal ini karena adanya potongan dari pemerintah pusat berupa potongan untuk penanganan Covid-19 pada bulan Januari sebesar Rp3.027.440.000,00, potongan atas sisa BOP PAUD, BOP Kesetaraan, dan BOKT tahun yang lalu di bulan April sebesar Rp2.874.575.640,00, potongan TPG sebesar Rp20.548.360,00 di bulan September, serta adanya potongan BKKBN pada bulan Oktober sebesar Rp751.500.000,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp609.455.496.125,00 dengan tingkat capaian 90,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp669.938.638.000,00 atau kurang sebesar Rp60.483.141.875,00 (-9,03%). Rincian DAK sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
A	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	207.298.167.073,00
1.	Dana Alokasi Khusus Reguler	176.585.289.797,00
	a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	464.467.000,00
	b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	56.799.599.500,00
	c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	26.043.062.000,00
	d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	549.848.989,00
	e. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	8.983.953.014,00
	f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	23.070.216.964,00
	g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	6.645.010.797,00
	h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	811.147.000,00
	i. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	45.000.296.575,00
	j. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.289.342.958,00
	k. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.928.345.000,00
2.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	30.712.877.276,00
	a. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	1.798.600.000,00
	b. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	1.350.311.000,00
	c. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4.873.225.848,00
	d. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.149.053.650,00
	e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	11.938.725.328,00
	f. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.602.961.450,00
B	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	402.157.329.052,00
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	126.485.711.005,00

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
2.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	211.081.088.790,00
3.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.243.000.000,00
4.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	15.170.239.000,00
5.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.657.500.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	29.456.664.867,00
7.	DAK Non Fisik-PK2UKM	375.300.000,00
8.	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	239.207.150,00
9.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	10.131.718.840,00
10.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	316.899.400,00
	JUMLAH	609.455.496.125,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya	275.132.361.000,00	274.422.186.800,00	(710.174.200,00)	272.381.591.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 sebesar Rp274.422.186.800,00 lebih besar dari Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2021 sebesar Rp272.381.591.000,00. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu berupa Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) dan Dana Desa.

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)

Dana Insentif Daerah realisasinya sebesar Rp37.001.635.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp37.001.635.000,00. Rincian kegiatannya sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
A.	BIDANG PENDIDIKAN	5.050.380.000,00
1.	Pembangunan Ruang Kelas PAUD	753.300.000,00
2.	Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	1.020.000.000,00
3.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama (alat olahraga dan alat kesenian)	893.940.000,00
4.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (alat kesenian)	288.400.000,00
5.	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD	753.000.000,00
6.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Sekolah Dasar (Mebel)	1.341.740.000,00
B.	BIDANG KESEHATAN	7.787.915.000,00
1.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan (pembayaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercover dalam kepesertaan PBI)	2.398.202.200,00
2.	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	4.457.570.000,00

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Pengadaan Ambulance	599.188.000,00
4.	Pengadaan Alat Kedokteran	246.454.800,00
5.	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (perangkat komputer)	86.500.000,00
C.	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	24.163.340.000,00
1.	Pemberian Makanan bagi Lansia (Rantang Simpati)	3.796.000.000,00
2.	Pengadaan benih/bibit ternak	870.000.000,00
3.	Pengembangan UMKM (pemberian alat produksi kepada UMKM)	1.340.000.000,00
4.	Penyediaan Permakanan (pemberian bantuan sosial permakanan)	1.502.340.000,00
5.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	940.000.000,00
6.	Rehabilitasi Jalan	4.460.000.000,00
7.	Rekonstruksi Jalan	11.255.000.000,00
	JUMLAH	37.001.635.000,00

5.1.1.2.2 Dana Desa

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Desa	238.130.726.000,00	237.420.551.800,00	(710.174.200,00)	227.319.620.000,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Desa terealisasi sebesar Rp237.420.551.800,00 dengan tingkat capaian 99,70% dari APBD Perubahan sebesar Rp238.130.726.000,00 atau kurang sebesar Rp710.174.200,00 (-0,30%), hal ini karena ada tiga desa yang realisasinya tidak sesuai ajuan, karena langsung dilakukan pengurangan dari pemerintah pusat berdasarkan dari perhitungan aplikasi Omspan, yaitu Desa Sundamekar realisasinya sebesar 64,22% atau kurang Rp274.362.000,00 dari target anggaran yang telah ditetapkan, Desa Ranjeng realisasinya sebesar 64,09% atau kurang Rp260.809.200,00, dan Desa Dayeuh Luhur realisasinya sebesar 77,41% atau kurang Rp175.003.000,00.

Dana Desa TA 2022 ditransfer dari rekening Kas Umum Negara langsung ke rekening pemerintah desa tanpa melalui rekening Kas Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja Dana Desa (SP2B) Nomor 900/38/XII/BUD/2022 sebagai dasar rekonsiliasi pencatatan realisasi pendapatan dana desa dan bantuan keuangan ke desa dengan nilai pendapatan sebesar Rp237.420.551.800,00 dan nilai belanja sebesar Rp237.420.551.800,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	338.628.170.938,00	326.018.129.022,00	(12.610.041.916,00)	341.669.477.862,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 sebesar Rp326.018.129.022,00 lebih kecil dari Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 sebesar Rp341.669.477.862,00. Transfer Pemerintah Provinsi yaitu berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp164.239.295.900,00 dengan tingkat capaian 99,46 % dari APBD Perubahan sebesar Rp165.125.099.330,00 atau kurang sebesar Rp885.803.430,00 (-0,54%). DBH Pajak dari Provinsi terdiri dari:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan	31.624.606.655,00	31.208.572.714,00	(416.033.941,00)	28.675.906.875,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.595.895.644,00	19.126.126.155,00	(469.769.489,00)	17.689.890.960,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.468.956.783,00	50.468.956.783,00	-	40.176.936.450,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	518.166.434,00	518.166.434,00	-	535.070.925,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	62.917.473.814,00	62.917.473.814,00	-	51.418.885.128,00
Jumlah		165.125.099.330,00	164.239.295.900,00	(885.803.430,00)	138.496.690.338,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan di SKPD Tahun 2022 sebesar Rp161.778.833.122,00 dengan tingkat capaian 93,24% dari APBD Perubahan sebesar Rp173.503.071.608,00 atau kurang sebesar Rp11.724.238.486,00 (-6,76%). Bantuan keuangan ini diantaranya untuk kesejahteraan Guru Non-PNS di daerah perbatasan, kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), pembangunan Pusat Budaya Desa, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan gedung Pemdes Desa Jemah, peningkatan jaringan irigasi, kegiatan usaha budidaya ikan, pengadaan sarana produksi ikan, pengembangan perbaikan air, perbaikan jalan usaha tani dan peningkatan jalan desa, pembangunan gedung Pemerintah Kecamatan Jatigede, serta jaminan kesehatan bagi PBI.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	3.411.071.029,00	3.411.071.029,00	131.896.910.224,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 sebesar Rp3.411.071.029,00 lebih kecil dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 sebesar Rp131.896.910.224,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini berupa pendapatan hibah, mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi pada LKPD TA 2021, karena di TA 2022 pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Dinas Pendidikan dianggarkan pada akun DAK Non Fisik-BOS Reguler. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 sebelumnya tidak dianggarkan, namun selama tahun berjalan ada realisasi yang berasal dari:

1. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp527.185.300,00 berupa IPDMIP-IFAD, yaitu program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten;
2. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.633.885.729,00 berupa AMBK-DFAT, yaitu Program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (AMBK) suatu strategi peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMD AM) atau pemerintah daerah melalui pemberian hibah berdasarkan peningkatan kinerja yang terukur atau *Performance Based Grant* (PBG);
3. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah, yaitu hibah dari Kabupaten Bojonegoro untuk pelaksanaan kegiatan penguatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pekerjaan penataan ruang *Command Center* TA. 2022 sebesar Rp1.250.000.000,00.

5.1.2 Belanja

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
BELANJA	2.790.284.169.097,00	2.541.080.922.302,00	(249.203.246.795,00)	2.332.798.822.208,00

Realisasi Belanja Daerah belum termasuk Transfer TA 2022 sebesar Rp2.541.080.922.302,00 lebih besar dari Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp2.332.798.822.208,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Daerah sebesar 91,07% dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp2.790.284.169.097,00 atau kurang sebesar Rp249.203.246.795,00 (-8,93%).

Belanja Daerah TA 2022 terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp2.057.716.538.601,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp480.578.259.481,00; dan
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.786.124.220,00.

Adapun rincian dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	2.174.405.964.869,00	2.057.716.538.601,00	(116.689.426.268,00)	1.955.814.792.559,00

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2022 sebesar Rp2.057.716.538.601,00 lebih besar dari Realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp1.955.814.792.559,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Operasi sebesar 94,63% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.174.405.964.869,00 atau kurang sebesar Rp116.689.426.268,00 (-5,37%). Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.236.237.935.089,00	1.169.624.519.375,00	(66.613.415.714,00)	1.182.261.056.674,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	852.462.461.630,00	803.235.286.510,00	(49.227.175.120,00)	709.093.186.272,00
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	500.587.500,00
4.	Belanja Subsidi	180.000.000,00	95.782.500,00	(84.217.500,00)	0,00
5.	Belanja Hibah	78.151.107.250,00	78.047.993.016,00	(103.114.234,00)	59.369.641.613,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	7.374.460.900,00	6.712.957.200,00	(661.503.700,00)	4.590.320.500,00
Jumlah		2.174.405.964.869,00	2.057.716.538.601,00	(116.689.426.268,00)	1.955.814.792.559,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2022 sebesar Rp1.169.624.519.375,00 lebih kecil dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp1.182.261.056.674,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar 94,61% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.236.237.935.089,00 atau kurang sebesar Rp66.613.415.714,00 (-5,39%). Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	TA. 2022		TA. 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	730.412.793.777,00	713.508.762.152,00	(16.904.031.625,00)	723.318.387.650,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	220.000.000.000,00	188.557.688.054,00	(31.442.311.946,00)	169.435.048.412,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	252.237.117.770,00	234.845.337.337,00	(17.391.780.433,00)	256.722.086.344,00

No.	Uraian	TA. 2022		TA. 2021	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.424.357.474,00	29.981.486.190,00	(442.871.284,00)	30.296.104.268,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.018.066.068,00	985.916.230,00	(32.149.838,00)	950.065.000,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.312.320.000,00	1.312.320.000,00	0,00	1.312.320.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	833.280.000,00	433.009.412,00	(400.270.588,00)	227.045.000,00
Jumlah		1.236.237.935.089,00	1.169.624.519.375,00	(66.613.415.714,00)	1.182.261.056.674,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang Jasa

Belanja barang jasa terealisasi sebesar Rp803.235.286.510,00 dengan tingkat capaian 94,23% dari APBD Perubahan sebesar Rp852.462.461.630,00 atau kurang sebesar Rp49.227.175.120,00 (-5,77%). Realisasi belanja barang jasa kurang dari anggaran yang telah ditetapkan antara lain adanya efisiensi anggaran belanja. Rincian realisasi belanja barang jasa dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Operasi-Barang Jasa LRA.**

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasinya sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan dengan TA 2021 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp500.587.500,00, karena pada TA 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak menganggarkan penerimaan pinjaman. Belanja bunga ini merupakan pembayaran bunga dari pinjaman kepada pihak bank, penerimaan pinjamannya dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi realisasinya sebesar Rp95.782.500,00 dengan tingkat capaian 53,21% dari APBD Perubahan sebesar Rp180.000.000,00 atau kurang sebesar Rp84.217.500,00 (-46,79%). Belanja Subsidi ini berupa alokasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) TA 2022.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah realisasinya sebesar Rp78.047.993.016,00 dengan tingkat capaian 99,87% dari APBD Perubahan sebesar Rp78.151.107.250,00 atau kurang sebesar Rp103.114.234,00 (-0,13%). Belanja Hibah ini terdiri dari:

1. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp100.000.000,00, diantaranya yaitu hibah kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Intervensi Pondok Pesantren Bersinar (Bersih Narkoba) di Kabupaten Sumedang;
2. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.072.087.790,00, diantaranya yaitu hibah untuk pengadaan Mini Command Centre Lapas Sumedang, Kodim, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan, untuk renovasi bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota penataan rumah dinas Wakapolres, Kapolres, penataan halaman polres, rehab

bangunan lapas, pekerjaan pembuatan sumur Lepas, penataan halaman/gedung kantor Kejaksaan Negeri Sumedang, penataan rumah dinas Kejaksaan Negeri Sumedang, serta pekerjaan rehabilitasi rumah dinas Kodim 0610; dan

3. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp14.149.675.662,00, diantaranya yaitu hibah untuk kegiatan persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Tahun 2022, hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang untuk Pelaksanaan Kegiatan Non Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2022, untuk kegiatan program kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumedang Tahun 2022 (Praja Muda Karana (PRAMUKA) Kabupaten Sumedang, kegiatan NPCI Tahun Anggaran 2022, biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)/Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (LPPL eRKS FM Kabupaten Sumedang, operasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumedang Tahun 2022, penguatan Kapasitas Kelembagaan DEKOPINDA Kabupaten Sumedang dalam rangka Hari Koperasi Ke-75 Tahun 2022, kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sumedang, kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat bulan Desember 2022, hibah kepada Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Sumedang, kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang untuk kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Sumedang, serta pengembalian hibah kepada KPU Sumedang;
4. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp32.511.717.191,00, diantaranya yaitu pengadaan peralatan kesenian tradisional SD International Green School Kecamatan Sumedang Utara, SD IT As Samadani Kecamatan Sumedang Selatan, pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD di Kecamatan Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Tanjungmedar, Tanjungkerta, Buahdua, Surian, Conggeang, Tomo, Ujungjaya, Jatigede, Jatinunggal, Cimanggung, Jatinangor, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, SMP Plus Al Amah, SMP Al Islam Sumedang, rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya SMP IT Asmaul Husna, penataan halaman Kodim (Pemagaran), rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP IT Asmaul Husna, SMP Plus Al Amah, rehabilitasi ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP Plus Al Amah, SMP IT Asmaul Husna, SMP Darul Fatwa, rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP IT Asmaul Husna, rehabilitasi ruang kelas TK Bhakti Pertiwi Rancakalong, pengadaan motor sampah roda tiga (PIK), peralatan seni budaya TK Alamanda Kecamatan Darmaraja, TK Bhakti Pertiwi Rancakalong, TK Muslimat

- NU, pengadaan mebelair STP Khoirul Umah Kecamatan Sumedang Utara, penataan halaman MTS Alfalaahiyah Cikoneng Kecamatan Ganeas, dan belanja BOP Paud dan Kesetaraan;
5. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp11.000.355.000,00, diantaranya yaitu hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sumedang untuk kegiatan pengiriman peserta Kafilah Kabupaten Sumedang pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Barat, kepada DPD Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Peningkatan Kemampuan Profesional Guru Madrasah DPD Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Sumedang, kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk kegiatan dan operasional pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang, kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang, kepada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah untuk Pelatihan dan kegiatan Pekan Olahraga Seni Santri Diniyah, kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, serta kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Sumedang untuk Kegiatan Operasional Kegiatan DPC LVRI Kabupaten Sumedang, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sumedang untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan operasional dan kesekretariatan PWRI Kabupaten Sumedang;
 6. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp10.109.163.573,00, diantaranya yaitu hibah untuk pengadaan benih dan sarana produksi kacang tanah, benih dan saprodi bawang merah, benih dan sarana produksi kacang koro, pengadaan pompa air 3" pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifikasi lokasi, pembangunan irigasi air tanah dangkal Poktan Saluyu Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede, pekerjaan pembangunan jalan usaha tani Poktan Pacicile Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, pengadaan Handtraktor, pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersier Poktan Mukti Tani Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Poktan Ciheuleut Desa Malaka Kecamatan Situraja, Poktan Karyamukti Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar, dan Poktan Mekar Rahayu 1 Desa Sukagalih Kecamatan Sumedang Selatan;
 7. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp900.000.000,00, diantaranya yaitu hibah untuk Asosiasi ARWT Kabupaten Sumedang bulan Agustus 2022, kegiatan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan KKM Parakan Muncang, KKM Wana Tirta Mandiri, serta KKM Mandala Tirta Mandiri;

8. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp6.277.747.800,00, diantaranya yaitu pengadaan alat produksi UMKM ke LPM Desa Marongge dan Kemasan Botol dan Gelas Ke LPM Desa Tegalmanggung, pekerjaan pembangunan baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan Minimal 50 KK Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara, pengadaan sarana pengolahan ikan pada sub kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, pekerjaan pengadaan ternak sapi potong PO Kecamatan Cimalaka pada sub kegiatan pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain; dan
9. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp927.246.000,00, yaitu bantuan keuangan kepada bantuan keuangan partai politik Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.712.957.200,00 dengan tingkat capaian 91,03% dari APBD Perubahan sebesar Rp7.374.460.900,00 atau kurang sebesar Rp661.503.700,00 (-8,97%). Belanja Bantuan Sosial ini terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp3.728.300.000,00, yaitu bantuan untuk pembayaran belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PIK) RTLH PIK Kecamatan Tanjungmedar, Tanjungsari, Sumedang Utara, Sukasari, Ujungjaya, dan Wado;
2. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp152.509.200,00, yaitu untuk penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
3. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp495.000.000,00, yaitu untuk fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
4. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp99.808.000,00, yaitu bantuan sosial bagi kelompok usaha PEKKA peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota; dan
5. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp2.237.340.000,00, yaitu berupa penyediaan permakanan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (APBD) RTLH LPM Desa

Kamal, Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar, Desa Mulyamekar dan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta.

5.1.2.2 Belanja Modal

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	559.478.453.307,00	480.578.259.481,00	(78.900.193.826,00)	353.171.282.580,00

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp480.578.259.481,00 lebih besar dari Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp353.171.282.580,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Modal sebesar 85,90% dari APBD Perubahan sebesar Rp559.478.453.307,00 atau kurang sebesar Rp78.900.193.826,00 (-14,10%). Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tanah	27.617.607.139,00	27.007.255.100,00	(610.352.039,00)	734.126.000,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	205.796.306.905,00	189.446.017.112,00	(16.350.289.793,00)	114.178.507.498,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	134.848.591.707,00	129.969.430.312,00	(4.879.161.395,00)	137.937.639.826,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	168.281.110.039,00	116.084.739.946,00	(52.196.370.093,00)	87.697.349.012,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.339.837.517,00	17.526.966.056,00	(4.812.871.461,00)	12.623.660.244,00
6.	Belanja Aset Lainnya	595.000.000,00	543.850.955,00	(51.149.045,00)	0,00
Jumlah		559.478.453.307,00	480.578.259.481,00	(78.900.193.826,00)	353.171.282.580,00

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah TA 2022 sebesar Rp27.007.255.100,00 lebih besar dari realisasi Belanja Tanah TA 2021 sebesar Rp734.126.000,00. Belanja Tanah TA 2022 yaitu berasal dari Belanja Modal Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp10.816.110.000,00, dengan tingkat capaian 99,06% dari APBD Perubahan sebesar Rp10.918.669.000,00, kurang sebesar Rp102.559.000,00 (-0,94%) dan dari Belanja Modal Lapangan (Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan, Tanah untuk Jalan) realisasinya sebesar Rp16.191.145.100,00 dengan tingkat capaian 96,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp16.698.938.139,00 atau kurang sebesar Rp507.793.039,00 (-3,04%). Rincian anggaran dan realisasi belanja tanah sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	Realisasi
1.	Belanja Modal Tanah Persil	10.918.669.000,00	10.816.110.000,00	(102.559.000,00)	0,00

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	Realisasi
2.	Belanja Modal Lapangan	16.698.938.139,00	16.191.145.100,00	(507.793.039,00)	734.126.000,00
Jumlah		27.617.607.139,00	27.007.255.100,00	(610.352.039,00)	33.328.265.935,00

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp189.446.017.112,00 lebih besar dari realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp114.178.507.498,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 92,06% dari APBD Perubahan sebesar Rp205.796.306.905,00 atau kurang sebesar Rp16.350.289.793,00 (-7,94%). Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Modal-Peralatan dan Mesin LRA.**

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp129.969.430.312,00 lebih kecil dari realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp137.937.639.826,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 96,38% dari APBD Perubahan sebesar Rp134.848.591.707,00 atau kurang sebesar Rp4.879.161.395,00 (-3,62%). Rincian realisasi belanja gedung dan bangunan sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.883.067.207,00	105.453.544.736,00	(2.429.522.471,00)	126.912.720.426,00
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.020.000.000,00	2.992.500.000,00	(27.500.000,00)	49.750.000,00
3.	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	23.875.524.500,00	21.324.089.976,00	(2.551.434.524,00)	10.216.573.500,00
4.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	70.000.000,00	69.721.000,00	(279.000,00)	209.720.000,00
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	129.574.600,00	129.574.600,00	548.875.900,00
Jumlah		134.848.591.707,00	129.969.430.312,00	(4.879.161.395,00)	142.070.482.407,00

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp116.084.739.946,00 lebih besar dari realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp87.697.349.012,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 68,98% dari APBD Perubahan sebesar Rp168.281.110.039,00 atau kurang sebesar Rp52.196.370.093,00 (-31,02%). Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	97.977.462.269,00	53.237.511.168,00	(44.739.951.101,00)	34.422.915.498,00
2.	Belanja Modal Jembatan	10.373.808.120,00	4.493.075.120,00	(5.880.733.000,00)	19.235.022.880,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	50.905.839.650,00	49.918.652.700,00	(987.186.950,00)	26.840.714.000,00
4.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	100.000.000,00	99.967.000,00	(33.000,00)	0,00
5.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	750.000.000,00	747.944.000,00	(2.056.000,00)	909.540.634,00
6.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	70.000.000,00	69.750.000,00	(250.000,00)	0,00
7.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	8.095.500.000,00	7.509.539.958,00	(585.960.042,00)	6.289.156.000,00
8.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	8.500.000,00	8.300.000,00	(200.000,00)	0,00
Jumlah		168.281.110.039,00	116.084.739.946,00	(52.196.370.093,00)	87.697.349.012,00

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp17.526.966.056,00 lebih besar dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp12.623.660.244,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 78,46% dari APBD Perubahan sebesar Rp22.339.837.517,00 atau kurang sebesar Rp4.812.871.461,00 (-21,54%). Rincian realisasi belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.586.400.000,00	1.537.795.033,00	(48.604.967,00)	267.106.000,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.644.736.800,00	1.636.111.000,00	(8.625.800,00)	199.650.000,00
3.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
4.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	701.250.000,00	698.720.030,00	(2.529.970,00)	398.854.000,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.701.650.050,00	13.652.989.993,00	(4.048.660.057,00)	11.660.172.744,00
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	705.800.667,00	1.350.000,00	(704.450.667,00)	85.877.500,00
Jumlah		22.339.837.517,00	17.526.966.056,00	(4.812.871.461,00)	12.623.660.244,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud masuk pada Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Hal ini karena pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 186 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 Akun Belanja Modal Aset

Tidak Berwujud dianggarkan dan direalisasikan pada Akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Kebijakan ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2022 sebesar Rp543.850.955,00 lebih besar dari realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2021 sebesar Rp0,00. Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD pada RSUD Kabupaten Sumedang, tingkat capaiannya sebesar 91,40% dari APBD Perubahan sebesar Rp595.000.000,00 atau kurang sebesar Rp51.149.045,00 (-8,60%).

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	56.399.750.921,00	2.786.124.220,00	(53.613.626.701,00)	23.812.747.069,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp2.786.124.220,00 lebih kecil dari Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp23.812.747.069,00. Tingkat capaian realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 4,94% dari APBD Perubahan sebesar Rp56.399.750.921,00 atau kurang sebesar Rp53.613.626.701,00 (-95,06%). Realisasi Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk:

1. Pembayaran dana operasional bidang penegakan hukum dan pendisiplinan dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga Wilayah Jawa dan Bali untuk pengendalian penyebaran Covid-19, serta penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kabupaten Sumedang;
2. Pengembalian sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011;
3. Pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2021;
4. Pengembalian BTT Bulan Desember 2022 BPBD Kabupaten Sumedang;
5. Pembayaran untuk pencairan atas pelaksanaan eksekusi gugatan dari Suryadi Wijaya, Dkk Perkara Nomor: 775 K/Pdt/2017 Jo. Nomor: 330/PDT/2016/PT.BDG Jo.Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.Smd; dan

6. Penanganan darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

5.1.3 Transfer

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
TRANSFER	390.568.021.000,00	389.855.052.943,00	(712.968.057,00)	379.331.582.631,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp389.855.052.943,00 lebih besar dari Realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp379.331.582.631,00. Tingkat capaian realisasi Transfer sebesar 99,82 % dari APBD Perubahan sebesar Rp390.568.021.000,00 atau kurang sebesar Rp712.968.057,00 (-0,18%).

Transfer ini berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	29.487.295.000,00	29.486.323.500,00	(971.500,00)	23.441.269.922,00
	- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	27.322.400.000,00	27.321.453.500,00	(946.500,00)	21.817.918.102,00
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.164.895.000,00	2.164.870.000,00	(25.000,00)	1.623.351.820,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	361.080.726.000,00	360.368.729.443,00	(711.996.557,00)	355.890.312.709,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	354.330.726.000,00	353.618.729.443,00	(711.996.557,00)	117.646.482.700,00
	- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	238.243.830.009,00
	Jumlah	390.568.021.000,00	389.855.052.943,00	(712.968.057,00)	379.331.582.631,00

5.1.3.1 Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp27.321.453.500,00 dengan tingkat capaian hampir 100% atau 99,9965% dari APBD Perubahan sebesar Rp27.322.400.000,00 atau kurang sebesar Rp946.500,00 (-0,0035%). Realisasi kurang tersebut disesuaikan dengan pengajuan pencairan dari desa, yaitu Desa Margalaksana kurang sebesar Rp910.000,00, Desa Cilengkrang sebesar Rp36.000,00, serta Desa Cigendel sebesar Rp500,00 yang ajuan pencairannya kurang dari pagu yang di anggarkan.

5.1.3.2 Bagi Hasil Retribusi

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.164.870.000,00 dengan tingkat capaian hampir 100% atau 99,9988% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.164.895.000,00 atau kurang sebesar Rp25.000,00 (-0,0012%). Realisasi kurang tersebut disesuaikan dengan pengajuan pencairan dari desa, dimana ada salah satu desa yaitu Desa Panyindangan yang ajuan pencairannya kurang dari pagu yang di anggarkan.

5.1.3.3 Bantuan Keuangan ke Desa

Belanja Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp360.368.729.443,00 dengan tingkat capaian 99,80% dari APBD Perubahan sebesar Rp361.080.726.000,00 atau kurang sebesar Rp711.996.557,00 (-0,20%), berasal dari:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp250.000.000,00, yaitu untuk penanganan bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur;
2. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp353.618.729.443,00, yaitu berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp116.198.177.643,00, dan Dana Desa sebesar Rp237.420.551.800,00;
3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp6.500.000.000,00, yaitu berasal dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa penerima bantuan khusus.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Transfer. Pembiayaan Neto per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.009.696.280,90. Selama TA 2022 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.887.971.103.743,84, Belanja sebesar Rp2.541.080.922.302,00 dan Transfer sebesar Rp389.855.052.943,00, sehingga terdapat Defisit Realisasi Anggaran sebesar (Rp42.964.871.501,16). Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan untuk TA 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	231.430.328.599,00	232.339.367.075,90	909.038.476,90	124.474.646.639,61

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp232.339.367.075,90 lebih besar dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp124.474.646.639,61. Tingkat capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar 100,39% dari APBD Perubahan sebesar Rp231.430.328.599,00. Penerimaan Pembiayaan ini berasal dari realisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya (TA 2021).

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	27.509.673.160,00	27.329.670.795,00	(180.002.365,00)	15.870.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp27.329.670.795,00 lebih besar dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp15.870.000.000,00. Tingkat capaian realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 99,35% dari APBD Perubahan sebesar Rp27.509.673.160,00. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk:

1. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp15.000.000.000,00, yaitu untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yang dilakukan secara bertahap.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp12.329.670.795,00 dengan tingkat capaian 98,56% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.509.673.160,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini diberikan kepada:
 - a. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp4.329.670.795,00;
 - b. PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebesar Rp1.500.000.000,00;
 - c. PT Lembaga Keuangan Mikro Sumedang sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
 - d. Bank Perkreditan Rakyat (Bank Sumedang) sebesar Rp5.500.000.000,00.

5.1.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp162.044.824.779,74 merupakan Defisit Realisasi Anggaran ditambah dengan Pos Pembiayaan Penerimaan dikurangi dengan Pos Pembiayaan Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Defisit Realisasi Anggaran TA 2022 (Rp42.964.871.501,16)

Ditambah:

Penggunaan SiLPA Rp232.339.367.075,90

Dikurangi:

Pembentukan Dana Cadangan Rp 15.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 12.329.670.795,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp162.044.824.779,74

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 terdiri dari:

1. SiLPA berupa kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp105.248.357,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Tanggal Setor ke Kasda	Nilai(Rp)
1.	Puskesmas Haurngombong	04/01/2023	5.040.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	04/01/2023	4.202.000,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	04/01/2023	9.818.215,00
		10/01/2023	5.000.000,00
		12/01/2023	5.000.000,00
		12/01/2023	5.000.000,00
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11/01/2023	25.000,00
5.	Kecamatan Conggeang	02/01/2023	6.499.218,00
6.	Kecamatan Ujungjaya	30/01/2023	6.000.000,00
		01/02/2023	58.658.482,00
7.	Kecamatan Sumedang Selatan	18/04/2023	5.442,00
Jumlah Total			105.248.357,00

2. SiLPA berupa Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp46.800,00;
3. SiLPA pada BLUD RSUD sebesar Rp6.005.910.947,00;
4. SiLPA berupa Kas Tunai BLUD di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD sebesar Rp480.000,00;
5. SiLPA pada 35 BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp8.791.994.095,00;
6. SiLPA pada Dinas Pendidikan berupa kas BOS sebesar Rp305.784.351,00;
7. SiLPA pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang berupa Giro sebesar Rp146.307.325.290,74. SiLPA tersebut terbagi atas SiLPA Dana Spesifik sebesar Rp84.549.322.878,00 dan SiLPA diluar Dana Spesifik sebesar Rp61.758.002.412,74.

Rincian SiLPA Dana Spesifik sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	SiLPA DAK Fisik	32.345.754.244,00
2.	SiLPA DAK Non Fisik	8.427.172.428,00
3.	Sisa DAK Fisik TA 2015	423.860.012,00
4.	DBHCHT	6.699.064.498,00
5.	Bantuan Provinsi	25.855.276.055,00
6.	Dana Aset Desa yang dihapuskan atas dampak pembangunan Waduk Jatigede	5.454.000,00
7.	DID	10.792.741.641,00

8. SiLPA tahun lalu berupa Kas Lainnya yaitu Bunga Bank BOS SD dan SMP sebesar Rp26.050.754,00;
9. SiLPA berupa Kas Lainnya dari Utang Pajak PPh 21 pada Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp3.277.500,00;
10. SiLPA berupa Kas Lainnya dari Jasa Giro Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sumedang Utara sebesar Rp19.799,00;
11. SiLPA tahun lalu berupa pengembalian Dana Bantuan Keuangan (PEN) sebesar Rp155.830.968,00 yang sudah dipindahbukukan dari RKUD Kabupaten Sumedang ke RKUD Provinsi Jawa Barat;
12. SiLPA berupa koreksi Kas BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp152.612.162,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SiLPA tahun lalu berupa koreksi pengeluaran Kas yaitu selisih Kas BOS sebesar Rp153.024.880,00;
 - b. SiLPA tahun lalu berupa koreksi penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran BOS dari kurang saji saldo awal BOS Tahun 2021 sebesar (Rp151.617,00);
 - c. SiLPA berupa koreksi penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran BOS dari kurang saji saldo awal BOS Tahun 2022 sebesar (Rp261.101,00);
13. SiLPA tahun lalu pengeluaran Kas dari selisih Kas BLUD sebesar Rp8.706,00;
14. SiLPA berupa penambahan Kas Lainnya dari Jasa Giro Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Tahun 2018 sebesar (Rp23.017,00);
15. SiLPA berupa pengurangan Kas Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran utang belanja honor Tahun 2021 di Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.425.000,00;
16. SiLPA berupa pengurangan Kas BLUD RSUD pengembalian kelebihan pendapatan BPJS Tahun 2021 sebesar Rp191.653.067,00.
17. SiLPA berupa koreksi penambahan Kas BLUD RSUD sebesar (Rp480.000,00);
18. SiLPA berupa koreksi penambahan Utang Pajak PPh 21 sebesar (Rp3.277.500,00);
19. SiLPA berupa penambahan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan sebesar Rp937.500,00.

5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

SAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp162.044.824.779,74 mengalami penurunan sebesar (Rp70.294.542.296,16) (-30,26%) dari SAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp232.339.367.075,90. SAL per 31 Desember 2022 terdiri dari:

1. SAL Awal TA 2022 sebesar Rp232.339.367.075,90 merupakan SAL Akhir TA 2021. Nilai SAL Awal TA 2022 sama dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp232.339.367.075,90 merupakan kas awal yang digunakan di tahun berjalan untuk pelaksanaan anggaran. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ini nilainya sama dengan SAL Awal TA 2022.
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan sebesar Rp162.044.824.779,74 merupakan nilai SiLPA/SiKPA yang berasal dari Defisit LRA sebesar (Rp42.964.871.501,16) ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp205.009.696.280,90.
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya nilainya Rp0,00 (nihil).
5. Lain-lain nilainya Rp0,00 (nihil).

5.1.6. Aset

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.749.200.532.145,28 mengalami kenaikan sebesar Rp221.389.622.424,51 (6,28%) dari Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.527.810.909.720,77 terdiri dari:

5.1.6.1. Aset Lancar

Kondisi Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp266.311.138.675,32 mengalami penurunan sebesar (Rp59.604.753.661,64) (-18,29%) dari Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp325.915.892.336,96. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.6.1.5 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.546.137.893,74 mengalami penurunan sebesar (Rp70.483.114.262,16) (-30,38%) dari Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp232.029.252.155,90. Adapun rincian Kas per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	146.307.325.290,74	184.041.578.435,90	(37.734.253.145,16)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	105.248.357,00	29.372.750,00	75.875.607,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	46.800,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	14.798.385.042,00	24.388.750.164,00	(9.590.365.122,00)
5	Kas di Bendahara BOS	305.784.351,00	543.112.841,00	(237.328.490,00)
6	Kas Lainnya	29.348.053,00	26.437.965,00	2.910.088,00

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
7	Setara Kas	0,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00
Jumlah		161.546.137.893,74	232.029.252.155,90	(70.483.114.262,16)

5.1.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp146.307.325.290,74 mengalami penurunan sebesar (Rp37.734.253.145,16) (-20,50%) dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp184.041.578.435,90. Rincian Kas di Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

No.	Nomor Rekening Giro	Nama Bank	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	0110230000015	Bank Jabar Cabang Sumedang	98.594.909.678,00	152.337.119.157,00	(53.742.209.479,00)
2.	0094-01-000405-30-6	Bank BRI Cabang Sumedang	8.123.158.420,86	16.150.490.343,86	(8.027.331.923,00)
3.	0094-01-004126-40-9	Bank BRI Cabang Sumedang	0,00	0,00	0,00
4.	016452329	Bank BNI Cabang Sumedang	6.991.881.238,00	845.018.094,00	6.146.863.144,00
5.	00381-01-30-000022-9	Bank BTN KCP Sumedang	3.629.700.319,34	562.627.118,55	3.067.073.200,79
6.	5180102000600	BJB Syariah Cabang Pembantu Sumedang	12.863.223.036,18	2.502.161.532,29	10.361.061.503,89
7.	1310013281698	Bank Mandiri Cabang Sumedang	5.684.911.965,39	1.560.751.667,87	4.124.160.297,52
8.	2971212128	Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang	10.409.528.068,92	10.073.419.886,27	346.120.746,70
9.	2971313137	Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang	10.012.564,05	9.990.636,06	(9.990.636,06)
Jumlah			146.307.325.290,74	184.041.578.435,90	(37.734.253.145,16)

Penjelasan rincian Kas Daerah dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Kas Daerah**.

5.1.6.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.248.357,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.875.607,00 (258,32%) dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.372.750,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan	Penyetoran ke Kas Daerah
1	Puskesmas Haurngombang	5.040.000,00	Pengembalian Kelebihan Belanja SPJ DAK Non Fisik (BOK) atas Sub Keg. Operasional Pelayanan Puskesmas Tahun Anggaran 2022	Tanggal 04/01/2023 STS No : 0001/STS/TUP.DAK/PKM.H AURNGOMBONG/II/2023

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan	Penyetoran ke Kas Daerah
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.202.000,00	Pengembalian Temuan BPK pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di Legok Muncang Ds. Cimungkal Kec. Wado	Tanggal 04/01/2023 STS No: 0011-800459-360/E701-0011/CV PUTRA PASIRMAS/KLBHN PBY REHAB JAR IRIGASI LEGOK MUNCANG CIMUNGKAL KEC WADO/TA21
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.818.215,00	Pengembalian Belanja Modal Jalan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Tanggal 04/01/2023 senilai Rp9.818.215,16 STS No. 003/05.2.01.02/STS//2023 2. Tanggal 10/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 004/05.2.01/02/STS//2023 3. Tanggal 12/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 005/05.2.01/02/STS//2023 4. Tanggal 12/01/2023 senilai Rp5.000.000 STS No. 006/05.2.01/02/STS//2023
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.000,00	Pengembalian Uang GU dari BPP Perkebunan ke Kas Daerah atas Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2022	Tanggal 11/01/2023 STS No. 001/ Pembayaran Kekurangan Daerah/DPKP/2023
5	Kecamatan Conggeang	6.499.218,00	Pengembalian saldo GU Bulan Desember TA 2022	Tanggal 02/01/2023 STS No: 0011-800475-360/L261-0629L2610030435
6	Kecamatan Ujungjaya	64.658.482,00	Pengembalian dari Belanja Tahun Anggaran 2022	1. Tanggal 30/01/2023 sebesar Rp6.000.000,00 STS No : 0001/Pengembalian/ Kec.Ujungjaya//2023 2. Tanggal 01/02/2023 sebesar Rp58.658.482,00 STS No : 0002/Pengembalian/ Kec.Ujungjaya//2023
7	Kecamatan Sumedang Selatan	5.442,00	Pengembalian Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022	Tanggal 18 April 2023 sebesar Rp5.442,00 STS No. 006/STS/BL/KEC.SMDSELA TAN/IV/2023
Jumlah		105.248.357,00		

5.1.6.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.800,00 (100,00%) dari Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021. Nilai tersebut merupakan penambahan kas di Bendahara Penerimaan dari pendapatan retribusi terminal sebesar Rp46.800,00 pada Dinas Perhubungan.

5.1.6.1.1.4 Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.798.385.042,00 mengalami penurunan sebesar (9.590.365.122,00) (-39,32%) dari Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.388.750.164,00. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp6.006.390.947,00 yang terdiri dari kas tunai sebesar Rp480.000,00 dan kas non tunai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Nomer Rekening	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Bank Jabar Banten	0007344813001	0,00	0,00	0,00
2	Bank Jabar Banten	0110030030830	934.520.668,00	1.078.175.297,00	(143.654.629,00)
3	BRI Cabang Sumedang	9401000539309	49.665.540,00	120.089.880,00	(70.424.340,00)
4	BNI Cabang Sumedang	0066834418	2.159.617.970,00	11.360.233.420,00	(9.200.615.450,00)
5	Bank Syariah Mandiri	2970505051	2.827.334.467,00	2.815.927.002,00	11.407.465,00
6	Bank Mandiri	131-00-2128888-3	34.772.302,00	135.508.577,00	(100.736.275,00)
Total			6.005.910.947,00	15.509.934.176,00	(9.504.023.229,00)

2. Kas di Bendahara BLUD Puskesmas serta Labkesda pada Dinkes sebesar Rp8.791.994.095,00. Nilai Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan nilai Kas di Rekening Koran Bank masing-masing Puskesmas dan Labkesda per 31 Desember 2021. Rincian Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Kas Puskesmas**.

5.1.6.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp305.784.351,00. Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No.	Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)
1	Saldo Awal TA 2022 (Saldo Dana BOS yang tercatat di Neraca per 31 Desember 2021)	543.112.841,00
2	Penambahan di TA 2022:	
A	Penerimaan Dana BOS Reguler Tahun 2022 yang dicatat sebagai Dana Alokasi Khusus Non Fisik - BOS Reguler yang dianggarkannya di BKAD	126.485.711.005,00
B	Koreksi tambah Saldo Awal berdasarkan nilai di Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dinas Pendidikan	261.101,00

No.	Keterangan		31 Desember 2022 (Rp)	
	C	Penyetoran Kas BOS atas temuan BPK Tahun 2021 yang disetor tahun 2022 dan Koreksi administrasi bank yang dikembalikan ke rekening sekolah oleh pihak bank (Kas BOS SDN sebesar Rp895.784,00 dan Kas BOS SMPN sebesar Rp22.109.128,00) yang dicatat sebagai Lain-lain PAD Yang Sah - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain di BKAD	23.004.912,00	
	Jumlah Penambahan di TA 2022			126.508.977.018,00
3	Pengurangan di TA 2022:			
	a	Pengeluaran Belanja Dana BOS Tahun 2022 terdiri dari: 1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp101.670.151.140,00; 2) Belanja Modal BOS sebesar Rp25.046.675.857,00.	(126.716.826.997,00)	
	b	Pengeluaran Pajak Bunga dan Administrasi Bank dari Rekening BOS Tahun 2022 dicatat sebagai penambah Belanja Barang dan Jasa BOS	(29.478.511,00)	
	Jumlah Pengurangan di TA 2022			(126.746.305.508,00)
4	Saldo Akhir Kas BOS TA 2022			305.784.351,00

5.1.6.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.348.053,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.910.088,00 (11,01%) dari Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.437.965,00. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan selisih kenaikan Kas Lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Reklasifikasi Kas di Bendahara BOS a. bunga bank yang dicatat pada Kas di Bendahara BOS Sekolah Dasar sebesar Rp12.123.322,00; b. Kas di Bendahara BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp13.927.432,00	26.050.754,00	26.050.754,00	0,00
2.	PPh 21 Kecamatan Sumedang Selatan yang telah disetorkan ke Kasda pada tanggal 19 Januari 2023 a. PPh 21 atas belanja honorarium tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp27.500,00 b. PPh 21 atas narasumber Pemilu sebesar Rp3.250.000,00	3.277.500,00	0,00	3.277.500,00
3.	Saldo kas berupa jasa/bunga rekening giro pada Kecamatan Sumedang Utara	19.799,00	0,00	19.799,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	a. BPP Kelurahan Kotakaler Rp9.952,00 (telah disetor ke Kasda pada tanggal 02/01/2023 sebesar Rp9.952,00) b. BPP Kelurahan Talun Rp9.847,00 (telah disetor ke Kasda pada tanggal 10/02/2023 sebesar Rp9.847,00)			
3.	Saldo kas dana CSR BJB TA 2016 a. saldo kas dana CSR BJB di Dinas Perhubungan sebesar Rp364.000,00; dan b. Sekretariat Daerah pada kegiatan pembinaan UKS Kabupaten Sumedang sebesar Rp194,00 yang telah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 18 Februari 2022	0,00	364.194,00	(364.194,00)
4.	Saldo kas pada dua Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sarana Prasarana di Dinas Pendidikan yang merupakan jasa giro dua rekening tabungan Bendahara TA 2018 masing-masing sebesar Rp3.732,00 dan Rp19.285,00 yang telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 24 Februari 2022	0,00	23.017,00	(23.017,00)
	Total	29.348.053,00	26.437.965,00	2.910.088,00

5.1.6.1.1.7 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp23.000.000.000,00) (-100,00%) dari Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.000.000.000,00. Penurunan nilai Setara Kas per 31 Desember 2022 disebabkan oleh pencairan deposito menjadi giro di awal tahun 2022.

5.1.6.1.2 Piutang

Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.269.284.850,88, atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.461.746.901,88 (14,79%) dari piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp97.807.537.949,00. Piutang per 31 Desember 2022 terdiri dari:

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Pajak	88.429.348.407,00

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2022 (Rp)
2.	Piutang Retribusi	535.689.304,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.065.422.985,88
4.	Piutang Pendapatan BLUD	9.084.798.362,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	12.145.642.492,00
6.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.383.300,00
Total		112.269.284.850,88

5.1.6.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp88.429.348.407,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.543.790.704,00 (13,54%) dari piutang 31 Desember 2021 sebesar Rp77.885.557.703,00. Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak Hotel	8.175.864,00	642.700,00	7.533.164,00
2.	Piutang Pajak Restoran	80.034.226,00	86.173.414,00	(6.139.188,00)
3.	Piutang Pajak Hiburan	2.766.000,00	808.000,00	1.958.000,00
4.	Piutang Pajak Reklame	607.087.590,00	620.676.640,00	-13.589.050,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.473.768,00	877.042,00	596.726,00
6.	Piutang Pajak Parkir	22.263.375,00	13.898.250,00	8.365.125,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	621.882.843,00	1.228.058.350,00	(606.175.507,00)
8.	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	3.766.875,00	2.094.000,00	1.672.875,00
9.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	86.903.691.866,00	75.932.329.307,00	10.971.362.559,00
10.	Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	178.206.000,00	0,00	178.206.000,00
Total		88.429.348.407,00	77.885.557.703,00	10.543.790.704,00

5.1.6.1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp535.689.304,00 mengalami kenaikan sebesar Rp350.369.453,00 (189,06%) dari Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 185.319.851,00. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskipas)	26.495.910,00	3.118.500,00	23.377.410,00
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi	0,00	182.201.351,00	(182.201.351,00)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sekretariat Daerah)			
3.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (BKAD)	182.201.351,00	0,00	182.201.351,00
4.	Piutang Retribusi Parkir Berlangganan (Dishub)	350.000,00	0,00	350.000,00
5.	Piutang Retribusi PBG (yang dianggarkan pada DPKPP kemudian dipindahkan ke DPUTR)	326.642.043,00	0,00	326.642.043,00
	Total	535.689.304,00	185.319.851,00	350.369.453,00

Pada Tahun Anggaran 2021, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp182.201.351,00 dicatat pada Sekretariat Daerah kemudian pada Tahun Anggaran 2022 dimutasikan ke BKAD.

Piutang Retribusi Parkir Berlangganan sebesar Rp 350.000,00 pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan retribusi yang diterima dari Loket Mall Pelayanan Publik pada tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp200.000,00 dan retribusi yang masuk ke rekening Yayasan Sebelas April (UNSA) pada tanggal 1 Maret 2022 sebesar Rp150.000,00. Retribusi tersebut telah disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan pada tanggal 30 Maret 2023 kemudian disetorkan ke Kasda pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan STS Nomor 00198/TBP/Dishub/III/2023 sebesar Rp350.000,00.

5.1.6.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.065.422.985,88 mengalami penurunan sebesar (Rp106.572.134,12) (-4,91%) dari piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.171.995.120,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

No.	Jenis Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	87.479.800,00	87.479.800,00	0,00
2.	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	1.950.000.000,00	2.050.000.000,00	(100.000.000,00)
3.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.915.320,00	7.915.320,00	0,00
4.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.300.000,00	26.600.000,00	(9.300.000,00)
5.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	2.727.865,88	0,00	2.727.865,88
	Jumlah	2.065.422.985,88	2.171.995.120,00	(106.572.134,12)

1. Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan

Piutang atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp87.479.800,00 merupakan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat yang dilakukan secara lelang serta dibeli oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013. Kendaraan tersebut telah terjual pada Tahun 2014, namun tagihan penjualan aset tetap belum dibayar. Rinciannya sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Pembelian	Harga Pembelian (Rp)	Taksiran Nilai Pasar (Rp)	Harga Jual (Rp)
1.	Toyota Camry	2003	438.000.000,00	110.757.000,00	20% x 110.757.000,00 =22.151.400,00
2.	Nisan X-Tril ST	2008	257.000.000,00	163.321.000,00	40% x 163.321.000,00 =65.328.400,00
Total			695.000.000,00	274.078.000,00	87.479.800,00

Perhitungan harga jual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran XII-Pemindahtanganan-Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III yang menyebutkan bahwa harga jual kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% dari harga umum/pasaran yang berlaku dan kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% dari harga umum/pasaran yang berlaku.

2. Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD mengalami penurunan sebesar (Rp100.000.000,00) dari Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.050.000.000,00, nilai piutang tersebut merupakan piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan PT Bangun Jaya Allia (BJA) sejak Tahun 2015 yang dicatat pada BKAD. Pada Tahun Anggaran 2022, PT BJA telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp100.000.000,00 sehingga sisa piutang PT BJA yang dicatat dalam Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD adalah sebesar Rp1.950.000.000,00. Adapun penyerahan kios sebanyak 17 unit senilai Rp1.950.000.000,00 oleh PT BJA kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kios Pasar PPKS Nomor DG.01/8928/2022 semula akan dicatat sebagai pengurang nilai piutang dan menambah persediaan. Namun berdasarkan rekomendasi BPK pada LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 21B/LHP/XVIII.BDG/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 yang merekomendasikan Bupati Sumedang untuk memerintahkan Kepala Diskop UKMPP agar melaksanakan pengawasan dan memastikan PT BJA supaya melaksanakan kewajibannya untuk mengasuransikan PPKS dan membayar piutang atas kerjasama ke kas daerah minimal sebesar Rp2.050.000.000,00 serta melaporkannya kepada Kepala Bidang Aset BKAD, maka penyerahan kios tersebut tidak dapat dicatat sebagai pengurang

piutang dan menambah persediaan dikarenakan pengurangan nilai piutang PT BJA hanya dapat dilakukan apabila terdapat pembayaran/pelunasan dalam bentuk uang yang disetor ke kas daerah.

3. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Diskipas sebesar Rp7.915.320,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan dari piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.915.320,00. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan denda atau sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% dari nilai retribusinya berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2017. Denda atau sanksi tersebut muncul karena ada delapan Wajib Retribusi yang belum menyelesaikan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran berakhir berdasarkan surat ketetapan retribusi daerahnya.

4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Merupakan Piutang Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri/TASPEN) sebesar Rp17.300.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp9.300.000,00) (-34,96%) dari piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	PUPUT TRI LEGOWO	10.300.000,00	18.700.000,00	(8.400.000,00)
2.	SUANGSIH	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.	EDI SUKARDI	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
4.	AGUS KOSASIH	0,00	4.900.000,00	(4.900.000,00)
	Jumlah	17.300.000,00	26.600.000,00	(9.300.000,00)

5. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Merupakan Piutang remunerasi atas Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.727.865,88.

5.1.6.1.2.4 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.084.798.362,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.843.447.960,00 (45,56%) dari nilai Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.241.350.402,00. Rincian Piutang terdiri dari:

1. Piutang Pendapatan BLUD RSUD

Piutang Pendapatan BLUD RSUD sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.836.446.362,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.914.304.960,00 (49,21%) dari nilai piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.922.141.402,00. Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2022 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pasien Menunggak (2007-2021)	4.060.300.980,00
2	Piutang Pasien Menunggak (2022)	1.063.867.934,00
3	Piutang Pasien Dalam Perawatan 2022	720.897.358,00
4	Piutang Jasa Raharja	14.013.575,00
5	Piutang BPJS Kesehatan	2.802.536.300,00
6	Piutang Beringin Life	11.351.265,00
7	Piutang Pertamina	5.335.582,00
8	Piutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	185.884,00
9	Piutang Asuransi Jiwa Kresna	76.346.876,00
10	Piutang Bumida	2.380.620,00
11	Piutang Pihak Ketiga Lainnya	79.229.988,00
	Jumlah	8.836.446.362,00

Adapun Piutang Pasien Menunggak yang telah dihapus dari Neraca Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp468.138.020,00 terdiri dari penghapusan senilai Rp116.705.409,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/KEP.168-BPKAD/2020 tentang Penghapusan Piutang Bersyarat Badan Layanan Umum Daerah dan Rp351.432.611,00 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 272 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Bersyarat Badan Layanan Umum Daerah. Berikut adalah rincian permohonan penghapusan pasien menunggak :

No.	Permohonan Penghapusan Pasien Menunggak	SK Bupati Bersyarat Sudah Keluar Neraca	SK Bupati Bersyarat Masih di Neraca	SK Bupati Mutlak Sudah Keluar Dari Neraca
1.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 08 Januari 2016	20.702.980,00		20.702.980,00
2.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 20 Mei 2016	8.926.605,00		8.926.605,00
3.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 20 Mei 2016	27.442.481,00		27.442.481,00
4.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 29 September 2016	41.531.921,00		41.531.921,00
5.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 09 November 2016	99.933.872,00		99.933.872,00
6.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 05 September 2017	42.341.345,00		42.341.345,00

No.	Permohonan Penghapusan Pasien Menunggak	SK Bupati Bersyarat Sudah Keluar Neraca	SK Bupati Bersyarat Masih di Neraca	SK Bupati Mutlak Sudah Keluar Dari Neraca
7.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 03 September 2019	84.326.474,00		
8.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 08 Oktober 2019	88.947.130,00		
9.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 07 November 2019	104.065.594,00		
10.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 11 Februari 2020		116.705.409,00	
11.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 29 September 2020	330.511.111,00		
12.	Permohonan Penghapusan secara bersyarat piutang daerah perorangan tanggal 18 Desember 2020		351.432.611,00	
	Total	848.729.513,00	468.138.020,00	240.879.204,00

Piutang Pasien Menunggak yang telah keluar dari Neraca berdasarkan SK Bupati Bersyarat masih memiliki hak tagih, sedangkan Piutang Pasien Menunggak yang telah keluar dari Neraca berdasarkan SK Bupati Mutlak sudah tidak memiliki hak tagih dan mutlak keluar dari Neraca.

Berikut rincian Piutang Pasien Menunggak yang telah dihapus dari Neraca Tahun Anggaran 2022 :

No	Tahun	Nilai Piutang (Rp)
1	2008	2.051.035,00
2	2009	5.517.308,00
3	2010	12.121.776,00
4	2011	18.180.021,00
5	2012	29.974.770,00
6	2013	19.494.908,00
7	2014	77.602.135,00
8	2015	186.490.658,00
	Jumlah	351.432.611,00
9	2016	116.705.409,00
	Jumlah	468.138.020,00

2. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda Unit Dinkes

Puskesmas yang merupakan BLUD Unit Dinkes mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp248.352.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp70.857.000,00) (-22,20%) dari nilai piutang 31 Desember 2021 sebesar Rp319.209.000,00. Piutang tersebut berupa piutang klaim kepada BPJS Kesehatan. Berikut Puskesmas yang masih memiliki piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 :

No	Nama Puskesmas	Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 (Rp)	Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	JATINANGOR	0,00	16.635.000,00	(16.635.000,00)
2	CIMANGGUNG	4.800.000,00	6.100.000,00	(1.300.000,00)
3	TANJUNGSARI	69.170.000,00	2.700.000,00	66.470.000,00
4	MARGAJAYA	10.705.000,00	0,00	10.705.000,00
5	HAURNGOMBONG	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
6	PAMULIHAN	0,00	13.135.000,00	(13.135.000,00)
7	RANCAKALONG	0,00	215.000,00	(215.000,00)
8	SUMEDANG SELATAN	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
9	SUKAGALIH	0,00	5.515.000,00	(5.515.000,00)
10	KOTAKALER	0,00	110.610.000,00	(110.610.000,00)
11	SITU	17.865.000,00	2.195.000,00	15.670.000,00
12	GANEAS	0,00	1.694.000,00	(1.694.000,00)
13	SITURAJA	0,00	14.670.000,00	(14.670.000,00)
14	CISITU	2.860.000,00	2.500.000,00	360.000,00
15	DARMARAJA	0,00	22.670.000,00	(22.670.000,00)
16	WADO	0,00	27.120.000,00	(27.120.000,00)
17	JATINUNGGAL	62.875.000,00	1.400.000,00	61.475.000,00
18	JATIGEDE	0,00	12.495.000,00	(12.495.000,00)
19	UJUNGJAYA	2.036.000,00	5.640.000,00	(3.604.000,00)
20	CONGGEANG	0,00	38.750.000,00	(38.750.000,00)
21	CIMALAKA	58.275.000,00	2.200.000,00	56.075.000,00
22	CISARUA	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
23	TANJUNGPUR	0,00	6.100.000,00	(6.100.000,00)
24	SUKAMANTRI	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
25	TANJUNGMEDAR	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)
26	SURIAN	0,00	2.660.000,00	(2.660.000,00)
27	CISEMPUR	4.630.000,00	3.000.000,00	1.630.000,00
28	SAWAHDADAP	3.840.000,00	6.530.000,00	(2.690.000,00)
29	PADASUKA	0,00	7.375.000,00	(7.375.000,00)
JUMLAH		248.352.000,00	319.209.000,00	(70.857.000,00)

5.1.6.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.145.642.492,00 mengalami kenaikan sebesar Rp944.744.319,00 (8,43%) dari Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.200.898.173,00. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.145.642.492,00 terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Salur Tahun 2022 sebesar Rp11.655.642.492,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi yang disalurkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Provinsi Jawa Barat Nomor 02.00/04.0/000971/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.08/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 untuk

keperluan pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sumedang Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp490.000.000,00 yang mengalami kesalahan transfer ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hingga akhir Tahun Anggaran 2022, tidak terdapat tindak lanjut atas kesalahan transfer tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mencatat Bantuan Keuangan tersebut sebagai Piutang Transfer Antar Daerah. Penjelasan lebih rinci terkait Piutang Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan dapat dilihat pada **5.2.1 Subsequent Event – Piutang Transfer Antar Daerah.**

Adapun rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Salur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.521.629.250,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.047.183.750,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.463.670.924,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	140.869.405,00
5.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	5.482.289.163,00
	Total	11.655.642.492,00

Sementara itu, Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Salur Tahun 2021 sebesar Rp11.200.898.173,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.115-Bapenda/2022 Tanggal 14 Maret 2022 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2021 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah disalurkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Tanggal Realisasi
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.787.251.200,00	20/01/2022
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.213.636.815,00	16/12/2022
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.672.539.430,00	16/12/2022
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	85.088.958,00	16/12/2022
5.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	4.442.381.770,00	16/12/2022
	Total	11.200.898.173,00	

Selisih kenaikan Piutang Transfer Antar Daerah secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Nama	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Salur	11.655.642.492,00	11.200.898.173,00	454.744.319,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022	490.000.000	0,00	490.000.000
	Total	12.145.642.492,00	11.200.898.173,00	944.744.319,00

5.1.6.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.383.300,00 mengalami penurunan sebesar (Rp14.033.400,00) (-93,15%) dari Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.416.700,00. Penurunan ini disebabkan oleh adanya reklas ke akun Aset Lainnya-TGR yaitu Piutang TGR yang Belum Tertagih dalam jangka waktu lebih dari masa perjanjian pelunasan piutang. Rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Piutang TP/TGR**.

5.1.6.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp41.862.755.145,35) mengalami kenaikan sebesar (Rp5.898.360.634,68) (16,40%) dari Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp35.964.394.510,67). Rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Piutang Pajak	36.872.411.527,87	31.696.694.432,10	5.175.717.095,77
2.	Piutang Retribusi	184.263.298,27	18.235.727,60	166.027.570,67
3.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.526.038.332,00	1.044.890.976,60	481.147.355,40
4.	Piutang BLUD	3.220.925.444,75	3.136.630.425,00	84.295.019,75
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	58.278.212,46	56.004.490,87	2.273.721,59
5.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	838.330,00	11.938.458,50	(11.100.128,50)
	Jumlah	41.862.755.145,35	35.964.394.510,67	5.898.360.634,68

Nilai Penyisihan Piutang akan mengurangi nilai Piutang secara keseluruhan. Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Penyisihan Piutang**.

Rincian Penyisihan Piutang per SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Bappenda	36.932.322.950,55	31.752.698.922,97	5.179.624.027,58
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	53.989,32	3.213,50	50.775,82
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	21.545.624,76	18.584.642,07	2.960.982,69
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	817.790,00	808.000,00	9.790,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	44.520.146,25	38.205.920,25	6.314.226,00
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	355.618,84	352.635,21	2.983,63
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	1.545.941,88	964.991,25	580.950,63
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	35.915.639,20	20.968.113,29	14.947.525,91

No	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.834,38	10.470,00	8.364,38
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	36.766.746.913,24	31.616.796.446,53	5.149.950.466,71
	Penyisihan Piutang Pajak BPHTB	891.030,00	0,00	891.030,00
	Penyisihan Piutang Retribusi PBG	1.633.210,22	0,00	1.633.210,22
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	58.278.212,46	56.004.490,87	2.273.721,59
2	Sekretariat Daerah	0,00	61.960.035,1	(61.960.035,10)
	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	18.220.135,10	(18.220.135,10)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	43.739.900,00	(43.739.900,00)
3	BKAD	1.708.286.481,00	1.013.049.958,50	695.236.522,50
	Penyisihan Piutang Retribusi	182.201.351,00	0,00	182.201.351,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pengelolaan Pasar PPKS	1.437.500.000,00	1.000.000.000,00	437.500.000,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Hasil Penjualan Alat Angkutan	87.479.800,00	0,00	87.479.800,00
	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	838.330,00	11.938.458,50	(11.100.128,50)
	Penyisihan Piutang TASPEN	267.000,00	1.111.500,00	(844.500,00)
4	Diskipas	1.220.269,05	55.169,10	1.165.099,95
	Penyisihan Piutang Retribusi	428.737,05	15.592,50	413.144,55
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	791.532,00	39.576,60	751.955,40
5	RSUD	3.220.925.444,75	3.136.630.425,00	84.295.019,75
	Penyisihan Piutang BLUD	3.220.925.444,75	3.136.630.425,00	84.295.019,75
	Jumlah	41.862.755.145,35	35.964.394.510,67	5.898.360.634,68

Terdapat beberapa piutang pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dihitung penyisihan piutangnya, yaitu :

1. Piutang Retribusi Parkir Berlangganan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp350.000,00 dikarenakan piutang tersebut telah disetor ke Kasda pada tanggal 31 Maret 2023.
2. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp2.727.865,88 dikarenakan tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait penyisihan piutang tersebut.
3. Piutang Transfer Antar Daerah atas Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi sebesar Rp490.000.000,00 yang mengalami kesalahan transfer ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tidak dihitung penyisihan piutangnya dikarenakan Bantuan Keuangan tersebut telah diterima oleh RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 27 Februari 2023.

5.1.6.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.698.630,14 mengalami penurunan sebesar (Rp127.500.000,00) (-49,19%) dari Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp259.198.630,14. Beban Dibayar Dimuka ini merupakan belanja asuransi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (Diskop UKMPP) sebesar Rp26.520.547,95 dan belanja sewa lahan parkir dan gudang RSUD sebesar Rp105.178.082,19.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka pada Diskop UKMPP, sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Polis Asuransi	Aset yang Diasuransikan	Nilai Premi Asuransi (Belanja Jasa Asuransi-LRA) (Rp)	Periode Asuransi	Perusahaan Asuransi	Beban Asuransi-LO (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka-Neraca per 31 Desember 2022 (Rp)
1	PDF2200075 Tanggal 14 November 2022	Bangunan Kios Pasar Darmaraja dan Bangunan Kios Pasar Buahdua	10.000.000,00	14 November 2022 s/d 14 November 2023	PT. Asuransi Bangun ASKRIDA	1.287.671,23	8.712.328,77
2	PDF2200023 Tanggal 10 Mei 2022	Bangunan Kios Pasar Tanjungsari, Pasar Conggeang, Pasar Wado, Pasar INPRES Gemah Ripah dan Pasar Parakan Muncang	50.000.000,00	10 Mei 2022 s/d 10 Mei 2023	PT. Asuransi Bangun ASKRIDA	32.191.780,82	17.808.219,18
Jumlah			60.000.000,00			33.479.452,05	26.520.547,95

Rincian Belanja Dibayar Dimuka pada RSUD, sebagai berikut:

No	Nomor dan Tanggal Kontrak Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Nilai Sewa (Belanja Jasa Sewa - LRA) (Rp)	Periode Sewa	Pihak Yang Menyewakan	Beban Sewa - LO (Rp)	Belanja Dibayar Dimuka – Neraca per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Nomor: 445/021/RS UD/II/2019 Tanggal 01 Februari 2019	387.500.000,00	Sewa Tanah dan Bangunan Lahan Parkir Kend. Roda 4 di Jl. Cipada RT 02/03	01 Februari 2019 s.d 31 Januari 2024	Drs. H Yayat Ruhiyat	303.417.808,22	84.082.191,78
2	Nomor: 445/016/RS UD/VI/2021 Tanggal 28 Mei 2021	100.000.000,00	Sewa Tempat/ Gedung untuk barang Inventaris Tidak Layak Pakai di Blok Lembur Tengah Kel. Situ Kec. Sumedang Utara	03 Juni 2021 s. d 03 Juni 2023	Tete Trisna Jong	78.904.109,59	21.095.890,41
Jumlah		487.500.000,00				382.321.917,81	105.178.082,19

5.1.6.1.5 Persediaan

Persediaan akhir TA 2022 adalah persediaan yang dikuasakan pada Bendahara Barang di setiap unit kerja. Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.060.767.740,91 mengalami kenaikan sebesar Rp1.276.469.628,32 (4,02%) dari Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.784.298.112,59. Rekapitulasi Persediaan yang terdapat di SKPD, sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	29.401.582.376,35	28.631.508.651,09	770.073.725,26
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.171.824,00	167.673.567,50	(117.501.743,50)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.182.072,00	31.209.872,00	(11.027.800,00)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	757.030.700,00	1.056.802.884,00	(299.772.184,00)
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.525.891.000,00	1.302.712.200,00	223.178.800,00
6	Dinas Perhubungan	61.264.140,00	80.198.046,00	(18.933.906,00)
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	21.458.100,00	46.250.000,00	(24.791.900,00)
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan	222.964.175,00	237.924.060,00	(14.959.885,00)
9	Dinas Perikanan dan Peternakan	96.339.275,00	112.702.012,00	(16.362.737,00)
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	648.572.585,46	21.380.150,00	627.192.435,46
11	Sekretariat Daerah	42.888.309,00	20.745.250,00	22.143.059,00
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.021.415,00	11.426.060,00	(2.404.645,00)
13	Badan Pendapatan Daerah	203.401.769,10	63.765.360,00	139.636.409,10
	Jumlah Total	33.060.767.740,91	31.784.298.112,59	1.276.469.628,32

Persediaan pada Dinas Kesehatan Rp30.567.587.081,35 merupakan jumlah persediaan dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta pada Dinas Kesehatan sendiri, dengan rincian seperti di bawah ini.

No	Urusan Pemerintahan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	10.667.464.861,24	17.599.447.195,09	(6.931.982.333,85)
2	Rumah Sakit Umum	12.864.226.737,00	11.032.061.456,00	1.832.165.281,00
3	Puskesmas dan Labkesda	7.035.895.483,11	0,00	7.035.895.483,11
	Jumlah Total	30.567.587.081,35	28.631.508.651,09	1.936.078.430,26

Persediaan obat pada Dinas Kesehatan tersebut tidak termasuk lima obat hasil hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penanganan Covid-19, yang dalam Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak tercantum harganya, dengan rincian seperti berikut:

No	Nama Obat	Stock Akhir per 31 Desember 2022	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Goggles	5	0,00	0,00
2	Indelible ink marker pen for MR	790	0,00	0,00
3	Masker KF95	950	0,00	0,00
4	Taishan Disposable Virus Spesimen Collection Tube	400	0,00	0,00
5	Vaksin PVC	739	0,00	0,00

Sedangkan rekapitulasi kenaikan/penurunan Persediaan menurut rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
I	Bahan	2.334.147.932,63	1.749.331.649,50	584.816.283,13
1	Bahan Kimia	2.163.271.393,63	1.556.457.460,00	606.813.933,63
2	Bahan Baku	19.661.624,00	0,00	19.661.624,00
3	Bahan/Bibit Tanaman	73.639.900,00	21.380.150,00	52.259.750,00
4	Isi Tabung Gas	20.860.000,00	19.902.000,00	958.000,00
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.686.665,00	112.702.012,00	(56.015.347,00)
6	Bahan Lainnya	28.350,00	38.890.027,50	(38.861.677,50)
II	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.910.065.891,10	2.849.028.114,00	61.037.777,10
1	Alat Tulis Kantor	264.575.108,10	1.058.808.429,00	(794.233.320,90)
2	Kertas dan Cover	44.010.340,50	0,00	44.010.340,50
3	Bahan Cetak	763.469.594,50	771.316.128,00	(7.846.533,50)
4	Benda Pos	840.000,00	310.000,00	530.000,00
5	Bahan Komputer	530.403.484,00	0,00	530.403.484,00
6	Perabot Kantor	23.680.250,00	36.569.500,00	(12.889.250,00)
7	Alat Listrik	143.210.144,00	110.244.902,00	32.965.242,00
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.139.876.970,00	871.779.155,00	268.097.815,00
III	Obat-obatan	27.213.056.931,72	27.092.162.359,09	120.894.572,63
1	Obat	27.200.323.431,72	27.092.162.359,09	108.161.072,63
2	Obat-obatan Lainnya	12.733.500,00	0,00	12.733.500,00
IV	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	581.762.635,46	92.214.040,00	489.548.595,46
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	581.762.635,46	92.214.040,00	489.548.595,46
V	Natura dan Pakan	21.734.350,00	1.561.950,00	20.172.400,00
1	Natura	805.350,00	1.561.950,00	(756.600,00)
2	Pakan	20.929.000,00	0,00	20.929.000,00
	Total	33.060.767.740,91	31.784.298.112,59	1.276.469.628,32

Rincian pada Lampiran Neraca – Persediaan.

5.1.6.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.306.878.217,91 mengalami kenaikan sebesar Rp7.257.605.834,18 (5,26%) dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp138.049.272.383,73. Investasi Jangka Panjang ini terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp1.000.932.571,62 dan Investasi Permanen sebesar Rp144.305.945.646,29

5.1.6.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.932.571,62 mengalami penurunan sebesar (Rp12.350.024,38) atau (-1,22%) dari Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.013.282.596,00. Investasi Non Permanen ini berupa Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih yang terdiri dari:

1.	Dana Bergulir:	
	1. Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK)	Rp2.823.907.025,00
	2. Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA)	Rp1.221.408.775,00
	Jumlah Dana Bergulir	Rp4.045.315.800,00
2.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(Rp3.044.383.228,38)
Total Investasi Non Permanen		Rp1.000.932.571,62

5.1.6.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.045.315.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.275.278,00 (2,80%) dari Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.935.040.522,00. Terdapat dua jenis Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.823.907.025,00.

Rincian Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) sebagai berikut:

Investasi Awal Dana Bergulir PAKEPUK berdasarkan APBD terdiri dari:	
1. APBD 2003 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003) pengelola Bank Jabar	Rp1.000.000.000,00
2. APBD 2004 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2004) pengelola Bank BRI	Rp500.000.000,00
3. APBD 2005 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2005) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
4. APBD 2006 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2006) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp2.700.000.000,00
Akumulasi Pendapatan Perguliran	Rp123.907.025,00
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2022	Rp2.823.907.025,00
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2022 terdiri dari :	
1. Kredit yang disalurkan (Tunggakan)	Rp2.002.159.595,00

2. Saldo kas di rekening pengelola terdiri dari :	Rp821.747.430,00
BRI Rek Nomor 009401000299307	Rp315.063.665,00
BJB Rek Nomor: 0110010038457	Rp383.579.256,00
PKPS Rek Nomor 0113200097913	Rp6.565.110,00
PKPS Rek Nomor 0065285721001	Rp116.539.399,00

Dalam tabel di atas yang dimaksud dengan Akumulasi Pendapatan perguliran yaitu pendapatan yang diperoleh dari awal digulirkannya dana tersebut sampai dengan akhir tahun berjalan diantaranya dari pendapatan bunga dan penerimaan setoran tunggakan kredit.

Program PAKEPUK digagas pada tahun 2003 dan berakhir tahun 2006 dengan total dana sebesar Rp2.700.000.000,00. Program PAKEPUK ini sebagai salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang kesulitan mendapatkan akses permodalan.

2. Dana bergulir kepada kelompok usaha mikro kecil berupa Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA) yang dikelola oleh Perumda BPR Bank Sumedang dengan nomor rekening tabungan 05.01.02082 dan rekening bunga 05.01.02083 atas nama Diskop UKMPP Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.221.408.775,00. Rincian dana bergulir Program KUSUMA:

Investasi Awal Dana Bergulir KUSUMA:	Rp1.000.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp1.000.000.000,00
Pendapatan Perguliran Tahun Lalu di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp82.209.427,00
Setoran Modal dari Pendapatan Perguliran Tahun Lalu	Rp0,00
Pendapatan Perguliran tahun berjalan di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp462.000,00
Penambahan Modal Tahun Lalu	Rp138.737.348,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2022	Rp1.221.408.775,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2022 terdiri dari :	
1. Saldo kas pendapatan perguliran di rekening bunga nomor rekening 5.01.02083	Rp82.671.427,00
2. Saldo kas tabungan di rekening nomor 05.01.02082	Rp45.321.473,00
3. Kredit yang disalurkan, terdiri dari:	Rp1.093.415.875,00
Lancar (<1tahun)	Rp39.886.675,00
Kurang Lancar (1 s.d 3 thn)	Rp5.950.000,00
Diragukan (> 3 s.d 5 thn)	Rp12.300.000,00
Macet (> 5 thn)	Rp1.035.279.200,00

Dasar pengklasifikasian kategori kredit yang disalurkan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet tidak berdasarkan umur piutang, tetapi berdasarkan data dari pengelola dana bergulir yaitu berdasarkan kualitas kredit.

5.1.6.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.044.383.228,38) mengalami kenaikan sebesar (Rp122.625.302,38) (4,20%) dari Penyisihan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.921.757.926,00. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih ini merupakan penyisihan atas Kredit yang disalurkan oleh pengelola dana bergulir. Rincian perhitungan penyisihan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir	Tunggakan Kredit yang disalurkan (Rp)	Lancar (< 1 tahun) (Rp)	Kurang Lancar (>1 s.d 3 tahun) (Rp)	Diragukan (> 3 s.d 5 tahun) (Rp)	Macet (> 5 tahun) (Rp)
PAKEPUK BRI	284.117.367,00	-	-	-	284.117.367,00
PAKEPUK BJB	381.646.737,00	-	-	-	381.646.737,00
PAKEPUK PKPS	1.336.395.491,00	-	-	-	1.336.395.491,00
KUSUMA	1.093.415.875,00	39.886.675,00	5.950.000,00	12.300.000,00	1.035.279.200,00
Total Tunggakan Kredit Yang Disalurkan	3.095.575.470,00	39.886.675,00	5.950.000,00	12.300.000,00	3.037.438.795,00
Presentase Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Dana Bergulir		199.433,38	595.000,00	6.150.000,00	3.037.438.795,00
Total Penyisihan Dana Bergulir					3.044.383.228,38

5.1.6.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.305.945.646,29 mengalami kenaikan sebesar Rp7.269.955.858,56 (5,31%) dari Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp137.035.989.787,73. Investasi Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai berdasarkan Metode Ekuitas dan Metode Biaya. Berdasarkan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi dinyatakan bahwa penggunaan Metode Ekuitas dan Metode Biaya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengukuran nilai investasi permanen dengan menggunakan Metode Ekuitas diterapkan pada Perumda BPR Bank Sumedang, PT. LKM Sumedang dan PT. Kampung Makmur (Perusahaan Daerah/Perseroda) karena kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang lebih dari 20%. Sedangkan untuk pengukuran nilai investasi permanen pada Bank Jabar Cabang Sumedang

menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan kurang dari 20%. Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.305.945.646,29 terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.113.175.360,67. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp100.000.000.000,00. Penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 50% dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 100%. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) Perumda BPR Bank Sumedang per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2021 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp55.951.986.998,73
Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp5.500.000.000,00
Bagian Laba Tahun Berjalan : 100% x Rp 13.343.517.280,94	Rp13.343.517.280,94
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(Rp7.682.328.919,00)
Total Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp67.113.175.360,67

Sedangkan Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan TA 2022 sebesar Rp42.019.740.978,65 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2008	Rp5.762.734.646,65
Penyertaan Modal Tahun 2009	Rp1.700.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2010	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2011	Rp500.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2012	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah dan Bangunan Tahun 2012	Rp3.012.700.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2013	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2014	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2015	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2016	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2017	Rp2.994.306.332,00
Penyertaan Modal Tahun 2018	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2020	Rp5.500.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2021	Rp3.850.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp5.500.000.000,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	Rp42.019.740.978,65

Dengan demikian sampai dengan TA 2022 secara akumulasi terdapat peningkatan Nilai Investasi Jangka Panjang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp25.093.434.382,02 (Rp67.113.175.360,67 – Rp42.019.740.978,65).

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.285.222.871,54. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang pada PT. LKM sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp5.000.000.000,00. Penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 78,16%. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Audited*) PT. LKM per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2021 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp2.383.921.521,40
Koreksi Saldo Awal (Perubahan Persentase Kepemilikan)	Rp43.988.666,02
Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp1.000.000.000,00
Bagian Laba Tahun Berjalan: 78,16% x (Rp1.363.841.713,00)	(Rp1.065.978.682,88)
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(Rp76.708.633,00)
Total Penyertaan Modal	Rp2.285.222.871,54

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM Sumedang sebesar 60% dan Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40%. Menurut Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) Sumedang menjadi PT. LKM Sumedang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta untuk tahun 2021 terdapat perubahan hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM yaitu menjadi 71,15% sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi hanya 28,85%. Kemudian pada tahun 2022, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham PT. LKM Sumedang Tahun 2022, hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM Tahun 2022 kembali mengalami perubahan menjadi 78,16% sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi hanya 21,84%. Berikut rincian perubahan porsi kepemilikan PT. LKM :

Porsi Kepemilikan yang Disajikan di Laporan Keuangan TA 2021	Porsi Kepemilikan yang Seharusnya Disajikan di Laporan Keuangan TA 2021	Porsi Kepemilikan Tahun 2022
60,00%	71,15%	78,16%

3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.049.800.239,08. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebesar Rp51.000.000.000,00 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp100.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dengan bentuk perusahaan perseroan daerah yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan modal

yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun berdasarkan Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 01 Tanggal 2 Februari 2021, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0024104-AH.01.02. Tahun 2021 dan Laporan Tahunan Tahun 2021 dan 2022, penyertaan modal dinilai berdasarkan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 99,30%. Berikut rincian porsi kepemilikan PT. Kampung Makmur (Perseroda):

Porsi Kepemilikan yang Disajikan di Laporan Keuangan TA 2021	Porsi Kepemilikan yang Seharusnya Disajikan di Laporan Keuangan TA 2021	Porsi Kepemilikan Tahun 2022
51,00%	99,30%	99,30%

Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Unaudited*) PT. Kampung Makmur (Perseroda) per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2021 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp37.083.894.962,66
Koreksi Saldo Awal (Perubahan Persentase Kepemilikan)	Rp77.703.546,17
Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp0,00
Bagian Laba Tahun Berjalan: 99,30% x (Rp1.119.635.719,79)	(Rp1.111.798.269,75)
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal	Rp36.049.800.239,08

Maksud didirikan Perseroan ini yaitu untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset Daerah Kabupaten.

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Dimana modal dasar Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan pihak lain paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Pemenuhan modal dasar dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), kewajiban Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar untuk pemenuhan modal disetor. Pemenuhan modal disetor dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.500.000.000,00 dan/atau barang milik daerah yang bernilai sebesar Rp34.501.937.740,00. Barang milik daerah tersebut terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00;
2. Tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00;
3. Tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00;
4. Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00; dan

5. Tanah dan bangunan eks Kandep Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Muchtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp 1.138.720.000,00.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan modal disetor kepada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang berupa Aset Tetap Tanah dan Bangunan Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00. Pelepasan aset tetap ini sebagai penambah nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2020.

Sedangkan untuk Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan modal disetor kepada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang berupa Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00;
2. Tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00; dan
3. Tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00;

Tanah dan bangunan eks Kantor Departemen Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Muchtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp1.138.720.000,00.

4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Cabang Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.842.841.795,00, dinilai berdasarkan metode biaya yaitu berdasarkan nilai pada lembar saham. Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar Cabang Sumedang sebesar Rp4.329.670.795,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tahun Anggaran 2022. Rincian penyertaan berdasarkan nilai pada lembar saham adalah sebagai berikut:

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/00096743	30 Maret 2000	96.743	967.430.000,00
2	A: II-24/0008342	31 Mei 2000	8.342	83.420.000,00
3	A: II-24/00017796	30 Juni 2000	17.796	177.960.000,00
4	A: II-24/0005436	31 Juli 2000	5436	54.360.000,00
5	A: II-24/0003000	31 Desember 2000	3.000	30.000.000,00
6	A: II-24/00020000	31 Desember 2001	20.000	200.000.000,00
7	A: II-24/00200000	31 Desember 2002	200.000	2.000.000.000,00
8	A: II-24/00650000	31 Desember 2003	650.000	6.500.000.000,00
9	A: II-24/150000	29 Desember 2006	150.000	1.500.000.000,00
Total			1.151.317	11.513.170.000,00

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp250,00/lembar saham)

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/46052684	31 Desember 2008	46.052.684	11.513.171.000,00

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp1.355,00/lembar saham)

No.	No. SBHMETD / Right Certificates	Tanggal Efektif	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	00020	21 Februari 2022	3.195.329	4.329.670.795,00

5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Medial Sumedang dinilai dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan akhir sebesar 100%. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020. Berikut rincian porsi kepemilikan PDAM Tirta Medial Sumedang :

Porsi Kepemilikan yang Disajikan di Laporan Keuangan TA 2021	Porsi Kepemilikan yang Seharusnya Disajikan di Laporan Keuangan TA 2021	Porsi Kepemilikan Tahun 2022
60,56%	100,00%	100,00%

Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PDAM Tirta Medial Sumedang sebesar Rp66.502.868.421,50 dengan total kepemilikan saham sebesar Rp109.813.916.285,12. Perhitungan penyertaan modal dengan melihat Laporan Keuangan (*Unaudited*) PDAM per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2021 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp30.103.015.304,94
Koreksi Saldo Awal (Perubahan Persentase Kepemilikan)	(Rp8.831.288.345,94)
Penyertaan Modal Tahun 2022	Rp1.500.000.000,00
Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan 100% x Rp243.178.421,00	Rp243.178.421,00
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal	Rp23.014.905.380,00

Sedangkan Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PDAM sampai dengan Tahun 2022 baik berupa kas maupun non kas sebesar Rp45.163.204.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan Modal tahun 1998 s.d 2003	610.175.883,00
Penyertaan Modal tahun 2005	150.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2006	800.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2010	500.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2011	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2012	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2013	2.400.000.000,00

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2014	1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2015	3.250.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2016	2.798.000.000,00
Penyertaan Modal Non Tunai Tahun 2016	11.258.109.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2017	4.629.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2018	4.649.367.436,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2019	3.918.552.264,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2020	3.200.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2021	2.100.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2022	1.500.000.000,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	45.163.204.583,00

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2022 secara akumulasi terdapat penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang pada PDAM Sumedang sebesar (Rp22.148.299.203,00) yaitu (Rp23.014.905.380,00 – Rp45.163.204.583,00).

5.1.6.3 Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.306.846.836.622,22 mengalami kenaikan sebesar Rp246.796.681.346,70 (8,07%) dari aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.060.050.155.275,52. Nilai aset tetap ini dihasilkan berdasarkan rekonsiliasi antara petugas akuntansi SKPD, pengurus barang SKPD, bidang akuntansi dan bidang aset.

Penyusunan neraca aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan rincian barang di neraca telah mengacu pada Pemandagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Rekap aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
a. Tanah	582.116.454.610,77	433.690.528.646,73	148.425.925.964,04
b. Peralatan Mesin	1.525.702.360.148,95	1.359.768.122.700,89	165.934.237.448,06
c. Bangunan Gedung	1.541.028.614.238,83	1.372.194.664.552,32	168.833.949.686,51
d. Jalan Irigasi dan Jaringan	3.051.233.809.417,23	2.850.481.458.311,11	200.752.351.106,12
e. Aset Tetap lainnya	212.813.927.498,19	196.060.575.980,47	16.753.351.517,72
f. Kontruksi dalam Pengerjaan	42.865.020.217,00	83.336.411.117,00	(40.471.390.900,00)
g. Akumulasi Penyusutan	(3.648.913.349.508,75)	(3.235.481.606.033,00)	(413.431.743.475,75)
TOTAL	3.306.846.836.622,22	3.060.050.155.275,52	246.796.681.346,70

Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2021	3.060.050.155.275,52
2.	Mutasi Tambah	1.221.593.526.045,66
	- Belanja Modal di LRA	480.034.408.526,00
	- Atribusi Biaya Umum	7.687.289.880,63
	- Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan	9.051.325.860,50
	- Koreksi Kurang Pencatatan	3.657.150.000,00
	- Mutasi Masuk SKPD	400.581.551.425,10
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	144.641.460.445,17
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.518.748.476,00
	- Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan bangunan	54.956.272.390,00
	- Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.380.138.727,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan	9.750.000,00
	- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin	300.000,00
	- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.129.698.241,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	88.143.600,01
	- Reklas ke Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10.389.938.158,18
	- Utang Belanja Modal Tahun 2022	44.136.857.970,00
	- Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.183.905.627,07

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	- Reklas ke Beban Penyusutan Aset Lain-lain	146.586.719,00
3.	Mutasi Kurang	974.796.844.698,96
	- Koreksi Aset Tetap <1.000.000 (Ekstrakompatabel)	15.111.627.917,67
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	2.108.686.000,00
	- Koreksi Lebih Pencatatan	99.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	400.581.551.425,10
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.865.020.217,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.000,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya	88.143.600,01
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Peralatan dan Mesin	9.750.000,00
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.739.698.890,00
	- Reklas ke Aset Lainnya dari Peralatan dan Mesin	10.558.190.907,18
	- Reklas ke Aset Lainnya dari Aset Tetap Lainnya	698.720.030,00
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.380.138.727,00
	- Beban Penyusutan	429.152.173.823,00
	- Pengurangan Utang Belanja Modal Tahun 2020	483.180.805,00
	- Reklas ke Beban Barang dan Jasa	19.563.200,00
	- Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	157,00
	Saldo Tahun 2022	3.306.846.836.622,22

Penjelasan pembentukan aset tetap per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Laporan Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya di Neraca dibandingkan Mutasi Seharusnya di SKPD.**

5.1.6.3.1 Tanah

Aset tetap tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp582.116.454.610,77 mengalami kenaikan sebesar Rp148.425.925.964,04 (34,22%) dari aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp433.690.528.646,73. Rincian aset tetap tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	410.924.464,00	410.924.464,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	6.102.928.914,00	6.102.928.914,00	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	158.042.895.645,50	143.481.914.789,50	14.560.980.856,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	3.314.508.260,10	3.321.710.260,10	(7.202.000,00)
Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	2.071.799.973,00	2.071.799.973,00	0,00
Tanah Persil Lainnya	960.048.000,00	708.588.000,00	251.460.000,00
Tanah Basah	30.716.102.013,08	30.716.102.013,08	0,00
Tanah Kering	488.270.040,00	488.270.040,00	0,00

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Tanah Perkebunan	202.582.412,00	202.582.412,00	0,00
Tanah Hutan	49.866.000,00	49.866.000,00	0,00
Tanah Tandus	6.346.992.000,00	6.346.992.000,00	0,00
Tanah Pertanian	616.654.373,18	616.654.373,18	0,00
Tanah Lapangan Olahraga	5.211.419.378,48	4.779.419.378,48	432.000.000,00
Tanah Lapangan Parkir	999.164.990,00	187.561.700,00	811.603.290,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	107.474.260,00	107.474.260,00	0,00
Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	668.575.000,00	215.883.000,00	452.692.000,00
Tanah untuk Jalan	292.916.676.496,90	217.567.415.981,90	75.349.260.515,00
Tanah untuk Bangunan Air	33.025.773.635,25	7.335.317.889,99	25.690.455.745,26
Tanah untuk Bangunan Instalasi	2.340.649.380,00	2.099.463.480,00	241.185.900,00
Tanah untuk Bangunan Bersejarah	224.878.000,00	224.878.000,00	0,00
Tanah untuk Makam	1.401.396.425,00	1.401.396.425,00	0,00
Tanah untuk Taman	34.834.160.997,78	4.190.671.340,00	30.643.489.657,78
Tanah Kampung	1.062.713.952,50	1.062.713.952,50	0,00
Total	582.116.454.610,77	433.690.528.646,73	148.425.925.964,04

Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2021	433.690.528.646,73
2.	Mutasi Tambah	149.145.285.964,04
	- Realisasi Belanja Modal	27.007.255.100,00
	- Koreksi Karena Pencatatan	3.657.150.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	117.761.520.864,04
	- Mutasi Masuk SKPD	719.360.000,00
3.	Mutasi Kurang	719.360.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	719.360.000,00
	Saldo Tahun 2022	582.116.454.610,77

Mutasi aset tetap tanah selama Tahun 2022 terdiri dari:

Mutasi tambah yang berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan aset Tetap Tanah sebesar Rp27.007.255.100,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp3.657.150.000,00 terjadi setelah dilakukan penilaian aset terhadap tanah dan bangunan pada Puskesmas Tanjungsari (Dinas Kesehatan) dengan nomor dokumen 00407/2.0151-00/PI/11/0354/0/XII/2022 tentang Laporan Penilaian Aset.
3. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk sebesar Rp117.761.520.864,04, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp86.843.845.306,26,

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp30.884.675.557,78 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp33.000.000,00. Rincian penerimaan Hibah Aset Tanah dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Tanah Rincian Hibah Tanah.**

4. Mutasi Masuk antar SKPD aset tetap tanah sebesar Rp719.360.000,00, yaitu tanah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mutasi masuk dari Sekretariat Daerah berupa Tanah Blok Pasar berlokasi di Jl. Pasar Lama No. 13 Desa Tanjungsari seluas 5.620 m² dengan nomor Berita Acara No: KU.03.07/5646/2022.

Mutasi kurang berasal dari Mutasi keluar antar SKPD aset tetap tanah sebesar Rp719.360.000,00, yaitu dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa Tanah Blok Pasar berlokasi di Jl. Pasar Lama No. 13 Desa Tanjungsari seluas 5.620 m² dengan nomor Berita Acara Nomor KU.03.07/5646/2022.

Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah yang dilakukan oleh pengurus barang pada DPUPR yaitu dengan menganalisis Kartu Inventaris Barang (KIB) dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 28 bidang tanah seluas 158.005 m² dengan total nilai perolehan sebesar Rp1.811.958.250,00 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai aset tetap tanah di Neraca. Seharusnya tanah tersebut tidak lagi dicatat sebagai aset tetap. Hasil inventarisasi akan dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk mengajukan reklasifikasi ke Aset Lainnya melalui Bidang Aset. Proses selanjutnya akan diajukan kedalam usulan penghapusan barang milik daerah.

Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disewa oleh pihak lain sebanyak lima bidang tanah seluas 71 m² yaitu disewa oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 9 m² berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan seluas 46 m² berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk dimanfaatkan sebagai kantor kas PT BPD Jawa Barat dan Banten dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 033/PKS.103-KS/2019 dan Nomor 056/SUE-PKS/2019 tentang tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 1 November 2021, saat ini masih dilakukan proses permohonan persetujuan Perjanjian Kerja Sama tanah dan atau bangunan milik Pemda Kabupaten Sumedang. PUD BPR Bank Sumedang seluas 15 m² berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang digunakan sebagai kantor kas PUD BPR Bank Sumedang sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pengelola Barang dengan PUD BPR Bank Sumedang Nomor 030/PKS/45.KS/2019 dan Nomor 20/SPK/BPR-Smd/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk kantor kas PUD BPR Bank Sumedang dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah

Kabupaten Sumedang dengan PUD BPR Bank Sumedang Nomor 033/PKS.73-KS/2020 dan Nomor 0019/SPK/BPR-Smd01/XII/2020 tentang sewa tanah dan atau bangunan milik Pemda Kabupaten Sumedang dengan luas 9 m² untuk dimanfaatkan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PT BRI (Persero) Tbk Sumedang seluas 25 m² berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sumedang Nomor B/14/KU.03.07/X/2022 dan Nomor B.2491 KC-VI/LYI/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk seluas 3,5 m² berlokasi di ruang galeri ATM Mal Pelayanan Publik (MPP) Sumedang dimanfaatkan untuk penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PMPTSP dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sumedang Nomor SDG/1/PKS-ATM/027/2020 tanggal 9 Oktober 2020. Selain itu juga digunakan oleh pihak ketiga/pihak lain dengan pinjam pakai sebanyak 15 bidang tanah seluas 13.283,85 m² yaitu digunakan untuk tujuh Markas Polisi Sektor, Pos Lantas, Pengadilan Agama Kelas 1, UPT DPPKB, Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), Pondok Pesantren, Lapangan Serbaguna Desa Sindangpakuon dan Kantor Sekretariat Gabungan Organisasi Wanita. Rincian pada **Lampiran Neraca – Aset Tetap Tanah Pinjam Pakai**.

Nilai aset tanah ini tidak termasuk aset tanah yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PUD BPR dalam likuidasi sebesar Rp288.103.698,00 yang di atasnya berdiri bangunan PUD BPR. Aset tanah dan bangunan ini terdapat pada PUD BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 PUD BPR (DL) Situraja sebesar Rp159.885.120,00, PUD BPR (DL) Sumedang Utara sebesar Rp45.000.000,00 dan di PUD BPR (DL) Cadasngampar sebesar Rp61.505.800,00. Sementara PUD BPR (DL) Tanjungkerta dan PUD BPR (DL) Sumedang Selatan tidak mempunyai aset tanah dan bangunan berdasarkan NAL. Tanah pada PUD BPR likuidasi merupakan tanah yang berada dalam penguasaan Bank Indonesia sebagai jaminan dana talang PUD BPR likuidasi.

Sedangkan beberapa aset tanah yang digunakan untuk sarana kesehatan dan pendidikan tetapi tidak masuk dalam neraca daerah karena bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, meskipun di atasnya berdiri bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 23 UPT Puskesmas pada Dinkes dan 38 bangunan sekolah pada Disdik. Rincian **Lampiran Neraca – Aset Tetap Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang**.

5.1.6.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.525.702.360.148,95 mengalami kenaikan sebesar Rp165.934.237.448,06 (12,20%) dari peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.359.768.122.700,89. Rincian Aset tetap peralatan dan mesin dapat

dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin.**

Nilai aset peralatan dan mesin ini tidak termasuk aset peralatan dan mesin yang ada di NAL PUD BPR dalam likuidasi yang berupa inventaris sebesar Rp14.959.850,00 dengan nilai akumulasi penyusutannya sebesar Rp14.959.850,00. PUD BPR (DL) yang mempunyai inventaris hanya di PUD BPR (DL) Cadasngampar, sedangkan di lima PUD BPR (DL) lainnya tidak mempunyai aset peralatan dan mesin (inventaris) berdasarkan NAL. Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2021	1.359.768.122.700,89
2.	Mutasi Tambah	203.807.799.792,69
	- Realisasi Belanja Modal	189.446.017.112,00
	- Atribusi Biaya Umum	419.980.891,90
	- Kapitalisasi	476.884.885,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	3.023.597.234,00
	- Mutasi Masuk SKPD	10.261.150.514,78
	- Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	300.000,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	88.143.600,01
	- Utang Belanja Modal	91.725.555,00
3.	Mutasi Kurang	37.873.562.344,63
	- Di Bawah Rp1.000.000,00 (Ekstrakomptabel)	15.111.627.917,67
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	1.430.000.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	10.261.150.514,78
	- Koreksi Karena Pencatatan	99.000,00
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	9.750.000,00
	- Reklas ke Aset Lainnya	10.558.190.907,18
	- Reklas ke Beban Barang dan Jasa	19.563.200,00
	- Pengurangan Utang Belanja Modal	483.180.805,00
Saldo Tahun 2022		1.525.702.360.148,95

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun 2022 terdiri dari:

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal yang menambah aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp189.446.017.112,00 yang terdapat pada 54 SKPD. Rincian pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal.**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang aset tetap peralatan dan mesin yang diluar belanja modal sebesar Rp419.980.891,90 yang terdapat di 45 SKPD. Rincian pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Atribusi Biaya Umum.**
3. Kapitalisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp476.884.885,00 yang terdapat pada empat SKPD, yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.995.900,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp113.812.740,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp238.716.200 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp105.360.045,00.

4. Hibah masuk sebesar Rp3.023.597.234,00, terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.008.694.000,00 merupakan penerimaan CSR dari Bank Jabar Banten berupa dua unit Dump Truck Sampah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp15.810.300,00, Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp1.585.843.534,00 merupakan penerimaan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp413.249.400,00 merupakan penerimaan alat panen dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
5. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap peralatan dan mesin di SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu pada 54 SKPD sebesar Rp10.261.150.514,78. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mutasi Masuk antar SKPD.**
6. Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp300.000,00 pada Dinas Kesehatan (Puskesmas Padasuka).
7. Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp88.143.600,01 terdapat pada Dinas Pendidikan.
8. Utang Belanja Modal merupakan Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari Belanja Modal sebesar Rp91.725.555,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).

Mutasi kurang berasal dari:

1. Ekstrakomptabel merupakan nilai aset di bawah Rp1.000.000,00 pada 30 SKPD sebesar Rp15.111.627.917,67. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel.**
2. Hibah keluar terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.430.000.000,00 kepada 22 Sekolah Swasta. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Hibah Keluar Peralatan dan Mesin.**
3. Mutasi keluar merupakan perpindahan aset tetap peralatan dan mesin yang terdapat pada 21 SKPD sebesar Rp10.261.150.514,78. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mutasi Keluar antar SKPD.**
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp99.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum).
5. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.750.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (Puskesmas Sukagalih).
6. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp10.558.190.907,18 terdapat pada 25 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklas ke Aset Lainnya.**
7. Reklas ke Beban Barang dan Jasa terdapat pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp19.563.200,00. Ke Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan

Terdaftar sebesar Rp6.594.600,00 dan ke Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp12.968.600,00.

8. Pengurangan Utang Belanja Modal sebesar Rp483.180.805,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah).

Nilai mutasi kurang belum termasuk kendaraan bermotor mini bus (penumpang 14 orang kebawah) merk Toyota New Avanza 1,3 M/T Nomor Polisi Z 1011 B dengan nilai perolehan sebesar Rp160.198.047,00, dimana kendaraan tersebut sudah digunakan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Barat Pengurus Cabang Sumedang sesuai naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor B/2366/KU.03.07/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah berupa Kendaran Roda 4 (empat) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, namun belum dikeluarkan dari KIB dikarenakan SK penghapusan belum ditandatangani oleh Bupati Sumedang.

5.1.6.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.541.028.614.238,83 mengalami kenaikan sebesar Rp168.833.949.686,51 (12,30%) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp1.372.194.664.552,32. Rincian aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.469.174.364.896,95	1.309.579.472.841,28	159.594.892.055,67
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	22.455.939.984,80	17.407.874.215,75	5.048.065.769,05
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	35.458.403.104,40	35.201.647.750,40	256.755.354,00
Bangunan Menara Perambuan	10.409.766.970,00	7.004.242.470,00	3.405.524.500,00
Tugu/Tanda Batas	3.530.139.282,68	3.001.427.274,89	528.712.007,79
Total	1.541.028.614.238,83	1.372.194.664.552,32	168.833.949.686,51

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2021	1.372.194.664.552,32
2.	Mutasi Tambah	269.431.038.094,71
	- Realisasi Belanja Modal	129.969.430.312,00
	- Atribusi Biaya Umum	3.426.127.711,00
	- Kapitalisasi	8.140.892.475,50
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	1.745.484.774,01
	- Mutasi Masuk antar SKPD	71.183.080.432,20

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	9.750.000,00
	- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	54.956.272.390,00
3.	Mutasi Kurang	100.597.088.408,20
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	678.686.000,00
	- Mutasi Keluar antar SKPD	71.183.080.432,20
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.735.321.976,00
	Saldo Akhir Tahun 2022	1.541.028.614.238,83

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terdiri dari:

Mutasi Tambah berasal dari :

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan nilai aset tetap senilai Rp129.969.430.312,00 pada 25 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal.**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya yang menambah aset tetap yang diluar belanja modal senilai Rp3.426.127.711,00 pada 27 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Atribusi Biaya Umum.**
3. Kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi aset tetap sebesar Rp8.150.642.475,50 di 22 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kapitalisasi.**
4. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk Gedung dan bangunan sebesar Rp1.745.484.774,01, terdapat pada 4 SKPD yaitu pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp234.291.012,01, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp412.720.000,00, Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp1.028.473.762,00 dan Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp70.000.000,00. Rincian penerimaan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rincian Hibah Gedung dan Bangunan.**
5. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tujuh SKPD sebesar Rp71.183.080.432,20, yaitu perpindahan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp24.544.916.774,20, ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.379.525.100,00, ke Sekretariat Daerah sebesar Rp20.892.693.000,00, dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Pendidikan sebesar Rp296.454.000,00 dan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp20.892.693.000,00, ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.093.542.892,00, ke Dinas Perhubungan sebesar Rp11.033.444,00 serta ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp72.222.222,00.

6. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.750.000,00 terdapat pada Puskesmas Sukagalih Dinas Kesehatan.
7. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp54.956.272.390,00 terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp46.941.815.880,00 dan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp8.014.456.510,00.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp678.686.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan. Rincian pengeluaran Hibah Aset Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rincian Hibah Gedung dan Bangunan**.
2. Mutasi Keluar antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap dari lima SKPD sebesar Rp71.183.080.432,20 yaitu perpindahan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp24.544.916.774,20, ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.379.525.100,00, ke Sekretariat Daerah sebesar Rp20.892.693.000,00 dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Ke Dinas Pendidikan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp296.454.000,00. Dan ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp20.892.693.000,00, ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.093.542.892,00, ke Dinas Perhubungan sebesar Rp11.033.444,00 serta ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp72.222.222,00 dari Sekretariat Daerah.
3. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp28.735.321.976,00, terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Aset tetap gedung dan bangunan ini sudah termasuk nilai bangunan yang berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 23 UPT Pusat Kesehatan pada Dinkes dan 38 bangunan sekolah pada Disdik. Nilai aset gedung dan bangunan ini tidak termasuk aset gedung dan bangunan yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PUD BPR (DL) sebesar Rp181.597.898,00 yaitu di PUD BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 dan PUD BPR Situraja sebesar Rp159.885.120,00. Sementara di empat PUD BPR (DL) lainnya tidak mempunyai aset gedung dan bangunan berdasarkan NAL.

Aset Bangunan dan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disewa oleh pihak lain sebanyak tiga bidang tanah seluas 71 m² yaitu disewa oleh PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 31 m² yang sampai 31 Desember 2022 belum ada ijin pembayaran sewa dari Bank Indonesia sedangkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 033/PKS.103-KS/2019 dan Nomor 056/SUE-PKS/2019 tanggal 1 November 2019 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang telah habis masa berlakunya pada tanggal 1 November 2021 dan saat ini masih dilakukan proses pembuatan Perjanjian Kerjasamanya kembali. PUD BPR Bank Sumedang seluas 15 m² sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Pengelola Barang dengan PUD BPR Bank Sumedang Nomor 030/PKS/45.KS/2019 dan Nomor 20/SPK/BPR-Smd/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk kantor kas PUD BPR Bank Sumedang. PT BRI (Persero) Tbk Sumedang seluas 25 m² sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Kabupaten Sumedang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero, TBK Cabang Sumedang Nomor B/14/KU.03.07/X/2022 dan Nomor B.2491 KC-VI/LYI/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang sewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

5.1.6.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.051.233.809.417,23, mengalami kenaikan sebesar Rp200.752.351.106,12 (7,04%) dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.850.481.458.311,11. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lebih lengkapnya pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Jalan	1.682.460.850.420,59	1.575.883.509.182,11	106.577.341.238,48
Jembatan	236.059.562.786,04	211.104.576.289,04	24.954.986.497,00
Bangunan Air Irigasi	795.490.353.246,29	744.727.321.656,29	50.763.031.590,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.566.781.166,67	2.566.781.166,67	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	173.874.891.583,39	164.358.038.760,75	9.516.852.822,64
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	800.412.451,30	800.412.451,30	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	11.373.328.648,40	11.241.768.648,40	131.560.000,00
Bangunan Air Kotor	2.224.411.597,34	2.121.664.597,34	102.747.000,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	40.402.900.944,27	40.394.900.944,27	8.000.000,00
Instalasi Air Kotor	10.844.772.725,00	9.941.318.725,00	903.454.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	471.086.000,00	401.336.000,00	69.750.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.775.160.088,77	6.775.160.088,77	0,00
Instalasi Gardu Listrik	3.794.932.585,00	3.794.932.585,00	0,00
Instalasi Pertahanan	2.658.127,20	2.658.127,20	0,00
Jaringan Air Minum	55.014.000.197,00	47.289.372.239,00	7.724.627.958,00
Jaringan Listrik	28.490.982.999,97	28.490.982.999,97	0,00
Jaringan Telepon	586.223.850,00	586.223.850,00	0,00
Jaringan Gas	500.000,00	500.000,00	0,00
Total	3.051.233.809.417,23	2.850.481.458.311,11	200.752.351.106,12

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2021	2.850.481.458.311,11
2.	Mutasi Tambah	218.736.478.012,12
	- Realisasi Belanja Modal	116.084.739.946,00
	- Atribusi Biaya Umum	3.832.529.686,00
	- Kapitalisasi	428.951.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	22.110.857.573,12
	- Mutasi Masuk antar SKPD	3.854.128.665,00
	- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.380.138.727,00
	- Utang Belanja Modal	44.045.132.415,00
3.	Mutasi Kurang	17.984.126.906,00
	- Mutasi Keluar antar SKPD	3.854.128.665,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	300.000,00
	- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.129.698.241,00
Saldo Akhir Tahun 2022		3.051.233.809.417,23

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp116.084.739.946,00 pada sembilan SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal.**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diluar belanja modal sebesar Rp3.832.529.686,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.742.949.686,00, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp54.130.000,00, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.780.000,00, Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp16.430.000,00 dan pada Kecamatan Sumedang Utara sebesar Rp16.240.000,00.
3. Kapitalisasi merupakan belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang di kapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp428.951.000,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp329.120.000,00, dan pada Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp99.831.000,00.

4. Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.110.857.573,12 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Rincian penerimaan Hibah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Rincian Hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi**.
5. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp3.854.128.665,00, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari Sekretariat Daerah.
6. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp28.380.138.727,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp9.328.540.847,00 dan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp19.051.597.880,00.
7. Utang Belanja Modal sebesar Rp44.045.132.415,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Mutasi keluar antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp3.854.128.665,00, terdapat pada Sekretariat Daerah ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000,00, terdapat pada Puskesmas Padasuka Dinas Kesehatan.
3. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp14.129.698.241,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Menurut hasil inventarisasi ulang terhadap aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilakukan oleh pengurus barang DPUPR yaitu dengan menganalisis KIB dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 41 aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan nilai perolehannya sebesar Rp24.842.472.163,91 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai aset tetap di Neraca. Dimana seharusnya aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dikeluarkan dari KIB-nya sehingga tidak lagi tercatat sebagai aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Hasil inventarisasi ini akan dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk melakukan pengajuan permohonan ke Bidang Aset untuk proses reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap ke Aset Lainnya. Serta proses selanjutnya diteruskan dengan pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai salah satu tahapan dalam alur penghapusan BMD.

5.1.6.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp212.813.927.498,19 mengalami kenaikan sebesar Rp16.753.351.517,72 (8,54%) dari Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp196.060.575.980,47.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
Bahan Perpustakaan Tercetak	197.070.937.123,14	182.029.131.397,15	15.041.805.725,99
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	110.845.960,00	110.845.960,00	0,00
Kartografi, Naskah dan Lukisan	753.486.666,00	725.876.666,00	27.610.000,00
Musik	80.739.000,00	80.676.500,00	62.500,00
Karya Grafika (Graphic Material)	44.910.575,00	34.744.275,00	10.166.300,00
Three Dimensional Artifacts and Realita	132.799.900,00	132.538.500,00	261.400,00
Tarscalt	131.650.000,00	131.650.000,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian	4.980.622.266,31	3.323.268.174,58	1.657.354.091,73
Alat Bercorak Kebudayaan	1.999.526.691,94	1.983.435.191,94	16.091.500,00
Tanda Penghargaan	68.293.700,00	68.293.700,00	0,00
Ternak	92.045.000,00	92.045.000,00	0,00
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	400.000,00	400.000,00	0,00
Tanaman	417.962.750,00	417.962.750,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	6.929.707.865,80	6.929.707.865,80	0,00
Total	212.813.927.498,19	196.060.575.980,47	16.753.351.517,72

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Audited 2021	196.060.575.980,47
2.	Mutasi Tambah	17.540.215.147,73
	- Realisasi Belanja Modal	17.526.966.056,00
	- Atribusi Biaya Umum	8.651.591,73
	- Kapitalisasi	4.597.500,00
3.	Mutasi Kurang	786.863.630,01
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	88.143.600,01
	- Reklas ke Aset Lainnya	698.720.030,00
	Saldo Tahun 2022	212.813.927.498,19

Mutasi aset tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terdiri dari mutasi tambah dan kurang. Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan aset tetap Tahun 2022 sebesar Rp17.526.966.056,00 terapat pada 14 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Modal.**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah aset tetap lainnya diluar belanja modal sebesar Rp8.651.591,73, terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.255.741,00 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.395.850,73.

- Kapitalisasi aset tetap lainnya menjadi aset tetap sebesar Rp4.597.500,00 terdapat pada Dinas Pendidikan.

Dan mutasi kurang berasal dari:

- Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.143.600,01 terdapat pada Dinas Pendidikan.
- Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp698.720.030,00 yang terdapat di 11 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Lainnya Reklas ke Aset Lainnya.**

5.1.6.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.865.020.217,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.471.390.900,00 (-48,56%) dari Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.336.411.117,00.

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Kontruksi Dalam Pengerjaan	42.865.020.217,00	83.336.411.117,00	(40.471.390.900,00)
Total	42.865.020.217,00	83.336.411.117,00	(40.471.390.900,00)

Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Audited Tahun 2021	83.336.411.117,00
2	Mutasi Tambah	42.865.020.217,00
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan	28.735.321.976,00
	- Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.129.698.241,00
3	Mutasi Kurang	83.336.411.117,00
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	54.956.272.390,00
	- Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.380.138.727,00
	Total Tahun 2022	42.865.020.217,00

Mutasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

- Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.735.321.976,00, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp10.216.573.500,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp18.518.748.476,00. Mutasi tambah tersebut merupakan reklas dari Gedung dan Bangunan (Belanja Modal Bangunan Gedung Menara Panenjoan Masjid Al Kamil Kecamatan Jatigede) yang pengerjaannya dilakukan secara bertahap dari Tahun 2021 dan direncanakan selesai pada Tahun 2023. Hal tersebut menyebabkan pengakuan aset baru dapat dilakukan ketika pekerjaan telah selesai dan bisa digunakan.

2. Reklas dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp14.129.698.241,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mutasi tambah tersebut merupakan reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Belanja Modal Jalan dan Jembatan) di tiga lokasi yang berbeda, yaitu ruas jalan Curugmas-Cibuyung, ruas jalan Hariang-Cisumur dan jembatan Cisaar Landeuh 2 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede yang pengerjaannya belum selesai dan belum bisa digunakan.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.956.272.390,00, terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp46.941.815.880,00 dan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp8.014.456.510,00.
2. Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp28.380.138.727,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan pada Tahun 2022, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp9.328.540.847,00 dan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp19.051.597.880,00.

Dengan rincian pada **Lampiran Neraca – Konstruksi Dalam Pengerjaan**.

5.1.6.3.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.648.913.349.508,75 mengalami kenaikan sebesar Rp413.431.743.475,75 (12,78%) dari Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.235.481.606.033,00. Adapun kenaikan tersebut terdiri dari penyusutan peralatan dan mesin naik sebesar Rp165.669.340.577,75 (19,05%), penyusutan gedung dan bangunan naik sebesar Rp56.571.136.571,00 (10,99%) dan kenaikan dari akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp191.191.266.327,00 (10,33%). Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.035.306.479.655,75	869.637.139.078,00	165.669.340.577,75	19,05
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	571.531.506.014,00	514.960.369.443,00	56.571.136.571,00	10,99
Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.042.075.363.839,00	1.850.884.097.512,00	191.191.266.327,00	10,33
Total	3.648.913.349.508,75	3.235.481.606.033,00	413.431.743.475,75	12,78

Sedangkan Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap : Akumulasi Penyusutan**.

5.1.6.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.000.937.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.937.500,00 (100,00%) dari Dana Cadangan per 31 Desember 2021. Dana Cadangan ini dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 yang bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Penjelasan lebih rinci terkait Dana Cadangan dapat dilihat pada **5.2.2. Subsequent Event – Dana Cadangan.**

5.1.6.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.234.243.871,75 mengalami kenaikan sebesar Rp12.438.654.147,19 (327,71%) dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.795.589.724,56. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Tuntutan Ganti Rugi	342.006.312,00	254.472.912,00	87.533.400,00	34,40
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	69.173.543,00	69.173.543,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	46.127.823.312,26	44.753.675.421,89	1.374.147.890,37	3,07
Aset Lain-lain	43.926.696.727,67	33.378.205.820,49	10.548.490.907,18	31,60
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(42.527.887.464,25)	(33.185.567.476,49)	(9.342.319.987,76)	28,15
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(42.951.089.531,93)	(41.474.370.496,33)	(1.476.719.035,60)	3,56
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	11.247.520.973,00	0,00	11.247.520.973,00	100,00
Total	16.234.243.871,75	3.795.589.724,56	12.438.654.147,19	327,71

Rincian penjelasan mengenai Aset Lainnya sebagai berikut:

1. Penambahan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp87.533.400,00 (34,40%), berasal dari penerimaan piutang aset lain-lain TGR sebesar Rp22.500.000,00, reklas ke bagian lancar piutang TGR sebesar Rp8.383.300,00 dan penerimaan dari reklas bagian lancar piutang TGR sebesar Rp118.416.700,00.
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau BGS/BSG yaitu Tanah yang digunakan untuk Bangunan PPKS. Luas tanah yang tercatat di KIB A (Tanah) yaitu 11.401 m². Perolehan pada Tahun 1980 dengan nilai sebesar Rp69.173.543,00. Sesuai perjanjian kerja sama Nomor 511/PKS.50-Huk/2013 tanggal 20 September 2013, PT Bangun Jaya Alia melakukan kerjasama BGS selama 25 tahun.
3. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp46.127.823.312,26 mengalami kenaikan sebesar Rp1.374.147.890,37 (3,07%) dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp44.753.675.421,89. Aset tidak berwujud ini berupa:
 - Lisensi dan Frenchise sebesar Rp554.628.035,00 pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum) Kabupaten Sumedang.

- *Software* yang berada di 54 SKPD sebesar Rp45.573.195.277,26 mengalami kenaikan sebesar Rp1.070.809.655,37 (2,41%) dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp44.502.385.621,89.

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Persentase %
Aset Tak Berwujud	46.127.823.312,26	44.753.675.421,89	1.374.147.890,37	3,07
• Lisensi dan Franchise	554.628.035,00	251.289.800,00	303.338.235,00	120,71
• <i>Software</i>	45.573.195.277,26	44.502.385.621,89	1.070.809.655,37	2,41

Rincian per SKPD-nya dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Tidak Berwujud**.

4. Aset Lain-lain dari seluruh SKPD sebesar Rp43.926.696.727,67 mengalami kenaikan sebesar Rp10.548.490.907,18 (31,60%) dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp33.378.205.820,49. Rincian aset lain-lain per SKPD dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Lain-lain**.
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp42.527.887.464,25 mengalami kenaikan sebesar Rp9.342.319.987,76 (28,15%) dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp33.185.567.476,49. Rincian akumulasi penyusutan aset lain-lain ini dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Lain-lain**.
6. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp42.951.089.531,93 mengalami kenaikan sebesar Rp1.476.719.035,60 (3,56%) dari saldo Tahun 2021 sebesar Rp41.474.370.496,33. Rincian nilai Amortisasi Per SKPD dapat di lihat lebih rinci pada **Lampiran Neraca – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**.
7. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp11.247.520.973,00 merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disimpan di rekening transitoris Bank Indonesia, mengacu pada surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-111/WPB.08/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah, surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-773/WPB.13/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Saldo pada Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Audited 2021	3.795.589.724,56
2.	Mutasi Tambah	24.721.777.424,47

-	Tuntutan Ganti Rugi	87.533.400,00
-	Realisasi Belanja Modal	543.850.955,00
-	Atribusi Biaya Umum Aset Tidak Berwujud	13.517.405,37
-	Kapitalisasi	118.059.500,00
-	Koreksi Pencatatan Amortisasi	13.433.758,75
-	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.184.504.889,42
-	Mutasi Masuk SKPD Aset Lain-lain	107.002.168,00
-	Mutasi keluar akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	50.772.179,00
-	Reklas dari Peralatan dan Mesin	10.558.190.907,18
-	Reklas dari Aset Tetap lainnya	698.720.030,00
-	Koreksi Akumulasi Amortisasi	88.971.258,75
-	Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	9.700.000,00
-	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	11.247.520.973,00
3.	Mutasi Kurang	12.283.123.277,28
-	Beban Akumulasi Amortisasi	1.579.124.053,10
-	Mutasi Keluar SKPD Aset Lain-lain	107.002.168,00
-	Mutasi masuk akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	50.772.179,00
-	Penghapusan	9.700.000,00
-	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dari Beban Aset Tetap	146.586.719,00
-	Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10.389.938.158,18
	Saldo TA 2022	16.234.243.871,75

Mutasi aset lainnya Tahun 2022 terdiri dari mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Penambahan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp87.533.400,00 (34,40%), berasal dari penerimaan piutang aset lain-lain TGR sebesar Rp22.500.000,00, reklas ke bagian lancar piutang TGR sebesar Rp8.383.300,00 dan penerimaan dari reklas bagian lancar piutang TGR sebesar Rp118.416.700,00;
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp543.850.955,00 terdapat pada Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah);
3. Atribusi biaya umum yaitu biaya penunjang yang menambah aset lainnya diluar belanja modal terdapat pada enam SKPD sebesar Rp13.517.405,37, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.530.000,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.530.000,00, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp5.920.000,00, pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.607.405,37, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar RpRp1.430.000,00 dan pada Inspektorat sebesar Rp1.500.000,00;
4. Kapitalisasi sebesar Rp118.059.500,00, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp99.800.000,00 dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp18.259.500,00;
5. Koreksi Pencatatan Amortisasi sebesar Rp13.433.758,75 terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain terdapat pada 15 SKPD sebesar Rp1.184.504.889,42;

7. Mutasi Masuk SKPD Aset Lain-lain sebesar Rp107.002.168,00 pada Dinas Kesehatan;
8. Mutasi keluar akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp50.772.179,00 pada Dinas Kesehatan;
9. Reklas dari Peralatan dan Mesin terdapat pada 25 SKPD sebesar Rp10.558.190.907,18;
10. Reklas dari Aset Tetap Lainnya terdapat pada 11 SKPD sebesar Rp698.720.030,00;
11. Koreksi Akumulasi Amortisasi sebesar Rp88.971.258,75 terdapat pada Dinas Sosial;
12. Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp9.700.000,00 pada Kecamatan Ujungjaya; dan
13. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp11.247.520.973,00 merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disimpan di rekening transitoris Bank Indonesia.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.579.124.053,10 pada 54 SKPD. Rincian Beban Amortisasi Per SKPD dapat di lihat lebih rinci pada **Lampiran Neraca - Aset Lainnya : Beban Penyusutan Amortisasi;**
2. Mutasi Keluar SKPD Aset Lain-lain sebesar Rp107.002.168,00 terdapat pada Dinas Kesehatan;
3. Mutasi masuk akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp50.772.179,00 pada Dinas Kesehatan;
4. Penghapusan sebesar Rp9.700.000,00 pada Kecamatan Ujungjaya;
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dari Beban Aset Tetap terdapat pada 12 SKPD sebesar Rp146.586.719,00; dan
6. Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdapat pada 25 SKPD sebesar Rp10.389.938.158,18.

5.1.7 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.757.733.513,40 mengalami kenaikan sebesar Rp45.989.747.861,25 (100,48%) dari Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.767.985.652,15. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 hanya mempunyai Kewajiban Jangka Pendek.

5.1.7.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.757.733.513,40 mengalami kenaikan sebesar Rp45.989.747.861,25 (100,48%) dari Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.767.985.652,15. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Utang PFK	3.277.500,00	0,00	3.277.500,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.367.125.480,40	1.202.786.157,15	1.164.339.323,25
3	Utang Belanja	82.764.944.871,00	44.316.920.645,00	38.448.024.226,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.622.385.662,00	248.278.850,00	6.374.106.812,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	91.757.733.513,40	45.767.985.652,15	45.989.747.861,25

5.1.7.1.1 Utang PFK

Utang PFK TA 2021 *Audited* yang merupakan saldo awal 1 Januari 2022 sebesar Rp9.987.632.008,00 direklas ke saldo awal Utang Belanja. Utang PFK berupa Iuran Wajib Pemda sebesar 4% ke BPJS atas kekurangan komponen Tunjangan Profesi Guru Tahun 2020 yang telah dibayar oleh Pemda ke BPJS pada Tahun Anggaran 2022 lebih tepat dicatat pada akun Utang Belanja Pegawai-Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN (Iuran Jaminan Kesehatan PNS). Sehingga saldo awal Utang PFK TA 2022 menjadi Rp0,00. Begitu juga untuk pelunasannya direklas dari Utang PFK ke Utang Belanja Pegawai-Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN (Iuran Jaminan Kesehatan PNS) sebesar Rp9.987.632.008,00 berdasarkan SP2D Nomor 02.15/04.0/06080/LS/BKAD/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022.

Sedangkan Utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.277.500,00 merupakan Utang PPh 21 pada Kecamatan Sumedang Selatan yang belum disetorkan per 31 Desember 2022. Utang PPh 21 ini terdiri dari utang PPh 21 atas belanja honorarium tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp27.500,00 dan utang PPh 21 atas narasumber Pemilu sebesar Rp3.250.000,00. Kecamatan Sumedang Selatan baru membayar seluruh utang PPh 21 tersebut pada tanggal 19 Januari 2023 sehingga per 31 Januari 2023, utang PPh tersebut telah lunas.

5.1.7.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.367.125.480,40 mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.339.323,25 (96,80%) dari nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.202.786.157,15.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	258.526.714,29	326.936.026,37	(68.409.312,08)
2.	Sisa pendapatan diterima dimuka atas Retribusi IMTA Tahun 2020	0,00	22.456.468,14	(22.456.468,14)
3.	Pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame (Bapenda)	1.101.157.024,68	853.393.662,64	247.763.362,04
4.	Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Pelayanan Parkir (Dishub)	443.271.071,43	0,00	443.271.071,43
5.	Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pengawasan menara telekomunikasi (Diskominfosanditik)	564.170.670,00	0,00	564.170.670,00
	Total	2.367.125.480,40	1.202.786.157,15	1.164.339.323,25

Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Pelayanan Parkir (Dishub) sebesar Rp443.271.071,43 terdiri dari Retribusi Parkir Berlangganan sebesar Rp427.651.071,43 dan Parkir Bongkar Muat sebesar Rp15.620.000,00. Sedangkan rincian Pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame yang diterima Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Papan/Bilboard/videotron/Megatron	1.092.940.371,38	848.794.978,34	244.145.393,04
2.	Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Kain	1.248.024,19	4.053.015,81	(2.804.991,62)
3.	Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame Berjalan	6.968.629,11	545.668,49	6.422.960,62
	Total	1.101.157.024,68	853.393.662,64	247.763.362,04

5.1.7.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.764.944.871,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.448.024.226,00 (86,76%) dari Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.316.920.645,00. Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Jasa BLUD Puskesmas Dinkes	3.539.352.905,00	2.747.159.676,00	792.193.229,00
2	Utang Belanja Barang BLUD Puskesmas Dinkes	117.845.700,00	52.890.000,00	64.955.700,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
3	Utang Operasional RSUD Kabupaten Sumedang	31.872.079.513,00	30.246.413.371,00	1.625.666.142,00
4	Utang Dinas Kesehatan berupa Iuran Jaminan/Asuransi	34.287.350,00	1.282.825.590,00	(1.248.538.240,00)
5	Utang Belanja Jasa DPUTR	2.713.297.246,00	0,00	2.713.297.246,00
6	Utang Belanja Modal DPUTR	44.045.132.415,00	0,00	44.045.132.415,00
7	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	442.949.742,00	9.987.632.008,00	(9.544.682.266,00)
	Jumlah Utang Belanja	82.764.944.871,00	44.316.920.645,00	38.448.024.226,00

Utang Belanja Jasa BLUD Puskesmas Dinkes per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.539.352.905,00 merupakan utang belanja jasa pelayanan, kemudian Utang Belanja Barang BLUD Puskesmas Dinkes sebesar Rp117.845.700,00 merupakan utang belanja makan minum pasien. Rincian utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Utang Belanja**.

Utang Operasional RSUD Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.872.079.513,00 merupakan utang operasional BLUD RSUD yang rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Utang Belanja**.

Rincian Utang Dinas Kesehatan berupa Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp34.287.350,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Utang pelayanan kesehatan program Jamkesda pada Rumah Sakit Pusat Mata Cicendo Bandung	13.438.400,00	0,00	13.438.400,00
2.	Utang pelayanan kesehatan program Jamkesda pada RSHS Bandung	20.848.950,00	0,00	20.848.950,00
3.	Tagihan Iuran Penduduk yang Didaftarkan (PD) Pemda/ PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN yaitu peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan melalui APBD 2020	0,00	945.751.500,00	(945.751.500,00)
4.	Tagihan Iuran Penduduk yang Didaftarkan (PD) Pemda/ PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN yaitu peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan melalui APBD 2021	0,00	269.010.000,00	(269.010.000,00)
5.	Utang biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesda kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan III (Rumah Sakit rujukan dari RSUD Sumedang) per 31 Desember 2021	0,00	68.064.090,00	(68.064.090,00)
	Total	34.287.350,00	1.282.825.590,00	(1.248.538.240,00)

Utang biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesda kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan III (Rumah Sakit rujukan dari RSUD Sumedang) per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.064.090,00 terdiri dari utang ke RSUP Dr. Hasan Sadikin sebesar Rp26.379.750,00 dan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp41.684.340,00.

Utang Belanja DPUTR per 31 Desember 2022 senilai Rp46.758.429.661,00 berasal dari Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.713.297.246,00 dan Utang Belanja Modal sebesar Rp44.045.132.415,00 dimana utang tersebut merupakan utang atas 102 paket pekerjaan yang SPM nya sudah dibuat namun SP2D nya tidak terbit dan cair per 31 Desember 2022. Rincian utang atas 102 paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang dari 87 SPM atas paket pekerjaan yang telah selesai 100%	18.669.070.756,00
2.	Utang dari 9 SPM atas paket pekerjaan yang belum selesai 100%	18.812.418.878,00
3.	Utang dari 4 SP2D yang tidak cair	8.935.452.950,00
4.	Utang dari 2 paket pekerjaan yang sudah diserahterimakan namun belum dibuat SPM nya	341.487.077,00
	Total	46.758.429.661,00

Rincian utang belanja DPUTR dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Utang Belanja**.

Saldo awal Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp9.987.632.008,00 merupakan hasil reklas dari saldo awal Utang PFK. Sehingga transaksi pelunasannya dicatat juga pada akun Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.

Per 31 Desember 2022, Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS bertambah sebesar Rp442.949.742,00 yang merupakan sisa kewajiban Iuran Wajib Pemda sebesar 4% ke BPJS Tahun 2022. Saldo utang ini berdasarkan surat dari BPJS Nomor 435/V-13/0423 tanggal 10 April 2023 tentang Konfirmasi Piutang BPJS Kesehatan. Rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Nilai Kekurangan iuran 4% (Rp)
1	Januari	1.305.268.511,00
2	Februari	1.269.854.856,00
3	Maret	997.542.432,00
4	April	593.338.192,00
5	Mei	(1.977.686.659,00)
6	Juni	839.042.380,00
7	Juli	683.045.759,00
8	Agustus	(1.521.891.816,00)
9	September	560.817.291,00
10	Oktober	836.368.696,00
11	November	823.219.552,00
12	Desember	(3.965.969.452,00)
	Total	442.949.742,00

5.1.7.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.622.385.662,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.374.106.812,00 (2.567,32%) dari Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp248.278.850,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dan selisih kenaikannya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2021 dari BTT	0,00	248.278.850,00	(248.278.850,00)
2.	Penyesuaian Utang Kelebihan transfer dari Pendapatan Bankeu Prov tahun 2015 sd 2021 yang tidak terserap (Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota)	6.582.680.462,00	0,00	6.582.680.462,00
3.	Penyesuaian Penambahan utang bantuan Provinsi yang tidak diserap pada tahun 2022 dan tidak ditinggalkan kembali di 2023 (Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.876-BPKAD/2022 tentang Penetapan Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Daerah Kabupaten/Kota)	39.705.200,00	0,00	39.705.200,00
	Total	6.622.385.662,00	248.278.850,00	6.374.106.812,00

Utang Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp248.278.850,00 telah dibayar pada tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan SP2D Nomor 02.15/04.0/00551/LS.BTT/BKAD/III/2022.

5.1.8 Ekuitas

Saldo ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80 mengalami kenaikan sebesar Rp175.899.377.305,18 (5,05%) dari Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.482.042.924.068,62. Ekuitas ini merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022. Penjelasan lengkap ekuitas bisa dilihat dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.17.

5.1.9 Pendapatan-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan – LO	2.827.488.554.984,44	2.821.241.193.886,06	6.247.361.098,38	0,22

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp2.827.488.554.984,44, lebih besar dari Pendapatan-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.821.241.193.886,06. Rincian Pendapatan-LO sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	524.153.936.374,47	474.186.402.875,14	49.967.533.499,33	10,54
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.140.305.228.852,00	2.010.013.824.214,00	130.291.404.638,00	6,48
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	163.029.389.757,97	337.040.966.796,92	(174.011.577.038,95)	(51,63)
Jumlah		2.827.488.554.984,44	2.821.241.193.886,06	6.247.361.098,38	0,22

5.1.9.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah – LO	524.153.936.374,47	474.186.402.875,14	49.967.533.499,33	10,54

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp524.153.936.374,47, lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp474.186.402.875,14. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	231.684.635.720,96	208.553.837.666,36	23.130.798.054,60	11,09
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.709.886.272,79	6.764.924.971,49	1.944.961.301,30	28,75
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	4.884.459.679,00	4.413.051.306,00	471.408.373,00	10,68
4.	Lain-lain PAD Yang Sah –LO	278.874.954.701,72	254.454.588.931,29	24.420.365.770,43	9,60
Jumlah		524.153.936.374,47	474.186.402.875,14	49.967.533.499,33	10,54

5.1.9.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah-LO	231.684.635.720,96	208.553.837.666,36	23.130.798.054,60	11,09

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp231.684.635.720,96, terdapat selisih sebesar Rp10.304.737.881,96 dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang belum Diterima Kasnya (Rp)	Pendapatan-LO dari Piutang (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	6=2+3+4+5-6
Pendapatan Pajak Daerah – LO	221.379.897.839,00	0,00	10.541.958.240,00	10.543.004,00	247.763.362,04	231.684.635.720,96

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak-LRA sebesar Rp221.379.897.839,00, merupakan penerimaan pajak yang telah diterima oleh Kas Daerah;
2. Pendapatan Pajak-LO yang belum diterima Kasnya sebesar Rp10.541.958.240,00, merupakan penambahan Piutang Pajak Daerah;
3. Pendapatan-LO dari Piutang sebesar Rp10.543.004,00, merupakan koreksi pencatatan sebagai pengurang Piutang Pendapatan Pajak Daerah;
4. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp247.763.362,04, merupakan penambahan pendapatan diterima dimuka.

Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO per jenis pajak Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Pajak Daerah- LO

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel – LO	4.031.464.312,00
2.	Pajak Restoran – LO	20.219.215.048,00
3.	Pajak Hiburan – LO	2.723.708.482,00
4.	Pajak Reklame – LO	2.321.544.162,96
5.	Pajak Penerangan Jalan – LO	81.202.524.177,00
6.	Pajak Parkir – LO	1.231.723.000,00
7.	Pajak Air Tanah – LO	9.501.365.739,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet – LO	2.250.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.825.692.079,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	72.493.952.188,00

11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	36.131.196.533,00
Jumlah		231.684.635.720,96

5.1.9.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	8.709.886.272,79	6.764.924.971,49	1.944.961.301,30	28,75

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp8.709.886.272,79, terdapat selisih sebesar Rp566.206.508,21 dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang belum Diterima Kasnya (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	9.276.092.781,00	349.392.494,51	350.369.453,00	1.265.968.455,72	0,00	8.709.886.272,79

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi -LRA sebesar Rp9.276.092.781,00, merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah;
2. Pendapatan Retribusi-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp349.392.494,51, merupakan pengurangan pendapatan diterima dimuka;
3. Pendapatan Pajak-LO yang belum diterima Kasnya sebesar Rp350.369.453,00, merupakan penambahan Piutang Retribusi Daerah;
4. Pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp1.265.968.455,72, merupakan penambahan pendapatan diterima dimuka.

Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per jenis retribusi Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah- LO

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.258.873.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.730.468.928,57
3.	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	466.403.150,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LO	340.746.000,00
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	12.846.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	66.628.500,00
7.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	587.548.080,00
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	330.836.966,00
9.	Retribusi Terminal – LO	44.936.600,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	29.009.000,00
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	51.935.400,00
12.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan –LO	3.325.162.768,00
13.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	96.714.100,00
14.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	367.777.780,22
Jumlah		8.709.886.272,79

5.1.9.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.884.459.679,00	4.413.051.306,00	471.408.373,00	10,68

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.884.459.679,00, terdapat selisih sebesar Rp7.759.037.552,00 dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang belum Diterima Kasnya (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	12.643.497.231,00	0,00	0,00	0,00	7.759.037.552,00	4.884.459.679,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp12.643.497.231,00, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah; dan
2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp7.759.037.552,00, merupakan pengurang Investasi Daerah (Setoran Laba) dari PD BPR Bank Sumedang sebesar Rp7.682.328.919,00 serta dari PT LKM Sumedang sebesar Rp76.708.633,00.

Adapun rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022, sebagai berikut:

**Rincian Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO**

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
a.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	4.880.970.568,00
	Laba hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dari Bank BJB	4.880.970.568,00
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dari PT LKM Sumedang	0,00
	Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dari PD BPR Bank Sumedang	0,00
b.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	3.489.111,00
	Bonus Produksi dari <i>Geothermal Energy</i>	3.489.111,00
	Jumlah	4.884.459.679,00

5.1.9.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	278.874.954.701,72	254.454.588.931,29	24.420.365.770,43	9,60

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp278.874.954.701,72, terdapat selisih sebesar Rp3.187.630.397,88 dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang belum Diterima Kasnya (Rp)	Belum diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4-5-6
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	275.687.324.303,84	0,00	3.329.819.084,00	0,00	142.188.686,12	278.874.954.701,72

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA sebesar Rp275.687.324.303,84, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah;
2. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang belum diterima Kasnya sebesar Rp3.329.819.084,00, merupakan penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan termasuk dari RSUD Kabupaten Sumedang dan Puskesmas; serta
3. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO sebesar Rp142.188.686,12, yaitu berupa selisih kurang Piutang Lain-lain

PAD yang Sah pada BKAD sebesar Rp133.072.134,12, dan pengurangan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berupa koreksi pencatatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp9.116.552,00.

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Rincian Lain - lain PAD yang Sah- LO

No	Uraian	31 Desember 2022
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	538.078.382,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	44.700.000,00
3.	Jasa Giro-LO	5.106.541.433,13
4.	Pendapatan Bunga-LO	2.492.589.446,59
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.500.000,00
6.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	268.281.758,00
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.767.794.655,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.001.823.841,00
9.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	6.793.400,00
10.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	206.272.520,00
11.	Pendapatan dari BLUD-LO	264.427.728.466,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	11.850.800,00
Jumlah		278.874.954.701,72

5.1.9.2 Pendapatan Transfer-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer-LO	2.140.305.228.852,00	2.010.013.824.214,00	130.291.404.638,00	6,48

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp2.140.305.228.852,00, lebih besar dari Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.010.013.824.214,00. Rincian Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.776.380.425.711,00	1.619.635.326.253,00	156.745.099.458,00	9,68
a.	Bagi Hasil Pajak	75.404.834.981,00	83.261.998.839,00	(7.857.163.858,00)	(9,44)
b.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	39.288.902.605,00	47.920.201.931,00	(8.631.299.326,00)	(18,01)
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.052.231.192.000,00	1.058.905.256.000,00	(6.674.064.000,00)	(0,63)
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	609.455.496.125,00	429.547.869.483,00	179.907.626.642,00	41,88
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (Dana Penyesuaian)	37.001.635.000,00	45.061.971.000,00	(8.060.336.000,00)	(17,89)
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	326.923.168.141,00	345.316.526.961,00	(18.393.358.820,00)	(5,33)
a.	Bagi Hasil Pajak	164.694.040.219,00	142.392.018.287,00	22.302.021.932,00	15,66
b.	Bantuan Keuangan	162.229.127.922,00	202.924.508.674,00	(40.695.380.752,00)	(20,05)
Jumlah		2.140.305.228.852,00	2.010.013.824.214,00	130.291.404.638,00	6,48

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp2.140.305.228.852,00, terdapat selisih sebesar Rp225.267.991.708,00 dengan Pendapatan Transfer-LRA, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan-LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA (Rp)	Pendapatan -LO yang belum Diterima Kasnya (Rp)	Pendapatan LO dari Pengurangan Piutang (Rp)	Pendapatan-LRA yang tidak Diakui sebagai Pendapatan-LO (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5-6
Pendapatan Transfer-LO	2.365.573.220.560,00	11.247.520.973,00	0,00	944.744.319,00	237.460.257.000,00	2.140.305.228.852,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp2.365.573.220.560,00, merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah;
2. Pendapatan LO yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA sebesar Rp11.247.520.973,00, merupakan Dana Bagi Hasil yang tersimpan pada rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) di Bank Indonesia yang dicatat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Pendapatan di LO. Hal ini berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor S-773/WPB.13/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Saldo pada Rekening TDF-TKD Tahun 2022;
3. Pendapatan Transfer-LO dari Pengurangan Piutang sebesar Rp944.744.319,00, merupakan penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak pada Bapenda; dan
4. Pendapatan Transfer-LRA yang tidak diakui sebagai Pendapatan-LO, berupa penyesuaian penambahan utang bantuan provinsi yang tidak diserap pada tahun 2022 dan tidak dianggarkan kembali di 2023 sebesar Rp39.705.200,00, serta dari pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp237.420.551.800,00. Berdasar pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua bahwa ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang.

5.1.9.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	163.029.389.757,97	337.040.966.796,92	(174.011.577.038,95)	(51,63)

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp163.029.389.757,97, lebih kecil dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp337.040.966.796,92. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2022 merupakan Pendapatan Hibah.

Pendapatan Hibah yang masuk ke Kas Daerah sebesar Rp3.411.071.029,00 dan selisihnya sebesar Rp159.618.318.728,97 berasal dari Pendapatan Hibah yang tidak melalui Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan Hibah	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		15.686.595.479,80
	a) Hibah dari Kementerian Investasi (Peralatan Komputer dan Jaringan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.813.500,00
	b) Hibah dari Menteri Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.618.317.296,00
	c) Hibah Obat Tahun 2022	Dinas Kesehatan	13.051.464.683,80
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO		2.337.639.800,00
	a) Hibah Persediaan Obat dari Pemerintah Provinsi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.924.390.400,00
	b) Hibah Peralatan dan Mesin (Alat Panen dari Dinas TPH Provinsi Jawa Barat)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	413.249.400,00
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO		141.594.083.449,17
	a) Hibah Tanah (Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.000.000,00
	b) Hibah Tanah (Tanah Untuk Jalan, Tanah Untuk Bangunan Air, Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Tanah Lapangan Parkir, Tanah Lapangan Olahraga)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	86.843.845.306,26
	c) Hibah Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga, Bangunan Fasilitas Umum, Pagar, dan Bangunan Gedung Tempat Olahraga)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	234.291.012,01
	d) Hibah Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Jalan Khusus, Bangunan Pembuang Pengaman Sungai, Instalasi Air Kotor Lainnya, Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai, Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22.106.857.573,12
	e) Hibah Tanah untuk Taman dan Bangunan Instalasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.884.675.557,78
	f) Hibah Peralatan dan Mesin (Kendaraan Bermotor Angkutan Barang)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.008.694.000,00
	g) Hibah Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung Instalasi)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	412.720.000,00
	h) Hibah Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung Tempat Ibadah)	Kecamatan Sumedang Selatan	70.000.000,00
	Jumlah		159.618.318.728,97

5.1.10 Beban

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban – LO	2.654.950.723.565,68	2.694.752.969.359,52	(39.802.245.793,84)	(1,48)

Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp2.654.950.723.565,68, lebih kecil dari Beban Tahun 2021 sebesar Rp2.694.752.969.359,52. Rincian Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Operasi	2.502.516.222.422,68		(40.224.784.305,84)	(1,58)
2.	Beban Transfer	152.434.501.143,00	152.011.962.631,00	422.538.512,00	0,28
Jumlah		2.654.950.723.565,68	2.694.752.969.359,52	(39.802.245.793,84)	(1,48)

5.1.10.1 Beban Operasi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Operasi	2.502.516.222.422,68	2.542.741.006.728,52	(40.224.784.305,84)	(1,58)

Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 realisasinya sebesar Rp2.502.516.222.422,68, lebih kecil dari Beban Operasi Tahun 2021 sebesar Rp2.542.741.006.728,52. Rincian Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai berikut:

5.1.10.1.1 Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.158.485.389.412,00	1.190.501.950.590,00	(32.016.561.178,00)	(2,69)

Beban Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp1.158.485.389.412,00, terdapat selisih sebesar Rp11.139.129.963,00 dengan Belanja Pegawai TA 2022, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Beban yang belum Dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=2+3-4-5
Beban Pegawai	1.169.624.519.375,00	0,00	0,00	11.139.129.963,00	1.158.485.389.412,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp1.169.624.519.375,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah;
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp11.139.129.963,00, merupakan selisih pembayaran Utang BPJS TPG Guru sebesar Rp9.987.632.008, penyesuaian Utang Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp442.949.742, dan biaya umum yang menambah aset tetap di Neraca sebesar Rp1.594.447.697,00.

5.1.10.1.2 Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Persediaan	237.531.836.718,28	399.567.855.580,37	(162.036.018.862,09)	(40,55)

Beban Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp237.531.836.718,28, terdapat selisih sebesar Rp11.284.116.544,67 (Rp11.579.345.404,67-Rp295.228.860,00) dengan Belanja Persediaan TA 2022, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp)	Beban diluar Belanja-LRA (Rp)	Beban yang belum dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5-6-7
Beban Persediaan	226.247.720.173,61	0,00	11.579.345.404,67	0,00	0,00	295.228.860,00	237.531.836.718,28

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp226.247.720.173,61, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah;
1. Beban diluar Belanja-LRA sebesar Rp11.579.345.404,67, berasal dari:
 - 1) Selisih lebih/selisih penambahan persediaan di neraca sebesar Rp12.374.646.391,98, terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah Selisih
1.	Beban Bahan-Bahan Baku	(19.661.624,00)
2.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	(52.259.750,00)
3.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	56.015.347,00
4.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	38.861.677,50
5.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.118.983,90
6.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	(44.010.340,50)
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.340.553,50
8.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	(140.000,00)
9.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	238.651.000,00
10.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	12.889.250,00
11.	Beban Obat-Obatan-Obat	27.436.551.575,99
12.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(13.680.420.163,00)

13.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	(489.548.595,46)
14.	Beban Natura dan Pakan-Pakan	(20.929.000,00)
15.	Beban Barang dan Jasa BLUD	(1.135.812.522,95)
Jumlah		12.374.646.391,98

- 2) Selisih kurang Utang Persediaan BLUD di neraca sebesar Rp795.300.987,31; dan
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp295.228.860,00, merupakan reklas beban/kapitalisasi dan atribusi yang menambah aset tetap di Neraca.

Adapun rincian Beban Persediaan per objek beban dapat dilihat pada **Lampiran Beban-Beban Persediaan LO**.

5.1.10.1.3 Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Jasa	498.857.377.442,70	398.627.051.093,06	100.230.326.349,64	25,14

Beban Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp498.857.377.442,70, terdapat selisih sebesar Rp3.471.288.674,69 (Rp5.382.611.882,31-Rp8.853.900.557,00) dengan Belanja Jasa TA 2022, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp)	Beban diluar Belanja-LRA (Rp)	Beban yang belum Dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5-6-7
Beban Jasa	502.328.666.117,39	0,00	5.382.611.882,31	0,00	0,00	8.853.900.557,00	498.857.377.442,70

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa-LRA sebesar Rp502.328.666.117,39, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah;
2. Beban diluar Belanja-LRA sebesar Rp5.382.611.882,31, merupakan penambah nilai beban yang berasal dari penambahan beban dibayar dimuka, penambahan utang di neraca, dan dari hibah/donasi yang mengurangi aset tetap di Neraca;
3. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp8.853.900.557,00, merupakan biaya umum/kapitalisasi yang menambah aset tetap di Neraca.

Adapun rincian Beban Jasa per objek beban dapat dilihat pada **Lampiran Beban-Beban Jasa LO**.

5.1.10.1.4 Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pemeliharaan	10.960.145.636,50	9.624.718.441,00	1.335.427.195,50	13,87

Beban Pemeliharaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp10.960.145.636,50, terdapat selisih sebesar Rp6.090.053.532,50 dengan Belanja Pemeliharaan TA 2022, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp)	Beban diluar Belanja- LRA (Rp)	Beban yang belum Dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5-6-7
Beban Pemeliharaan	17.050.199.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.053.532,50	10.960.145.636,50

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa-LRA sebesar Rp17.050.199.169,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah;
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp6.090.053.532,50, merupakan kapitalisasi yang menambah aset tetap di Neraca.

Adapun rincian Beban Pemeliharaan per Objek Beban Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.222.909.815,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.438.235.821,50
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299.000.000,00
Jumlah		10.960.145.636,50

5.1.10.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas	57.608.701.050,00	41.722.821.664,00	15.885.879.386,00	38,07

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp57.608.701.050,00, rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.900.441.200,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.400.238.850,00
3.	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	1.308.021.000,00
Jumlah		57.608.701.050,00

5.1.10.1.6 Beban Bunga

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bunga	0,00	500.587.500,00	(500.587.500,00)	(100,00)

Beban Bunga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp0,00, dibandingkan dengan TA 2021 mengalami penurunan, hal ini karena pada TA 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak menganggarkan penerimaan pinjaman. Beban bunga pada tahun lalu merupakan pembayaran bunga dari pinjaman jangka pendek BLUD RSUD ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk operasional BLUD RSUD.

5.1.10.1.7 Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Subsidi	95.782.500,00	0,00	95.782.500,00	

Beban Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp95.782.500,00, merupakan Belanja Alokasi Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Tahun Anggaran 2022.

5.1.10.1.8 Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah	80.139.680.216,00	69.879.810.767,00	10.259.869.449,00	14,68

Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp80.139.680.216,00 merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp80.139.680.216,00 berasal dari beban yang dikeluarkan oleh Kas Daerah sebesar Rp78.047.993.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		2.172.087.790,00
a.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00
b.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.375.298.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	696.789.790,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		74.948.659.226,00
a.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan	50.000.000,00
		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	13.250.000.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	150.000.000,00
		Sekretariat Daerah	200.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	249.675.662,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	150.000.000,00
b.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pendidikan	30.820.311.507,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	852.886.420,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	838.519.264,00
c.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Dinkes	650.000.000,00
		Dinas Pendidikan	300.000.000,00
		Sekretariat Daerah	9.650.355.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400.000.000,00
d.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.109.163.573,00
e.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	600.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00
f.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.332.366.000,00
		Kecamatan Sumedang Selatan	139.570.500,00
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.784.000.000,00
		Dinas Perikanan dan Peternakan	2.021.811.300,00
3.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		927.246.000,00
	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	927.246.000,00
	Jumlah		78.047.993.016,00

Sedangkan penambah Beban Hibah sebesar Rp2.091.687.200,00, merupakan pengakuan Beban Hibah di LO yang berasal dari pengurangan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Hibah	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		2.091.687.200,00
a.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
	Pengurang Aset dari Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan Kapitalisasi Aset dari BOP PAUD dan BOP Kesetaraan	Dinas Pendidikan	2.085.092.600,00
b.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
	Pengurang Aset dari Pakaian Dinas Lapangan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	6.594.600,00
	Jumlah		2.091.687.200,00

5.1.10.1.9 Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial	6.712.957.200,00	4.590.320.500,00	2.122.636.700,00	46,24

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp6.712.957.200,00 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terdiri dari beban bantuan sosial kepada masyarakat yaitu kepada individu masyarakat atau keluarga dan kepada lembaga non pemerintahan. Rincian Beban Bantuan Sosial yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang/Barang kepada Individu		3.880.809.200,00
a.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		
	Bantuan untuk pembayaran belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, untuk perbaikan Rumah Tidak Layak	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	770.000.000,00
	Huni (PIK) RTLH PIK Kecamatan Tanjungmedar, Tanjungsari, Sumedang Utara, Sukasari, Ujungjaya, dan Wado	Dinas Sosial	2.958.300.000,00
b.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		
	Penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Dinas Sosial	152.509.200,00
2.	Beban Bantuan Sosial Uang/Barang kepada Kelompok Masyarakat		594.808.000,00
a.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		
	Kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Dinas Sosial	495.000.000,00

No.	Uraian	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
b.	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat		
	Bantuan sosial bagi kelompok usaha PEKKA peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99.808.000,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		2.237.340.000,00
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (APBD) RTLH LPM Desa Kamal, Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar, Desa Mulyamekar dan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	735.000.000,00
	Penyediaan permakanan	Dinas Sosial	1.502.340.000,00
	Jumlah		6.712.957.200,00

5.1.10.1.10 Beban Penyusutan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan	430.731.297.876,10	409.850.818.104,62	20.880.479.771,48	5,09

Beban Penyusutan ini merupakan beban penyusutan aset tetap selain tanah yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp429.152.173.823,00 dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.579.124.053,10 yang terdapat diseluruh SKPD. Beban Penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp20.880.479.771,48 atau 5,09% dari tahun 2021. Beban penyusutan ini menambah nilai total beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Penyusutan LO.**

5.1.10.1.11. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang	6.089.773.386,43	7.643.319.673,93	(1.553.546.287,50)	(20,33)

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp6.089.773.386,43 terdiri dari:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp5.175.717.095,77 pada Bapenda;
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp166.779.526,07, yaitu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp1.165.099,95, BKAD sebesar Rp163.981.215,90, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.633.210,22;

3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp565.534.919,75, yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp84.295.019,75, dan BKAD sebesar Rp481.239.900,00;
4. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp58.278.212,46 pada Bapenda;
5. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp122.625.302,38 pada BKAD; dan
6. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp838.330,00 pada BKAD.

Rekapitulasi realisasi bebannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
a.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	5.908.031.541,59
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.175.717.095,77
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	166.779.526,07
	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	565.534.919,75
b.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	58.278.212,46
c.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	123.463.632,38
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	122.625.302,38
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	838.330,00
	Jumlah	6.089.773.386,43

5.1.10.1.12 Beban Lain-lain

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Lain-lain	15.303.280.984,67	10.231.752.814,54	5.071.528.170,13	49,57

Beban Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp15.303.280.984,67. Beban Lain-lain Tahun 2022, yaitu berasal dari:

1. Pembayaran tagihan ke BPJS Kesehatan sesuai BA hasil verifikasi paska klaim pembayaran kelebihan/kekurangan biaya pelayanan kesehatan dan obat sebesar Rp191.653.067,00; serta
2. Aset Tetap dibawah nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel) sebesar Rp15.111.627.917,67.

5.1.10.2 Beban Transfer

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Transfer	152.434.501.143,00	152.011.962.631,00	422.538.512,00	0,28

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 realisasinya sebesar Rp152.434.501.143,00, lebih besar dari Beban Transfer Tahun 2021 sebesar Rp152.011.962.631,00. Rincian Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Bagi Hasil	29.486.323.500,00
a.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	27.321.453.500,00
b.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.164.870.000,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	122.948.177.643,00
a.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00
b.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	122.698.177.643,00
	Jumlah	152.434.501.143,00

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp152.434.501.143,00, terdapat selisih sebesar Rp237.420.551.800,00 dengan Belanja Transfer TA 2022, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp)	Beban diluar Belanj a-LRA (Rp)	Beban yang belum Dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5-6-7
Beban Transfer	389.855.052.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.420.551.800,00	152.434.501.143,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Transfer-LRA sebesar Rp389.855.052.943,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah;
2. Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai beban sebesar Rp237.420.551.800,00, merupakan pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp237.420.551.800,00. Berdasarkan pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua bahwa ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.

5.1.11 Surplus/Defisit Dari Operasi

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/ Defisit Dari Operasi	172.537.831.418,76	126.488.224.526,54	46.049.606.892,22	36,41

Surplus/Defisit Dari Operasi sebesar Rp172.537.831.418,76 merupakan selisih dari Jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.827.488.554.984,44 dan Jumlah Beban-LO sebesar Rp2.654.950.723.565,68.

5.1.12 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	11.240.459.996,74	13.021.632.913,94	(1.781.172.917,20)	(13,68)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.240.459.996,74 merupakan selisih dari Surplus Non Operasional sebesar Rp13.765.758.429,31 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp2.525.298.432,57.

5.1.12.1 Surplus Non Operasional

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus Non Operasional	13.765.758.429,31	20.337.172.880,19	(6.571.414.450,88)	(32,31)

Surplus Non Operasional ini mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Surplus Non Operasional sebesar Rp13.765.758.429,31 berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terdapat di BKAD sebesar Rp13.709.753.938,44, dan di Bapenda sebesar Rp56.004.490,87. Surplus Non Operasional terbentuk dari:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)
1.	BKAD	13.709.753.938,44
	▪ Penyesuaian Investasi Permanen dari laba Perumda BPR Sumedang	13.343.517.280,94
	▪ Penyesuaian Investasi Non Permanen PAKEPUK	109.813.278,00
	▪ Penyesuaian Penyisihan Piutang Lainnya dari Piutang TGR	11.938.458,50
	▪ Penyesuaian Investasi Permanen Laba PDAM	243.178.421,00
	▪ Penyesuaian Penyisihan Piutang TASPEN	844.500,00
	▪ Penyesuaian Investasi Non Permanen KUSUMA	462.000,00
2.	Bapenda	56.004.490,87
	▪ Penyesuaian Penyisihan Dana Bagi Hasil	56.004.490,87
	Jumlah	13.765.758.429,31

5.1.12.2 Defisit Non Operasional

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Defisit Non Operasional	2.525.298.432,57	7.315.539.966,25	(4.790.241.533,68)	(65,48)

Defisit Non Operasional sebesar Rp2.525.298.432,57 mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Defisit Non Operasional terbentuk dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp9.700.000,00, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp2.515.598.432,57.

5.1.12.2.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2022 sebesar Rp9.700.000,00, berupa Defisit Penjualan Aset Lainnya berasal dari penghapusan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/ Usang dari TGR yang telah lunas pada Kecamatan Ujungjaya sesuai Surat Keterangan Nomor : KU.17.04.02/147/I/2023.

5.1.12.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp2.515.598.432,57, yaitu pada:

- a. Dinkes sebesar Rp293.997.699,94 berupa bahan obat-obatan kadaluarsa termasuk di dalamnya dari RSUD dan Puskesmas;
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp43.823.780,00 berupa persediaan karcis kadaluarsa; dan
- c. BKAD sebesar Rp2.177.776.952,63, yaitu:
 1. Penyesuaian Investasi Permanen PT LKM Sumedang (rugi) sebesar Rp818.305.027,80;
 2. Penyesuaian Investasi Permanen PT Kampung Makmur (rugi) sebesar Rp255.300.589,07;
 3. Penambahan bagian rugi Pemda atas perubahan kepemilikan pada PT LKM sebesar Rp247.673.655,08; dan
 4. Penambahan bagian rugi Pemda atas perubahan kepemilikan pada PT Kampung Makmur sebesar Rp856.497.680,68.

5.1.13 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	183.778.291.415,50	139.509.857.440,48	44.268.433.975,02	31,73

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp183.778.291.415,50 merupakan Jumlah dari Surplus/Defisit Dari Operasi sebesar Rp172.537.831.418,76 dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.240.459.996,74.

5.1.14 Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Luar Biasa	9.120.525.832,00	19.133.702.695,00	(10.013.176.863,00)	(52,33)

Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp9.120.525.832,00 berbeda dengan realisasi Belanja Tidak Terduga di LRA selisih sebesar Rp6.334.401.612,00, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Belanja-LRA (Rp)	Reklas Beban dari Aset Tetap (Rp)	Beban diluar Belanja-LRA (Rp)	Beban yang belum Dibayar (Rp)	Belum diakui sebagai Beban (Rp)	Belanja-LRA yang tidak Diakui sebagai Beban (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5-6-7
Beban Luar Biasa	2.786.124.220,00	0,00	6.334.401.612,00	0,00	0,00	0,00	9.120.525.832,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga-LRA sebesar Rp2.786.124.220,00, merupakan pengeluaran belanja yang telah dikeluarkan oleh Kas Daerah;
2. Beban diluar Belanja-LRA sebesar Rp6.334.401.612,00, merupakan penambah beban dari pengakuan Utang Bantuan Keuangan utang kelebihan transfer dari Pendapatan Bankeu Provinsi Tahun 2015 sampai dengan 2021 yang tidak terserap sebesar Rp6.582.680.462,00, serta dari pengurangan Utang Bantuan Keuangan (pembayaran Utang Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2021) sebesar Rp248.278.850,00.

Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp9.120.525.832,00 berupa:

1. Penambahan beban pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp248.278.850,00, yang kemudian dikurangi Kembali melalui jurnal penyesuaian pengurangan utang bantuan keuangan tahun anggaran 2021;
2. Penambahan beban pembayaran dana operasional bidang penegakan hukum dan pendisiplinan dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) wilayah Jawa dan Bali untuk pengendalian penyebaran Covid-19 serta penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan AKB di Kabupaten Sumedang sebesar Rp205.950.000,00;

3. Penambahan beban pengembalian sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011 sebesar Rp1.118.595.370,00;
4. Penambahan beban pembayaran pencairan atas pelaksanaan eksekusi gugatan dari Suryadi Wijaya, Dkk perkara Nomor 775 K/Pdt/2017 Jo. Nomor 330/PDT/2016/PT.BDG Jo. Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd sebesar Rp1.100.000.000,00;
5. Penambahan beban penanganan darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sebesar Rp124.445.000.000,00;
6. Pengurangan beban pengembalian BTT Bulan Desember 2022 BPBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp11.145.000,00; dan
7. Penambahan beban penyesuaian penambahan utang kelebihan transfer dari pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2015 sampai dengan 2021 yang tidak terserap sebesar Rp6.582.680.462,00..

5.1.15 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/Defisit Laporan Operasional	174.657.765.583,50	120.376.154.745,48	54.281.610.838,02	45,09

Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar Rp174.657.765.583,50 berasal dari Surplus dari Operasi sebesar Rp172.537.831.418,76 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.240.459.996,74 dikurangi Pos Luar Biasa sebesar Rp9.120.525.832,00. Surplus/Defisit Laporan Operasional tersebut akan menambah Ekuitas per 31 Desember 2022.

5.1.16 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

5.1.16.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.1.16.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Operasi dalam Tahun 2022 sebesar Rp2.887.971.103.743,84 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	221.379.897.839,00	198.326.131.839,00	23.053.766.000,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	9.276.092.781,00	6.731.513.966,00	2.544.578.815,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.643.497.231,00	11.164.520.965,00	1.478.976.266,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	275.687.324.303,84	254.059.653.166,29	21.627.671.137,55
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	67.220.420.048,00	83.261.998.839,00	(16.041.578.791,00)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	36.225.796.565,00	47.920.201.931,00	(11.694.405.366,00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.052.231.192.000,00	1.058.905.256.000,00	(6.674.064.000,00)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	609.455.496.125,00	429.547.869.483,00	179.907.626.642,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	37.001.635.000,00	45.061.971.000,00	(8.060.336.000,00)
10	Penerimaan Dana Desa	237.420.551.800,00	227.319.620.000,00	10.100.931.800,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	164.239.295.900,00	138.496.690.338,00	25.742.605.562,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	161.778.833.122,00	203.172.787.524,00	(41.393.954.402,00)
13	Penerimaan Hibah	3.411.071.029,00	131.896.910.224,00	(128.485.839.195,00)
	Jumlah	2.887.971.103.743,84	2.835.865.125.275,29	52.105.978.468,55

5.1.16.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun 2022 sebesar Rp2.450.357.715.764,00 dipergunakan untuk:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.169.624.519.375,00	1.182.261.056.674,00	(12.636.537.299,00)
2	Pembayaran Barang Jasa	803.235.286.510,00	709.093.186.272,00	94.142.100.238,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	500.587.500,00	(500.587.500,00)
4	Pembayaran Subsidi	95.782.500,00	0,00	95.782.500,00
5	Pembayaran Hibah	78.047.993.016,00	59.369.641.613,00	18.678.351.403,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	6.712.957.200,00	4.590.320.500,00	2.122.636.700,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
7	Pembayaran Tak Terduga	2.786.124.220,00	23.812.747.069,00	(21.026.622.849,00)
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	27.321.453.500,00	21.817.918.102,00	5.503.535.398,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.164.870.000,00	1.623.351.820,00	541.518.180,00
10	Pembayaran Bantuan Keuangan	360.368.729.443,00	355.890.312.709,00	4.478.416.734,00
	Jumlah	2.450.357.715.764,00	2.358.959.122.259,00	91.398.593.505,00

5.1.16.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.1.16.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Investasi dalam Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.1.16.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun 2022 sebesar Rp507.908.867.776,00 dipergunakan untuk:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.937.500,00	0,00	15.000.937.500,00
2	Perolehan Tanah	27.007.255.100,00	734.126.000,00	26.273.129.100,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	189.446.017.112,00	114.178.507.498,00	75.267.509.614,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	129.969.430.312,00	137.937.639.826,00	(7.968.209.514,00)
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	116.084.739.946,00	87.697.349.012,00	28.387.390.934,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	17.526.966.056,00	12.623.660.244,00	4.903.305.812,00
7	Perolehan Aset Lainnya	543.850.955,00	0,00	543.850.955,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.329.670.795,00	8.870.000.000,00	3.459.670.795,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	507.908.867.776,00	362.041.282.580,00	145.867.585.196,00

5.1.16.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.1.16.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	0,00	7.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	7.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)

5.1.16.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	7.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)
	Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	7.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)

5.1.16.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.1.16.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun 2022 sebesar Rp202.377.397.679,00 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	202.376.656.578,00	154.223.190.645,20	48.153.465.932,80
2	Penambahan Kas Lainnya (Bunga Giro 2018)	0,00	23.017,00	(23.017,00)
3	Penambahan Kas BOS Tahun Lalu	261.101,00	151.617,00	109.484,00
4	Penambahan Kas di BLUD	480.000,00	0,00	480.000,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	202.377.397.679,00	154.223.365.279,20	48.154.032.399,80

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi Penerimaan PFK sebesar Rp202.376.656.578,00 yang terdiri dari penerimaan potongan Pajak Penghasilan, PPN, Asuransi Tenaga Kerja, Iuran Wajib Pegawai, BPJS Pegawai, Taperum dan Iuran Jaminan Kesehatan oleh BUD. Penambahan Kas BOS Tahun Lalu sebesar Rp261.101,00 merupakan Koreksi tambah Saldo Awal berdasarkan nilai di Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dinas Pendidikan. Penambahan kas di BLUD sebesar Rp480.000,00 merupakan saldo kas tunai pada BPP RSUD.

5.1.16.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun 2022 sebesar Rp202.565.032.145,00 berasal dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pengeluaran PFK	202.373.379.078,00	154.224.952.008,20	48.148.427.069,80
2	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan (PEN)	-	155.830.968,00	(155.830.968,00)
3	Pengurangan Kas BOS tahun lalu	-	153.024.880,00	(153.024.880,00)
4	Pengurangan Kas BLUD Puskesmas tahun lalu	-	8.706,00	(8.706,00)
5	Pengurangan Kas BLUD RSUD pengembalian kelebihan pendapatan BPJS Tahun 2021	191.653.067,00	0,00	191.653.067,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	202.565.032.145,00	154.533.816.562,20	48.031.215.582,80

5.1.16.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebesar (Rp70.483.114.262,16) berasal dari:

5.1.16.5.1 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Uraian		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
5.1.16.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	437.613.387.979,84	476.906.003.016,29	(39.292.615.036,45)
5.1.16.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(507.908.867.776,00)	(362.041.282.580,00)	(145.867.585.196,00)
5.1.16.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
5.1.16.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(187.634.466,00)	(310.451.283,00)	122.816.817,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(70.483.114.262,16)	114.554.269.153,29	(185.037.383.415,45)

Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2022 sebesar (Rp70.483.114.262,16) mengalami penurunan sebesar (Rp185.037.383.415,45) dari Kenaikan Kas Tahun 2021 sebesar Rp114.554.269.153,29. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh meningkatnya arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk pembayaran barang jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan. Kemudian menurunnya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi yang diperuntukkan untuk pembentukan dana cadangan dan perolehan aset tetap.

5.1.16.5.2 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 1 Januari 2022 sebesar Rp232.029.252.155,90 sama dengan nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2021. Rincian Saldo Awal Kas yaitu:

No	Uraian	1 Januari 2022 (Rp)
1	Kas di BUD	184.041.578.435,90
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	29.372.750,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
4	Kas di BLUD	24.388.750.164,00
5	Saldo Akhir Kas BOS	543.112.841,00
6	Kas Lainnya	26.437.965,00
7	Setara Kas	23.000.000.000,00
	Saldo Awal Kas	232.029.252.155,90

5.1.16.5.3 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.546.137.893,74 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Kas di BUD	146.307.325.290,74	184.041.578.435,90	(37.734.253.145,16)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	105.248.357,00	29.372.750,00	75.875.607,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	46.800,00	0,00	46.800,00
4	Kas di BLUD	14.798.385.042,00	24.388.750.164,00	(9.590.365.122,00)
5	Kas Dana BOS	305.784.351,00	543.112.841,00	(237.328.490,00)
6	Kas Lainnya	29.348.053,00	26.437.965,00	2.910.088,00
7	Setara Kas	0,00	23.000.000.000,00	(23.000.000.000,00)
	Saldo Akhir Kas	161.546.137.893,74	232.029.252.155,90	(70.483.114.262,16)

Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.546.137.893,74 sama jumlahnya dengan Kas di Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.546.137.893,74. Rincian Saldo Akhir Kas bisa dilihat pada tabel Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas.

5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan rincian Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80 berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Ekuitas Awal	3.482.042.924.068,62	3.312.509.966.625,96
2	Surplus / Defisit – LO	174.657.765.583,50	120.376.154.745,48
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	1.241.611.721,68	49.156.802.697,18
	1) Koreksi Nilai Kas	741.101,00	(308.689.920,00)
	2) Koreksi Nilai Persediaan	165.175.121,44	70.120.420,00
	3) Koreksi Piutang	(491.663.082,00)	(20.848.233,33)
	4) Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	113.428.450,00
	5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap	3.657.150.000,00	81.809.000,00
	6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.183.905.470,07	81.942.763.287,00
	7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain	0,00	(32.857.869.160,49)
	8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.194.204.889,42	0,00
	9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	102.405.017,50	134.850.000,00
	10) Koreksi Atas Utang	133.591.368,00	1.238.854,00
	11) Koreksi Ekuitas Lainnya	(8.703.898.163,75)	0,00

	12)	Lain-lain:	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir		3.657.942.301.373,80	3.482.042.924.068,62

1. Ekuitas Awal berasal dari Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp3.482.042.924.068,62;
2. Surplus/Defisit–LO sebesar Rp174.657.765.583,50 berasal dari Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp172.537.831.418,76 ditambah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp11.240.459.996,74 ditambah Pos Luar Biasa sebesar (Rp9.120.525.832,00);
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp1.241.611.721,68 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi Nilai Kas sebesar 741.101,00 merupakan Koreksi Saldo Awal KAS BOS SD TA. 2022 disesuaikan dengan Saldo Awal di ARKAS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp261.101,00 dan Koreksi penambahan kas BLUD yaitu kas tunai di BPP sebesar Rp480.000,00 pada RSUD;
 - 2) Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp165.175.121,44 merupakan koreksi Persediaan Awal Obat pada Puskesmas sebesar Rp81.960.176,44, Koreksi Penambahan Persediaan berdasarkan Temuan BPK TA 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp78.250.025,00 dan Koreksi Penambahan Persediaan berdasarkan Temuan BPK TA 2022 pada Unit Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp4.964.920,00;
 - 3) Koreksi Piutang sebesar (Rp491.663.082,00) merupakan koreksi pengurangan Piutang Pajak Air Tanah Universitas Padjadjaran pada BAPENDA sebesar (Rp16.240.974,00), Koreksi pengurangan Pencatatan Piutang Tahun Lalu pada RSUD sebesar (Rp9.116.552,00); Koreksi penambahan piutang pajak PBB P2 tahun 2020 sebesar Rp1.832.464,00 pada BAPENDA dan Koreksi pengurangan Piutang Pendapatan BLUD berupa penghapusan bersyarat sebesar (Rp468.138.020,00) pada RSUD;
 - 4) Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00;
 - 5) Koreksi Pencatatan Aset Tetap sebesar Rp3.657.150.000,00 merupakan koreksi atas penambahan Aset Tetap (Kurang Catat) Tanah pada Puskesmas Tanjungsari sebesar Rp3.657.150.000,00;
 - 6) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp5.183.905.470,07 yaitu koreksi atas nilai akumulasi penyusutan tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan akumulasi penyusutan akhir tahun yaitu sebesar Rp5.183.905.470,07, koreksi akumulasi penyusutan dari Hibah Aset Toyota Avanza Tahun 2012 Nopol Z 1011 B ke Yayasan Kemala Bhayangkari pada BKAD sebesar Rp160.198.047,00 dan koreksi penambahan akumulasi penyusutan sebesar (Rp160.198.047,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 7) Koreksi Pencatatan Aset Lain-lain nihil;

- 8) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp1.194.204.889,42 merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan tahun lalu pada tahun berjalan dengan menyesuaikan pada hasil perhitungan akumulasi penyusutan akhir tahun sebesar Rp1.195.925.654,91, penghapusan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp9.700.000,00, Koreksi penambahan saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp21.506.772,54) pada Sekretariat Daerah dan Koreksi pengurangan saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp10.086.001,00; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp5,05 serta BKAD sebesar Rp1,00;
- 9) Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp102.405.017,50 merupakan koreksi lebih catat saldo awal akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Sosial sebesar Rp88.971.258,75 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp13.433.758,75;
- 10) Koreksi Atas Utang sebesar Rp133.591.368,00 yaitu koreksi saldo awal utang pada Neraca RSUD Kabupaten Sumedang sebesar Rp199.417.128,00 dan koreksi penambahan utang BLUD Puskesmas Margayaja Tahun 2021 sebesar (Rp65.825.760,00);
- 11) Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp8.703.898.163,75) merupakan penambahan ekuitas sebesar Rp5.697.970,00 pada BAPENDA, Koreksi pengurangan saldo awal investasi permanen sebesar (Rp8.831.288.345,94) pada PDAM, koreksi penambahan saldo awal investasi permanen sebesar Rp43.988.666,02 pada PT LKM dan koreksi penambahan sebesar Rp77.703.546,17 pada PT Kampung Makmur.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.657.942.301.373,80 merupakan nilai hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp3.482.042.924.068,62 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp174.657.765.583,50 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp1.241.611.721,68.

5.2 Subsequent Event

Subsequent Event merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca namun sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun.

5.2.1 Piutang Transfer Antar Daerah

Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 yang disalurkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp490.000.000,00 sempat mengalami kesalahan transfer oleh pihak Bank BJB ke RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

disebabkan oleh kesalahan nomor rekening yang tercantum. Sehingga per 31 Desember 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mencatat Bantuan Keuangan tersebut sebagai Piutang Transfer Antar Daerah dikarenakan hingga akhir Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat tindak lanjut atas kesalahan transfer tersebut.

Pada tanggal 16 Januari 2023, pihak bank BJB mengirimkan surat permohonan izin koreksi penyaluran SP2D RKUD yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor. Atas tindak lanjut surat tersebut, dana Bantuan Keuangan sebesar Rp490.000.000,00 telah disetorkan dan diterima oleh RKUD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Nomor STS 01573/NK/PENDAPATAN/BKAD/II/2023. Sehingga Piutang Transfer Antar Daerah atas Bantuan Keuangan tersebut tidak dihitung penyisihan piutangnya.

5.2.2 Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.000.937.500,00 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024.

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebesar Rp40.000.000.000,00 yang dipenuhi selama dua tahun anggaran dimana setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :

- a. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00;
- b. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00; dan
- c. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Sumber pemenuhan Dana Cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Berdasarkan Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumdang Nomor B/4862/KU.01/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pindahbukuan Dana, alokasi dana cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang masih terdapat di dalam RKUD dipindahbukukan ke Rekening Dana Cadangan Pemilukada Serentak. Hal ini berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Per 31 Desember 2022, terdapat penambahan bunga deposito sebesar Rp937.500,00 yang menambah nilai Dana Cadangan sehingga Dana Cadangan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.000.937.500,00. Kemudian pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan bunga deposito sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp95.749.860,00 yang menambah nilai Dana

Cadangan pada Tahun Anggaran 2023. Sehingga total penambahan bunga deposito Dana Cadangan sampai dengan 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp96.687.360,00.

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 Kecamatan dengan 272 desa dan 7 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, batas-batas wilayah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang

Gambar 6.1
Peta Administratif Berdasarkan Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Sumedang



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi lima kelas, yaitu:

1. 0–8 %, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
2. 8–15 %, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 %. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
3. 15–25 %, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 %. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
4. 25–40 %, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
5. Lebih dari kemiringan 40 %, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 %. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Tabel 6.1
Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Wado	84,27	10
2	Jatinunggal	72,12	9
3	Darmaraja	49,38	12
4	Cibugel	59,52	7
5	Cisitu	65,03	10
6	Situraja	43,23	14
7	Conggeang	106,98	12
8	Paseh	31,62	10
9	Surian	70,88	9
10	Buahdua	107,68	14
11	Tanjungsari	44,86	12
12	Sukasari	41,82	7
13	Pamulihan	50,70	11
14	Cimanggung	55,55	11
15	Jatinangor	31,60	12
16	Rancakalong	55,07	10
17	Sumedang Selatan	92,51	10/4
18	Sumedang Utara	30,40	10/3
19	Ganeas	22,90	8
20	Tanjungkerta	43,72	12
21	Tanjungmedar	60,67	9
22	Cimalaka	43,29	14
23	Cisarua	17,71	7
24	Tomo	84,74	10
25	Ujungjaya	86,23	9
26	Jatigede	106,24	11

Sumber : Badan Pusat Statistik (Kabupaten Sumedang Dalam Angka, 2022)

Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah 24,7°C, dengan curah hujan rata-rata 2.570 mm, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember-

Januari. Kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang.

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung, dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai- sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Kecamatan Jatinangor.

Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tataguna lahan, morfologi, dan kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Kecamatan Surian, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Tanjungkerta, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Rancakalong. Sedangkan di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar, berada di Kecamatan Tomo, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Jatinunggal. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2
Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah Sumedang	Luas kurang lebih 21.612 Ha
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.	-
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.	-
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan;	-

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
		i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitu; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal; t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.	

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada Semester II Tahun 2022 adalah sebanyak 1.187.620 yang terdiri dari 598.352 jiwa penduduk laki-laki dan 589.268 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 6.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tingkat Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
		n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)
1	Wado	22.942	22.041	44.983
2	Jatinunggal	23.466	23.020	46.486
3	Darmaraja	18.944	18.653	37.597
4	Cibugel	12.844	12.330	25.174
5	Cisitu	15.664	15.426	31.090
6	Situraja	21.732	21.403	43.135
7	Conggeang	14.578	14.831	29.409
8	Paseh	19.386	19.345	38.731
9	Surian	6.014	5.995	12.009
10	Buahdua	16.579	16.898	33.477
11	Tanjungsari	43.791	43.140	86.931
12	Sukasari	17.465	16.916	34.381
13	Pamulihan	32.341	31.841	64.182
14	Cimanggung	46.077	44.474	90.551
15	Jatinangor	47.045	45.693	92.738
16	Rancakalong	21.089	20.835	41.924
17	Sumedang Selatan	41.322	40.801	82.123
18	Sumedang Utara	51.023	50.246	101.269
19	Ganeas	13.332	13.020	26.352
20	Tanjungkerta	17.874	17.411	35.285
21	Tanjungmedar	13.434	13.522	26.956
22	Cimalaka	31.983	31.414	63.397
23	Cisarua	10.755	10.594	21.349
24	Tomo	11.711	11.912	23.623

NO	NAMA KECAMATAN	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
		n (jiwa)	n (jiwa)	n (jiwa)
25	Ujung Jaya	15.752	16.028	31.780
26	Jatigede	11.209	11.479	22.688
	TOTAL KAB/KOTA	598.352	589.268	1.187.620

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Sumedang Utara merupakan kecamatan di Kabupaten Sumedang yang memiliki populasi penduduk terbanyak yaitu 101.269 jiwa dan Kecamatan Surian merupakan kecamatan yang memiliki populasi paling sedikit sebanyak 12.009 jiwa.

6.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022

NO	SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan
18	Dinas Perikanan dan Peternakan
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21	Sekretariat Daerah

NO	SKPD
22	Sekretariat DPRD
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah
25	Badan Pendapatan Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Inspektorat
28	Kecamatan Wado
29	Kecamatan Jatinunggal
30	Kecamatan Darmaraja
31	Kecamatan Cibugel
32	Kecamatan Cisitu
33	Kecamatan Situraja
34	Kecamatan Conggeang
35	Kecamatan Paseh
36	Kecamatan Surian
37	Kecamatan Buahdua
38	Kecamatan Tanjungsari
39	Kecamatan Sukasari
40	Kecamatan Pamulihan
41	Kecamatan Cimanggung
42	Kecamatan Jatinangor
43	Kecamatan Rancakalong
44	Kecamatan Sumedang Selatan
45	Kecamatan Sumedang Utara
46	Kecamatan Ganeas
47	Kecamatan Tanjungkerta
48	Kecamatan Tanjungmedar
49	Kecamatan Cimalaka
50	Kecamatan Cisarua
51	Kecamatan Tomo
52	Kecamatan Ujungjaya
53	Kecamatan Jatigede
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selain perangkat daerah, terdapat Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yaitu :

1. Kelurahan Cipameungpeuk
2. Kelurahan Kota Kaler
3. Kelurahan Kota Kulon
4. Kelurahan Pasanggrahan Baru
5. Kelurahan Regol Wetan
6. Kelurahan Situ

7. Kelurahan Talun

6.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran (PDRB Menurut Lapangan Usaha) maupun sisi permintaan (PDRB Menurut Pengeluaran). Pertumbuhan keduanya merupakan instrument yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu pemerintah daerah. PDRB Menurut Lapangan Usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB Menurut Pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Nilai PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha pada tahun 2021 mencapai Rp37.250.246,10 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp1,76 Trilyun rupiah dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai Rp35.489.082,60 atau meningkat sebesar 4,96%. Kenaikan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,14%.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Sumedang didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan besar dan eceran serta Kategori Konstruksi.

Tabel 6.5
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,33	19,72	19,05	19,81	18,67
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09
C	Industri Pengolahan	18,36	19,04	19,99	20,02	20,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,40	0,39	0,38	0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	10,19	10,43	10,41	9,98	11,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,90	15,67	15,62	14,57	14,99
H	Transportasi dan Pergudangan	5,29	5,17	5,02	4,80	4,51

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,49	4,56	4,60	4,52	4,40
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,12	3,13	3,88	3,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	4,52	4,56	4,44	4,52
L	Real Estat	1,60	1,60	1,61	1,53	1,59
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,13	5,95	5,89	5,87
P	Jasa Pendidikan	6,30	6,51	6,54	7,03	6,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,13	1,14	1,19	1,27
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,79	1,81	1,82	1,77	1,70
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari Rp23.665.006,6 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi Rp24.414.663,3 pada tahun 2021. Hal ini berarti selama tahun 2021 Sumedang mengalami pertumbuhan ekonomi positif yaitu sebesar 3,17%. Meski mengalami kontraksi sebesar 1,12% akibat adanya wabah *Covid-19* pada tahun 2020, ekonomi Sumedang kembali pulih pada tahun 2021 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,17% . Pertumbuhan yang positif hampir terjadi di semua kategori kecuali kategori pertanian dan kategori angkutan.

Tabel 6.6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sumedang Menurut Lapangan Usaha (persen) 2017-2021

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,79	1,15	2,17	2,82	-0,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0,17	2,37	-0,80	1,41	8,16
C	Industri Pengolahan	5,29	10,64	13,72	-1,44	2,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,92	2,30	4,63	-3,01	8,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,56	3,20	-1,57	7,42
F	Konstruksi	7,83	8,41	2,65	-4,20	12,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,94	4,21	5,23	-7,78	4,59
H	Transportasi dan Pergudangan	5,64	4,83	4,81	-6,57	-4,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,04	7,29	6,02	-4,50	1,59
J	Informasi dan Komunikasi	10,12	10,39	9,32	22,90	4,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,82	4,29	6,64	-1,78	3,77
L	Real Estat	9,73	9,19	8,10	-5,21	7,55
M,N	Jasa Perusahaan	8,52	8,64	7,92	-6,73	4,48
O	Administasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,88	1,29	3,36	-2,24	0,51
P	Jasa Pendidikan	8,19	5,38	6,19	3,24	0,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	7,33	6,97	3,23	9,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,54	5,89	5,83	-3,65	0,86
Produk Domestik Regional Bruto		6,23	5,79	6,33	-1,12	3,17

*Angka Sementara

**Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, kategori Konstruksi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 12,66% dan 9,88% disusul dengan kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,47% dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,16%. Tingginya pertumbuhan di kategori

Konstruksi terutama disebabkan oleh adanya pembangunan jalan Tol Cisumdawu serta pembangunan jalan di beberapa wilayah diantaranya pembangunan jalan di lingkaran Waduk Jatigede. Sedangkan pertumbuhan di kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial disebabkan oleh meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan akibat adanya wabah *Covid-19*.

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 sebesar 4,96% atas dasar harga berlaku menurut Pengeluaran terjadi pada semua komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, dan PMTB.

Tabel 6.7
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen)
Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019*	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	70,85	69,76	68,76	68,68	67,62
2. Konsumsi LNPRT	1,37	1,52	1,51	1,47	1,45
3. Konsumsi Pemerintah	9,35	9,23	8,84	8,95	8,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,66	25,08	24,55	22,80	24,10
5. Perubahan Inventori	3,72	3,62	3,42	1,83	-0,98
6. Net Ekspor	-9,95	-9,24	-7,08	-3,73	-1,05
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan distribusi tersebut, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2017 sampai 2021, sebagian besar PDRB Kabupaten Sumedang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sedangkan pada komponen Net Ekspor, terjadi peningkatan nilai yang ditandai dengan berkurangnya nilai negatif. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Sumedang yang selama ini didominasi oleh komponen impor daripada ekspor ke luar daerah menunjukkan kecenderungan meningkatnya nilai ekspor komoditi ke luar daerah baik barang maupun jasa.

Tabel 6.8
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen)
Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019*	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,36	4,00	3,82	-1,92	1,65
2. Konsumsi LNPRT	4,25	16,55	4,71	-4,38	1,85
3. Konsumsi Pemerintah	-9,19	4,57	3,30	-0,21	1,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,20	7,91	3,74	-7,47	8,75
PDRB	6,23	5,79	6,33	-1,12	3,17

**angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai 2021. Meski mengalami penurunan yang signifikan

pada tahun 2020 akibat adanya wabah *Covid-19* yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali meski masih relatif lebih kecil yaitu sebesar 3,17%.

6.4 Kewajiban Kontinjensi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki kewajiban kontinjensi atas perkara sebagai berikut

Tabel 6.9
Kewajiban Kontinjensi per 31 Desember 2022

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan	Keterangan
1	Pembongkaran bangunan kios yang belum berakhir atau belum habis masa berlakunya atau yang masih berlaku haknya	- Suryadi Wijaya (<i>Penggugat I</i>) - Yuyun Sugandi (<i>Penggugat II</i>)	- Pemerintah Kabupaten Sumedang (<i>Tergugat I</i>) - PT. Bangun Jaya Allia (<i>Tergugat II</i>)	Putusan I : Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd tanggal 26 April 2016 memutuskan bahwa : - Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pembongkaran terhadap Bangunan Kios yang belum habis masa jangka waktunya adalah perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Peggugat. - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul. Putusan II : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 330/PDT/2016/PT.BDG tanggal 5 September 2016 memutuskan bahwa: - Pembongkaran kios yang belum berakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Peggugat. - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 26 April 2016 Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd - Membebaskan biaya perkara kepada Para Peggugat. Putusan III : Putusan Mahkamah Agung Nomor 775 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2017 memutuskan bahwa: - Pembongkaran objek sengketa milik Para Peggugat oleh Tergugat berupa kios yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan milik Para Peggugat yang belum berakhir masa berlakunya merupakan perbuatan melawan hukum	Belum diproses lebih lanjut karena belum jelas persentase tanggung renteng masing-masing Tergugat.

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Putusan	Keterangan
				yang mewajibkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Para Tergugat) ditolak. - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul.	

6.5 Penjelasan Non Keuangan Lainnya

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 974/KEP.173-DIPENDA/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Orang Pribadi/Badan diketahui terdapat 239 bidang tanah seluas 46.188,79 m² yang disewakan dan ditetapkan tarif sewanya. Berdasarkan hasil analisa KIB (Kartu Inventaris Barang) aset tanah, diketahui bahwa tanah tersebut belum dicatat sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang karena belum diketahui besaran nilai perolehannya. Tetapi sejak lama tanah tersebut telah disewakan dan dikenakan tarif sewanya. Pada saat dilakukan penelusuran kembali atas beberapa blok tanah yang disewakan dalam hal ini sebagai *sampel* penelusuran atas empat blok tanah yang sudah dikenakan tarif sewanya yaitu Blok Samoja, Gelora A. Yani, Jl. Cut Nyak Dhien dan Blok Cijeruk didapatkan suatu hasil penelusuran sebagai berikut:

1. Blok Samoja

Di blok Samoja ini, tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan tanah yang berlokasi di pinggir jalan provinsi. Sehingga kesimpulan sementara ada kemungkinan tanah tersebut merupakan sisa hasil pembebasan lahan pada saat provinsi ingin membuat jalan.

2. Blok Gelora A. Yani

Di blok ini, merupakan tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berlokasi di dalam kompleks Gelora A. Yani. Gelora tersebut masih dipakai oleh masyarakat untuk olahraga sepakbola. Berdasarkan informasi dari Bidang Aset dan Bagian Pengelola Barang Daerah (PBD) Sekretariat Daerah diketahui bahwa atas tanah gelora tersebut tidak diakui oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dikarenakan harga perolehannya tidak diketahui sehingga tidak bisa dicatat dalam KIB tanah.

3. Blok Jl. Cut Nyak Dhien

Di blok ini, merupakan tanah yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Sumedang. Sejak merdeka tanah tersebut dihadiahkan kepada pegawai pemerintahan yang dianggap sudah mengabdikan ke pemerintah daerah.

4. Blok Cijeruk

Blok ini merupakan tanah yang dipakai oleh masyarakat korban longsor yang pernah terjadi di Sumedang.

Sejak adanya Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Orang Pribadi/Badan, pelaksanaan penetapan besaran tarif sewa dan penagihan ke pihak penyewa dilakukan oleh Bapenda dan berlangsung sampai Tahun Anggaran 2019. Tetapi sejak Tahun Anggaran 2020, Bapenda sudah tidak melakukan penagihan lagi dan penagihan dilimpahkan ke Sekretariat Daerah tepatnya ke Bagian Pengelolaan Barang Daerah (PBD). Bagian PBD Sekretariat Daerah tidak melakukan penagihan uang sewa atas aset tanah tersebut dikarenakan tidak ada berkas sewa tanah yang diserahkan oleh pihak Bapenda ke PBD Sekretariat Daerah. Bagian PBD hanya menerima data rekapan SKRD yang telah diterbitkan oleh Bapenda. Atas permasalahan tersebut, potensi penerimaan retribusi daerah atas sewa tanah menjadi berkurang karena tidak ada penerimaan ke Kas Daerah. Terkait pengakuan aset tetap tanah dan penetapan besaran tarif sewa atas tanah tersebut menjadi bahan penelusuran lebih lanjut baik oleh Bapenda maupun Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian PBD agar diperoleh kejelasan atas kepemilikan tanah tersebut dan tidak lagi kehilangan potensi pendapatan daerah atas retribusi sewa tanah.

Masih terkait pencatatan aset tetap tanah dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum serta berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/KEP.226-PUPR/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 186 ruas jalan kabupaten dengan panjang 774.368 Km. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui bahwa ada enam ruas tanah bawah jalan yang belum tercatat sebagai aset tetap di Neraca. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penilaian terhadap tanah tersebut sebagai dasar penentuan nilai perolehan. Dimana jalan tersebut merupakan perubahan status dari jalan nasional menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas, jalan provinsi menjadi jalan kabupaten sebanyak dua ruas dan peningkatan status dua ruas jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten. Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap ke enam ruas tanah bawah jalan tersebut sehingga diperoleh nilai perolehannya untuk dasar pencatatan dalam aset tetap di Neraca.

Per 31 Desember 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 2031 bidang tanah seluas 580.590 m² dengan total nilai Rp578.459.304.611,77. Dari total tersebut, 311 bidang tanah telah memiliki sertifikat dengan luas 293.092 m² senilai Rp11.861.676.692,00 sedangkan

1720 bidang tanah belum bersertifikat. Pada Tahun Anggaran 2023, sekitar 150 bidang tanah rencananya akan dibuatkan sertifikat dengan anggaran Rp838.897.000,00.



BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.

LAMPIRAN

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.230.270.000,00	1.258.873.000,00	28.603.000,00	1.041.425.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.087.963.000,00	2.173.390.000,00	(2.914.573.000,00)	1.307.110.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	614.265.600,00	466.403.150,00	(147.862.450,00)	455.392.150,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000,00	340.746.000,00	(359.254.000,00)	379.302.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	12.846.000,00	2.846.000,00	10.000.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.111.500,00	66.628.500,00	11.517.000,00	66.491.700,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.076.874.750,00	1.128.341.340,00	51.466.590,00	1.389.643.290,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.646.776,00	330.836.966,00	(269.809.810,00)	266.167.093,00
9	Retribusi Terminal	35.000.000,00	44.936.600,00	9.936.600,00	30.639.800,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	28.548.500,00	29.009.000,00	460.500,00	27.221.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	51.935.400,00	51.935.400,00	0,00	42.000.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.914.128.000,00	2.998.520.725,00	(2.915.607.275,00)	952.705.833,00
13	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	86.400.000,00	96.714.100,00	10.314.100,00	23.160.100,00
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	638.400.000,00	276.912.000,00	(361.488.000,00)	740.256.000,00
Jumlah		16.129.543.526,00	9.276.092.781,00	(6.853.450.745,00)	6.731.513.966,00

Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	111.049.452.100,00	107.451.296.133,00	(3.598.155.967,00)	71.604.619.999,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	184.770.200,00	182.873.160,00	(1.897.040,00)	410.514.550,00
3	Belanja Jasa Kantor	173.149.317.950,00	165.625.205.737,00	(7.524.112.213,00)	142.009.551.898,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	64.471.265.133,00	56.599.944.588,00	(7.871.320.545,00)	49.069.902.193,00
5	Belanja Sewa Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	23.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.886.088.880,00	3.152.419.220,00	(733.669.660,00)	2.481.110.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.759.969.596,00	6.543.524.516,00	(216.445.080,00)	5.009.805.457,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	234.000.000,00	233.359.000,00	(641.000,00)	130.000.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.648.495.030,00	6.638.953.830,00	(5.009.541.200,00)	13.003.261.995,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.099.300.000,00	3.010.374.197,00	(88.925.803,00)	2.644.760.150,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.844.410.400,00	11.289.342.400,00	(555.068.000,00)	11.431.483.850,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	150.000.000,00	116.250.000,00	(33.750.000,00)	112.500.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	89.900.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.310.194.900,00	6.222.909.815,00	(87.285.085,00)	5.367.859.961,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.122.349.220,00	10.099.338.354,00	(23.010.866,00)	5.301.829.282,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.060.000.000,00	727.951.000,00	(5.332.049.000,00)	19.567.687.615,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.375.375.000,00	56.300.680.050,00	(4.074.694.950,00)	41.722.821.664,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.392.129.000,00	1.308.021.000,00	(84.108.000,00)	0,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.256.250.000,00	7.193.098.531,00	(63.151.469,00)	8.076.786.000,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.137.647.800,00	8.020.921.010,00	(116.726.790,00)	9.583.923.044,00
22	Belanja Barang dan	108.492.210.000,00	101.699.629.651,00	(6.792.580.349,00)	105.256.329.518,00

Lampiran Belanja Operasi-Barang Jasa LRA

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
	Jasa BOS				
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	257.819.236.421,00	250.799.194.318,00	(7.020.042.103,00)	216.111.539.096,00
Jumlah		852.462.461.630,00	803.235.286.510,00	(49.227.175.120,00)	709.093.186.272,00

Lampiran Belanja Modal-Peralatan dan Mesin LRA

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	40.000.000,00	39.787.000,00	(213.000,00)	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	157.086.020,00	156.330.600,00	(755.420,00)	38.157.600,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	16.227.058.000,00	16.034.928.200,00	(192.129.800,00)	2.161.539.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	220.000.000,00	219.307.000,00	(693.000,00)	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	48.000.000,00	44.099.550,00	(3.900.450,00)	29.996.750,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	500.000,00	500.000,00	0,00	695.429.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	15.517.200,00	15.476.455,00	(40.745,00)	27.001.750,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	2.566.992.060,00	2.517.095.774,00	(49.896.286,00)	3.787.518.675,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.066.187.531,00	19.861.646.076,00	(204.541.455,00)	11.920.404.398,00
11	Belanja Modal Alat Studio	18.240.319.090,00	18.158.425.507,00	(81.893.583,00)	11.752.697.000,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	697.457.720,00	680.880.532,00	(16.577.188,00)	443.625.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Pemancar	7.310.100,00	7.309.350,00	(750,00)	7.000.000,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	19.717.428.653,00	17.272.931.360,00	(2.444.497.293,00)	20.304.303.742,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.854.945.534,00	7.992.688.347,00	(862.257.187,00)	60.919.398,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	562.850.676,00
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	54.397.770.000,00	53.520.448.482,00	(877.321.518,00)	4.497.884.672,00
18	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Komputer Unit	12.298.784.560,00	11.551.871.003,00	(746.913.557,00)	9.625.042.147,00
20	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.592.283.252,00	10.317.887.608,00	(274.395.644,00)	3.172.446.878,00
21	Belanja Modal Sumur	75.000.000,00	74.800.000,00	(200.000,00)	2.075.365.700,00
22	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	182.006.000,00
23	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	8.622.700,00	8.622.700,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	836.301.000,00	824.834.000,00	(11.467.000,00)	319.110.000,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	162.599.000,00	158.853.000,00	(3.746.000,00)	17.590.409.950,00

Lampiran Belanja Modal-Peralatan dan Mesin LRA

No.	Uraian	TA. 2022			TA. 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.365.078.700,00	11.393.685.864,00	(6.971.392.836,00)	13.496.848.999,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.198.395.785,00	18.590.938.704,00	(3.607.457.081,00)	11.402.950.163,00
Jumlah		205.796.306.905,00	189.446.017.112,00	(16.350.289.793,00)	114.178.507.498,00

Rincian Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
I	Kas Dana Spesifik	84.549.322.878,00	76.461.211.402,00	8.088.111.476,00
	I.1 Dana Alokasi Khusus Fisik	32.345.754.244,00	5.520.543.767,00	26.825.210.477,00
	1 Dana Alokasi Khusus Reguler	25.030.987.929,00	3.397.747.212,00	21.633.240.717,00
	a Bidang Pendidikan	898.897.611,00	885.304.061,00	13.593.550,00
	b Bidang Kesehatan dan KB	426.803.639,00	399.236.139,00	27.567.500,00
	c Bidang Jalan	21.569.212.667,00	7.003.000,00	21.562.209.667,00
	d Bidang Perumahan dan Permukiman	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00
	e Bidang Air Minum	532.590.312,00	505.270.312,00	27.320.000,00
	f Bidang Sanitasi	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
	g Bidang Sarana Perdagangan/Pasar	460.186.000,00	460.186.000,00	0,00
	h Bidang Pertanian	93.064.800,00	93.064.800,00	0,00
	i Bidang Pariwisata	1.025.242.900,00	1.025.242.900,00	0,00
	2 Dana Alokasi Khusus Penugasan	7.314.766.315,00	2.122.796.555,00	5.191.969.760,00
	a Bidang Kesehatan dan KB	34.664.848,00	34.664.848,00	0,00
	b Bidang Irigasi	216.910.570,00	216.910.570,00	0,00
	c Bidang Irigasi-Tematik	75.552.660,00	0,00	75.552.660,00
	d Bidang Kelautan dan perikanan	5.755.000,00	5.755.000,00	0,00
	e Bidang Pertanian	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00
	f Bidang Pertanian - Tematik	27.326.500,00	0,00	27.326.500,00
	g Bidang Pasar	1.519.130.100,00	1.519.130.100,00	0,00
	h Bidang Lingkungan Hidup	1.079.001,00	1.079.001,00	0,00
	i Bidang Jalan - Tematik	5.089.090.600,00	0,00	5.089.090.600,00
	j Bidang Sanitasi	5.129.000,00	5.129.000,00	0,00
	k Bidang Air Minum	193.643.036,00	193.643.036,00	0,00
	l Bidang Air Minum (Penanggulangan Kemiskinan)	71.180.000,00	71.180.000,00	0,00
	m Bidang Air Minum (Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting)	49.310.000,00	49.310.000,00	0,00
	n Bidang Perumahan dan Permukiman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
	I.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	8.427.172.428,00	28.074.002.052,00	(19.646.829.624,00)
	1 BOP PAUD	0,00	1.290.000.000,00	(1.290.000.000,00)
	2 BOP Pendidikan kesetaraan	0,00	46.450.000,00	(46.450.000,00)
	3 BOK	4.063.281.770,00	5.460.808.133,00	(1.397.526.363,00)
	4 BOK TAMBAHAN	0,00	1.538.125.640,00	(1.538.125.640,00)
	5 BO KB	458.830.400,00	24.045.160,00	434.785.240,00
	6 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	14.100.000,00	28.900.000,00	(14.800.000,00)
	7 Tamsil	816.987.500,00	29.000.000,00	787.987.500,00
	8 TPG	1.014.122.163,00	17.425.558.154,00	(16.411.435.991,00)
	9 Admindak	365.955.400,00	365.955.400,00	0,00
	10 Akreditasi Puskesmas	417.302.225,00	417.302.225,00	0,00
	11 Jaminan Persalinan	1.204.901.530,00	1.204.901.530,00	0,00
	12 Tunjangan Khusus Guru	0,00	20.548.360,00	(20.548.360,00)

Lampiran Neraca – Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
	13 Dana Fasilitas Penanaman Modal	70.828.690,00	144.706.850,00	(73.878.160,00)
	14 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	862.750,00	77.700.600,00	(76.837.850,00)
	I.3 Sisa Tahun 2015	423.860.012,00	423.860.012,00	0,00
	1 Bidang Pendidikan SMA/SMK 2015	26.996.617,00	26.996.617,00	0,00
	2 Keluarga berencana 2015	53.879.089,00	53.879.089,00	0,00
	3 Transfortasi perdesaan 2015	24.962.306,00	24.962.306,00	0,00
	4 DAK Tambahan -Infrastruktur irigasi 2015	54.867.000,00	54.867.000,00	0,00
	5 DAK Tambahan - Perdagangan-Pasar 2015	263.155.000,00	263.155.000,00	0,00
	I.4 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.699.064.498,00	13.423.755.081,00	(6.724.690.583,00)
	I.5 Bantuan Keuangan Provinsi	25.855.276.055,00	25.555.744.704,00	299.531.351,00
	I.6 Dana Aset Desa yang dihapuskan atas dampak pembangunan Waduk Jatigede	5.454.000,00	0,00	5.454.000,00
	I.7 Dana Insentif Daerah	10.792.741.641,00	3.463.305.786,00	7.329.435.855,00
II	Kas Diluar Dana Spesifik	61.758.002.412,74	107.580.367.033,90	(45.822.364.621,16)
	Total (I + II)	146.307.325.290,74	184.041.578.435,90	(37.734.253.145,16)

**Rincian Kas Puskesmas dan Labkesda
(Dana Kapitasi JKN)**

No.	Nama Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Kas Puskesmas DTP Jatinangor	390.194.285,00	381.303.555,00	8.890.730,00
2	Kas Puskesmas Cimanggung	1.509.996.572,00	1.641.867.115,00	(131.870.543,00)
3	Kas Puskesmas DTP Tanjungsari	557.720.063,00	664.073.427,00	(106.353.364,00)
4	Kas Puskesmas Margajaya	118.771.362,00	89.574.723,00	29.196.639,00
5	Kas Puskesmas Sukasari	264.475.294,00	321.962.195,00	(57.486.901,00)
6	Kas Puskesmas Haurgombong	198.120.450,00	230.240.951,00	(32.120.501,00)
7	Kas Puskesmas Pamulihan	243.963.813,00	276.312.062,00	(32.348.249,00)
8	Kas Puskesmas Rancakalong	98.987.095,00	106.624.019,00	(7.636.924,00)
9	Kas Puskesmas Sumedang Selatan	340.690.353,00	350.967.240,00	(10.276.887,00)
10	Kas Puskesmas Sukagalih	106.639.672,00	124.057.607,00	(17.417.935,00)
11	Kas Puskesmas Kotakaler	165.233.441,00	194.906.603,00	(29.673.162,00)
12	Kas Puskesmas Situ	224.980.214,00	82.253.728,00	142.726.486,00
13	Kas Puskesmas Ganeas	261.157.584,00	187.616.650,00	73.540.934,00
14	Kas Puskesmas Situraja	150.781.237,00	414.727.424,00	(263.946.187,00)
15	Kas Puskesmas Cisitu	176.531.015,00	79.172.934,00	97.358.081,00
16	Kas Puskesmas DTP Darmaraja	150.755.148,00	163.863.995,00	(13.108.847,00)
17	Kas Puskesmas Cibugel	153.821.438,00	147.659.347,00	6.162.091,00
18	Kas Puskesmas Wado	621.613.252,00	398.071.022,00	223.542.230,00
19	Kas Puskesmas Jatinunggal	689.242.955,00	1.236.621.032,00	(547.378.077,00)
20	Kas Puskesmas Jatigede	272.646.789,00	310.802.108,00	(38.155.319,00)
21	Kas Puskesmas DTP Tomo	65.051.711,00	95.762.158,00	(30.710.447,00)
22	Kas Puskesmas Ujungjaya	257.769.789,00	294.877.098,00	(37.107.309,00)
23	Kas Puskesmas DTP Conggeang	313.075.163,00	125.839.272,00	187.235.891,00
24	Kas Puskesmas Paseh	319.677.828,00	77.293.305,00	242.384.523,00
25	Kas Puskesmas Cimalaka	217.268.828,00	4.855.566,00	212.413.262,00
26	Kas Puskesmas Cisarua	184.035.713,00	115.587.633,00	68.448.080,00
27	Kas Puskesmas Tanjungkerta	30.641.692,00	21.362.236,00	9.279.456,00
28	Kas Puskesmas DTP Sukamantri	131.911.907,00	87.624.164,00	44.287.743,00
29	Kas Puskesmas Tanjungmedar	80.980.383,00	86.128.995,00	(5.148.612,00)
30	Kas Puskesmas Buahdua	115.483.111,00	169.312.220,00	(53.829.109,00)
31	Kas Puskesmas Hariang	28.865.063,00	15.564.752,00	13.300.311,00
32	Kas Puskesmas Surian	36.347.601,00	40.605.293,00	(4.257.692,00)
33	Kas Puskesmas Cisempur	82.635.012,00	137.632.785,00	(54.997.773,00)
34	Kas Puskesmas Sawahdadap	49.071.880,00	44.370.020,00	4.701.860,00
35	Kas Puskesmas Padasuka	118.154.597,00	34.974.140,00	83.180.457,00
36	Kas di LABKESDA	64.701.785,00	124.348.614,00	(59.646.829,00)
	Total	8.791.994.095,00	8.878.815.988,00	(86.821.893,00)

Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Rugi) (Rp)	TP/TGR Per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah:			
1	Motor Dinas Kawasaki KLX Z 4108 C Tahun 2014 Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Ujungjaya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang a.n SARJONO S. Hut. MM.	0,00	14.250.000,00	15.250.000,00
2	Mobil Dinas Toyota Type New Avanza 1,5 G M/T Tahun 2012 Nomor Polisi Z 1083 A, Pensiunan Kepala Bidang Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Sumedang a.n Drs. H. DADANG RUKMAWAN, M.Kes.	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00
3	Motor Dinas Kawasaki Type LX 150 F Tahun 2018 Nomor Polisi Z 6736 A Kasubag TU UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang a.n HETTY YULIAH, SP., MP	8.383.300,00	12.766.700,00	15.766.700,00
4	BKP4K Yamaha Vega R No. Z 3535 A a.n KOSWARA SOFYAN	0,00	2.200.000,00	0,00
5	Kasubag Risalah & Perundang-undangan Sekretariat DPRD Honda New Mega Pro No. Z 3297 A a.n WAWAN GUNAWAN, SmKk.	0,00	2.500.000,00	0,00
6	Ketua BPD Kec. Tanjungsari Yamaha Vega R No. Z 3552 A a.n Drs. JAJANG, S.Pd.	0,00	6.000.000,00	0,00
7	Penilik UPTD TK,SD dan PNF Kec. Ujungjaya Honda Supra Fit No. Z 2979 A a.n DADANG SIAGAN, S.Sos., M.Si.	0,00	1.019.700,00	0,00
8	Ketua BPD Ganeas Kec. Ganeas Yamaha Vega R No. Z 3470 A a.n. UU ABDURAUUF	0,00	5.250.000,00	0,00
9	BKBPP Kab. Sumedang Honda NF 1181 DM/T No. Z 3902 A a.n. RENIS HODIJAH	0,00	5.100.000,00	0,00
10	Kepala UPTB LH Wil. Jatinangor Kab. Sumedang Yamaha V-IXION No. Z 4863 A a.n. TJETJEP HERMAWAN S.	0,00	15.500.000,00	0,00
11	Mantan Kepala SDN Pamulihan Kec. Pamulihan Motor Dinas No. Z 3388 A a.n. AJANG HERYANA	0,00	6.000.000,00	0,00
12	Kepala Desa Haurgombang Kec. Pamulihan Yamaha Jupiter MX No. Z 2036 B a.n. CECEP SAEPUKIN, S.Ag	0,00	4.000.000,00	0,00
13	BPMPDKBPP Kab. Sumedang Mobil Suzuki Futura ST 150 No. Z 8242 A a.n. ANDRY SUTISNA SUDRAJAT, S.Pd	0,00	54.000.000,00	0,00
14	Ketua BPD Desa Sirnasari Kec. Jatinunggal Yamaha Vega R No. Z 3382 A a.n. ODANG RUNTIADI	0,00	2.807.500,00	0,00
15	Kepala Desa Cijati Kec. Situraja Yamaha Jupiter MX No. Z 2124 B a.n. RUHIAT	0,00	8.000.000,00	0,00
16	Mobil Dinas Toyota All New Avanza Z 1182 A a.n. H. SUTISNA, SKM.,M.Si.	0,00	27.000.000,00	0,00

Lampiran Neraca – Piutang TP/TGR

No.	Uraian	Piutang Bagian Lancar TGR Per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Rugi) (Rp)	TP/TGR Per 31 Desember 2020 (Audited) (Rp)
	Kabid. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan a.n. H. SUTISNA, SKM.,M.Si.			
17	Motor Dinas Honda CB 15ARRF Z Kabag. Umum pada Sekretariat Daerah a.n. SYARIF EFFENDI BADAR, S.Sos.,M.Si	0,00	8.710.000,00	0,00
18	Motor Dinas Kawasaki KLX Z 4067 A Kasi Manajemen Rekayasa LALIN pada Dinas Perhubungan a.n. DEDI SURYADI, S.Sos.	0,00	23.400.000,00	0,00
19	Motor Dinas Kawasaki LX Z 4895 C Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah a.n. AA SUJANA	0,00	12.026.000,00	0,00
20	Motor Dinas Yamaha Vega R Z 3285 A Ketua BPD Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar a.n. H. MAMAN IRYANTO	0,00	3.250.000,00	0,00
21	Motor Dinas Kawasaki LX Z 4949 A Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang a.n. Rd. ADI AHDIAT	0,00	4.826.000,00	0,00
22	Redistribusi Penebangan Kayu Genereh di Desa Genereh Kec. Buahdua	0,00	32.000.412,00	0,00
Jumlah		8.383.300,00	342.006.312,00	122.416.700,00

Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang

Rincian Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur

NO	JENIS PIUTANG 2022	UMUR PIUTANG								TOTAL	
		< 1 Tahun		> 1 s.d 2 Tahun		> 2 s.d 5 Tahun		> 5 Tahun		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang
		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (0,5%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (10%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (50%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (100%)		
1	Piutang Pajak	18.567.816.610,00	92.839.083,05	26.307.554.128,00	2.630.755.412,80	18.810.321.274,00	9.405.160.637,00	24.743.656.395,00	24.743.656.395,00	88.429.348.407,00	36.872.411.527,87
2	Piutang Retribusi	350.019.453,00	1.750.097,27	3.118.500,00	311.850,00	0,00	0,00	182.201.351,00	182.201.351,00	535.339.304,00	184.263.298,27
3	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	15.400.000,00	77.000,00	9.815.320,00	981.532,00	1.025.000.000,00	512.500.000,00	1.012.479.800,00	1.012.479.800,00	2.062.695.120,00	1.526.038.332,00
4	Piutang Transfer Antar Daerah (Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi)	11.655.642.492,00	58.278.212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655.642.492,00	58.278.212,46
5	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	8.383.300,00	838.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383.300,00	838.330,00
	JUMLAH	30.588.878.555,00	152.944.392,78	26.328.871.248,00	2.632.887.124,80	19.835.321.274,00	9.917.660.637,00	25.938.337.546,00	25.938.337.546,00	102.691.408.623,00	38.641.829.700,60

Rincian Piutang BLUD Berdasarkan Jenis dan Umur

NO	JENIS PIUTANG 2022	UMUR PIUTANG								TOTAL	
		< 1 Tahun		> 1 s.d 2 Tahun		> 2 s.d 3 Tahun		> 3 Tahun		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang
		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (0%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (25%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (50%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (100%)		
1	Piutang BLUD RSUD	4.606.650.749,00	0,00	1.038.029.263,00	259.507.315,75	460.696.442,00	230.348.221,00	2.731.069.908,00	2.731.069.908,00	8.836.446.362,00	3.220.925.444,75
2	Piutang BLUD Puskesmas	248.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.352.000,00	0,00
	JUMLAH	4.606.650.749,00	0,00	1.038.029.263,00	259.507.315,75	460.696.442,00	230.348.221,00	2.731.069.908,00	2.731.069.908,00	9.084.798.362,00	3.220.925.444,75

Rincian Piutang Yang Tidak Disisihkan

NO	JENIS PIUTANG 2022	UMUR PIUTANG								TOTAL	
		< 1 Tahun		> 1 s.d 2 Tahun		> 2 s.d 5 Tahun		> 5 Tahun		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang
		Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (0,5%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (10%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (50%)	Saldo Piutang	Penyisihan Piutang (100%)		
1	Piutang Retribusi Parkir Berlangganan	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-
2	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	2.727.865,88	-	-	-	-	-	-	-	2.727.865,88	-
3	Piutang Transfer Antar Daerah atas Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi	490.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	490.000.000,00	-
	JUMLAH	493.077.865,88	-	-	-	-	-	-	-	493.077.865,88	-

REKAPITULASI PERSEDIAAN SKPD TAHUN 2022

NO	SKPD	REKAPITULASI				
		SALDO AWAL	MUTASI		JUMLAH MUTASI	SALDO AKHIR
			MASUK	KELUAR		
1	2	23	24	25	26	27
1	DINAS KESEHATAN	28.631.508.651,09	153.947.116.267,61	152.011.037.837,35	1.936.078.430,26	30.567.587.081,35
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	167.673.567,50	242.028.497,00	359.530.240,50	(117.501.743,50)	50.171.824,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	31.209.872,00	2.842.965.373,00	2.853.993.173,00	(11.027.800,00)	20.182.072,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.056.802.884,00	1.883.045.056,00	2.182.817.240,00	(299.772.184,00)	757.030.700,00
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.302.712.200,00	2.693.248.050,00	2.470.069.250,00	223.178.800,00	1.525.891.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	80.198.046,00	2.534.314.383,00	2.553.248.289,00	(18.933.906,00)	61.264.140,00
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	46.250.000,00	1.818.386.540,00	1.843.178.440,00	(24.791.900,00)	21.458.100,00
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	237.924.060,00	265.600.275,00	280.560.160,00	(14.959.885,00)	222.964.175,00
9	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	112.702.012,00	1.532.795.121,00	1.549.157.858,00	(16.362.737,00)	96.339.275,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	21.380.150,00	6.292.625.950,00	5.665.433.514,54	627.192.435,46	648.572.585,46
11	SEKRETARIAT DAERAH	20.745.250,00	6.004.665.329,00	5.982.522.270,00	22.143.059,00	42.888.309,00
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11.426.060,00	1.635.250.212,00	1.637.654.857,00	(2.404.645,00)	9.021.415,00
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	63.765.360,00	2.120.152.332,00	1.980.515.922,90	139.636.409,10	203.401.769,10
	JUMLAH	31.784.298.112,59	183.812.193.385,61	181.369.719.052,29	2.442.474.333,32	34.226.772.445,91

LAPORAN MUTASI ASET TETAP DI NERACA DIBANDINGKAN MUTASI ASET SEHARUSNYA DI SKPD

No.	URAIAN	NERACA			Jumlah Mutasi Aset Tetap di SKPD 2022	Selisih Neraca & Mutasi SKPD 2022
		Tahun 2022	Tahun 2021 (Saldo Awal)	Mutasi		
	ASET TETAP					
1	TANAH	582.116.454.610,77	433.690.528.646,73	148.425.925.964,04	148.425.925.964,04	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.525.702.360.148,95	1.359.768.122.700,89	165.934.237.448,06	165.934.237.448,06	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.541.028.614.238,83	1.372.194.664.552,32	168.833.949.686,51	168.833.949.686,51	0,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	3.051.233.809.417,23	2.850.481.458.311,11	200.752.351.106,12	200.752.351.106,12	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	212.813.927.498,19	196.060.575.980,47	16.753.351.517,72	16.753.351.517,72	0,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	42.865.020.217,00	83.336.411.117,00	(40.471.390.900,00)	(40.471.390.900,00)	0,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.648.913.349.508,75)	(3.235.481.606.033,00)	(413.431.743.475,75)	(413.431.743.475,75)	(0,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.306.846.836.622,22	3.060.050.155.275,52	246.796.681.346,70	246.796.681.346,70	0,00
	ASET LAINNYA	16.234.243.871,75	3.795.589.724,56	12.438.654.147,19	12.438.654.147,19	(0,00)
8	TAGIHAN JANGKA PANJANG	342.006.312,00	254.472.912,00	87.533.400,00	87.533.400,00	0,00
9	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	69.173.543,00	69.173.543,00	0,00	0,00	0,00
10	ASET TIDAK BERWUJUD	46.127.823.312,26	44.753.675.421,89	1.374.147.890,37	1.374.147.890,37	(0,00)
11	ASET LAIN-LAIN	43.926.696.727,67	33.378.205.820,49	10.548.490.907,18	10.548.490.907,18	(0,00)
12	PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	(42.527.887.464,25)	(33.185.567.476,49)	(9.342.319.987,76)	(9.342.319.987,76)	0,00
13	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	(42.951.089.531,93)	(41.474.370.496,33)	(1.476.719.035,60)	(1.476.719.035,60)	(0,00)
14	DANA TRANSFER TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)	11.247.520.973,00	0,00	11.247.520.973,00	11.247.520.973,00	0,00
	JUMLAH	3.323.081.080.493,97	3.063.845.745.000,08	259.235.335.493,89	259.235.335.493,89	0,00

Rincian Hibah Tanah
Aset Tetap : Tanah

No	Uraian	Luas M ²	Alamat	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			86.843.845.306,26
1	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	35.053,40	Lahan Jalan Lingkungan Perumahan Panorama Alam Raya Jatinangor	20.201.274.420,00
2	Tanah Bangunan Air Kotor	32.676,93	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Panorama Alam raya Jatinangor	18.831.714.759,00
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	222,50	Lahan Gedung Serba Guna di Perumahan Panorama Alam raya Jatinangor	128.226.750,00
4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	36,00	Lahan Pos Jaga di Perumahan Panorama Alam raya Jatinangor	20.746.800,00
5	Tanah Lapangan Parkir Konstruksi Beton	1.408,30	Lahan Lapangan Parkir di Perumahan Panorama Alam raya Jatinangor	811.603.290,00
6	Tanah Bangunan Air Kotor	254,00	Lahan saluran drainase di Perumahan Grand Park Cimalaka	20.828.000,00
7	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	1.963,40	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Panorama Alam raya Jatinangor	160.998.800,00
8	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	6,00	Lahan Pos Jaga di Perumahan Gand Park	492.000,00
9	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	2.229,00	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Gand Park Padasuka	229.587.000,00
10	Tanah Bangunan Air Kotor	303,60	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Gand Park Padasuka	31.270.800,00
11	Tanah Bangunan Air Kotor	723,80	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Villa Istana Bendungan	46.323.200,00
12	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	1.700,00	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Villa Istana Bendungan	108.800.000,00
13	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	9,00	Lahan Pos Jaga di Perumahan Villa Istana	576.000,00
14	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	3.747,50	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Griya Husada Ibnu Sina	2.826.491.915,00
15	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	9,00	Lahan Pos Jaga di Perumahan Griya Husada	6.788.106,00
16	Tanah Bangunan Air Kotor	523,89	Lahan Drainase di Perumahan Griya Husada	395.135.650,26
17	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	2.413,00	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Golden Housing Islamic	3.074.162.000,00
18	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	5,00	Lahan Pos Jaga di Perumahan Golden Housing	6.370.000,00
19	Tanah Bangunan Air Kotor	483,00	Lahan Saluran drainase di Perumahan Golden Housing Islamic	615.342.000,00
20	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	1.585,60	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Griya	1.902.720.000,00
21	Tanah Bangunan Air Kotor	427,20	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Griya	512.640.000,00
22	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	8.141,80	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Bukit Cimanggung Permai	390.806.400,00
23	Tanah Bangunan Air Kotor	1.782,70	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Bukit Cimanggung Permai	85.569.600,00
24	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	20.694,14	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	24.832.968.000,00
25	Tanah Lapangan Tennis	360,00	Lahan Lapangan Tennis di Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	432.000.000,00
26	Tanah Bangunan Air Kotor	2.922,30	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	3.506.760.000,00
27	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	11.712,00	Lahan Jalan Lingkungan di Perumahan Griya Prima Alam Sari	4.469.299.200,00
28	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara	12,00	Lahan Pos Jaga di Perumahan Griya Prima	4.579.200,00
29	Tanah Bangunan Air Kotor	3.836,21	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Griya Prima Alam Sari	1.463.897.736,00
30	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	422,30	Lahan Bahu Jalan di Perumahan Griya Prima	161.149.680,00
31	Tanah Bangunan Air Kotor	2.142,00	Lahan Saluran Drainase di Perumahan Cisalak	175.644.000,00
32	Tanah Bangunan Air Lainnya	65,00	Lahan Bak Penampungan Air di Perumahan Cisalak Permai	5.330.000,00
33	Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek	15.275,00	Lahan Jalan Lingkungan Air di Perumahan Cisalak Permai	1.252.550.000,00
34	Tanah Bangunan Pendidikan dan	300,00	Lahan PAUD/TPA di Perumahan Cisalak	24.600.000,00
35	Tanah Bangunan Pendidikan dan	1.300,00	Lahan Sekolah Kejuruan di Perumahan Cisalak	106.600.000,00

Lampiran Neraca - Aset Tetap Tanah Rincian Hibah Tanah

No	Uraian	Luas M ²	Alamat	Jumlah (Rp)
II	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			30.884.675.557,78
1	Tanah untuk Taman	29.048,16	Panorama Alam Raya Jatinangor	16.740.454.608,00
2	Tanah untuk Bangunan Instalasi	235,00	Panorama Alam Raya Jatinangor	135.430.500,00
3	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9,00	Perumahan Grand Park Cimalaka	738.000,00
4	Tanah untuk Taman	295,00	Perumahan Grand Park Cimalaka	24.190.000,00
5	Tanah untuk Taman	225,00	Perumahan Grand Park Padasuka	23.175.000,00
6	Tanah untuk Bangunan Instalasi	176,00	Perumahan Villa Istana Bendungan	11.264.000,00
7	Tanah untuk Taman	3.014,04	Perumahan Villa Istana Bendungan	192.898.560,00
8	Tanah untuk Bangunan Instalasi	100,00	Perumahan Griya Husada Ibnu Sina	75.423.400,00
9	Tanah untuk Taman	1.659,17	Perumahan Griya Husada Ibnu Sina	1.251.402.425,78
10	Tanah untuk Taman	276,22	Perumahan Golden Housing Islamic	351.904.280,00
11	Tanah untuk Taman	76,86	Perumahan Griya Parigi Asri	92.232.000,00
12	Tanah untuk Bangunan Instalasi	100,00	Perumahan Bukit Cimanggung Permai	4.800.000,00
13	Tanah untuk Taman	5.990,00	Perumahan Bukit Cimanggung Permai	287.520.000,00
14	Tanah untuk Taman	7.880,00	Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	9.456.000.000,00
15	Tanah untuk Taman	4.894,74	Perumahan Griya Prima Alam Sari	1.867.832.784,00
16	Tanah untuk Bangunan Instalasi	165,00	Perumahan Cisalak Permai	13.530.000,00
17	Tanah untuk Taman	4.340,00	Perumahan Cisalak Permai	355.880.000,00
III	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			33.000.000,00
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	308,00	Blok Cikukulu Desa Ganeas	22.500.000,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	98,00	Blok Cikukulu Desa Ganeas	10.500.000,00
TOTAL				117.761.520.864,04

Lampiran Aset Tetap Tanah Pinjam Pakai

TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG YANG DIPINJAM PAKAIKAN KE PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN

No	Nama Pemilik	Lokasi/ Alamat	Luas M2	No. SPHAT/Persil/Akta	Batas Tanah				Intansi/ Lembaga Pemakai	Mulai Tahun Perjanjian	Lama Masa Perjanjian	No. Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan /Tercatat
					Utara	Selatan	Timur	Barat						
1	Pemda Sumedang	Blok Babakan Picung Desa Wargaluyu no Percil 043/013 kohir 863 Kec.Tanjungmedar	840	593.82/15/SPHT/D PPKAD/Aset/XII/2012	Jln.Provinsi	Tanah Milik Epon Nia Partini	Jln. Desa Wargaluyu	Tanah Pesantren Pagelaran II	Markas Komando polisi Sektor Tanjungmedar	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	BKAD
2	Pemda Sumedang	Dusun Awiluar RT 01 / Rw 01 Ciuyah Kec.Cisarua	700	590/92/Kec	Jln.Kabupaten	Eks.Jalan Kabupaten	Jln .Milik Adang	Tanah Milik Mustofa	Markas Komando polisi Sektor Cisarua	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Setda
3	Pemda Sumedang	Dusun Puncak Desa Genteng Kec.Sukasari	970	593.82/14/SPHT/D PPKAD/Aset/XII/2012	Tanah Milik Sukarya	Tanah Milik Koncod	Tanah Milik Nanan Sukandar	Jln.PUK	Markas Komando polisi Sektor Sukasari	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	BKAD
4	Pemda Sumedang	Dusun Kebon Kalapa RT 03 RW 05 Persil 001 Desa Rancamulya Kec.Sumedang Utara	560	Persil 011	Jln.Dusun Kebon Kalapa	Jln. Raya Rancamulya - Dano	Tanah Milik Cristy	Jln.Dusun Kebon Kalapa	Markas Komando polisi Sektor Sumedang Utara	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Setda
5	Pemda Sumedang	Blok Cijambe Desa Situmekar Kec.Cisitu	700	Akta 594.4/60/2005	Kantor Kecamatan Cisitu	Tanah Milik Entis Sutisna	Jln.Rd.Umar Wirahadikusumah	UPTD Pertanian	Markas Komando polisi Sektor Cisitu	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Kec. Cisitu
6	Pemda Sumedang	Blok Kampung Nagrak Desa Cikareo Utara Kec.Wado	602	594/47/Kec	Tanah Milik Novianti Dan Thomas	Tanah Milik Hj.Cucu Dan H.Oom	Jln.Raya Wado-Malangbong	Selokan	Markas Komando polisi Sektor Wado	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	BKAD
7	Pemda Sumedang	Blok Karang Nangka Desa Ciptasari Kec. Pamulihan	700	591/92/Kec	Tanah Kas Desa Ciptasari	Jln.Raya Bandung Sumedang	Tanah Milik Hj,Ai Wastilah	Tanah Kas Desa Ciptasari	Markas Komando polisi Sektor Pamulihan	2010	11 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Setda
8	Pemda Sumedang	Blok Gentramanah Kelas D.I Persil 15 Desa Gentramanah Kec. Jatinangor	108	Persil 15	Jln. Raya Provinsi	Kantor Kec. Jatinangor	Kantor Kec. Jatinangor	Selokan	Pos lintas Jatinangor	2013	8 Tahun	028/387/PBD-Setda/2018-B/32/IX/2018	6-9-2018 sd.6-9-2023	Kec.Jatiangor
9	Pemda Sumedang	Lingk. Pengadilan Agama Kelas 1A Sumedang	2,655	-	Tanah Drs. H.OO Rohaendinurhara dan Jln. Statstk	Tanah Dr. Helm dan Tanah Ade	Jln. Statistik	Tanah Adeng	Pengadilan Agama Kelas 1 Kab. Sumedang	16-10-2017	3 Tahun	028/3922/PBD/2020		Setda

No	Nama Pemilik	Lokasi/ Alamat	Luas M2	No. SPHAT/Persil/Akta	Batas Tanah				Intansi/ Lembaga Pemakai	Mulai Tahun Perjanjian	Lama Masa Perjanjian	No. Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan /Tercatat
					Utara	Selatan	Timur	Barat						
10	Pemda Sumedang	Jalan raya Parakanmuncang-Smpang Dsn. Cicabe Rt03 Rw 05 Desa Sindang Galih Kec. Cimanggung Kab. Sumedang	50	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalain Penduduk daan KB Kab. Sumedang	04/02/2019	2 Tahun	028 /1740/PBD-Setda/2019-028/25/DPPK B/2019	2-4-2019 sd.2-4-2024	BKAD
11	Pemda Sumedang	Dusun Lebaktulang Desa Nagarawangi Kec. Rancakalong (belakang Kec. Rancakalong	50	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalain Penduduk daan KB Kab. Sumedang	04/02/2019	2 Tahun	028 /1740/PBD-Setda/2019-028/25/DPPK B/2019	2-4-2019 sd.2-4-2024	Kec. Rancakalong
12	Pemda Sumedang	Dusun Cihegar Mekar Rt19 RW05 Desa Mekar Asih Kecamatan Jatigede Kab. Sumedang	7000	-	-	-	-	-	Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Bina harapan Jatigede	04/02/2019	2 Tahun	KU.03.07/3428 /2021-081/SK.YPBH J/01D/V/2021	27-5-2021 sd. 27-5-2023	Setda
13	Pemda Sumedang	Blok Kaca-kaca Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka	1,195	-	-	-	-	-	Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Islami Cimalaka Sumedang	31-5-2021 sd. 30-5-2026	5 Tahun	B/3515/KU.03.07/V/2021-017/PPDQ-Sm/U/2021	31-5-2021 sd. 30-5-2026	Setda
14	Pemda Sumedang	Blok Lebak Panglay Desa Sindang pakuon Kec. Cimanggung Kab. Sumedang	5.616,80	-	-	-	-	-	Desa Sindangpakuon	28-4-2021 sd. 28-4-2023	2 Tahun	Ku/03.07./287 3/IV/2021	28-4-2021 sd. 28-4-2023	Setda
15	Pemda Sumedang	Jln. Serma Muhtar No 98 Kel.Situ Kec.Sumedang Utara	1000	-	Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang	Jln. Serma Mughtar Kelurahan Situ	Pemukiman	Pemukiman	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Sumedang	B/3513/KU.03.07/V/2021	5 Tahun	B/3513/KU.03.07/V/2021	31-5-2021 sd. 30-5-2026	Setda

**DAFTAR TANAH BUKAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
YANG DIGUNAKAN UNTUK SEKOLAH DAN PUSKESMAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SD AMBIT	MILIK DESA AMBIT
2	SD BANGBAYANG	MILIK DESA BANGBAYANG
3	SD CIJELER I	MILIK DESA CIJELER
4	SD CIJELER II	MILIK DESA CIJELER
5	SD CIJELER III	MILIK DESA CIJELER
6	SD CIKADU	MILIK DESA CIKADU
7	SD CIPELANG	MILIK DESA SUKATALI
8	SD JATISARI	MILIK DESA SITURAJA
9	SD KARANGMULYA	MILIK DESA KADUWULUNG
10	SD KARANGNANGKA I	MILIK DESA KARANGHEULEUT
11	SD KARANGNANGKA II	MILIK DESA KARANGHEULEUT
12	SD MALAKA	MILIK DESA MALAKA
13	SD NEGLASARI	MILIK DESA MEKARMULYA
14	SD PAMULIHAN	MILIK DESA WANAKERTA
15	SD PASIR IMPUN	MILIK DESA SITURAJA
16	SD SINDANGWANGI	MILIK DESA CIKADU
17	SD SITURAJA	MILIK DESA SITURAJA
18	SD SUKASARI	MILIK DESA MEKARMULYA
19	SD SUKATALI	MILIK DESA SUKATALI
20	SD TEGALSARI	MILIK DESA CIJATI
21	SD WARUNGKETAN	MILIK DESA JATIMEKAR
22	SD LEUWILIANG	MILIK DESA SINDULANG
23	SD MANGLAYANG II	MILIK DESA SINDANGSARI
24	SD BANTARJAMBE	MILIK DESA CIGINTUNG
25	SD CIMUNGKAL	MILIK DESA CIMUNGKAL
26	SD SUKAMAJU	MILIK DESA PAMEKARAN
27	SDN SABAGI	MILIK DESA CIHERANG
28	SD LICIN	MILIK DESA LICIN
29	SD MANDALAHERANG III	MILIK DESA MANDALAHERANG
30	SD MARGAMUKTI	MILIK DESA LICIN
31	SD MEKARSARI	MILIK DESA
32	SD SAYANG	MILIK DESA SAYANG
33	SMP SATU ATAP CIMANGGUNG	MILIK DESA
34	SMP SATU ATAP SUKANYIRU	MILIK DESA
35	SMP SATU ATAP CIKAWAO	MILIK DESA
36	SMPN 1 JATINANGOR	MILIK PEMPROV JABAR
37	SMPN 4 WADO	TANAH MILIK MASYARAKAT
38	SMPN 4 WADO	TANAH MILIK DESA CIMUNGKAL
39	PUSKESMAS RAWAT INAP JATINANGOR	TANAH DESA
40	PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNGSARI	TANAH DESA
41	PUSKESMAS CIMANGGUNG	TANAH DESA

Lampiran Neraca – Aset Tetap Tanah Bukan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang

NO	URAIAN	KETERANGAN
42	PUSKESMAS PAMULIHAN	TANAH DESA
43	PUSKESMAS HAURGOMBONG	TANAH DESA
44	PUSKESMAS RANCAKALONG	TANAH DESA
45	PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN	TANAH DESA
46	PUSKESMAS SUKAGALIH	TANAH DESA
47	PUSKESMAS MAMPU PONED SITURAJA	TANAH DESA
48	PUSKESMAS CISITU	TANAH DESA
49	PUSKESMAS RAWAT INAP DARMARAJA	TANAH DESA
50	PUSKESMAS MAMPU PONED CIBUGEL	TANAH DESA
51	PUSKESMAS RAWAT INAP WADO	TANAH DESA
52	PUSKESMAS RAWAT INAP TOMO	TANAH DESA
53	PUSKESMAS RAWAT INAP UJUNGJAYA	TANAH DESA
54	PUSKESMAS MAMPU PONED PASEH	TANAH DESA
55	PUSKESMAS CISARUA	TANAH DESA
56	PUSKESMAS CIMALAKA	TANAH DESA
57	PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG	TANAH DESA
58	PUSKESMAS HARIANG	TANAH DESA
59	PUSKESMAS TANJUNGKERTA	TANAH DESA
60	PUSKESMAS TANJUNGMEDAR	TANAH DESA
61	PUSKESMAS MAMPU PONED SURIAN	TANAH DESA

Rincian Peralatan dan Mesin
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Alat Besar Darat	15.710.900.752,77	17.234.777.587,77	(1.523.876.835,00)
2	Alat Besar Apung	136.100.000,00	136.100.000,00	0,00
3	Alat Bantu	3.241.182.239,52	3.259.559.689,52	(18.377.450,00)
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	172.277.265.531,66	156.160.457.699,66	16.116.807.832,00
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.691.106.610,65	1.836.778.921,65	(145.672.311,00)
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	882.400.000,00	908.135.500,00	(25.735.500,00)
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	615.636.776,04	396.329.776,04	219.307.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.102.918.006,97	1.066.191.031,63	36.726.975,34
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	534.242.597,18	525.217.597,18	9.025.000,00
10	Alat Ukur	16.932.676.187,92	17.009.509.804,51	(76.833.616,59)
11	Alat Pengolahan	9.383.231.517,87	9.220.022.270,73	163.209.247,14
12	Alat Kantor	106.387.618.514,90	97.202.005.981,68	9.185.612.533,22
13	Alat Rumah Tangga	161.118.230.723,30	149.970.256.689,48	11.147.974.033,82
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.343.858.017,45	10.988.428.256,37	355.429.761,08
15	Alat Studio	231.199.204.277,36	213.925.316.103,76	17.273.888.173,60
16	Alat Komunikasi	15.337.631.651,54	14.539.036.339,01	798.595.312,53
17	Peralatan Pemancar	751.421.197,40	746.213.177,07	5.208.020,33
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	25.170.000,00	13.500.000,00	11.670.000,00
19	Alat Kedokteran	244.225.934.130,51	217.112.975.394,55	27.112.958.735,96
20	Alat Kesehatan Umum	9.394.457.510,87	984.060.675,29	8.410.396.835,58
21	Unit Alat Laboratorium	28.871.882.329,26	27.300.951.674,16	1.570.930.655,10
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	13.300.690,00	13.300.690,00	0,00
23	Alat Peraga Praktik Sekolah	59.556.439.075,00	59.321.043.905,00	235.395.170,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	294.332.385,42	294.332.385,42	0,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	23.672.730,00	23.672.730,00	0,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	35.061.984,82	35.061.984,82	0,00
27	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.750.342.294,54	1.724.782.294,54	25.560.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.180.368.819,32	3.180.368.819,32	0,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	93.730.000,00	93.730.000,00	0,00
30	Komputer Unit	254.871.202.705,56	190.818.218.625,05	64.052.984.080,51
31	Peralatan Komputer	143.637.955.256,33	133.997.264.923,91	9.640.690.332,42
32	Alat Pengeboran Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
33	Sumur	2.150.165.700,00	2.075.365.700,00	74.800.000,00
34	Produksi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
35	Alat Pelindung	59.978.000,00	59.978.000,00	0,00
36	Alat SAR	4.769.175.099,29	4.477.183.294,27	291.991.805,02
37	Alat Kerja Penerbangan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00
38	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.239.234.732,00	520.638.814,00	718.595.918,00
39	Unit Peralatan Proses/Produksi	17.850.000,00	1.200.000,00	16.650.000,00
40	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	21.654.742.456,62	21.382.076.716,62	272.665.740,00
41	Peralatan Olahraga	1.121.839.646,88	1.144.179.647,88	(22.340.001,00)
	Total	1.525.702.360.148,95	1.359.768.122.700,89	165.934.237.448,06

BELANJA MODAL DI LRA
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	BELANJA MODAL DI LRA		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	111.703.443.546,00	47.046.487.021,00	64.656.956.525,00
2	DINAS KESEHATAN	47.358.545.331,00	35.218.445.105,00	12.140.100.226,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	355.095.482,00	877.183.125,00	(522.087.643,00)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.163.684.003,00	2.200.530.200,00	(1.036.846.197,00)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	280.508.710,00	193.476.000,00	87.032.710,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	422.774.000,00		422.774.000,00
7	DINAS SOSIAL	286.853.396,00	151.198.000,00	135.655.396,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	717.185.300,00	148.620.000,00	568.565.300,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14.670.040,00	491.890.500,00	(477.220.460,00)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	545.198.090,00	688.925.000,00	(143.726.910,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	279.265.601,00	22.100.000,00	257.165.601,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	932.404.580,00	1.189.258.900,00	(256.854.320,00)
13	DINAS PERHUBUNGAN	378.846.000,00	17.707.139.950,00	(17.328.293.950,00)
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	1.666.429.996,00	851.753.200,00	814.676.796,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	173.565.387,00	287.595.000,00	(114.029.613,00)
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	474.078.580,00	366.712.500,00	107.366.080,00
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	111.693.750,00	87.701.900,00	23.991.850,00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	12.055.600,00	233.877.750,00	(221.822.150,00)
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	509.954.020,00	233.566.472,00	276.387.548,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.153.282.520,00	485.844.800,00	1.667.437.720,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	1.589.388.672,00	2.017.802.850,00	(428.414.178,00)
22	SEKRETARIAT DPRD	2.496.196.700,00	1.322.457.650,00	1.173.739.050,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	417.438.575,00	617.918.000,00	(200.479.425,00)
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.834.970.575,00	353.395.700,00	1.481.574.875,00
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	947.856.950,00	261.157.500,00	686.699.450,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	549688500,00	0,00	549.688.500,00
27	INSPEKTORAT	309.602.315,00	282.483.000,00	27.119.315,00
28	KECAMATAN WADO	408013315,00	0,00	408.013.315,00
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	382774350,00	0,00	382.774.350,00
30	KECAMATAN DARMARAJA	505100000,00	0,00	505.100.000,00
31	KECAMATAN CIBUGEL	272995000,00	0,00	272.995.000,00
32	KECAMATAN CISITU	365454000,00	0,00	365.454.000,00
33	KECAMATAN SITURAJA	597.450.000,00	49.600.000,00	547.850.000,00
34	KECAMATAN CONGGEANG	486.000.000,00	14.950.000,00	471.050.000,00
35	KECAMATAN PASEH	409200000,00	0,00	409.200.000,00
36	KECAMATAN SURIAN	365.488.600,00	35.255.000,00	330.233.600,00
37	KECAMATAN BUAHDUA	510.551.200,00	49.350.000,00	461.201.200,00
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	514.995.000,00	9.000.000,00	505.995.000,00
39	KECAMATAN SUKASARI	320036780,00	0,00	320.036.780,00
40	KECAMATAN PAMULIHAN	435.387.500,00	44.840.000,00	390.547.500,00
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	399.500.000,00	48.300.000,00	351.200.000,00
42	KECAMATAN JATINANGOR	559.710.000,00	9.000.000,00	550.710.000,00
43	KECAMATAN RANCAKALONG	414.966.035,00	45500000,00	369.466.035,00
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	676.732.999,00	36.500.000,00	640.232.999,00
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	645.528.784,00	40.000.000,00	605.528.784,00
46	KECAMATAN GANEAS	391141880,00	0,00	391.141.880,00
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	511.184.374,00	40.179.000,00	471.005.374,00
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	343.000.000,00	8.875.000,00	334.125.000,00
49	KECAMATAN CIMALAKA	490.000.000,00	79134000,00	410.866.000,00
50	KECAMATAN CISARUA	389.904.500,00	110.229.375,00	279.675.125,00
51	KECAMATAN TOMO	384.872.520,00	24.475.000,00	360.397.520,00
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	382.432.856,00	2.800.000,00	379.632.856,00
53	KECAMATAN JATIGEDE	430.500.000,00	84.500.000,00	346.000.000,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	168.421.200,00	108.500.000,00	59.921.200,00
	JUMLAH	189.446.017.112,00	114.178.507.498,00	75.267.509.614,00

ATRIBUSI BIAYA UMUM
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	BELANJA MODAL DI LRA		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	189.884.148,00	100.882.013,00	89.002.135,00
2	DINAS KESEHATAN	20.590.000,00	0,00	20.590.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.060.000,00	10.540.000,00	(7.480.000,00)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
5	DINAS SOSIAL	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.610.000,00	4.390.000,00	6.220.000,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00
9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.530.000,00	4.490.000,00	(2.960.000,00)
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
12	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	2.860.000,00	(2.860.000,00)
13	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	29.356.743,90	0,00	29.356.743,90
15	SEKRETARIAT DPRD	13.010.000,00	0,00	13.010.000,00
16	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.550.000,00	5.920.000,00	1.630.000,00
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.060.000,00	7.250.000,00	(4.190.000,00)
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00
19	INSPEKTORAT	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00
20	KECAMATAN WADO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
21	KECAMATAN JATINUNGGAL	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
22	KECAMATAN DARMARAJA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
23	KECAMATAN CIBUGEL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
24	KECAMATAN CISITU	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
25	KECAMATAN SITURAJA	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
26	KECAMATAN CONGGEANG	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
27	KECAMATAN PASEH	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
28	KECAMATAN SURIAN	2.530.000,00	1.430.000,00	1.100.000,00
29	KECAMATAN BUAHDUA	4.060.000,00	1.330.000,00	2.730.000,00
30	KECAMATAN TANJUNGSARI	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00
31	KECAMATAN SUKASARI	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
32	KECAMATAN PAMULIHAN	5.490.000,00	2.110.000,00	3.380.000,00
33	KECAMATAN CIMANGGUNG	1.200.000,00	1.630.000,00	(430.000,00)
34	KECAMATAN JATINANGOR	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00
35	KECAMATAN RANCAKALONG	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
36	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
37	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00
38	KECAMATAN GANEAS	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
39	KECAMATAN TANJUNGPURBA	5.490.000,00	0,00	5.490.000,00
40	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
41	KECAMATAN CIMALAKA	2.630.000,00	2.080.000,00	550.000,00
42	KECAMATAN CISARUA	4.260.000,00	1.430.000,00	2.830.000,00
43	KECAMATAN TOMO	4.060.000,00	1.430.000,00	2.630.000,00
44	KECAMATAN UJUNGJAYA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
45	KECAMATAN JATIGEDE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	JUMLAH	419.980.891,90	147.772.013,00	272.208.878,90

MUTASI MASUK ANTAR SKPD
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	Mutasi Masuk Antar SKPD		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	3.849.998,90	689.800.615,80	(685.950.616,90)
2	DINAS KESEHATAN	7.699.997,80	394.820.343,60	(387.120.345,80)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	277.532.978,90	205.200.995,80	72.331.983,10
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	310.181.440,90	197.410.171,80	112.771.269,10
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	287.519.998,90	565.164.991,80	(277.644.992,90)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	213.099.998,90	197.410.171,80	15.689.827,10
7	DINAS SOSIAL	414.849.998,90	244.229.971,80	170.620.027,10
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.849.998,90	197.410.171,80	(193.560.172,90)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	668.220.376,90	244.229.971,80	423.990.405,10
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	380.183.625,00	197.410.171,80	182.773.453,20
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	414.849.998,90	197.410.171,80	217.439.827,10
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	315.670.339,90	197.410.171,80	118.260.168,10
13	DINAS PERHUBUNGAN	373.321.634,01	197.410.171,80	175.911.462,21
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	1.113.766.286,13	377.490.129,61	736.276.156,52
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	669.363.719,90	197.410.171,80	471.953.548,10
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35.079.848,90	197.410.171,80	(162.330.322,90)
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	207.745.126,90	11.230.206,00	196.514.920,90
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	241.826.749,42	358.970.171,80	(117.143.422,38)
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	376.540.598,90	214.510.171,80	162.030.427,10
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	22.412.561,90	197.410.171,80	(174.997.609,90)
21	SEKRETARIAT DAERAH	1.306.106.083,81	2.907.208.638,62	(1.601.102.554,81)
22	SEKRETARIAT DPRD	249.008.147,90	197.410.171,80	51.597.976,10
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	229.904.998,90	197.410.171,80	32.494.827,10
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	846.670.500,41	690.602.341,80	156.068.158,61
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.849.998,90	197.410.171,80	(193.560.172,90)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.849.998,90	197.410.171,80	(193.560.172,90)
27	INSPEKTORAT	3.849.998,90	665.704.518,80	(661.854.519,90)
28	KECAMATAN WADO	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
30	KECAMATAN DARMARAJA	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
31	KECAMATAN CIBUGEL	56.559.499,90	294.408.132,00	(237.848.632,10)
32	KECAMATAN CISITU	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
33	KECAMATAN SITURAJA	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
34	KECAMATAN CONGGEANG	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
35	KECAMATAN PASEH	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
36	KECAMATAN SURIAN	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
37	KECAMATAN BUAHDUA	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	12.509.998,90	438.769.848,00	(426.259.849,10)
39	KECAMATAN SUKASARI	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
40	KECAMATAN PAMULIHAN	177.509.998,90	282.869.848,00	(105.359.849,10)

Lampiran Neraca - Aset Tetap : Peralatan dan Mesin Mutasi Masuk antar SKPD

NO	SKPD	Mutasi Masuk Antar SKPD		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
42	KECAMATAN JATINANGOR	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
43	KECAMATAN RANCAKALONG	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	43.223.990,90	241.869.848,00	(198.645.857,10)
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	45.623.981,90	340.359.435,00	(294.735.453,10)
46	KECAMATAN GANEAS	29.535.181,90	241.869.848,00	(212.334.666,10)
47	KECAMATAN TANJUNGKERTA	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
49	KECAMATAN CIMALAKA	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
50	KECAMATAN CISARUA	12.509.998,90	241.869.848,00	(229.359.849,10)
51	KECAMATAN TOMO	12.509.998,90	262.842.789,00	(250.332.790,10)
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	29.509.998,90	256.481.951,00	(226.971.952,10)
53	KECAMATAN JATIGEDE	12.509.998,90	356.869.846,00	(344.359.847,10)
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	648.182.877,80	197.410.171,80	450.772.706,00
	JUMLAH	10.261.150.514,78	17.358.444.607,03	(7.097.294.092,25)

KOREKSI ASET TETAP <1.000.000 (EKSTRAKOMPTABEL)

Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	Koreksi Aset Tetap < 1.000.000 (Ekstrakomptabel)		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaiakan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	13.593.012.204,99	7.651.049.862,00	5.941.962.342,99
2	DINAS KESEHATAN	755.741.561,00	1.485.933.925,00	(730.192.364,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	30.493.000,00	92.572.501,29	(62.079.501,29)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	975.000,00	0,00	975.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	104.976.000,00	(104.976.000,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33.687.500,00	0,00	33.687.500,00
7	DINAS SOSIAL	0,00	363.000,00	(363.000,00)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	51.266.082,00	0,00	51.266.082,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.204.680,00	0,00	4.204.680,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.425.000,00	25.550.000,00	(18.125.000,00)
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.811.900,00	0,00	11.811.900,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	344.378.300,00	(344.378.300,00)
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	31.518.450,00	37.489.200,00	(5.970.750,00)
14	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	32.785.000,00	(32.785.000,00)
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.401.450,00	495.550,00	6.905.900,00
16	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1.887.000,00	7.426.900,00	(5.539.900,00)
17	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	42.356.500,00	1.775.250,00	40.581.250,00
18	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	31.191.350,00	13.400.000,00	17.791.350,00
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	178.568.041,07	57.339.000,00	121.229.041,07
20	SEKRETARIAT DAERAH	249.088.656,11	89.341.000,00	159.747.656,11
21	SEKRETARIAT DPRD	0,00	719.200,00	(719.200,00)
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.900.420,00	5.113.000,00	7.787.420,00
23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.477.600,00	17.314.000,00	(11.836.400,00)
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.165.500,00	5.000.000,00	(3.834.500,00)
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.192.685,24	0,00	19.192.685,24
26	INSPEKTORAT	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
27	KECAMATAN JATINUNGGAL	952.625,79	0,00	952.625,79
28	KECAMATAN DARMARAJA	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
29	KECAMATAN CIBUGEL	500.000,00	0,00	500.000,00
30	KECAMATAN SURIAN	0,00	3.880.000,00	(3.880.000,00)
31	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)
32	KECAMATAN SUKASARI	382.014,93	0,00	382.014,93
33	KECAMATAN CIMANGGUNG	0,00	1.895.000,00	(1.895.000,00)
34	KECAMATAN JATINANGOR	9.906.844,54	0,00	9.906.844,54
35	KECAMATAN RANCAKALONG	16.196.852,00	6.500.000,00	9.696.852,00
36	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
37	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
38	KECAMATAN GANEAS	200.000,00	0,00	200.000,00
39	KECAMATAN TANJUNGPURA	1.950.000,00	2.039.000,00	(89.000,00)
40	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	0,00	1.875.000,00	(1.875.000,00)
41	KECAMATAN CISARUA	0,00	30.972.500,00	(30.972.500,00)
42	KECAMATAN UJUNGJAYA	975.000,00	2.800.000,00	(1.825.000,00)
43	KECAMATAN JATIGEDE	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)
	JUMLAH	15.111.627.917,67	10.088.983.188,29	5.022.644.729,38

HIBAH KELUAR PERALATAN DAN MESIN
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	NAMA SEKOLAH	PINERI INTERACTIVE BOARD DEVICE	INFOCUS	LAPTOP	PINERI VISUALIZER PV 4	E5600-AH	JUMLAH
1	SMP 11 APRIL SUMEDANG	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
2	SMP AL ISLAM SUMEDANG	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
3	SMP AL MAMUN	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
4	SMP AL MASOEM	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
5	SMP BINA INSAN HARAPAN	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
6	SMP DARUL FATWA	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
7	SMP IT BINTANG GEMILANG	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
8	SMP IT GENERASI UNGGUL	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
9	SMP IT IMAM SYAFII	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
10	SMP KARSA MADYA - YKM	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
11	SMP MUHAMMADIYAH JATINANGOR	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
12	SMP PASUNDAN TANJUNGSARI	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
13	SMP PGRI 1 JATINANGOR	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
14	SMP PLUS AL AMAH	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
15	SMP PLUS AL AQSHA	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
16	SMP PLUS AL HIKMAH	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
17	SMP PLUS BANI YASIN	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
18	SMP PLUS BANJARSARI	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
19	SMP PLUS PERSATUAN ISLAM TANJUNGSARI	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
20	SMP PLUS ULUMUL QURAN AL MUSTOFA	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
21	SMP PLUS YPSA SUMEDANG	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
22	SMP YADIKA TANJUNGSARI	35.700.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	65.000.000,00
JUMLAH TOTAL							1.430.000.000,00

Lampiran Neraca - Aset Tetap : Peralatan dan Mesin Mutasi Keluar antar SKPD

MUTASI KELUAR SKPD
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	Mutasi Keluar SKPD		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	477.578.108,00	419.095.184,00	58.482.924,00
2	DINAS KESEHATAN	0,00	491.652.000,00	(491.652.000,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00	241.756.883,83	(241.756.883,83)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	810.793.544,14	0,00	810.793.544,14
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	165.000.000,00	335.518.750,00	(170.518.750,00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	243.203.999,99	(243.203.999,99)
7	DINAS SOSIAL	461.000.000,00	0,00	461.000.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	415.200.000,00	0,00	415.200.000,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	411.000.000,00	0,00	411.000.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	466.933.625,00	0,00	466.933.625,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	378.184.992,76	0,00	378.184.992,76
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	1.005.967.935,62	0,00	1.005.967.935,62
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	291.100.824,00	161.560.000,00	129.540.824,00
15	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	437.760.263,00	12.043.555.856,40	(11.605.795.593,40)
16	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	161.560.000,00	0,00	161.560.000,00
17	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	197.198.619,13	214.050.000,00	(16.851.380,87)
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	25.415.115,00	410.518.897,00	(385.103.782,00)
19	SEKRETARIAT DAERAH	2.860.021.951,51	1.165.097.151,00	1.694.924.800,51
20	SEKRETARIAT DPRD	356.828.400,00	0,00	356.828.400,00
21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	950.189.367,51	825.177.025,81	125.012.341,70
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	80.279.351,00	395.900.206,00	(315.620.855,00)
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	279.470.000,00	0,00	279.470.000,00
24	INSPEKTORAT	0,00	367.754.820,00	(367.754.820,00)
25	KECAMATAN BUAHDUA	12.643.235,11	0,00	12.643.235,11
26	KECAMATAN GANEAS	17.025.183,00	0,00	17.025.183,00
27	KECAMATAN TOMO	0,00	28.603.833,00	(28.603.833,00)
	JUMLAH	10.261.150.514,78	17.358.444.607,03	(7.097.294.092,25)

REKLAS KE ASET LAINNYA
Aset Tetap : Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
2	DINAS KESEHATAN	1.350.689.959,00	25.256.689,60	1.325.433.269,40
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.150.000,00	12.628.344,80	(11.478.344,80)
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	91.000.000,00	12.628.344,80	78.371.655,20
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.050.000,00	12.628.344,80	(578.344,80)
7	DINAS SOSIAL	40.354.779,66	12.628.344,80	27.726.434,86
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.742.248.820,00	12.628.344,80	3.729.620.475,20
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	387.499.686,18	12.628.344,80	374.871.341,38
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	128.250.000,00	12.628.344,80	115.621.655,20
13	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	2.880.900,00	12.628.344,80	(9.747.444,80)
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	516.883.282,41	12.628.344,80	504.254.937,61
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	123.313.768,11	12.628.344,80	110.685.423,31
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	25.424.510,50	(25.424.510,50)
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	127.533.630,49	12.628.344,80	114.905.285,69
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	527.790.068,42	12.628.344,80	515.161.723,62
21	SEKRETARIAT DAERAH	388.934.861,30	12.628.344,80	376.306.516,50
22	SEKRETARIAT DPRD	2.400.000,00	12.628.344,80	(10.228.344,80)
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	273.871.216,88	12.628.344,80	261.242.872,08
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.297.312.820,66	12.628.344,80	2.284.684.475,86
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
27	INSPEKTORAT	17.920.000,00	12.628.344,80	5.291.655,20
28	KECAMATAN WADO	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
30	KECAMATAN DARMARAJA	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
31	KECAMATAN CIBUGEL	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
32	KECAMATAN CISITU	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
33	KECAMATAN SITURAJA	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
34	KECAMATAN CONGGANG	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
35	KECAMATAN PASEH	172.557.967,00	12.626.728,90	159.931.238,10
36	KECAMATAN SURIAN	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
37	KECAMATAN BUAHDUA	185.805.486,34	12.626.728,90	173.178.757,44
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
39	KECAMATAN SUKASARI	16.893.230,73	12.626.728,90	4.266.501,83
40	KECAMATAN PAMULIHAN	20.600.300,00	12.626.728,90	7.973.571,10
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
42	KECAMATAN JATINANGOR	4.000.000,00	12.626.728,90	(8.626.728,90)
43	KECAMATAN RANCAKALONG	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	10.097.500,00	12.626.728,90	(2.529.228,90)
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
46	KECAMATAN GANEAS	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
49	KECAMATAN CIMALAKA	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
50	KECAMATAN CISARUA	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)

Lampiran Neraca - Aset Tetap : Peralatan dan Mesin Reklas ke Aset Lainnya

NO	SKPD	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
51	KECAMATAN TOMO	116.152.630,00	12.626.728,90	103.525.901,10
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	0,00	22.326.728,90	(22.326.728,90)
53	KECAMATAN JATIGEDE	0,00	12.626.728,90	(12.626.728,90)
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	12.628.344,80	(12.628.344,80)
	JUMLAH	10.558.190.907,18	717.013.116,30	9.841.177.790,88

Belanja Modal di LRA
Aset Tetap : Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	49.335.523.780,00	55.764.233.391	(6.428.709.611,00)
2	DINAS KESEHATAN	7.258.567.636,00	4.088.981.600	3.169.586.036,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	57.006.115.346,00	775.590.000,00	56.230.525.346,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0,00	61.400.168.739	(61.400.168.739,00)
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	199.748.000,00	(199.748.000,00)
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	609.206.000,00	296.558.000	312.648.000,00
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	139.611.000,00	598.259.000	(458.648.000,00)
8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	0,00	197.000.000	(197.000.000,00)
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	920.295.886,00	578.544.057	341.751.829,00
10	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	8.753.900.014,00	0,00	8.753.900.014,00
11	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	197.966.219,00	378.730.000	(180.763.781,00)
12	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	222.084.714,00	8.646.353.510	(8.424.268.796,00)
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.035.272.996,00	2.548.661.729	486.611.267,00
14	SEKRETARIAT DPRD	199.800.000,00	0,00	199.800.000,00
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	369.312.000,00	358.746.500	10.565.500,00
16	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	259.470.000	(259.470.000,00)
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49.521.540,00	234.148.300	(184.626.760,00)
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	154.350.000,00	0,00	154.350.000,00
19	INSPEKTORAT	0,00	153.500.000,00	(153.500.000,00)
20	KECAMATAN CONGGANG	0,00	189.800.000	(189.800.000,00)
21	KECAMATAN PASEH	9.887.300,00	143.500.000	(133.612.700,00)
22	KECAMATAN TANJUNGSARI	229.267.000,00	0,00	229.267.000,00
23	KECAMATAN PAMULIHAN	69.700.000,00	0,00	69.700.000,00
24	KECAMATAN CIMANGGUNG	69.721.000,00	219.010.000,00	(149.289.000,00)
25	KECAMATAN JATINANGOR	39.989.000,00	99.614.000	(59.625.000,00)
26	KECAMATAN RANCAKALONG	192.678.000,00	0,00	192.678.000,00
27	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	652.664.340,00	358.200.000	294.464.340,00
28	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	334.748.000,00	179.823.000	154.925.000,00
29	KECAMATAN GANEAS	39.779.000,00	0,00	39.779.000,00
30	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	39.995.541,00	74.500.000	(34.504.459,00)
31	KECAMATAN CISARUA	0,00	194.500.000,00	(194.500.000,00)
32	KECAMATAN JATIGEDE	39.474.000,00	0,00	39.474.000,00
	JUMLAH	129.969.430.312,00	137.937.639.826,00	(7.968.209.514,00)

Atribusi Biaya Umum
Aset Tetap : Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	Atribusi Biaya Umum (diluar Belanja Modal)		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.081.505.781,00	1.754.633.187,00	(673.127.406,00)
2	DINAS KESEHATAN	187.771.500,00	0,00	187.771.500,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.960.916.430,00	17.230.000,00	1.943.686.430,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	680.000,00	0,00	680.000,00
5	DINAS SOSIAL	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.080.000,00	6.560.000,00	(3.480.000,00)
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	65.384.000,00	18.640.000,00	46.744.000,00
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
11	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	6.260.000,00	(6.260.000,00)
12	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
13	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	14.450.000,00	0,00	14.450.000,00
14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.380.000,00	7.690.000,00	(4.310.000,00)
15	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	8.090.000,00	(8.090.000,00)
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
17	INSPEKTORAT	0,00	3.180.000,00	(3.180.000,00)
18	KECAMATAN DARMARAJA	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
19	KECAMATAN PASEH	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
20	KECAMATAN SURIAN	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00
21	KECAMATAN BUAHDUA	2.630.000,00	1.980.000,00	650.000,00
22	KECAMATAN TANJUNGSARI	6.460.000,00	3.180.000,00	3.280.000,00
23	KECAMATAN PAMULIHAN	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
24	KECAMATAN CIMANGGUNG	9.340.000,00	10.040.000,00	(700.000,00)
25	KECAMATAN JATINANGOR	6.460.000,00	3.280.000,00	3.180.000,00
26	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	14.250.000,00	11.720.000,00	2.530.000,00
27	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	24.020.000,00	0,00	24.020.000,00
28	KECAMATAN GANEAS	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00
29	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
30	KECAMATAN CISARUA	0,00	3.280.000,00	(3.280.000,00)
31	KECAMATAN JATIGEDE	3.080.000,00	3.180.000,00	(100.000,00)
	JUMLAH	3.426.127.711,00	1.862.123.187,00	1.564.004.524,00

Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan
Aset Tetap : Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	399.490.000,00	0,00	399.490.000,00
2	DINAS KESEHATAN	4.703.291.988,00	740.334.418,00	3.962.957.570,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	189.827.000,00	0,00	189.827.000,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	84.171.206,24	0,00	84.171.206,24
5	DINAS SOSIAL	398.766.000,00	69.800.000,00	328.966.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	34.954.000,00	294.177.352,00	(259.223.352,00)
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	256.755.354,00	0,00	256.755.354,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	159.100.000,00	64.850.000,00	94.250.000,00
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	437.826.000,00	478.707.750,00	(40.881.750,00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.827.927,26	0,00	75.827.927,26
11	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	248.474.000,00	(248.474.000,00)
12	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	278.953.000,00	43.450.000,00	235.503.000,00
13	SEKRETARIAT DAERAH	139.900.000,00	0,00	139.900.000,00
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	119.666.000,00	0,00	119.666.000,00
15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	309.090.000,00	363.719.450,00	(54.629.450,00)
16	BADAN PENDAPATAN DAERAH	56.943.000,00	0,00	56.943.000,00
17	KECAMATAN DARMARAJA	49.698.000,00	0,00	49.698.000,00
18	KECAMATAN SURIAN	29.834.000,00	0,00	29.834.000,00
19	KECAMATAN BUAHDUA	39.900.000,00	29.851.000,00	10.049.000,00
20	KECAMATAN TANJUNGSARI	0,00	49.770.000,00	(49.770.000,00)
21	KECAMATAN CIMANGGUNG	84.584.000,00	29.800.000,00	54.784.000,00
22	KECAMATAN JATINANGOR	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00
23	KECAMATAN RANCAKALONG	49.980.000,00	0,00	49.980.000,00
24	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	189.385.000,00	109.780.000,00	79.605.000,00
25	KECAMATAN JATIGEDE	0,00	99.552.000,00	(99.552.000,00)
	JUMLAH	8.150.642.475,50	2.622.265.970,00	5.128.886.505,50

Rincian Hibah Gedung dan Bangunan
Aset Tetap : Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Luas M ²	Alamat	Jumlah (Rp)
HIBAH MASUK				
I	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			234.291.012,01
1	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	36	Perumahan Panorama Alam Raya Jatinangor	57.657.600,00
2	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	5	Perumahan Golden Housing Islamice	14.784.000,00
3	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	12	Perumahan Griya Alam Sari	19.219.200,00
4	Bangunan Fasilitas Umum	1.408	Perumahan Panorama Alam Raya Jatinangor	112.716.839,42
5	Pagar	194	Perumahan Grand Padasuka	19.113.127,79
6	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	360	Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	10.800.244,80
II	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			412.720.000,00
1	Bangunan Gedung Instalasi	100	Perumahan Griya Husada Ibnu Sina	252.560.000,00
2	Bangunan Gedung Instalasi	100	Perumahan Bukit Cimanggung Permai	160.160.000,00
III	Dinas Perikanan dan Peternakan			1.028.473.762,00
1	Bangunan Gedung Kantor	56	Jl. Sebelas April No. 62 Sumedang	284.348.200,00
2	Bangunan Gedung Laboratorium	30	Jl. Sebelas April No. 62 Sumedang	91.885.636,00
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	36	Jl. Sebelas April No. 62 Sumedang	252.246.563,00
4	Bangunan Peternakan/Perikanan	1.000	Desa Padasuka Blok Nyangegeng Kec. Sumedang Utara	399.993.363,00
IV	Kecamatan Sumedang Selatan			70.000.000,00
1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	16	Jl. Pangeran Kornel No. 125 Lingk. Samoja RT 01 RW 08 Kel. Pasanggahan Baru Kec. Sumedang Selatan	70.000.000,00
TOTAL HIBAH MASUK				1.745.484.774,01
HIBAH KELUAR				
I	Dinas Pendidikan			678.686.000,00
1	Bangunan Terbuka	150	Dsn. Cisema RT 02 RW 03 Ds. Pakualam Kec. Darmaraja	142.200.000,00
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36	Jl SDN Citepok RT 03 RW 01 Dusun Baru Desa Citepok Kecamatan Paseh	94.850.000,00
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36	Jl. Suramanggala No.15 Dusun Cipicung RT. 03/01 Darmaraja	149.959.000,00
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36	Link. Kaum No. 12 RT. 02/10 Kel Regol Wetan Kec Sumedang Selatan	143.877.000,00
5	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	56	Dusun Babakan Rt.007 RW. 001 Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal	147.800.000,00
TOTAL HIBAH KELUAR				678.686.000,00

Belanja Modal di LRA
Aset Tetap : Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	8.300.000,00	909.540.634,00	(901.240.634,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.394.546.661,00	57.339.437.232,00	43.055.109.429,00
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8.394.096.785,00	28.218.077.146,00	(19.823.980.361,00)
4	DINAS PERHUBUNGAN	303.495.000,00	-	303.495.000,00
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	99.967.000,00	-	99.967.000,00
6	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5.609.445.500,00	-	5.609.445.500,00
7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	815.703.000,00	870.527.000,00	(54.824.000,00)
8	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	389.436.000,00	359.767.000,00	29.669.000,00
9	KECAMATAN UJUNGJAYA	69.750.000,00	-	69.750.000,00
	JUMLAH	116.084.739.946,00	87.697.349.012,00	28.387.390.934,00

Rincian Hibah Jalan, Jaringan dan Irigasi
Aset Tetap : Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Luas M ²	Alamat	Jumlah (Rp)
I	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			22.106.857.573,12
1	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	65	Perumahan Cisalak Permai	131.560.000,00
2	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	7.352	Perumahan Panorama Alam Raya Jatinangor	3.273.783.618,82
3	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	104	Perumahan Grand Park Cimalaka	85.484.273,41
4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	104	Perumahan Grand Padasuka	82.001.206,83
5	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	611	Perumahan Villa Istana Bendungan	471.038.460,26
6	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	210	Perumahan Griya Husada Ibnu Sina	147.138.026,15
7	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	165	Perumahan Golden Housing Islamice	135.637.128,00
8	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	427	Perumahan Griya Parigi Asri	182.904.612,00
9	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	611	Perumahan Bukit Cimanggung Permai	272.155.554,81
10	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.101	Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	527.938.064,19
11	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.315	Perumahan Griya Alam Sari	585.654.744,82
12	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.142	Perumahan Cisalak Permai	917.091.945,00
13	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.654	Perumahan Panorama Alam Raya Jatinangor	1.627.029.003,60
14	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	31	Perumahan Grand Park Cimalaka	25.318.930,87
15	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	144	Perumahan Grand Padasuka	113.653.222,58
16	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	171	Perumahan Villa Istana Bendungan	131.718.233,97
17	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	298	Perumahan Griya Husada Ibnu Sina	209.384.678,58
18	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.703	Perumahan Cisalak Permai	728.921.118,75
19	Instalasi Air Kotor Lainnya	3	Perumahan Panorama Alam Raya Jatinangor	135.450.000,00
20	Jalan Khusus	35.053	Perumahan Panorama Alam Raya Jatinangor	2.805.587.203,57
21	Jalan Khusus	1.963	Perumahan Grand Park Cimalaka	605.523.751,38
22	Jalan Khusus	2.229	Perumahan Grand Padasuka	672.810.030,81
23	Jalan Khusus	1.700	Perumahan Villa Istana Bendungan	501.979.519,00
24	Jalan Khusus	3.748	Perumahan Griya Husada Ibnu Sina	1.048.325.949,80
25	Jalan Khusus	2.413	Perumahan Golden Housing Islamice	790.258.899,54
26	Jalan Khusus	1.586	Perumahan Griya Parigi Asri	270.460.897,63
27	Jalan Khusus	8.142	Perumahan Bukit Cimanggung Permai	651.649.480,34
28	Jalan Khusus	20.694	Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	2.483.778.766,52
29	Jalan Khusus	11.712	Perumahan Puteraco Puri Indah Jatinangor	1.305.304.742,40
30	Jalan Khusus	422	Perumahan Griya Alam Sari	11.764.340,49
31	Jalan Khusus	15.275	Perumahan Cisalak Permai	1.175.551.169,00
II	Dinas Perikanan dan Peternakan			4.000.000,00
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	180	Jl. Sebelas April No. 62 Sumedang	4.000.000,00
TOTAL				22.110.857.573,12

Lampiran Neraca - Aset Tetap : Aset Tetap Lainnya Belanja Modal di LRA

Belanja Modal di LRA
Aset Tetap : Aset Tetap Lainnya

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	15.256.577.993,00	11.672.172.744,00	3.584.405.249,00
2	DINAS KESEHATAN	1.350.000,00	85.877.500,00	(84.527.500,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	79.500.000,00	(79.500.000,00)
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	89.910.000,00	29.800.000,00	60.110.000,00
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	216.556.780,00	0,00	216.556.780,00
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	74.778.000,00	(74.778.000,00)
8	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	1.537.795.033,00	267.106.000,00	1.270.689.033,00
9	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	73.815.000,00	0,00	73.815.000,00
10	SEKRETARIAT DAERAH	62.493.000,00	229.150.000,00	(166.657.000,00)
11	SEKRETARIAT DPRD	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	89.993.250,00	125.000.000,00	(35.006.750,00)
13	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.000.000,00	45.276.000,00	(40.276.000,00)
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
16	INSPEKTORAT	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
17	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	JUMLAH	17.526.966.056,00	12.623.660.244,00	4.903.305.812,00

Reklas ke Aset Lainnya
Aset Tetap : Aset Tetap Lainnya

NO	SKPD	Belanja Modal di LRA		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	0,00	85.877.500,00	(85.877.500,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
3	DINAS SOSIAL	0,00	79.500.000,00	(79.500.000,00)
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	89.910.000,00	29.800.000,00	60.110.000,00
5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	216.556.780,00	0,00	216.556.780,00
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00	74.778.000,00	(74.778.000,00)
7	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	73.815.000,00	0,00	73.815.000,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	29.970.000,00	29.500.000,00	470.000,00
9	SEKRETARIAT DPRD	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	89.993.250,00	125.000.000,00	(35.006.750,00)
11	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.000.000,00	45.276.000,00	(40.276.000,00)
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
14	INSPEKTORAT	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
15	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	JUMLAH	698.720.030,00	484.731.500,00	213.988.530,00

RINCIAN KONTRAK KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

No	SKPD	Tahun Pengadaan	Lokasi Pekerjaan	Nilai KDP (Rp)	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak
I	Gedung dan Bangunan			28.735.321.976,00		
1	DISRUMKINTAN	2021	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	10.216.573.500,00	Pembangunan Menara Panenjoan Kecamatan Jatigede (BANPROV)	
2	DPUTR	2022	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	3.674.365.627,00	Pembangunan Lanjutan Menara Panenjoan Jatigede	04/SP/PPK/PEM-MPANENJOAN/DPUTR/2022 tanggal 15 Juni 2022
3	DPUTR	2022	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	5.511.548.441,00	Pembangunan Lanjutan Menara Panenjoan Jatigede	04/SP/PPK/PEM-MPANENJOAN/DPUTR/2022 tanggal 15 Juni 2022
4	DPUTR	2022	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	4.592.957.034,00	Pembangunan Lanjutan Menara Panenjoan Jatigede	04/SP/PPK/PEM-MPANENJOAN/DPUTR/2022 tanggal 15 Juni 2022
5	DPUTR	2022	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	3.215.069.924,00	Pembangunan Lanjutan Menara Panenjoan Jatigede	04/SP/PPK/PEM-MPANENJOAN/DPUTR/2022 tanggal 15 Juni 2022
6	DPUTR	2022	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	297.511.500,00	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lanjutan Menara Panenjoan Jatigede	
7	DPUTR	2022	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	929.784.450,00	Pengadaan Lift Menara Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	04/SP/PPK/LIFT-MPANENJOAN/DPUTR/2022 tanggal 28 november 2022
8	DPUTR	2022	Menara Masjid Al-Kamil Panenjoan Kecamatan Jatigede	297.511.500,00	Konsultansi pengawasan pembangunan lanjutan menara Panenjoan Jatigede	04/SP/PPK/KONSLPENGA W tanggal 15 juni 2022ASAN-MPANENJOAN/DPUTR/2022
II	Jalan, Irigasi dan Jembatan			14.129.698.241,00		
1	DPUTR	2022	Ruas jalan Curugmas-Cibuyung	1.212.484.837,00	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi	
2	DPUTR	2022	Ruas jalan Curugmas-Cibuyung	98.885.000,00	Jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Curugmas-Cibuyung	05/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 oktober 2022
3	DPUTR	2022	Ruas Jalan Curugmas-Cibuyung	2.823.149.697,00	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi	
4	DPUTR	2022	Ruas Jalan Curugmas-Cibuyung	2.180.000,00	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Curugmas - Cibuyung	17/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 juli 2022
5	DPUTR	2022	Ruas Jalan Curugmas-Cibuyung	5.000.000,00	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Curugmas - Cibuyung	17/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 juli 2022
9	DPUTR	2022	Ruas Jalan Curugmas-Cibuyung	2.330.000,00	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Curugmas - Cibuyung	17/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 juli 2022
10	DPUTR	2022	Ruas Jalan Curugmas-Cibuyung	5.000.000,00	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Curugmas - Cibuyung	17/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 juli 2022
6	DPUTR	2022	Ruas jalan Hariang-Cisumur	1.505.271.088,00	pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Hariang-Cisumur	19/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juii 2022

Rincian pada Lampiran Neraca – Konstruksi Dalam Pengerjaan Rincian Kontrak

No	SKPD	Tahun Pengadaan	Lokasi Pekerjaan	Nilai KDP (Rp)	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak
7	DPUTR	2022	Ruas jalan Hariang-Cisumur	2.709.487.959,00	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Hariang-Cisumur	19/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juii 2022
8	DPUTR	2022	Ruas jalan Hariang-Cisumur	1.223.484.340,00	Pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Hariang-Cisumur	19/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juii 2022
11	DPUTR	2022	Ruas jalan Hariang-Cisumur	99.040.000,00	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Hariang - Cisumur	07/01.10/ADD.03/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 8 juli 2022
12	DPUTR	2022	Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	4.104.267.000,00	Pembangunan Jembatan Cisaar Landeuh 2	05/01.12/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 18 agustus 2022
13	DPUTR	2022	Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	99.713.520,00	Jasa konsultansi perencanaan pembangunan jembatan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede (Bantuan Provinsi) Pembangunan Jembatan Cisaar Landeuh 2	02.PL/11-01.12/SPK/PPK/DPUTR/IV/2022 tanggal 12 april 2022
14	DPUTR	2022	Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede	239.404.800,00	Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pembangunan jembatan Ds. Cijeungjing Kecamatan Jatigede (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Pembangunan jembatan Cisaar Landeuh 2	03/01.12/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022
JUMLAH				42.865.020.217,00		

**Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap : Akumulasi Penyusutan**

NO	SKPD	PERALATAN MESIN			GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN			T O T A L		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)	2021(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	454.726.042.993,00	344.693.091.004,00	110.032.951.989,00	306.471.166.822,00	277.495.272.329,00	28.975.894.493,00	638.064.145,00	592.256.955,00	45.807.190,00	761.835.273.960,00	622.780.620.288,00	139.054.653.672,00
2	DINAS KESEHATAN	278.733.298.920,00	245.279.909.224,00	33.453.389.696,00	106.983.354.692,00	95.992.291.351,00	10.991.063.341,00	5.472.983.416,00	4.315.108.745,00	1.157.874.671,00	391.189.637.028,00	345.587.309.320,00	45.602.327.708,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.289.799.122,00	17.979.125.458,00	1.310.673.664,00	5.851.483.060,00	4.845.616.542,00	1.005.866.518,00	1.814.460.691.915,00	1.654.134.172.671,00	160.326.519.244,00	1.839.601.974.097,00	1.676.958.914.671,00	162.643.059.426,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	4.716.536.797,00	4.236.381.578,00	480.155.219,00	12.964.188.703,00	14.250.160.104,00	(1.285.971.401,00)	177.406.526.376,00	152.785.321.286,00	24.621.205.090,00	195.087.251.876,00	171.271.862.968,00	23.815.388.908,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.702.456.645,00	9.536.640.698,00	165.815.947,00	2.279.200.332,00	2.222.214.901,00	56.985.431,00	0,00	0,00	0,00	11.981.656.977,00	11.758.855.599,00	222.801.378,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.931.219.248,00	3.530.376.922,00	400.842.326,00	391.356.024,00	338.587.076,00	52.768.948,00	2.216.190.267,00	1.623.264.584,00	592.925.683,00	6.538.765.539,00	5.492.228.582,00	1.046.536.957,00
7	DINAS SOSIAL	3.744.285.911,00	3.425.534.421,00	318.751.490,00	916.838.997,00	808.900.036,00	107.938.961,00	253.044.548,00	217.161.799,00	35.882.749,00	4.914.169.456,00	4.451.596.256,00	462.573.200,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.275.769.129,00	6.925.173.494,00	350.595.635,00	3.704.310.807,00	3.645.431.834,00	58.878.973,00	27.504.000,00	26.004.000,00	1.500.000,00	11.007.583.936,00	10.596.609.328,00	410.974.608,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	18.825.893.851,00	21.005.441.462,00	(2.179.547.611,00)	10.528.449.771,00	4.545.657.011,00	5.982.792.760,00	4.389.825.275,00	4.224.681.810,00	165.143.465,00	33.744.168.897,00	29.775.780.283,00	3.968.388.614,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.452.587.720,00	5.746.355.942,00	706.231.778,00	310.868.724,00	274.586.987,00	36.281.737,00	0,00	0,00	0,00	6.763.456.444,00	6.020.942.929,00	742.513.515,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.336.992.353,00	3.359.107.751,00	(22.115.398,00)	508.951.454,00	439.728.491,00	69.222.963,00	8.197.650,00	6.375.950,00	1.821.700,00	3.854.141.457,00	3.805.212.192,00	48.929.265,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.569.117.626,00	10.001.631.856,00	567.485.770,00	1.826.191.901,00	1.570.172.933,00	256.018.968,00	0,00	0,00	0,00	12.395.309.527,00	11.571.804.789,00	823.504.738,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	25.180.193.193,00	19.536.713.943,00	5.643.479.250,00	4.985.641.485,00	4.344.117.043,00	641.524.442,00	22.507.116.849,00	20.617.090.305,00	1.890.026.544,00	52.672.951.527,00	44.497.921.291,00	8.175.030.236,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	8.208.442.014,00	6.085.065.655,00	2.123.376.359,00	678.290.208,00	565.254.362,00	113.035.846,00	6.250.000,00	4.750.000,00	1.500.000,00	8.892.982.222,00	6.655.070.017,00	2.237.912.205,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.264.843.242,59	5.765.810.964,00	499.032.278,59	14.565.174.128,00	13.676.892.645,00	888.281.483,00	4.278.116.518,00	3.904.876.593,00	373.239.925,00	25.108.133.888,59	23.347.580.202,00	1.760.553.686,59
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.324.685.397,89	6.614.464.842,00	710.220.555,89	1.079.241.874,00	762.650.897,00	316.590.977,00	80.041.454,00	71.225.810,00	8.815.644,00	8.483.968.725,89	7.448.341.549,00	1.035.627.176,89
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	5.352.423.101,00	4.766.640.642,00	585.782.459,00	1.251.738.715,00	965.731.196,00	286.007.519,00	0,00	0,00	0,00	6.604.161.816,00	5.732.371.838,00	871.789.978,00
18	DINAS PERIKATAN DAN PETERNAKAN	6.416.805.110,00	6.088.932.710,00	327.872.400,00	4.519.381.003,00	4.062.499.503,00	456.881.500,00	2.919.170.862,00	2.697.338.261,00	221.832.601,00	13.855.356.975,00	12.848.770.474,00	1.006.586.501,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5.123.629.529,00	4.254.684.980,00	868.944.549,00	15.031.206.068,00	11.130.168.022,00	3.901.038.046,00	3.230.216.821,00	2.753.328.539,00	476.888.282,00	23.385.052.418,00	18.138.181.541,00	5.246.870.877,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	13.261.911.434,00	12.660.924.724,00	600.986.710,00	8.482.936.895,00	8.077.443.205,00	405.493.690,00	998.466.704,00	793.860.441,00	204.606.263,00	22.743.315.033,00	21.532.228.370,00	1.211.086.663,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	45.294.819.870,00	42.771.945.947,00	2.522.873.923,00	29.438.868.386,00	29.778.133.604,00	(339.265.218,00)	1.355.876.503,00	860.743.616,00	495.132.887,00	76.089.564.759,00	73.410.823.167,00	2.678.741.592,00
22	SEKRETARIAT DPRD	9.668.044.774,00	8.980.853.528,00	687.191.246,00	2.457.582.790,00	2.318.875.170,00	138.707.620,00	75.688.544,00	73.753.595,00	1.934.949,00	12.201.316.108,00	11.373.482.293,00	827.833.815,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.796.489.439,00	8.935.429.690,00	861.059.749,00	4.077.160.403,00	3.693.279.176,00	383.881.227,00	93.034.862,00	87.835.149,00	5.199.713,00	13.966.684.704,00	12.716.544.015,00	1.250.140.689,00
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.463.546.581,00	13.602.632.073,00	(1.139.085.492,00)	3.541.735.325,00	3.127.910.753,00	413.824.572,00	168.816.999,00	139.705.499,00	29.111.500,00	16.174.098.905,00	16.870.248.325,00	(696.149.420,00)
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.665.191.843,00	8.652.441.760,00	1.012.750.083,00	4.207.431.790,00	3.836.046.951,00	371.384.839,00	8.109.167,00	5.479.167,00	2.630.000,00	13.880.732.800,00	12.493.967.878,00	1.386.764.922,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.747.007.489,00	2.813.595.196,00	(66.587.707,00)	3.072.107.924,00	2.726.988.320,00	345.119.604,00	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00	5.828.590.413,00	5.550.058.516,00	278.531.897,00
27	INSPEKTORAT	4.120.396.116,00	3.716.590.259,00	403.805.857,00	590.761.790,00	540.781.608,00	49.980.182,00	0,00	0,00	0,00	4.711.157.906,00	4.257.371.867,00	453.786.039,00
28	KECAMATAN WADO	1.253.979.054,00	1.098.083.268,00	155.895.786,00	1.077.846.384,00	1.000.568.096,00	77.278.288,00	6.145.696,00	3.309.221,00	2.836.475,00	2.337.971.134,00	2.101.960.585,00	236.010.549,00
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	1.341.347.641,00	1.197.632.532,00	143.715.109,00	415.530.518,00	496.522.129,00	(80.991.611,00)	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	1.766.128.159,00	1.703.404.661,00	62.723.498,00
30	KECAMATAN DARMARAJA	1.563.698.266,00	1.426.173.577,00	137.524.689,00	713.033.694,00	629.005.870,00	84.027.824,00	5.819.667,00	3.133.667,00	2.686.000,00	2.282.551.627,00	2.058.313.114,00	224.238.513,00
31	KECAMATAN CIBUGUA	1.358.656.931,00	1.198.941.384,00	159.715.547,00	275.791.740,00	250.492.293,00	25.299.447,00	0,00	0,00	0,00	1.634.448.671,00	1.449.433.677,00	185.014.994,00
32	KECAMATAN CISITU	1.222.308.210,00	1.113.801.527,00	108.506.683,00	1.077.183.187,00	957.503.421,00	119.679.766,00	0,00	0,00	0,00	2.299.491.397,00	2.071.304.948,00	228.186.449,00
33	KECAMATAN SITURAJA	1.702.946.443,00	1.581.189.909,00	121.756.534,00	1.213.102.784,00	1.138.451.637,00	74.651.147,00	0,00	0,00	0,00	2.016.049.227,00	2.719.641.546,00	(696.592.319,00)
34	KECAMATAN CONGGANG	1.610.078.588,00	1.450.484.646,00	159.593.942,00	971.204.876,00	842.137.226,00	129.067.650,00	0,00	0,00	0,00	2.581.283.464,00	2.292.621.872,00	288.661.592,00
35	KECAMATAN PASEH	1.351.012.044,00	1.373.283.268,00	(22.271.224,00)	780.588.391,00	696.243.057,00	84.345.334,00	133.073.092,00	115.524.992,00	17.548.100,00	2.264.673.527,00	2.185.051.317,00	79.622.210,00
36	KECAMATAN SURIAN	1.388.972.998,00	1.251.406.636,00	137.566.362,00	647.676.828,00	600.976.684,00	46.700.144,00	0,00	0,00	0,00	2.036.649.826,00	1.852.383.320,00	184.266.506,00
37	KECAMATAN BUAHDUA	1.143.588.668,00	1.234.867.858,00	(91.279.190,00)	1.178.577.939,00	1.138.987.252,00	39.590.687,00	9.748.542,00	8.146.042,00	1.602.500,00	2.331.915.149,00	2.382.001.152,00	(50.086.003,00)
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	1.429.388.761,00	1.280.680.989,00	148.707.772,00	614.648.085,00	523.365.495,00	91.282.590,00	0,00	0,00	0,00	2.044.036.846,00	1.804.046.484,00	239.990.362,00
39	KECAMATAN SUKASARI	1.159.946.036,27	1.045.470.940,00	114.475.096,27	789.464.203,00	713.920.884,00	75.543.319,00	0,00	0,00	0,00	1.949.410.239,27	1.759.391.824,00	190.018.415,27
40	KECAMATAN PAMULIHAN	1.364.994.076,00	1.077.263.421,00	287.730.655,00	682.678.002,00	596.757.511,00	85.920.491,00	0,00	0,00	0,00	2.047.672.078,00	1.674.020.932,00	373.651.146,00
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	1.603.583.244,00	1.440.553.953,00	163.029.291,00	495.226.995,00	566.841.522,00	(71.614.527,00)	88.899.999,00	80.750.833,00	8.149.166,00	2.187.710.238,00	2.088.146.308,00	99.563.930,00
42	KECAMATAN JATINANGOR	1.827.988.549,00	1.642.363.979,00	185.624.570,00	332.558.090,00	352.527.948,00	(19.969.858,00)	6.208.333,00	3.228.333,00	2.980.000,00	2.166.754.972,00	1.998.120.260,00	168.634.712,00

NO	SKPD	PERALATAN MESIN			GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			T O T A L		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)	2021(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
43	KECAMATAN RANCAKALONG	1.320.661.454,00	1.211.158.297,00	109.503.157,00	574.400.628,00	518.450.699,00	55.949.929,00	0,00	0,00	0,00	1.895.062.082,00	1.729.608.996,00	165.453.086,00
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	3.101.171.506,00	2.867.764.313,00	233.407.193,00	1.901.896.868,00	1.717.470.757,00	184.426.111,00	759.461.117,00	394.637.863,00	364.823.254,00	5.762.529.491,00	4.979.872.933,00	782.656.558,00
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	4.059.612.415,00	3.669.180.644,00	390.431.771,00	2.012.711.301,00	1.715.783.933,00	296.927.368,00	230.297.565,00	120.289.902,00	110.007.663,00	6.302.621.281,00	5.505.254.479,00	797.366.802,00
46	KECAMATAN GANEAS	1.226.742.347,00	1.102.456.463,00	124.285.884,00	925.111.828,00	821.021.549,00	104.090.279,00	0,00	0,00	0,00	2.151.854.175,00	1.923.478.012,00	228.376.163,00
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	1.244.020.944,00	1.100.313.273,00	143.707.671,00	704.869.374,00	574.231.887,00	130.637.487,00	0,00	0,00	0,00	1.948.890.318,00	1.674.545.160,00	274.345.158,00
48	KECAMATAN TANJUNGPURA	1.479.986.680,00	1.356.428.811,00	123.557.869,00	1.044.748.164,00	941.273.630,00	103.474.534,00	0,00	0,00	0,00	2.524.734.844,00	2.297.702.441,00	227.032.403,00
49	KECAMATAN CIMALAKA	1.511.282.098,00	1.352.466.312,00	158.815.786,00	623.022.895,00	620.386.302,00	2.636.593,00	19.874.000,00	19.874.000,00	0,00	2.154.178.993,00	1.992.726.614,00	161.452.379,00
50	KECAMATAN CISARUA	1.279.093.454,00	1.128.902.153,00	150.191.301,00	378.809.283,00	312.807.158,00	66.002.125,00	0,00	0,00	0,00	1.657.902.737,00	1.441.709.311,00	216.193.426,00
51	KECAMATAN TOMO	1.175.284.305,00	1.167.750.322,00	7.533.983,00	377.298.050,00	318.820.259,00	58.477.791,00	0,00	0,00	0,00	1.552.582.355,00	1.486.570.581,00	66.011.774,00
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	1.606.389.355,00	1.442.492.109,00	163.897.246,00	573.509.108,00	498.957.153,00	74.551.955,00	30.255.750,00	25.717.900,00	4.537.850,00	2.210.154.213,00	1.967.167.162,00	242.987.051,00
53	KECAMATAN JATIGEDE	1.378.471.847,00	1.247.071.744,00	131.400.103,00	434.396.728,00	381.473.041,00	52.923.687,00	172.922.203,00	156.424.984,00	16.497.219,00	1.985.790.778,00	1.784.969.769,00	200.821.009,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.408.844.293,00	1.613.460.027,00	795.384.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.844.293,00	1.613.460.027,00	795.384.266,00
	JUMLAH	1.035.306.479.655,75	869.637.139.078,00	165.669.340.577,75	571.531.506.014,00	514.960.369.443,00	56.571.136.571,00	2.042.075.363.839,00	1.850.884.097.512,00	191.191.266.327,00	3.648.913.349.508,75	3.235.481.606.033,00	413.431.743.475,75

Aset Tidak Berwujud (Lisensi/Frenchise dan Software)
Aset Lainnya : Aset Tak Berwujud

NO	SKPD	Aset Tidak Berwujud (Lisensi/Frenchise dan Software)		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	34.628.446.664,39	34.628.446.664,39	0,00
2	DINAS KESEHATAN	1.877.036.743,60	1.333.185.788,60	543.850.955,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	481.836.999,80	481.836.999,80	0,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	56.028.344,80	56.028.344,80	0,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.628.344,80	12628344,80	0,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.628.344,80	12628344,80	0,00
7	DINAS SOSIAL	178.028.344,80	178.028.344,80	0,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	325.333.344,80	224.003.344,80	101.330.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	22.628.344,80	22.628.344,80	0,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	296.208.344,80	204.768.344,80	91.440.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.478.344,80	28.478.344,80	0,00
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.628.344,80	12628344,80	0,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	85.928.344,80	85.928.344,80	0,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	235.105.124,80	12628344,80	222.476.780,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	370.304.844,80	370.304.844,80	0,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.628.344,80	12628344,80	0,00
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	117.354.510,50	117.354.510,50	0,00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	19.628.344,80	19.628.344,80	0,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	418.994.844,80	345.179.844,80	73.815.000,00
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	424.618.344,80	424.618.344,80	0,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	487.315.250,17	437.478.344,80	49.836.905,37
22	SEKRETARIAT DPRD	344.678.344,80	294.678.344,80	50.000.000,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	892.674.844,80	802.681.594,80	89.993.250,00
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.911.812.452,80	1.906.812.452,80	5.000.000,00
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.258.629.318,80	1.233.654.318,80	24.975.000,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	144.408.344,80	93.978.344,80	50.430.000,00
27	INSPEKTORAT	262.273.244,80	211.273.244,80	51.000.000,00
28	KECAMATAN WADO	40.526.728,90	40.526.728,90	0,00
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	12.626.728,90	12626728,90	0,00
30	KECAMATAN DARMARAJA	52.426.728,90	52.426.728,90	0,00
31	KECAMATAN CIBUGEL	32.626.728,90	32.626.728,90	0,00
32	KECAMATAN CISITU	42.626.728,90	42.626.728,90	0,00
33	KECAMATAN SITURAJA	54.626.728,90	54.626.728,90	0,00
34	KECAMATAN CONGGEANG	50.556.728,90	50.556.728,90	0,00
35	KECAMATAN PASEH	42.121.728,90	42.121.728,90	0,00
36	KECAMATAN SURIAN	12.626.728,90	12626728,90	0,00
37	KECAMATAN BUAHDUA	12.626.728,90	12626728,90	0,00
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	64.306.728,90	64.306.728,90	0,00
39	KECAMATAN SUKASARI	53.176.728,90	53.176.728,90	0,00
40	KECAMATAN PAMULIHAN	57.156.728,90	57.156.728,90	0,00
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	42.626.728,90	42.626.728,90	0,00
42	KECAMATAN JATINANGOR	59.326.728,90	59.326.728,90	0,00
43	KECAMATAN RANCAKALONG	12.626.728,90	12626728,90	0,00
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	148.376.728,90	128.376.728,90	20.000.000,00
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	101.776.728,90	101.776.728,90	0,00
46	KECAMATAN GANEAS	52.226.728,90	52226728,90	0,00
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	23.926.728,90	23.926.728,90	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	31.476.728,90	31.476.728,90	0,00
49	KECAMATAN CIMALAKA	38.451.728,90	38.451.728,90	0,00
50	KECAMATAN CISARUA	28.926.728,90	28.926.728,90	0,00
51	KECAMATAN TOMO	12.626.728,90	12626728,90	0,00
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	69.801.728,90	69.801.728,90	0,00
53	KECAMATAN JATIGEDE	46.726.728,90	46.726.728,90	0,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.628.344,80	12628344,80	0,00
	JUMLAH	46.127.823.312,26	44.753.675.421,89	1.374.147.890,37

Aset Lain-lain (Kondisi Rusak Berat)
Aset Lainnya : Aset Lain-lain

NO	SKPD	NILAI PEROLEHAN (Rp)												Total Saldo Akhir Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp)	NILAI BUKU (Rp)		
		PERALATAN DAN MESIN			GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			ASET TETAP LAINNYA							
		Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	DINAS PENDIDIKAN	3.511.730.890,35	-	3.511.730.890,35	19.141.872.945,28	-	19.141.872.945,28	-	-	-	-	-	752.100.486,30	-	752.100.486,30	23.405.704.321,93	(22.318.628.587,00)	1.087.075.734,93
2	DINAS KESEHATAN	2.094.951.893,00	-	2.094.951.893,00	107.002.168,00	-	107.002.168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.201.954.061,00	(2.144.372.339,00)	57.581.722,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	547.467.580,00	-	547.467.580,00	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	622.467.580,00	(622.467.579,00)	1,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	16.790.000,00	-	16.790.000,00	197.711.000,00	-	197.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	214.501.000,00	(47.270.446,00)	167.230.554,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	111.359.000,00	-	111.359.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.359.000,00	(111.359.000,00)	-
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.050.000,00	-	12.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.050.000,00	(12.050.000,00)	-
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	171.479.779,66	-	171.479.779,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.479.779,66	(170.288.113,00)	1.191.666,66
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	316.156.108,00	-	316.156.108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.086.000,00	-	10.086.000,00	326.242.108,00	(316.156.107,00)	10.086.001,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.727.052.382,50	-	4.727.052.382,50	-	-	-	194.000.000,00	-	194.000.000,00	-	-	-	-	-	4.921.052.382,50	(4.912.467.382,00)	8.585.000,50
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	578.706.686,18	-	578.706.686,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578.706.686,18	(565.973.352,00)	12.733.334,18
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.505.000,00	-	150.505.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.505.000,00	(150.505.000,00)	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	692.677.119,04	-	692.677.119,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692.677.119,04	(692.677.118,00)	1,04
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	24.155.900,00	-	24.155.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.155.900,00	(24.155.900,00)	-
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.090.065.252,41	-	1.090.065.252,41	237.925.660,00	-	237.925.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.327.990.912,41	(1.316.431.797,41)	11.559.115,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	319.333.590,11	-	319.333.590,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.333.590,11	(319.333.590,11)	-
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	44.607.207,00	-	44.607.207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.607.207,00	(44.607.207,00)	-
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	171.337.251,49	-	171.337.251,49	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965.200.000,00	-	1.965.200.000,00	2.136.537.251,49	(2.131.783.818,00)	4.753.433,49
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	221.397.550,00	-	221.397.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.397.550,00	(221.397.550,00)	-
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	879.588.961,47	-	879.588.961,47	-	-	-	138.087.000,00	-	138.087.000,00	-	-	-	-	-	1.017.675.961,47	(1.017.675.961,00)	0,47
21	SEKRETARIAT DAERAH	811.283.039,10	-	811.283.039,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811.283.039,10	(809.239.872,00)	2.043.167,10
22	SEKRETARIAT DPRD	35.115.000,00	-	35.115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.115.000,00	(35.115.000,00)	-
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	368.292.216,88	-	368.292.216,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.292.216,88	(351.468.325,00)	16.823.891,88
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.297.312.820,66	-	2.297.312.820,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.297.312.820,66	(2.284.556.225,00)	12.756.595,66
25	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	276.829.144,00	-	276.829.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276.829.144,00	(276.829.144,00)	-
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	240.189.965,56	-	240.189.965,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.189.965,56	(240.189.965,00)	0,56
27	INSPEKTORAT	33.909.100,00	-	33.909.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.909.100,00	(33.909.100,00)	-
28	KECAMATAN WADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	47.148.400,00	-	47.148.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.148.400,00	(47.148.400,00)	-
30	KECAMATAN DARMARAJA	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	(8.500.000,00)	-
31	KECAMATAN CIBUGEL	13.101.000,00	-	13.101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.101.000,00	(13.101.000,00)	-
32	KECAMATAN CISITU	9.495.100,00	-	9.495.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.495.100,00	(9.495.100,00)	-
33	KECAMATAN SITURAJA	38.668.000,00	-	38.668.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.668.000,00	(38.668.000,00)	-
34	KECAMATAN CONGGANG	55.050.000,00	-	55.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.050.000,00	(55.050.000,00)	-
35	KECAMATAN PASEH	172.757.967,00	-	172.757.967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.757.967,00	(166.368.923,00)	6.389.044,00
36	KECAMATAN SURIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN BUAHDUA	190.605.486,34	-	190.605.486,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.605.486,34	(190.605.486,00)	0,34
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KECAMATAN SUKASARI	32.323.230,73	-	32.323.230,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.323.230,73	(32.323.230,73)	-
40	KECAMATAN PAMULIHAN	23.600.300,00	-	23.600.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.600.300,00	(23.600.300,00)	-
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	KECAMATAN JATINANGOR	22.330.000,00	-	22.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.330.000,00	(22.330.000,00)	-
43	KECAMATAN RANCAKALONG	59.285.810,00	-	59.285.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.285.810,00	(59.285.810,00)	-

NO	SKPD	NILAI PEROLEHAN (Rp)												Total Saldo Akhir Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
		PERALATAN DAN MESIN			GEDUNG DAN BANGUNAN			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			ASET TETAP LAINNYA					
		Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir	Saldo Awal (Harga Perolehan)	Penghapusan	Saldo Akhir			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	69.449.500,00	-	69.449.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.449.500,00	(69.449.500,00)	-
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	69.984.524,61	-	69.984.524,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.984.524,61	(69.984.525,00)	(0,39)
46	KECAMATAN GANEAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	KECAMATAN TANJUNGPURA	206.616.468,00	-	206.616.468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.616.468,00	(206.616.468,00)	-
49	KECAMATAN CIMALAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	KECAMATAN CISARUA	19.949.614,00	-	19.949.614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.949.614,00	(19.949.614,00)	-
51	KECAMATAN TOMO	116.152.630,00	-	116.152.630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.152.630,00	(116.152.630,00)	-
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	24.700.000,00	9.700.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-
53	KECAMATAN JATIGEDE	43.500.000,00	-	43.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.500.000,00	(43.500.000,00)	-
54	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	149.850.000,00	-	149.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.850.000,00	(149.850.000,00)	-
	JUMLAH	21.117.411.471,09	9.700.000,00	21.107.711.468,09	19.759.511.773,28	-	19.759.511.773,28	332.087.000,00	-	332.087.000,00	2.727.386.486,30	-	2.727.386.486,30	43.926.696.727,67	(42.527.887.464,25)	1.398.809.263,42

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lainnya : Amortisasi

NO	SKPD	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	34.376.077.555,84	34.124.231.680,09	251.845.875,75
2	Dinas Kesehatan	1.081.343.169,00	910.610.931,50	170.732.237,50
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	411.550.327,50	360.125.174,00	51.425.153,50
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	49.714.172,50	46.557.086,25	3.157.086,25
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.314.172,50	3157086,25	3.157.086,25
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.314.172,50	3157086,25	3.157.086,25
7	Dinas Sosial	112.089.172,50	178.028.345,00	(65.939.172,50)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	201.901.672,50	190.850.836,25	11.050.836,25
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.314.172,40	10.657.086,25	5.657.086,15
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160.189.172,50	133.667.086,25	26.522.086,25
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.164.172,50	28.478.345,00	(6.314.172,50)
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.314.172,50	3157086,25	3.157.086,25
13	Dinas Perhubungan	79.614.172,50	63.769.586,25	15.844.586,25
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	6.314.172,50	3.157.086,25	3.157.086,25
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	205.257.922,50	125.881.711,25	79.376.211,25
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.314.172,50	3157086,25	3.157.086,25
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	79.077.255,50	49.738.627,75	29.338.627,75
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	11.564.172,50	6.657.086,25	4.907.086,25
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	326.440.672,50	293.583.586,25	32.857.086,25
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	368.994.172,49	295.439.586,24	73.554.586,25
21	Sekretariat Daerah	395.639.172,50	325.157.086,25	70.482.086,25
22	Sekretariat DPRD	288.364.172,50	248.519.586,25	39.844.586,25
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	689.918.422,50	592.864.836,25	97.053.586,25
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.774.603.780,50	1.637.125.194,25	137.478.586,25
25	Badan Pendapatan Daerah	1.258.483.146,70	1.185.838.560,25	72.644.586,45
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87.664.172,50	64.169.586,25	23.494.586,25
27	Inspektorat	136.653.447,50	83.835.136,25	52.818.311,25
28	Kecamatan Wado	27.238.364,50	10.131.682,25	17.106.682,25
29	Kecamatan Jatinunggal	6.313.364,50	3156682,25	3.156.682,25
30	Kecamatan Darmaraja	36.163.364,50	23.056.682,25	13.106.682,25
31	Kecamatan Cibugel	16.313.364,50	8156682,25	8.156.682,25
32	Kecamatan Cisit	28.813.364,50	18.156.682,25	10.656.682,25
33	Kecamatan Situraja	27.313.364,50	13656682,25	13.656.682,25
34	Kecamatan Conggeang	34.760.864,50	22.121.682,25	12.639.182,25
35	Kecamatan Paseh	24.522.114,50	13.991.682,25	10.530.432,25
36	Kecamatan Surian	6.313.364,50	3156682,25	3.156.682,25
37	Kecamatan Buahdua	6.313.364,50	3156682,25	3.156.682,25
38	Kecamatan Tanjungsari	45.073.364,50	28.996.682,25	16.076.682,25
39	Kecamatan Sukasari	36.725.864,50	23.431.682,25	13.294.182,25
40	Kecamatan Pamulihan	39.710.864,50	25.421.682,25	14.289.182,25
41	Kecamatan Cimanggung	28.813.364,50	18.156.682,25	10.656.682,25
42	Kecamatan Jatinangor	41.338.364,50	26.506.682,25	14.831.682,25
43	Kecamatan Rancakalong	6.313.364,50	3156682,25	3.156.682,25
44	Kecamatan Sumedang Selatan	95.000.864,50	64.781.682,25	30.219.182,25
45	Kecamatan Sumedang Utara	64.025.864,50	42.419.182,25	21.606.682,25
46	Kecamatan Ganeas	26.113.364,50	13056682,25	13.056.682,25
47	Kecamatan Tanjungkerta	14.788.364,50	8.806.682,25	5.981.682,25
48	Kecamatan Tanjungmedar	20.450.864,50	12.581.682,25	7.869.182,25
49	Kecamatan Cimalaka	32.138.364,50	28.981.682,25	3.156.682,25
50	Kecamatan Cisarua	18.538.364,50	11.306.682,25	7.231.682,25
51	Kecamatan Tomo	6.313.364,50	3156682,25	3.156.682,25
52	Kecamatan Ujungjaya	58.288.364,50	49.931.682,25	8.356.682,25
53	Kecamatan Jatigede	31.888.364,50	20.206.682,25	11.681.682,25
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.314.172,50	3157086,25	3.157.086,25
	JUMLAH	42.951.089.531,93	41.474.370.496,33	1.476.719.035,60

Beban Penyusutan di LO
Aset Lainnya : Beban Penyusutan Amortisasi

NO	SKPD	Beban Penyusutan di LO		
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	251.845.875,75	8.654.948.508,37	(8.403.102.632,62)
2	DINAS KESEHATAN	170.732.237,50	128.767.902,50	41.964.335,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	51.425.153,50	116.351.750,00	(64.926.596,50)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.157.086,25	3.157.086,25	0,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.157.086,25	3.157.086,25	0,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.157.086,25	3.157.086,25	0,00
7	DINAS SOSIAL	23.032.086,25	92.128.345,00	(69.096.258,75)
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11.050.836,25	11.050.836,25	0,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.657.086,15	5.657.086,25	(0,10)
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26.522.086,25	19.072.086,25	7.450.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.119.586,25	20.553.345,00	(13.433.758,75)
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.157.086,25	3.157.086,25	0,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	15.844.586,25	15.844.586,25	0,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	3.157.086,25	3.157.086,25	0,00
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	79.376.211,25	60.681.711,25	18.694.500,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.157.086,25	3.157.086,25	0,00
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	29.338.627,75	29.338.627,75	0,00
18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	4.907.086,25	4.907.086,25	0,00
19	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	32.857.086,25	44.444.586,25	(11.587.500,00)
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	73.554.586,25	94.342.086,25	(20.787.500,00)
21	SEKRETARIAT DAERAH	70.482.086,25	69.744.586,25	737.500,00
22	SEKRETARIAT DPRD	39.844.586,25	39.844.586,25	0,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	97.053.586,25	120.979.836,25	(23.926.250,00)
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	137.478.586,25	213.079.836,25	(75.601.250,00)
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	72.644.586,45	212.161.711,25	(139.517.124,80)
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.494.586,25	23.494.586,25	0,00
27	INSPEKTORAT	52.818.311,25	52.818.311,25	0,00
28	KECAMATAN WADO	17.106.682,25	3.156.682,25	13.950.000,00
29	KECAMATAN JATINUNGGAL	3.156.682,25	3.156.682,25	0,00
30	KECAMATAN DARMARAJA	13.106.682,25	13.106.682,25	0,00
31	KECAMATAN CIBUGEL	8.156.682,25	8.156.682,25	0,00
32	KECAMATAN CISITU	10.656.682,25	10.656.682,25	0,00
33	KECAMATAN SITURAJA	13.656.682,25	13.656.682,25	0,00
34	KECAMATAN CONGGEANG	12.639.182,25	12.639.182,25	0,00
35	KECAMATAN PASEH	10.530.432,25	10.530.432,25	0,00
36	KECAMATAN SURIAN	3.156.682,25	3.156.682,25	0,00
37	KECAMATAN BUAHDUA	3.156.682,25	3.156.682,25	0,00
38	KECAMATAN TANJUNGSARI	16.076.682,25	16.076.682,25	0,00
39	KECAMATAN SUKASARI	13.294.182,25	13.294.182,25	0,00
40	KECAMATAN PAMULIHAN	14.289.182,25	14.289.182,25	0,00
41	KECAMATAN CIMANGGUNG	10.656.682,25	10.656.682,25	0,00
42	KECAMATAN JATINANGOR	14.831.682,25	14.831.682,25	0,00
43	KECAMATAN RANCAKALONG	3.156.682,25	3.156.682,25	0,00
44	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	30.219.182,25	30.219.182,25	0,00
45	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	21.606.682,25	21.606.682,25	0,00
46	KECAMATAN GANEAS	13.056.682,25	13.056.682,25	0,00
47	KECAMATAN TANJUNGPURA	5.981.682,25	5.981.682,25	0,00
48	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	7.869.182,25	7.869.182,25	0,00
49	KECAMATAN CIMALAKA	3.156.682,25	3.156.682,25	0,00
50	KECAMATAN CISARUA	7.231.682,25	7.231.682,25	0,00
51	KECAMATAN TOMO	3.156.682,25	3.156.682,25	0,00
52	KECAMATAN UJUNGJAYA	8.356.682,25	17.450.432,25	(9.093.750,00)
53	KECAMATAN JATIGEDE	11.681.682,25	11.681.682,25	0,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.157.086,25	3.157.086,25	0,00
	JUMLAH	1.579.124.053,10	10.327.400.339,62	(8.748.276.286,52)

**Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan
Per 31 Desember 2022**

NO	NAMA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN (Rp)	MAMIN PASIEN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	JATINANGOR	168.575.764,00	8.550.000,00	177.125.764,00
2	CIMANGGUNG	146.579.400,00	-	146.579.400,00
3	TANJUNGSARI	136.037.880,00	10.900.000,00	146.937.880,00
4	MARGAJAYA	83.699.646,00	-	83.699.646,00
5	SUKASARI	75.095.100,00	-	75.095.100,00
6	HAURNGOMBONG	68.801.460,00	-	68.801.460,00
7	PAMULIHAN	91.172.060,00	-	91.172.060,00
8	RANCAKALONG	67.220.960,00	-	67.220.960,00
9	SUMEDANG SELATAN	150.538.918,00	-	150.538.918,00
10	SUKAGALIH	56.286.600,00	-	56.286.600,00
11	KOTAKALER	112.886.700,00	5.550.000,00	118.436.700,00
12	SITU	236.897.880,00	12.523.500,00	249.421.380,00
13	GANEAS	68.050.300,00	-	68.050.300,00
14	SITURAJA	95.253.000,00	-	95.253.000,00
15	CISITU	92.566.800,00	-	92.566.800,00
16	DARMARAJA	133.369.120,00	-	133.369.120,00
17	CIBUGEL	68.428.500,00	7.449.000,00	75.877.500,00
18	WADO	115.173.240,00	26.675.000,00	141.848.240,00
19	JATINUNGGAL	188.794.450,00	-	188.794.450,00
20	JATIGEDE	55.676.670,00	-	55.676.670,00
21	TOMO	65.115.661,00	2.803.200,00	67.918.861,00
22	UJUNGJAYA	117.685.850,00	19.895.000	137.580.850,00
23	CONGGEANG	102.774.910,00	-	102.774.910,00
24	PASEH	108.043.500,00	-	108.043.500,00
25	CIMALAKA	320.158.676,00	7.650.000,00	327.808.676,00
26	CISARUA	48.479.760,00	-	48.479.760,00
27	TANJUNGGAL	29.313.600,00	-	29.313.600,00
28	SUKAMANTRI	98.428.500,00	15.850.000,00	114.278.500,00
29	TANJUNGMEDAR	46.737.660,00	-	46.737.660,00
30	BUAHDUA	111.537.900,00	-	111.537.900,00
31	HARIANG	22.609.500,00	-	22.609.500,00
32	SURIAN	22.958.760,00	-	22.958.760,00
33	CISEMPUR	52.532.000,00	-	52.532.000,00
34	SAWAHDADAP	54.116.400,00	-	54.116.400,00
35	PADASUKA	127.755.780,00	-	127.755.780,00
36	LABKESDA	-	-	-
JUMLAH		3.539.352.905,00	117.845.700,00	3.657.198.605,00

**Rekapitulasi Utang Operasional RSUD Kabupaten Sumedang
Per 31 Desember 2022**

No.	Nama Rekanan	Nilai Transaksi (Rp)
1	ADYA ARTHA ABADI	49.214.703,00
2	ALPHA PRIMERA INDO	535.738.303,00
3	ANDRA PRIMA JAYA	26.307.000,00
4	ANUGRAH ARGON MEDIKA	2.154.894.119,00
5	ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	823.258.041,00
6	BAYU MEDIKA KHATULISTIWA	144.852.233,00
7	BINA SAN PRIMA	619.101.853,00
8	BUANA INTIPRIMA USAHA	50.172.000,00
9	BUANA MEDITAMA	736.611.870,00
10	BUMI SEKAR PRAJA	662.567.325,00
11	CENTRAL BANDUNG RAYA	237.570.572,00
12	CIPTA JAYA ABADI	137.265.027,00
13	CV AURA VETRA	501.038.510,00
14	CV BELMAS	113.000.000,00
15	CV CAHAYA	217.830.000,00
16	CV PRIMA PUTRA	15.950.000,00
17	CV RIZAL	33.050.250,00
18	DIAN LANGGENG PRATAMA	4.440.000,00
19	DIPA PRASADA HUSADA	30.389.851,00
20	DISTRIVERSA BUANAMAS	7.751.077,00
21	DOCARE LARAS INDONESIA	65.913.199,00
22	DOS NI ROHA	86.684.725,00
23	ENSEVAL PUTERA	2.399.387.705,00
24	EZZY GEMILANG JAYA	114.207.900,00
25	FRINSANHA	154.280.533,00
26	GIRI SAKTI UTAMA	114.614.200,00
27	GLOBAL BAGJA	709.051.899,00
28	GRIYA NUTRISI	1.060.072.704,00
29	HARMONI PRIMA MEDIKA	162.917.734,00
30	HAZIMAH PRADHANA SAKTI	81.269.551,00
31	INDO PRIANGAN KATULISTIWA	49.735.000,00
32	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	2.833.830,00
33	KEBAYORAB PHARMA	3.376.230,00
34	KIMIA FARMA	1.757.683.119,00
35	KPRI	91.566.000,00
36	MEDLICIN INDO RAYA	139.860.000,00
37	MEGAH ALKESINDO	76.907.900,00
38	MEGAH MEDIKA P.	643.447.016,00
39	MENSA BINA SUKSES	48.431.169,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

No.	Nama Rekanan	Nilai Transaksi (Rp)
40	MERAPI	612.861.281,00
41	MILLENIU PHARMA INT.	840.363.805,00
42	MUARA SAKTI	1.039.376.363,00
43	NASA JAYA ABADI	272.632.650,00
44	NIMBU SEJAHTERA MANDIRI	97.095.308,00
45	NUGRA KARSERA	859.293.379,00
46	NUSA KHARISMA RAYA	272.404.724,00
47	PALANG MERAH INDONESIA	590.260.000,00
48	PANCARAYA K	139.157.026,00
49	PARIT PADANG	1.610.806.015,00
50	PENTAVALENT	25.383.647,00
51	PDAM	73.637.000,00
52	PLN	122.550.170,00
53	PRIMA DAYA SENTOSA	35.750.000,00
54	PRO HEALT INTERNAIONAL	85.471.853,00
55	PRODIA	57.906.900,00
56	PURWA ANUGERAH SETIA	27.983.100,00
57	RAJAWALI MEDIKA	306.193.500,00
58	RAJAWALI NUSINDO	1.566.370.525,00
59	REKAMILENIUMINDO	176.206.950,00
60	REVASS UTAMA MEDIKA	588.486.547,00
61	SABA INDOMEDIKA	45.395.559,00
62	SENJA DWI PUTRA	334.803.750,00
63	SENTRA ASIA GEMILANG	43.676.280,00
64	SINAR PANCA MEDIKA	762.797.893,00
65	SINAR RODA	2.920.028.492,00
66	SINERGI TRIDATA MEDICAL	12.207.780,00
67	SUKAPURA	10.989.000,00
68	SUMANTA MITRA MULYA	193.120.901,00
69	SURGIKA ALKESINDO	143.671.564,00
70	TAWADA HEALT CARE	421.899.998,00
71	TEMPO	2.663.304,00
72	TELKOM	15.366.906,00
73	TJANDRA JAYA BERKAT	7.332.105,00
74	TOTAL MEDEKA PERSADA	75.781.972,00
75	TRI SAPTA JAYA	20.113.510,00
76	TRI SURYA TEKNIK	173.681.700,00
77	TRIJAYA GASENDO	1.042.522.160,00
78	TRIPUTRA AMAN MAKMUR	95.500.000,00
79	TUNAS BANGUN P.	1.142.996.242,00
80	UNITED DICO CITAS	144.096.506,00
JUMLAH		31.872.079.513,00

**Daftar SPM Pekerjaan 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang Tidak Terbit SP2D
Tahun Anggaran 2022**

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
1	02.15/03.0/0409 /LS/DPUTR/XII/ 2022	14/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pemeliharaan jalan Cigembong - Batugara Desa Cikoneng Kec. Ganeas Kab Sumedang (Luncuran Banprov Tahun Anggaran 2021) sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan sesuai SP No: 07.EC/01.10/SP/PPK/DPUPR/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 dan ADD no: 07.EC/01.10/ADD.01/PPK/DPUPR/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 atas nama PT. Tiara Mulya Sejahtera	749.286.000,00
2	02.15/03.0/0475 /LS/DPUTR/XII/ 2022	26/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Rekonstruksi Ruas Jalan Wilayah III sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 03.PL/11-01.09/SPK/PPK/DPUTR/IV/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama PT. Antasalam Multi Kreasi	58.268.450,00
3	02.15/03.0/0476 /LS/DPUTR/XII/ 2022	26/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi ruas jalan wilayah I sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SPK no: 01.PL/11-01.08/SPK/PPK/DPUTR/V/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama CV. Asgard	58.680.000,00
4	02.15/03.0/0477 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	26/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan jembatan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede (Bantuan Provinsi) Pembangunan Jembatan Cisaar Landeuh 2 sub kegiatan pembangunan jembatan sesuai SPK no: 02.PL/11-01.12/SPK/PPK/DPUTR/IV/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama PT Antasalam Multikreasi	99.713.520,00
5	02.15/03.0/0478 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	26/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konstruksi Perencanaan Pembangunan Jembatan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede (Bantuan Provinsi) Pembangunan Jembatan Cisaar Lanang sub kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai SPK No : 01.PL/11-01.12/PPK/DPUTR/IV/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama CV. Asgard	99.852.825,00
6	02.15/03.0/0479 /LS/DPUTR/XII/ 2022	26/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Rekonstruksi Ruas Jalan Wilayah II sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 02.PL/11-01.08/SPK/PPK/DPUTR/IV/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama CV. Asgard	58.863.300,00
7	02.15/03.0/0480 /LS/DPUTR/XII/ 2022	26/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi rekontruksi ruas jalan wilayah V sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SPK no: 05.PL/11-01.08/APBD/DPUTR-BM/IV/2022 tanggal 26 April 2022 atas nama PT Antasalam Multikreasi	79.920.000,00
8	02.15/03.0/0512 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan Desa Mekarjaya Desa Mekarmukti Kecamatan Sumedang Utara (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Mekarjaya-Margamukti Kecamatan Sumedang Utara sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 07/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama PT. Prabu Cipta Tehnik	29.931.000,00
9	02.15/03.0/0513 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan rehabilitasi jalan kelurahan kota kulon Kecamatan Sumedang Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rehabilitasi jalan Gending - Ragadiem Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 11/01.09/SPK/PPK-BM/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama CV. Mega Structure	29.818.000,00
10	02.15/03.0/0514 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Sindangtaman-Gembong Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 05/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama CV. Mega Structure	29.659.000,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
11	02.15/03.0/0517 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan kegiatan peningkatan jalan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rekontruksi ruas jalan Singkup-Kareumbi Desa Cimarias Kec. Pamulihan sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SPK no: 07/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 atas nam PT. Gugusawang Prakarsa	34.665.300,00
12	02.15/03.0/0531 /LS.DAK/DPUTR R/XII/2022	28/12/2022	Pembayaran seklaigus (100%) Pekerjaan belanja jasa pihak ketiga untuk kegiatan DAK Penugasan (Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Terampil Kontruksi) sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SPK no: 04/SPK/PPK/PEL.SERTIFIKASI-KONTRUKSI/DPUTR/2022 tanggal 25 November 2022 atas nama PT. Denicont Anugerah Pratama	99.650.000,00
13	02.15/03.0/0532 /LS/DPUTR/XII/ 2022	28/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) pek Rehabilitasi Ruas Jalan Gudang - Cijambu sub keg Rehabilitasi Jalan sesuai SP No : 03.T/01.09/SP/PPK/DPUPR/IX/2021 tgl 27-09-2021. Add. 01 Kontrak No : 03.T/01.09/ADD.01/PPK/DPUPR/X/2021 11-10-2021. Add. 02 Kontrak No : 03.T/01.09/ADD.02/PPK/DPUPR/XI/2021 26-11-2021. Add. 03 Kontrak No : 03.T/01.09/ADD.03/PPK/DPUPR/XII/2021 11-12-2021 nilai kontrak Rp. 764.556.000,00 a.n CV. Raniya Jaya Puspa	241.470.000,00
14	02.15/03.0/0533 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan konsultansi perencanaan peningkatan jalan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rehabilitasi ruas jalan strategis Cintajaya - Jembarwangi Desa Clintajaya Kecamatan Jatigede sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 01/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama CV. asgard	29.975.000,00
15	02.15/03.0/0534 /LS/DPUTR/XII/ 2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan DED Ruas Jalan Cimalaka - Cipadung (Interchange Tol Cisumdawu) sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan sesuai SPK No : 01/01.01/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 atas nama CV. TSULUST Engineering	69.770.000,00
16	02.15/03.0/0548 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Rekonstruksi Ruas Jalan Parigi - Gununggadung Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan sub Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 10/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama PT. MATRA CIPTARIPTA CONSULT	29.803.500,00
17	02.15/03.0/0549 /LS/DPUTR/XII/ 2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan DED ruas jalan Legok - Conggeang (Interchange Tol Cisumdawu) sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, sesuai SPK no: 02/01.01/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 atas nama CV. Mega Mantra Manunggal	69.991.050,00
18	02.15/03.0/0551 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan konsultansi perencanaan kegiatan peningkatan ruas jalan Citengah Desa Jayamekar Kecamatan Sumedang Selatan Kecamatan Cibugel (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rekontruksi ruas jalan Cisoka - Cibubut Desa Citengah Desa Jayamekar Kecamatan Sumedang Selatan Kecamatan Cibugel sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SPK no: 08/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 atas nama PT. Matra Ciptaripta Consult	34.765.200,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
19	02.15/03.0/0552 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran Sekaligus (100%) Pekerjaan belanja jasa konsultansi perencanaan kegiatan peningkatan jalan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rekontruksi ruas jalan Cibungur-Pamarisen Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong sub kegiatan rekontruksi jalan sesuai SPK no: 06/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 29 juni 2022 atas nama PT. Antasalam Multikreasi	29.881.000,00
20	02.15/03.0/0553 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Malaka Desa Cipeles Kecamatan Situraja Kecamatan Tomo (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Rekontruksi Ruas jalan Limusunggal-Cipeles Desa Malaka Desa Cipeles Kecamatan Situraja Kecamatan Tomo sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 09/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022 atas nama PT. Gugusawang Prakarsa	34.765.200,00
21	02.15/03.0/0554 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Gunungpuyuh - Nanggorak Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sub kegiatan 10/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 atas nama PT. GUGUSAWANG PRAKARSA	29.847.900,00
22	02.15/03.0/0555 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan Desa Darmawangi Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Darmawangi - Jembarwangi Desa Darmawangi Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No. 06/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama PT. Antasalam Multi Kreasi	29.964.000,00
23	02.15/03.0/0556 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan Desa Situraja Kecamatan Situraja (Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Situraja-Limusunggal Desa Situraja Kecamatan Situraja sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 09/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 atas nama PT. Matra Ciptaripta Consult	34.459.900,00
24	02.15/03.0/0557 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan rehabilitasi jalan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rehabilitasi ruas jalan Pawenang-Cikareo Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 08/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama PT. GUGUSAWANG PRAKARSA	29.836.800,00
25	02.15/03.0/0559 /LS/DPUTR/XII/ 2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi perencanaan rehabilitasi Wil I sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 01.PL/11-01.09/SPK/PPK/DPUTR/IV/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama PT.Antasalam Multikreasi	49.217.000,00
26	02.15/03.0/0560 /LS/DPUTR/XII/ 2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Wil. II sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 02.PL/11-01.09/SPK/PPK/DPUTR/IV/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama CV. Antasalam Multikreasi	49.027.000,00
27	02.15/03.0/0574 /LS/DPUTR/XII/ 2022	28/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penanganan Bahu Ruas Jalan Buahdua - Burujul sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 32/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama CV. YURI	174.507.000,00
28	02.15/03.0/0577 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	28/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) Pekerjaan penunjang peningkatan jalan Sukamanah - cibareubeu Desa Sukamanah Kel Sukamanah Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang (Luncuran Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021) sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SP no: 73.T/01.08/SP/PPK/DPUPIR/IX/2021 tanggal 23 September 2021 nilai Kontrak Rp. 536.986.000 atas nama CV. Campernik	56.920.516,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
29	02.15/03.0/0580 /LS/DPUTR/XII/ 2022	28/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) Pekerjaan peningkatan ruas jalan Lebaksiuh - Kadu E-katalog (Luncuran Tahun anggaran 2021 sub kegiatan rekonstruksi jalan, sesuai SP no: 60.EC/01.08/SP/PPK/DPUPR/XII/20221 tanggal 1 desember 2021 dan ADD no: 60.EC/01.08/ADD.01/PPK/DPUPR/IX/2021 tanggal 21 Desember 2021 Nilai Kontrak RP. 984.370.000 atas nama PT. Tiara Mulya Sejahtera	365.071.468,00
30	02.15/03.0/0585 /LS/DPUTR/XII/ 2022	29/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Cidempet - Hamawang sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 23/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama CV. Raka Putra Perkasa	184.500.000,00
31	02.15/03.0/0601 /LS/DPUTR/XII/ 2022	29/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Bahu Ruas Jalan Cae - Sukanyiru sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 33/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 & Add Kontrak.01 No : 33/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. Sarana Utama	174.358.000,00
32	02.15/03.0/0602 /LS/DPUTR/XII/ 2022	29/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Cibeureum -TPSA Desa Cibeureum Wetan Kel. Cibeureum Wetan Kec. Ciimalaka Kab Sumedang (Luncuran Banprov tahun 2021) sub kegiatan pemeliharaan jalan sesuai SP no: 04.T/01.10/SPP/PPK/DPUTR/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dan ADD no: 04.T/01.10/ADD.02/PPK/DPUTR/XI/2021 tanggal 25 November 2021 Nilai kontrak Rp. 3.087.369.000 atas nama CV. Fatmanaba	91.077.385,00
33	02.15/03.0/0603 /LS/DPUTR/XII/ 2022	29/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penanganan Bahu Ruas Jalan Citengah - Cisoka sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 44/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 nilai kontrak Rp. 174.504.000.00, dan ADD 1 No. 44/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. RANDY JAYA	174.504.000,00
34	02.15/03.0/0604 /LS/DPUTR/XII/ 2022	29/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jalan Cicabe - Pangsor sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 22/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dan ADD I no 22/01.09/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 6 Oktobe 2022 atas nama CV. Rahayu Kinansih	189.788.000,00
35	02.15/03.0/0618 /LS/DPUTR/XII/ 2022	29/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lebaksiuh - Kadu Desa Lebaksiuh Kec. Jatigede (PIK) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 30/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022. Add. Kontrak.01 No : 30/01.09/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama CV. Rahayu Kinansih	189.143.000,00
36	02.15/03.0/0621 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Pasirpadang - Ganjaresik sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No. 09/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 nilai kontrak Rp. 758,828,000,00, dan ADD 3 No. 09/01.10/ADD.03/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. SERENE TECHNO BAKTI	75.828.000,00
37	02.15/03.0/0622 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Cimungkal - Kirisik sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 04/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 atas nama PT. Galuh Rekasindo Konsultan	69.205.000,00
38	02.15/03.0/0623 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran seklaiigus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Cipeundeuy - Cimanintin sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 01/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD II no : 01/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Priangan Raya Utama	75.262.000,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
39	02.15/03.0/0634 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jalan Tanjungsari Genteng (DBHCHT) sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 02/01.09/SP.01/APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan ADD no: 02/01.09/ADDSP.01/APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama PT. Trisakti Manunggal Perkasa Internasional	456.240.751,00
40	02.15/03.0/0635 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Cikuda - Nanggerang (DBHCHT) sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 01/01.09/SP-APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan ADD no: 01/01.09/ADDSP.01-APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional	367.517.818,00
41	02.15/03.0/0636 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Sabagi - Rancakalong (DBHCHT) sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 04/01.09/SP-APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 28 tanggal 12 Desember 2022 atas nama PT. Trisakti Manunggal Perkasa Internasional	411.192.010,00
42	02.15/03.0/0637 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi ruas jalan alternatif pasirtalang - Cijambu (DBHCHT) sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 03/01.09/SP-APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 atas nama PT. Trisakti Manunggal Perkasa Internasional	174.780.672,00
43	02.15/03.0/0638 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Cipasang - Cibugel (DBHCHT) sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 05/01.09/SP/APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan ADD no: 05/01.09/ADDSP.01/APBDP/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas nama PT. Trisakti Manunggal Perkasa Internasional	442.300.642,00
44	02.15/03.0/0639 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Pembangunan Drainase Jalan Simpangpalasah-Mariuk segmen Desa Palasari Kec. Ujungjaya (PIK) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 26/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan Add.Kontrak.02 No : 26/01.08/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. Sri Rejeki	49.780.000,00
45	02.15/03.0/0640 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan penanganan bahu ruas jalan Cicabe - Cikandang sub kegiatan rekonstruksi jalan, sesuai SPK no: 35/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dan ADD no: 35/01.08/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. Citra Surya Mandiri	179.577.000,00
46	02.15/03.0/0641 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Bahu Ruas Jalan Sukanyiru - Lemahsugih sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 54/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Add.Kontrak.01 No : 54/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. Putra Jaya Mandiri	174.700.000,00
47	02.15/03.0/0642 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jalan Saungtalab - Lebaktulang sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 36/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan ADD no : 36/01.09/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 oktober 2022 atas nama CV. Rasty	184.091.000,00
48	02.15/03.0/0643 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Hariang-Cisumur Desa Pamekarsari, Wanasari Kec. Surian (PIK) sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SPK No : 27/01.09/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan Add.Kontrak.01 No : 27/01.09/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 5 September 2022 atas nama CV. Fadhiil Al-Fawaz	188.706.000,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
49	02.15/03.0/0644 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (1005) Pekerjaan rehabilitasi jalan warungketan - Cicau sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 41/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan ADD no: 41/01.09/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. Rasty	184.315.000,00
50	02.15/03.0/0645 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan penanganan bahu ruas jalan Cigarukgak - Buahdua sub kegiatan rekonstruksi jalan sesuai SPK no: 36/01.08/APBD/DPUTR-BM/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 atas nama CV. Yuri	174.045.000,00
51	02.15/03.0/0646 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pembangunan TPT Jalan Ujungjaya-Palasa segmen Desa Ujungjaya Kec. Ujungjaya (PIK) sub kegiatan rekonstruksi jalan, sesuai SPK no: 30/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama CV. Rahayu Kinansih	49.629.000,00
52	02.15/03.0/0647 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Cacaban - Pindingangin sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 65/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama CV. Sri Rejeki	189.470.000,00
53	02.15/03.0/0648 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Cimanintin - Bts Kab. Majalengka sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 12/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 1 September 2022 dan ADD no: 12/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. Citra Surya Mandiri	179.550.000,00
54	02.15/03.0/0649 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Penanganan Bahu Ruas Jalan Cipadung - Cigarukgak sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 42/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 & Add.Kontrak.01 No : 42/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama CV. Yuri	174.566.000,00
55	02.15/03.0/0650 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan penanganan bahu ruas jalan Jirkang - Cismur sub kegiatan rekonstruksi jalan, sesuai SPK no: 47/01.08/SPK/PPK-BBM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan ADD no: 47/01.08/ADD.01/PPK-BBM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama CV. Yuri	174.694.000,00
56	02.15/03.0/0651 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Hariang - Cismur sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SKP No. 07/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 , dan ADD 3 No. 07/01.10/ADD.03/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT	99.040.000,00
57	02.15/03.0/0652 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Hamawang-Cipelang sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 02/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 dan ADD no: 02/01.10/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Khusna Muthiguna Mandiri	99.369.864,00
58	02.15/03.0/0653 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Warungbuah-Parugpug sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SPK No : 11/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Add.Kontrak.02 No : 11/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Khusna Multhiwiguna Mandiri	56.589.000,00
59	02.15/03.0/0654 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, sesuai SP no: 04/PP/SP/BJKASI/DPUTR/2022 tanggal 21 november 2022 atas nama CV. ESZETA GLOBALINDO PRATAMA	25.000.000,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
60	02.15/03.0/0655 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Tegamanggung-Sindulang sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 10/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD no: 10/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Prabu Cipta Tehnik	69.570.000,00
61	02.15/03.0/0656 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan rekonstruksi ruas jalan Cicabe-Cipeundeuy sub kegiatan rekonstruksi jalan, sesuai SPK no: 17/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD no: 17/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama PT. Alocita Mandiri	69.618.000,00
62	02.15/03.0/0657 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Curugmas-Cibuyung sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 05/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD no: 05/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Gumilang Sajati	98.885.000,00
63	02.15/03.0/0658 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Palasari-Cimanintin sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 08/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD no: 08/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT Anggara Karya Utama	69.654.999,00
64	02.15/03.0/0659 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Gandasoli-Jingkang sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 06/01.10//PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD no : 06/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama CV. IMAYA CONSULTING ENGINEERS	68.831.999,00
65	02.15/03.0/0660 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jalan Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rehabilitasi ruas jalan strategis Cintajaya - Jembarwangi Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 46/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 7 September 2022 dan ADD no : 46/01.09/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama PT. Jati Gede Indah	598.057.750,00
66	02.15/03.0/0661 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Penanganan Bahu Ruas Jalan Pasirbiru - Mulyasari sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 50/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama CV. Rahayu Kinansih	179.546.000,00
67	02.15/03.0/0662 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Cibubut-Cibugel sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SPK no: 03/01.10/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD no: 03/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama PT. PRISMA KARYA UTAMA	69.288.619,00
68	02.15/03.0/0663 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Darmawangsi Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo (Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Darmawangsi-Jembarwangi Desa Darmawangsi Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SP No : 48/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 12 September 2022 & Add.Kontrak.02 No : 48/01.09/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 3 November 2022 atas nama PT. Jati Gede Indah	418.595.200,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
69	02.15/03.0/0664 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Ruas jalan Pamoyanan - Palasari sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No : 18/01.08/SPK/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 & Add.Kontrak.02 No : 18/01.08/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Dutagraha Cipta Enjinereng	97.120.000,00
70	02.15/03.0/0665 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Cipeundeuy - Mekarwangi sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SPK No. 59/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama PT. Jati Gede Indah	179.747.002,00
71	02.15/03.0/0666 /LS/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi abudmen jembatan Ciawi Desa Gunasari Kec. Sumedang Selatan (Penanganan pasca bencana banjir Citengah) sub kegiatan rehabilitasi jembatan, sesuai SPK no: 01/01.18/SPK/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 dan ADD no: 01/01.18/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama CV. Putra Utama	184.550.000,00
72	02.15/03.0/0675 /LS/DAK/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Cibala - Cipeundeuy (DAK Penugasan) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SP No : 73/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8-7-2022, Add Kontrak 01 No : 73/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 10-8-2022 & Add Kontrak 02 No : 73/01.08/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6-10-2022 dengan nilai kontrak Rp. 2.091.867.189,00 atas nama PT. Jati Gede Indah (DAK Penugasan Bidang Jalan	188.268.046,00
73	02.15/03.0/0676 /LS.BKP/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan kegiatan pembangunan jembatan Ds. Cijeungjing Kecamatan Jatigede (Bantuan KeuanganProvinsi Jawa Barat) Pembangunan jembatan Cisaar Lanang sub kegiatan pembangunan jembatan, sesuai SP no: 04/01.12/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan ADD no: 04/01.12/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 8 Oktober 2022 atas nama PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT	230.305.020,00
74	02.15/03.0/0677 /LS.BKP/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan jasa konsultansi pengawasan kegiatan pembangunan jembatan Ds. Cijeungjing Kecamatan Jatigede (Bantuan KeuanganProvinsi Jawa Barat) Pembangunan jembatan Cisaar Landeuh 2 sub kegiatan pembangunan jembatan, sesuai SP no: 03/01.12/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan ADD no: 03/01.12/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT	239.404.800,00
75	02.15/03.0/0678 /LS.BKP/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ds Sukajaya Kec Sumedang Selatan (Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Gunungpuyuh - Nanggorak Ds Sukajaya Kec Sumedang Selatan sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SP No : 53/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama PT. Nisajana Hasna Rizqy	412.044.170,00
76	02.15/03.0/0679 /LS.BKP/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Cipanas Kec. Tanjungkerta (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 47/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan ADD no: 47/01.09/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama PT. Nisajana Hasna Rizqy	417.400.850,00
77	02.15/03.0/0680 /LS.BKP/DPUTR/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal (Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Ruas Jalan Pawenang-Cikareo Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SP No : 51/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama PT. Nisajana Hasna Rizqy	408.159.310,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
78	02.15/03.0/0681 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jalan Desa Citengah Desa Jayamekar Kecamatan Sumedang Selatan Kecamatan Cibugel (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rekontruksi ruas jalan Cisoka-Cibubut Desa Citengah Desa Jayamekar Kec. Sumedang Selatan sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SP no: 78/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan ADD no: 78/01.08/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 atas nama PT. NISAJANA HASNA RIZQY	873.133.050,00
79	02.15/03.0/0682 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan penigkatan jalan Desa Cibungur Kecamatan Rancakalong (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rekontruksi ruas jalan Cibungur - Pamarisen Kecamatan Rancakalong sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SP no: 75/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dan ADD no: 75/01.08/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama PT. NISAJANA HASNA RIZQY	416.411.090,00
80	02.15/03.0/0683 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Cicau - Karedok (Lanjutan) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SP No : 66/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 atas nama PT. Nisajana Hasna Rizqy	1.412.227.600,00
81	02.15/03.0/0684 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan peningkatan jalan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan (Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat) rekontruksi ruas jalan Singkup-Kareumbi Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan sub kegiatan rekontruksi jalan sesuai SP no : 76/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dan ADD no: 76/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 atas nama PT. NISAJANA HASNA RIZQY	873.859.510,00
82	02.15/03.0/0685 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan (Bantuan Provinsi) Rekonstruksi Ruas Jalan Parigi-Gununggadung Kelurahan Kota Kulon sub kegiatan Kecamatan Sumedang Selatan Rekonstruksi Jalan sesuai SP No : 81/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 3 November 2022 atas nama PT. Nisajana Hasna Rizqy	417.059.990,00
83	02.15/03.0/0686 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rekontruksi jalan Gudang - Cijambu sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SP no: 67/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dan ADD no: 67/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas nama PT. NISAJANA HASNA RIZQY	925.212.130,00
84	02.15/03.0/0687 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rekontruksi jalan Cisumur - nanggerang/Bts Kab. Subang sub kegiatan Rekonstruksi - JAlan SP no: 60/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 4 November 2022 dan ADD no: 60/01.08/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 17 Novermber 2022 atas nama PT. NISAJANA HASNA RIZQY	438.018.670,00
85	02.15/03.0/0688 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Desa Mekarjaya Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara (Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat) Rehabilitasi Jalan Mekarjaya-Margamukti Desa Mekarjaya Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara sub kegiatan Rehabilitasi Jalan sesuai SP No : 50/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 5 September 2022 & Add.SP 02 No : 50/01.09/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama PT. Nisajana Hasna Rizqy	415.926.250,00
86	02.15/03.0/0689 /LS/DPUTR/XII/ 2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rekontruksi jalan Darmaraja-Cibugel sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SP no: 61/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus2022 dan ADD no: 61/01.08/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama PT. NISAJANA HASNA RIZQY	437.305.570,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
87	02.15/03.0/0691 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran sekaligus (100%) Pekerjaan rehabilitasi jalan kelurahan kota kulon Kecamatan Sumedang Selatan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rehabilitasi jalan Gending-Ragadiem Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SPK no: 54/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dan ADD no: 54/01.09/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal tanggal 13 Oktober 2022 atas nama PT. NISAJANA HASNA RIZQY	414.471.060,00
JUMLAH TOTAL				18.669.070.756,00

**Daftar SPM Pekerjaan Belum 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang Tidak Terbit SP2D
Tahun Anggaran 2022**

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
1	02.15/03.0/0667 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran termyn (95,6%) pekerjaan Pembangunan Jembatan Ds Cijeungjing Kecamatan Jatigede (Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat) Pembangunan Jembatan Cisaar Lanang sesuai SP No : 06/01.12/SP/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 & Add.Kontrak.02 No : 06/01.12/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan nilai kontrak Rp. 4.994.872.652,00 atas nama CV. Mulya Utama	4.763.164.000,00
2	02.15/03.0/0668 /LS.DAK/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran tahap II Pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Hariang-Cisumur sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SP no: 19/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 nilai kontrak Rp. 6.021.084.353, ADD 1 No. 19/01.10/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan 19/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Jati Gede Indah (DAK Reguler Bidang Jalan)	1.223.484.340,00
3	02.15/03.0/0669 /LS.DAK/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran Tahap II pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Cimungkal - Kirisik sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SP No : 16/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, Add. SP 01 No : 16/01.10/ADDSP.01/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 & ADD. SP 02 No : 16/01.10/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dengan nilai kontrak Rp. 3.298.824.070,00 a.n PT. Nisajana Hasna Rizqy (DAK Reguler Bidang Jalan)	263.905.925,00
4	02.15/03.0/0670 /LS.DAK/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran tahap II pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Pasirpadang - Ganjaresik sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SP No : 21/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, ADD I No: 21/01.10/ADDSP.01/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan ADD II no: 21/01.10/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dengan nilai kontrak Rp. 3.680.040.310,00 atas nama PT. Nisajana Hasna Rizqy (DAK Reguler Bidang Jalan)	404.804.434,00
5	02.15/03.0/0671 /LS.DAK/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran tahap II pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Hamawang-Cipelang sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SP no: 14/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 nilai kontrak Rp. 6.534.430.072, ADD 1 No.14/01.10/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, ADD 2 No.14/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama PT. Jati Gede Indah (DAK Penugasan Bidang Jalan)	3.288.125.212,00
6	02.15/03.0/0672 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran termyn I (85,65%) Pekerjaan peningkatan jalan Desa Malaka Desa Cipeles Kecamatan Situraja Kecamatan Tomo (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rekontruksi ruas jalan Limusunnggal - Cipeles Desa Malaka Desa Cipeles Kecamatan Situraja sub kegiatan rekontruksi jalan, sesuai SP no : 80/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 5 September 2022	782.640.190,00
7	02.15/03.0/0673 /LS.DAK/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran Tahap II pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Curugmas-Cibuyung sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, sesuai SP no : 17/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 & Add.03 No : 17/01.10/ADD.03/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 5 November 2022 dengan nilai kontrak Rp. 4.849.939.350,00 atas nama PT. Jati Gede Indah (DAK Reguler Bidang Jalan)	2.823.149.697,00

Lampiran Neraca – Utang Belanja

NO	NOSPM	TGLSPM	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
8	02.15/03.0/0674 /LS.BKP/DPUTR /XII/2022	30/12/2022	Pembayaran termyn I (47,56%) Pekerjaan rehabilitasi jalan Desa Situraja Kecamatan Situraja (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) rehabilitasi jalan Situraja-Limusunggal Desa Situraja Kecamatan Situraja sub kegiatan rehabilitasi jalan, sesuai SP no: 52/01.09/SP/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 07 September 2022 atas nama CV. Jati Gede Indah	461.458.000,00
9	02.15/03.0/0690 /LS.DAK/DPUTR R/XII/2022	30/12/2022	Pembayaran termyn (81,16%) pekerjaan Rekonstruksi Ruas jalan Pamoyanan-Palasari (DAK Reguler) sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sesuai SP No : 74/01.08/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan ADD no : 74/01.08/ADD.03/PPK-BM/DPUTR/XI/2022 tanggal 5 November 2022 dengan nilai kontrak Rp. 8.550.012.607,00 atas nama PT. Jati Gede Indah (DAK Reguler Bidang Jalan)	4.801.687.080,00
JUMLAH TOTAL				18.812.418.878,00

**Daftar SP2D Tidak Cair Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun Anggaran 2022**

NO	NOSP2D	TGLSP2D	KEPERLUAN	NILAI (Rp)
1	02.15/04.0/06295/L S.DAK/DPUTR/XII/ 2022	15/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Gandasoli-Jingkang sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SP no: 18/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 Nilai Kontrak Rp. 3.232.915.813,11 , ADD 1 No.18/01.10/ADDSP.01/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, ADD 2 No. 18/01.10/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/IX/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Selo Sakti Perkasa (DAK Reguler Bidang Jalan)	2.424.686.860,00
2	02.15/04.0/06298/L S.DAK/DPUTR/XII/ 2022	15/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Cibubut - Cibugel sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SP No : 15/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 dengan nilai kontrak Rp. 3.209.591.553,00, ADD 1 No. 15/01.10/ADDSP.01/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 29 Juli 2022, dan ADD 2 No.15/01.10/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama PT. Selo Sakti Perkasa (DAK Reguler Bidang Jalan)	2.407.193.665,00
3	02.15/04.0/06297/L S.DAK/DPUTR/XII/ 2022	15/12/2022	Pembayaran terakhir (100%) pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Ruas Jalan Tegalmanggung - Sindulang sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan sesuai SP No : 22/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, ADD I no: 22/01.10/ADDSP.01/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan ADD II no: ADD I no: 22/01.10/ADDSP.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan nilai kontrak Rp. 3.467.538.011,45 atas nama PT. Selo Sakti Perkasa (DAK Reguler Bidang Jalan)	2.600.653.508,00
4	02.15/04.0/06296/L S.DAK/DPUTR/XII/ 2022	15/12/2022	Pembayaran tahap I pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi ruas jalan Hamawang-Cipelang sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan, sesuai SP no: 14/01.10/SP/PPK-BM/DPUTR/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 nilai kontrak Rp. 6.534.430.072, ADD 1 No.14/01.10/ADD.01/PPK-BM/DPUTR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, ADD 2 No.14/01.10/ADD.02/PPK-BM/DPUTR/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 atas nama PT. Jati Gede Indah (DAK Penugasan Bidang Jalan)	1.502.918.917,00
JUMLAH TOTAL				8.935.452.950,00

**Daftar Paket Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Belum Dibuat SPM
Tahun Anggaran 2022**

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	NK Rp. 6.534.430.072, dikurangi realiasi Rp. 1.633.607.518 sisa yg belum diserap Rp. 4.900.822.554,- SPM yang Masuk thn 2022 untuk tahap I yaitu Rp. 1.502.918.917 tahap II yaitu sebesar Rp. 3.288.125.212,- sehingga sisa yang masih belum dibuatkan SPMnya TA 2022 adalah senilai Rp. 109.778.425,-	109.778.425,00
2	NK Rp. 4.994.872.652 dikurangi SPM yang Masuk thn 2022 untuk progres 95,6 % yaitu sebesar Rp.4.763.164.000,- sehingga sisa yang masih belum dibuatkan SPMnya TA 2022 adalah senilai Rp. 231.708.652,-	231.708.652,00
	JUMLAH	Rp341.487.077,00

Rincian Beban Persediaan

No	Uraian	Beban Persediaan TA 2022 (Rp)	Belanja Persediaan TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.734.370.216,00	2.777.480.216,00	(43.110.000,00)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	649.940.041,00	649.940.041,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.895.321.196,00	7.896.086.196,00	(765.000,00)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	2.158.903.110,00	2.185.074.234,00	(26.171.124,00)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.538.167.050,00	1.590.426.800,00	(52.259.750,00)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	44.728.800,00	44.728.800,00	0,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	388.008.097,00	331.992.750,00	56.015.347,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	95.623.127,50	56.761.450,00	38.861.677,50
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	147.158.700,00	147.158.700,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	931.000,00	931.000,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	455.500.762,00	455.500.762,00	0,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.624.936.515,40	3.620.101.671,50	4.834.843,90
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.394.555.386,00	3.471.035.756,50	(76.480.370,50)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.566.611.377,50	8.606.928.374,00	(40.316.996,50)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	567.194.000,00	567.334.000,00	(140.000,00)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.357.027.257,00	2.127.138.457,00	229.888.800,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	525.878.721,00	512.989.471,00	12.889.250,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.848.913.172,00	1.848.913.172,00	-
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	922.210.325,00	931.572.525,00	(9.362.200,00)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.172.809.938,00	2.172.809.938,00	0,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Lainnya	103.317.400,00	103.317.400,00	0,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	27.674.016.111,99	237.464.536,00	27.436.551.575,99
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	157.970.000,00	13.838.390.163,00	(13.680.420.163,00)
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.153.640.392,54	7.643.188.988,00	(489.548.595,46)
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.300.254.000,00	11.300.254.000,00	0,00
27	Beban Natura dan Pakan-Pakan	137.537.050,00	158.466.050,00	(20.929.000,00)
28	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	22.017.100,00	135.829.840,00	(113.812.740,00)
29	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	36.547.820,00	47.043.320,00	(10.495.500,00)
30	Beban Barang dan Jasa BLUD	150.849.998.052,35	152.781.111.562,61	(1.931.113.510,26)
Jumlah		237.531.836.718,28	226.247.720.173,61	11.284.116.544,67

Rincian Beban Jasa

No	Uraian	Beban Jasa TA 2022 (Rp)	Belanja Jasa TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	23.094.127.707,00	23.189.907.707,00	(95.780.000,00)
2	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.647.737.050,00	3.647.737.050,00	0,00
3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	38.865.200,00	38.865.200,00	0,00
4	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	259.696.930,00	259.696.930,00	0,00
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.794.688.000,00	3.794.688.000,00	0,00
6	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	175.170.000,00	175.170.000,00	0,00
7	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
8	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	256.700.000,00	256.700.000,00	0,00
9	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	360.941.350,00	360.941.350,00	0,00
10	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.497.534.695,00	1.484.566.095,00	12.968.600,00
11	Beban Pakaian Teknik	76.399.800,00	76.399.800,00	0,00
12	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	132.800.200,00	132.800.200,00	0,00
13	Beban Pakaian KORPRI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
14	Beban Pakaian Adat Daerah	152.960.000,00	152.960.000,00	0,00
15	Beban Pakaian Batik Tradisional	185.121.000,00	185.121.000,00	0,00
16	Beban Pakaian Olahraga	266.601.600,00	266.601.600,00	0,00
17	Beban Pakaian Paskibraka	52.205.750,00	52.205.750,00	0,00
18	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.780.419.620,00	16.780.419.620,00	0,00
19	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.060.630.000,00	15.616.180.000,00	(555.550.000,00)
20	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
21	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
22	Beban Honorarium Rohaniwan	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	0,00
23	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.279.500.000,00	1.279.500.000,00	0,00
24	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00
25	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	750.000,00	750.000,00	0,00
26	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	678.600.000,00	678.600.000,00	0,00
27	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	18.457.800.000,00	18.457.800.000,00	0,00
28	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	5.359.772.600,00	5.344.314.000,00	15.458.600,00
29	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	159.556.000,00	159.556.000,00	0,00
30	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
31	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00
32	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.021.440.000,00	1.021.440.000,00	0,00

Lampiran Beban-Beban Jasa LO

No	Uraian	Beban Jasa TA 2022 (Rp)	Belanja Jasa TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
33	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.195.124.000,00	1.195.124.000,00	0,00
34	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	6.211.000.000,00	6.211.000.000,00	0,00
35	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	223.580.000,00	223.580.000,00	0,00
36	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	374.700.000,00	374.700.000,00	0,00
37	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.833.622.500,00	5.974.622.500,00	(141.000.000,00)
38	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	9.003.450.000,00	9.063.450.000,00	(60.000.000,00)
39	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.070.255.000,00	12.086.955.000,00	(16.700.000,00)
40	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.722.050.000,00	1.722.050.000,00	0,00
41	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.225.155.890,00	7.225.155.890,00	0,00
42	Beban Jasa Tenaga Keamanan	13.456.112.923,00	13.456.112.923,00	0,00
43	Beban Jasa Tenaga Supir	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00	0,00
44	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
45	Beban Jasa Tata Rias	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
46	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	178.999.500,00	178.999.500,00	0,00
47	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	248.157.823,00	248.157.823,00	0,00
48	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	49.090.000,00	49.090.000,00	0,00
49	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
50	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.993.478.380,00	2.068.278.380,00	(74.800.000,00)
51	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	10.206.880.433,00	10.107.230.433,00	99.650.000,00
52	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
53	Beban Jasa Pengolahan Sampah	105.975.600,00	105.975.600,00	0,00
54	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.596.738.325,00	4.596.738.325,00	0,00
55	Beban Tagihan Telepon	1.781.343.763,00	1.781.343.763,00	0,00
56	Beban Tagihan Air	230.201.293,00	230.201.293,00	0,00
57	Beban Tagihan Listrik	10.235.363.042,00	10.235.363.042,00	0,00
58	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	951.165.900,00	951.165.900,00	0,00
59	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.096.184.955,00	7.095.181.755,00	1.003.200,00
60	Beban Paket/Pengiriman	765.000,00	765.000,00	0,00
61	Beban Registrasi/Keanggotaan	534.163.090,00	534.163.090,00	0,00
62	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	524.657.400,00	524.657.400,00	0,00
63	Beban Pengolahan Air Limbah	1.194.000.000,00	1.194.000.000,00	0,00
64	Beban Lembur	3.744.584.500,00	3.744.584.500,00	0,00
65	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	256.100.000,00	256.100.000,00	0,00

Lampiran Beban-Beban Jasa LO

No	Uraian	Beban Jasa TA 2022 (Rp)	Belanja Jasa TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
66	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.030.939.759,00	4.030.939.759,00	0,00
67	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	44.540.994.660,00	45.804.991.500,00	(1.263.996.840,00)
68	Beban Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.648.560.400,00	5.648.560.400,00	0,00
69	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.288.288,00	12.288.288,00	0,00
70	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	481.586.973,00	481.586.973,00	0,00
71	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	561.577.668,00	561.577.668,00	0,00
72	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
73	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
74	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	217.728.540,00	217.728.540,00	0,00
75	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.511.198.080,00	2.511.198.080,00	0,00
76	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	83.045.000,00	83.045.000,00	0,00
77	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	318.043.000,00	318.043.000,00	0,00
78	Beban Sewa Mebel	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00
79	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.369.600,00	3.369.600,00	0,00
80	Beban Sewa Peralatan Umum	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
81	Beban Sewa Bangunan Gudang	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
82	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.207.099.920,00	5.207.099.920,00	0,00
83	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	318.910.000,00	318.910.000,00	0,00
84	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum	65.980.000,00	65.980.000,00	0,00
85	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
86	Beban Sewa Hotel	538.534.596,00	538.534.596,00	0,00
87	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	29.614.000,00	29.614.000,00	0,00
88	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	32.745.000,00	32.745.000,00	0,00
89	Beban Sewa Hewan Pengangkut	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
90	Beban Sewa Tanaman	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00
91	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	57.964,00	301.556.900,00	(301.498.936,00)
92	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	820.004.700,00	1.069.448.700,00	(249.444.000,00)
93	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	333.415.000,00	333.415.000,00	0,00
94	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	139.761.050,00	118.813.800,00	20.947.250,00
95	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan	358.452.000,00	358.452.000,00	0,00
96	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan	1.426.399.430,00	1.426.399.430,00	0,00

Lampiran Beban-Beban Jasa LO

No	Uraian	Beban Jasa TA 2022 (Rp)	Belanja Jasa TA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
	Wilayah			
97	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00
98	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	220.110.963,00	2.077.526.500,00	(1.857.415.537,00)
99	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	-	79.855.000,00	(79.855.000,00)
100	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	149.200.000,00	149.200.000,00	0,00
101	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00
102	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	193.517.500,00	193.517.500,00	0,00
103	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	410.170.000,00	410.170.000,00	0,00
104	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
105	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.634.978.150,00	1.634.978.150,00	0,00
106	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	246.192.450,00	246.192.450,00	0,00
107	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.055.203.597,00	1.055.203.597,00	0,00
108	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.073.981.400,00	2.073.981.400,00	0,00
109	Beban Sosialisasi	6.180.527.000,00	6.180.527.000,00	0,00
110	Beban Bimbingan Teknis	2.418.800.000,00	2.418.800.000,00	0,00
111	Beban Diklat Kepemimpinan	616.034.000,00	616.034.000,00	0,00
112	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	116.250.000,00	116.250.000,00	0,00
113	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.109.360.200,00	2.109.360.200,00	0,00
114	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	519.888.331,00	519.888.331,00	0,00
115	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
116	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.385.650.000,00	4.385.650.000,00	0,00
117	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	142.200.000,00	142.200.000,00	0,00
118	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.763.945.310,00	8.020.921.010,00	(256.975.700,00)
119	Beban Barang dan Jasa BOS	101.699.629.651,00	101.699.629.651,00	0,00
120	Beban Barang dan Jasa BLUD	99.349.782.443,70	98.018.082.755,39	1.331.699.688,31
	Jumlah	498.857.377.442,70	502.328.666.117,39	(3.471.288.674,69)

Lampiran Beban-Beban Penyusutan LO

Rincian Beban Penyusutan

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022			Beban Amortisasi TA 2022 (Rp)	Total (Rp)
		Peralatan & Mesin (Rp)	Gedung & Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi & Jaringan (Rp)		
1	Dinas Pendidikan	110.511.980.094,00	29.009.673.511,00	45.807.187,00	251.845.875,75	139.819.306.667,75
2	Dinas Kesehatan	34.798.107.169,00	11.072.399.815,00	1.157.874.669,00	170.732.237,50	47.199.113.890,50
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.036.990.745,00	1.114.067.902,00	160.326.519.243,00	51.425.153,50	162.529.003.043,50
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	841.722.703,00	4.258.283.257,00	24.621.205.122,00	3.157.086,25	29.724.368.168,25
5	Satuan Polisi Pamong Praja	138.145.955,00	56.985.431,00	0,00	3.157.086,25	198.288.472,25
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	203.642.332,00	52.768.948,00	592.925.683,00	3.157.086,25	852.494.049,25
7	Dinas Sosial	375.414.622,00	117.484.159,00	35.882.749,00	23.032.086,25	551.813.616,25
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.595.681,00	382.685.221,00	1.500.000,00	11.050.836,25	745.831.738,25
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.392.390.706,00	1.903.949.166,00	165.143.463,00	5.657.086,15	3.467.140.421,15
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	852.264.502,00	36.281.737,00	0,00	26.522.086,25	915.068.325,25
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	300.968.209,00	69.222.964,00	1.821.700,00	7.119.586,25	379.132.459,25
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	762.100.319,00	257.240.819,00	0,00	3.157.086,25	1.022.498.224,25
13	Dinas Perhubungan	5.278.569.331,00	641.524.449,00	1.890.026.538,00	15.844.586,25	7.825.964.904,25
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.849.509.034,00	152.798.860,00	1.500.000,00	3.157.086,25	2.006.964.980,25
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	641.502.700,00	1.158.029.511,00	373.239.928,00	79.376.211,25	2.252.148.350,25
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	813.618.393,00	316.590.978,00	8.815.644,00	3.157.086,25	1.142.182.101,25
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	622.655.467,00	286.007.520,00	0,00	29.338.627,75	938.001.614,75
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	374.235.834,00	521.403.443,00	221.832.598,00	4.907.086,25	1.122.378.961,25
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan	693.452.596,00	3.277.673.155,00	476.888.281,00	32.857.086,25	4.480.871.118,25

Lampiran Beban-Beban Penyusutan LO

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022			Beban Amortisasi TA 2022 (Rp)	Total (Rp)
		Peralatan & Mesin (Rp)	Gedung & Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi & Jaringan (Rp)		
	Olah Raga					
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.135.629.369,00	1.043.517.652,00	204.606.262,00	73.554.586,25	2.457.307.869,25
21	Sekretariat Daerah	4.425.173.358,00	1.863.692.523,00	463.082.122,00	70.482.086,25	6.822.430.089,25
22	Sekretariat DPRD	801.261.496,00	138.707.619,00	1.934.950,00	39.844.586,25	981.748.651,25
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	892.052.074,00	383.881.229,00	5.199.713,00	97.053.586,25	1.378.186.602,25
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.325.778.145,00	423.020.341,00	29.111.500,00	137.478.586,25	1.915.388.572,25
25	Badan Pendapatan Daerah	1.081.715.530,00	429.093.203,00	2.630.000,00	72.644.586,45	1.586.083.319,45
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	212.882.215,00	345.119.606,00	0,00	23.494.586,25	581.496.407,25
27	Inspektorat Daerah	425.855.593,00	49.980.183,00	0,00	52.818.311,25	528.654.087,25
28	Kecamatan Wado	155.895.787,00	90.644.303,00	2.836.475,00	17.106.682,25	266.483.247,25
29	Kecamatan Jatinunggal	143.715.107,00	55.318.196,00	0,00	3.156.682,25	202.189.985,25
30	Kecamatan Darmaraja	137.524.691,00	84.027.828,00	2.686.000,00	13.106.682,25	237.345.201,25
31	Kecamatan Cibugel	115.666.042,00	25.299.446,00	0,00	8.156.682,25	149.122.170,25
32	Kecamatan Cisitu	108.506.675,00	119.679.768,00	0,00	10.656.682,25	238.843.125,25
33	Kecamatan Situraja	121.756.544,00	74.651.147,00	0,00	13.656.682,25	210.064.373,25
34	Kecamatan Conggeang	159.593.940,00	138.977.235,00	0,00	12.639.182,25	311.210.357,25
35	Kecamatan Paseh	143.897.699,00	84.345.335,00	17.548.100,00	10.530.432,25	256.321.566,25
36	Kecamatan Surian	137.566.355,00	46.700.144,00	0,00	3.156.682,25	187.423.181,25
37	Kecamatan Buahdua	102.607.871,00	70.297.877,00	1.602.500,00	3.156.682,25	177.664.930,25
38	Kecamatan Tanjungsari	148.707.776,00	91.282.593,00	0,00	16.076.682,25	256.067.051,25
39	Kecamatan Sukasari	131.368.325,00	75.543.319,00	0,00	13.294.182,25	220.205.826,25
40	Kecamatan Pamulihan	143.330.953,00	85.920.492,00	0,00	14.289.182,25	243.540.627,25
41	Kecamatan Cimanggung	163.029.287,00	74.584.049,00	8.149.167,00	10.656.682,25	256.419.185,25
42	Kecamatan Jatinangor	189.624.575,00	82.765.873,00	2.980.000,00	14.831.682,25	290.202.130,25
43	Kecamatan Rancakalong	109.503.161,00	55.949.928,00	0,00	3.156.682,25	168.609.771,25
44	Kecamatan Sumedang Selatan	212.790.692,00	195.191.738,00	364.823.258,00	30.219.182,25	803.024.870,25
45	Kecamatan Sumedang Utara	357.317.794,00	296.927.368,00	110.007.661,00	21.606.682,25	785.859.505,25
46	Kecamatan Ganeas	124.285.877,00	104.090.279,00	0,00	13.056.682,25	241.432.838,25

Lampiran Beban-Beban Penyusutan LO

No	SKPD	Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022			Beban Amortisasi TA 2022 (Rp)	Total (Rp)
		Peralatan & Mesin (Rp)	Gedung & Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi & Jaringan (Rp)		
47	Kecamatan Tanjungkerta	143.707.671,00	130.637.487,00	0,00	5.981.682,25	280.326.840,25
48	Kecamatan Tanjungmedar	123.557.870,00	108.384.737,00	0,00	7.869.182,25	239.811.789,25
49	Kecamatan Cimalaka	158.815.785,00	76.397.037,00	0,00	3.156.682,25	238.369.504,25
50	Kecamatan Cisarua	150.191.289,00	66.002.125,00	0,00	7.231.682,25	223.425.096,25
51	Kecamatan Tomo	123.686.619,00	58.477.792,00	0,00	3.156.682,25	185.321.093,25
52	Kecamatan Ujungjaya	163.897.246,00	75.434.040,00	4.537.850,00	8.356.682,25	252.225.818,25
53	Kecamatan Jatigede	131.400.102,00	65.423.601,00	16.497.220,00	11.681.682,25	225.002.605,25
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	157.761.396,00	0,00	0,00	3.157.086,25	160.918.482,25
Jumlah		176.197.921.301,00	61.795.036.939,00	191.159.215.583,00	1.579.124.053,10	430.731.297.876,10

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

TAHUN 2022



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Sumedang-Cirebon KM. 4,5 Ds. Serang,
Cimalaka, Sumedang



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA).....	1
LAPORAN LABA-RUGI	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS.....	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

JALAN RAYA SUMEDANG – CIREBON KM. 4,5 DS. SERANG CIMALAKA
Telp. (0261) 202627 Fax. (0261) 2138910 Email - perumdaairminumsumedang@gmail.com SUMEDANG 45353



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rd. Moch. Taufik Suriakusumah, S.E.
Alamat Kantor : Jalan Raya Sumedang – Cirebon KM. 4,5 Desa Serang
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Deni Rochendi S., S.T., M.M.
Alamat Kantor : Jalan Raya Sumedang – Cirebon KM. 4,5 Desa Serang
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Jabatan : Direktur Teknik

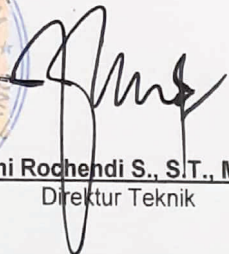
Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun Buku 2021;
2. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang, 22 Februari 2023


Rd. Moch. Taufik Suriakusumah, S.E.
Direktur Utama


Deni Rochendi S., S.T., M.M.
Direktur Teknik



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00010/3.0410/AU.2/04/1624-1/I/II/2023

Yth,

**Dewan Pengawas Dan Direktur
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang** ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan

usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh

hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo & Rekan**



Danang Rahmat Surono, CPA
No.Reg. Izin AP.1624

22 Februari 2023

PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG				
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)				
PER 31 DESEMBER 2022				
NO.	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
			Rp	Rp
1	2	3	4	5
I	ASET LANCAR			
	Kas Bank	5.3.1	6.898.097.224	4.735.371.755
	Piutang Langganan	5.3.2	8.089.805.831	7.553.750.802
	Penyisihan Piutang	5.3.2	(2.436.487.836)	(2.271.480.310)
	Nilai Buku		5.653.317.995	5.282.270.492
	Persediaan	5.3.3	2.067.948.090	1.023.041.532
	Pembayaran Dimuka	5.3.4	1.766.340.464	546.996.958
	JUMLAH ASET LANCAR		16.385.703.774	11.587.680.737
II	ASET TETAP			
	Aset Tetap	5.3.5	87.315.173.799	86.084.508.070
	Akumulasi Penyusutan	5.3.5	(62.005.276.037)	(56.146.719.490)
	Nilai Buku		25.309.897.762	29.937.788.580
III	ASET LAINNYA			
	Aset Tetap Dalam Penyelesaian	5.3.6	1.380.919.626	1.280.999.716
	Aset Tak Berwujud	5.3.7	1.895.358.443	2.286.506.678
	Aset Tetap Yang Tidak dan Belum Digunakan	5.3.8	723.201.826	723.201.826
	Akm Penyusutan AT tdk/blm Digunakan	5.3.8	(231.088.991)	(231.088.991)
	Nilai Buku		492.112.835	492.112.835
	Uang Muka pada PEMDA	5.3.9	-	-
	Piutang Lain-lain	5.3.9	99.349.190	111.758.273
	Biaya Ditangguhkan	5.3.10	603.407.381	545.621.200
	JUMLAH ASET LAIN-LAIN		4.471.147.475	4.716.998.702
	JUMLAH ASET		46.166.749.011	46.242.468.019
IV	LIABILITAS JANGKA PENDEK			
	Hutang Usaha	5.3.11	259.445.502	1.465.424.820
	Hutang Lain-lain	5.3.12	2.280.451.591	1.689.192.516
	Hutang Pajak dan Bea Materai	5.3.13	-	-
	Beban Yang Masih Harus Dibayar	5.3.14	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.15	-	-
	Hutang Iuran Dana Pensiun	5.3.16	-	713.436.253
	Hutang ADB Yang Jatuh Tempo	5.3.17	-	-
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		2.539.897.093	3.868.053.589
V	LIABILITAS JANGKA PANJANG			
	Hutang ADB Belum Jatuh Tempo	5.3.18	-	-
VI	E K U I T A S			
	Modal Pemerintah Daerah	5.3.19	45.163.204.582	43.663.204.582
	PMP Yang Belum Ditetapkan Statusnya	5.3.20	24.093.536.254	24.093.536.254
	Modal Donasi	5.3.21	4.273.158.197	4.273.158.197
	Cadangan Umum	5.3.22	88.560.318	88.560.318
	Saldo Laba (Rugi) :	5.3.23	-	-
	Saldo (Rugi) Tahun Lalu		(30.234.785.854)	(28.011.419.076)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan		243.178.421	(1.732.625.844)
	Saldo Laba (Rugi)		(29.991.607.433)	(29.744.044.920)
	JUMLAH EKUITAS		43.626.851.918	42.374.414.431
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		46.166.749.011	46.242.468.020

Sumedang, 22 Februari 2023
PDAM Tirta Medal Sumedang

Materai 10000

TORD. MOCH. TAUFIK SURIKUSUMAH, SE

PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022				
NO.	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp
1	2	3	5	6
I	PENDAPATAN USAHA	5.4.1		
1)	Pendapatan Air		42.700.814.230	40.339.503.233
2)	Pendapatan Non Air		1.720.813.750	838.693.000
3)	Pendapatan Lain-Lain		144.730.026	743.566.741
	SUB JUMLAH PENDAPATAN USAHA		44.566.358.006	41.921.762.974
II	BEBAN USAHA	5.4.2		
1)	Beban Operasi Air		1.902.780.304	2.096.903.675
2)	Beban Pegawai		25.564.769.814	22.685.220.588
3)	Beban Bahan Bakar		0	55.567.750
4)	Beban Listrik		3.668.020.272	3.994.550.711
5)	Beban Pemeliharaan		1.431.792.391	2.531.616.718
6)	Beban Umum Kantor		513.549.688	597.053.760
7)	Beban Hubungan Langganan		519.441.590	370.205.613
8)	Beban Penelitian dan Pengembangan		285.538.500	58.509.500
9)	Beban Umum Keuangan		52.810.100	96.874.000
10)	Rupa-Rupa Beban Umum		3.845.492.418	4.179.809.940
11)	Beban penyisihan Piutang		165.007.526	524.206.381
12)	Beban Penyusutan dan Amortisasi		6.358.829.023	6.453.879.592
13)	Beban Pajak		-	-
14)	Beban Lain-Lain		15.147.960	9.990.589
	SUB JUMLAH BEBAN USAHA		44.323.179.585	43.654.388.817
15)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		243.178.421	(1.732.625.844)
	PAJAK PENGHASILAN		-	-
	LABA (RUGI) BERSIH		243.178.421	(1.732.625.844)

Sumedang, 22 Februari 2023
PDAM Tirta Medal Sumedang

Materai 10000

TORD. MOCH. TAUFIK SURIKUSUMAH, SE
Direktur Utama

PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

No	Keterangan	Modal Pemerintah	PMP. Yang Belum Ditetapkan Statusnya	Modal Donasi	Cadangan Umum	Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
		(Rp) 3	(Rp) 4	(Rp) 5	(Rp) 6	(Rp) 7	(Rp) 8
1	2						
	Per 01 Januari 2021	41.563.204.583	24.093.536.254	4.273.158.197	88.560.317	(20.441.270.945)	49.577.188.406
	<u>Mutasi 2021:</u>						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.100.000.000					2.100.000.000
	Modal Donasi						-
	Pembagian Laba					(7.570.148.131)	-
	Penyesuaian Laba/(Rugi) Tahun Lalu					(1.732.625.844)	(7.570.148.131)
	Laba/(Rugi) tahun Berjalan						(1.732.625.844)
	Per 31 Desember 2021	43.663.204.583	24.093.536.254	4.273.158.197	88.560.317	(29.744.044.920)	42.374.414.431
	<u>Mutasi 2022:</u>						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000					1.500.000.000
	Modal Donasi						-
	Pembagian Laba					(490.740.934)	-
	Penyesuaian Laba/(Rugi) Tahun Lalu					243.178.421	(490.740.934)
	Laba/(Rugi) tahun Berjalan						243.178.421
	Per 31 Desember 2022	45.163.204.582	24.093.536.254	4.273.158.197	88.560.318	(29.991.607.433)	43.626.851.918

(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

KETERANGAN	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba Tahun Berjalan	243.178.421	(1.732.625.844)
Penyesuaian		
Penyisihan Piutang Langganan	165.007.526	524.206.381
Penyusutan & Amortisasi	6.358.829.022	6.453.879.593
Arus Kas Sebelum Perubahan Modal Kerja	6.767.014.969	5.245.460.131
Perubahan Modal Kerja :		
Piutang Langganan	(536.055.029)	(491.344.365)
Persediaan	(1.044.906.558)	1.561.396.037
Pembayaran Di Muka	(1.219.343.506)	3.085.310.322
Piutang Lain - lain	12.409.083	2.517.087.287
Uang Muka Kepada Pemda	-	-
Biaya Ditangguhkan	(166.910.422)	-
Hutang Usaha	(1.205.979.318)	39.943.900
Hutang Lain - lain	591.259.075	(1.490.962.636)
Biaya YMH Dibayar	-	(336.456.209)
Pendapatan Diterima Dimuka	-	(126.500)
Hutang Iuran Dana Pensiun	(713.436.253)	713.436.253
Hutang ADB Jatuh Tempo	-	-
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	(4.282.962.928)	5.598.284.089
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi :		
Perolehan Aset Tetap	(1.230.665.728)	(4.638.114.709)
Aset Tetap dlm Penyelesaian	(99.919.909)	3.184.856.868
Aset Tetap Yang Tidak Dan Belum Digunakan	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	(413.010.000)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.330.585.638)	(1.866.267.840)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :		
Modal Pemerintah	1.500.000.000	2.099.999.999
Modal Donasi	-	-
Penyesuaian Laba/Rugi Tahun Lalu (ADB)	-	-
Penyesuaian Laba/Rugi Tahun Lalu	(490.740.934)	(7.570.148.131)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	1.009.259.066	(5.470.148.132)
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	2.162.725.469	3.507.328.248
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.735.371.755	1.228.043.507
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	6.898.097.224	4.735.371.755

(Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

**PERUMDA TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Umum

5.1.1 Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1985 tanggal 20 Maret 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum. Sesuai perkembangan peran PDAM, telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang tanggal 12 Agustus 2020.

a. Tujuan Perusahaan

Tujuan pendirian PERUMDA Tirta Medal Kabupaten Sumedang adalah :

- Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dengan Perumda Air Minum;
- Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
- Terwujudnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Kegiatan Usaha Pokok

Kegiatan utama Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan air minum, penyelenggaraan penyediaan dan pengelolaan pelayanan air minum dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Permodalan

Modal sebagai hak pemilik harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Penyetoran modal dalam bentuk kas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dicatat dalam klasifikasi Modal Disetor.

Penyerahan aset tetap, barang persediaan atau barang lainnya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan sebagai penyertaan dicatat dalam klasifikasi Penyertaan Pemerintah, sedangkan untuk yang belum ditetapkan statusnya diklasifikasikan dalam Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya.

Pembayaran dimuka bagian laba kepada pemerintah daerah dicatat dalam kelompok ekuitas dengan klasifikasi Pembayaran Dimuka Kepada Pemerintah.

5.1.2 Susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang periode tahun 2021-2025 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 346 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2021-2025 tanggal 25 Agustus 2021.

Susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| - Ketua | : Maman Nurachman, S.E., Ak., M.Ak. |
| - Anggota | : Ginan Wibawa, S.HI., S.H., M.H. |

**PERUMDA TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

5.1.2 Susunan Dewan Pengawas dan Direksi (lanjutan)

Direksi Perumda Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang masa jabatan tahun 2020-2025 diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP.427-HUK/2020 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Masa Jabatan Tahun 2020-2025 tanggal 23 Oktober 2020.

Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Rd. Moch. Taufik Suriakusumah.,S.E.
- Direktur Teknik : Deni Rochendi S.,ST,.M.M

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, diangkat seorang sekretaris berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Nomor 800/16/Kep.DP-Perumda.AM/2021 tentang Penunjukkan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2021-2025 tanggal 27 Agustus 2021, yaitu:

Tati Kusmiati, SE : Pelaksana Sub Bagian Pendayagunaan BUMD dan Lembaga Keuangan pada
Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

5.1.3 Data Pegawai Tahun 2021

Jumlah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2021 sebanyak 526 orang, terdapat pegawai Perjanjian Kerja Antar Waktu (PKWT) sebanyak 16 orang, dengan jumlah total sebanyak 542 orang. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2020 sebanyak 555 orang dikarenakan sebanyak 29 orang memasuki masa pensiun normal.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	31-Des-2021	31-Des-2022	Perubahan
1	Pasca Sarjana	10	10	-
2	Sarjana	151	143	-
3	Sarjana Muda	15	14	-
4	SLTA	340	331	-
5	SLTP	7	4	-
6	SD	3	2	-
	Jumlah	526	504	

b. Menurut status kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	31-Des-2021	31-Des-2022	Perubahan
1	Pegawai Tetap	517	504	-
2	Calon Pegawai	6	-	-
3	Honorer	3	-	-
	Jumlah	526	504	-

**PERUMDA TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

5.1.4 Data Pelanggan Tahun 2022

Jumlah pelanggan air bersih yang terlayani oleh PERUMDA Tirta Medal Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2022 sebanyak 35.465 sambungan langganan. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah sambung langganan per 31 Desember 2021 sebanyak 35.640 sambungan langganan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Golongan	31-Des-2021	31-Des-2022	Perubahan
1	Rumah Tangga	34.009	33.837	-
2	Pemerintah	397	390	-
3	Niaga	792	796	-
4	Industri	8	9	-
5	Sosial (Umum & Khusus)	434	433	-
	Jumlah	35.640	35.465	-

5.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.2.1 Penyajian Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi PERUMDA d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan mulai 1 Januari 2011 telah dilakukan mutasi/perubahan ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

5.2.2 Periode Pembukuan

Periode pembukuan (Accounting period) adalah tanggal 01 Januari sampai 31 Desember.

5.2.3 Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan penjualan air diakui pada saat rekening tagihan air diterbitkan setiap bulan (Basis Akrua).
- Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan non air lainnya yang dibayar secara tunai diakui pada saat pembayaran (Basis kas), sedangkan jika pembayaran dilakukan dengan cara mencicil diakui pada saat dokumen tagihan cicilan diterbitkan sesuai jatuh tempo tiap-tiap cicilan (Basis Akrua).
- Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima (Basis Kas).
- Biaya diakui pada periode terjadinya transaksi (Basis Akrua).

5.2.4 Penilaian Piutang

Piutang disajikan dalam laporan keuangan dengan nilai tunai yang dapat direalisasikan. Besarnya penyisihan piutang usaha ditetapkan berdasarkan Daftar Saldo Rata-rata (DSR) piutang tak tertagih untuk 3 (tiga) tahun yang berakhir pada masing-masing kelompok dengan perhitungan :

- $(\text{Nilai DSR untuk 3 tahun terakhir Piutang} \times 100\%) / 3$ atau Rata-rata % DSR untuk 3 (tiga) tahun x Saldo Piutang Akhir Tahun
- Piutang yang telah berumur lebih dari dua tahun disisihkan sebesar 100% selanjutnya diusulkan untuk dihapuskan kepada Dewan Pengawas, (kecuali untuk instansi Pemerintah dan TNI/POLRI). Untuk Piutang yang telah dihapus tetap dicatat secara *ekstra comptable* dan terus diupayakan penagihannya.

5.2.5 Persediaan

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- Untuk Penilaian bahan operasi kimia dan bahan instalasi menggunakan *Perpetual inventory method*; persediaan dicatat berdasarkan setiap mutasi (penerimaan maupun pengeluaran) sehingga nilai dan kualitasnya dapat diketahui setiap saat.

**PERUMDA TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

5.2.5 Persediaan (lanjutan)

- b. Untuk penilaian persediaan ATK dan bahan operasi lainnya, persediaan awal dan pembelian di catat sebagai biaya dan pada akhir tahun dikoreksi oleh persediaan akhir hasil dari opname fisik.

Penilaian persediaan menggunakan metode *first in first out* (FIFO), yaitu pemakaian bahan dibebankan sebagai biaya sebesar harga beli awal atas saldo persediaan yang ada.

5.2.6 Pengeluaran Barang Modal

Pengeluaran barang modal adalah pengeluaran untuk pembelian barang berwujud siap pakai dalam operasi dan tidak untuk dijual, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan nilai harga satuan di atas Rp 200.000,00.

5.2.7 Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, sedangkan penyusutannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.

No	Kelompok		Masa Manfaat	Metode Penyusutan	Tarif Penyusutan
			(Tahun)		
1	Harta Berwujud				
1.1	Bukan Bangunan				
	a	Kelompok 1	4	Garis Lurus	25%
	b	Kelompok 2	8	Garis Lurus	12,50%
	c	Kelompok 3	16	Garis Lurus	6,25%
	d	Kelompok 4	20	Garis Lurus	5%
1.2	Bangunan				
	a	Permanen	20	Garis Lurus	5%
	b	Tidak Permanen	10	Garis Lurus	10%

5.2.8 Aset Tetap Dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian adalah pekerjaan bangunan dan atau pemasangan sambungan/instalasi air yang belum selesai.

Terhadap Aset Tetap yang sudah selesai pengerjaannya dipindahkan ke Akun Aset Tetap sesuai dengan kelompok Akunnya dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima. Terhadap Aset Tetap dalam penyelesaian tidak dilaksanakan penyusutan.

5.2.9 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud/fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional, aset tidak berwujud diamortisasi selama masa manfaat aset tersebut. Aset tidak berwujud disajikan sebesar nilai netto yaitu biaya perolehan setelah dikurangi amortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.

Jenis Aset tidak berwujud antar lain berupa biaya riset dan pengembangan, *software*, paten, hak cipta. Untuk biaya riset dan pengembangan serta *software* diamortisasi selama 8 (Delapan) tahun dengan metode garis lurus.

5.2.10 Aset Tetap tidak dan belum Digunakan

- **Aset tetap tidak digunakan** adalah Aset Tetap yang sudah usang/rusak tidak dapat digunakan lagi dalam operasi PERUMDA d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan untuk aset tetap ini disusutkan penuh (100%).

Terhadap Aset Tetap yang tidak digunakan tersebut yang telah disusutkan seluruhnya (100%), selanjutnya diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PERUMDA TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

5.2.10 Aset Tetap tidak dan belum Digunakan (lanjutan)

- **Aset tetap belum digunakan** adalah Aset Tetap yang ada di PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, yang belum digunakan sehubungan belum ada air untuk mengalirkan, dan belum ada bukti Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut dari Pemda Kabupaten Sumedang kepada PERUMDA d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

5.2.11 Pencatatan Hutang/Kewajiban

Pada dasarnya seluruh kewajiban/hutang dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tepat atau tidak. Namun, atas kewajiban yang timbul dan jumlahnya belum dapat ditentukan secara pasti, dicatat berdasarkan jumlah taksiran yang wajar.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)		
5.3.1 KAS / BANK	6.898.097.224	4.735.371.755
Jumlah tersebut terdiri dari :		
Kas		
- Kas Kecil	-	24.779.721
- Kas Rekonsiliasi Bank	2.983.092	2.963.090
- Kas Besar / Tunai PDAM	-	-
Jumlah Kas	2.983.092	27.742.811
Saldo Bank terdiri dari :		
- Kas Cabang/Unit	32.268.800	6.338.300
- Bank Jabar Untuk Kantor Pusat	270.196.981	170.066.164
- Bank Jabar Untuk Kantor Pusat (PMP)	3.313.236.960	1.949.345.600
- Bank Bjb Syariah	31.602.601	819.461.276
- BRI Untuk Kantor Pusat	324.389.596	156.943.666
- BRI Untuk Kantor Pusat BP	13.913.550	18.467.693
- BJB Cabang Sumedang	6.723.474	6.656.600
- BPR Untuk Cabang Cimalaka		
- BPR Untuk Cabang Paseh		
- BPR Untuk Cabang Tanjungkerta		
- BJB Cabang Tanjungsari		
- BRI Untuk Cabang Tanjungsari		
- BRI Untuk Up Darmaraja		
- BRI Untuk Cabang Tomo		
- BJB Cabang Cikeruh		
- Bank BJB Syariah - Tasedo	1.000.838.322	-
- Bank Bpr Bunga Deposito	31.493.799	-
- BPR Tanki Air	101.463.130	27.476.260
- BPR AMDK	68.986.919	52.873.385
Jumlah Bank	5.195.114.132	3.207.628.944
- Deposito Bank Sumedang - BPR	1.700.000.000	1.500.000.000
Jumlah Kas / Bank	6.898.097.224	4.735.371.755
5.3.2 PIUTANG LANGGANAN	5.653.317.995	5.282.270.492
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang langganan yang terdiri dari:		
- Piutang Air	7.844.224.831	7.313.254.802
- Piutang Non Air	245.581.000	240.496.000
Jumlah	8.089.805.831	7.553.750.802
- Penyisihan Piutang Langganan	(2.436.487.836)	(2.271.480.310)
Jumlah Piutang Langganan	5.653.317.995	5.282.270.492

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.3 PERSEDIAAN	2.067.948.090	1.023.041.532
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan terdiri dari :		
- Persediaan alat-alat tulis & barang cetakan	12.784.200	12.784.200
- Persediaan bahan kimia	303.761.946	15.514.675
- Persediaan Bahan Instalasi	1.751.401.944	994.742.657
Jumlah Persediaan	2.067.948.090	1.023.041.532
5.3.4 PEMBAYARAN DIMUKA	1.766.340.464	546.996.958
Jumlah tersebut merupakan saldo pembayaran dimuka terdiri dari :		
- Biaya dibayar di muka sewa gedung kantor cabang	-	-
- Uang Muka Operasi	1.748.340.464	380.086.536
- Uang Muka Kerja Proyek	-	166.910.422
- Uang Pembelian Kendaraan	18.000.000	-
- Uang Muka Sewa Kantor	-	-
Jumlah Pembayaran Dimuka	1.766.340.464	546.996.958
5.3.5 ASET TETAP	25.309.897.762	29.937.788.580
Jumlah tersebut merupakan nilai buku terdiri dari :		
Nilai Perolehan Aset Tetap		
- Tanah	1.979.502.679	1.977.002.679
- Instalasi Sumber Air	7.464.128.837	7.464.128.837
- instalasi Pompa	4.071.020.817	4.020.361.637
- Instalasi Pengolahan	14.435.555.617	14.407.467.617
- Instalasi Transdist	53.165.938.143	52.437.023.919
- Instalasi Non Pabrik Air	6.199.027.706	5.778.523.381
Jumlah Aset Tetap	87.315.173.799	86.084.508.070
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap :		
- Instalasi Sumber Air	(3.208.273.679)	(2.857.102.203)
- Instalasi Pompa	(3.218.424.594)	(2.979.356.341)
- Instalasi Pengolahan	(9.525.885.200)	(8.145.722.425)
- Instalasi Transdist	(41.369.042.109)	(37.941.609.882)
- Instalasi Non Pabrik Air	(4.683.650.455)	(4.222.928.639)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(62.005.276.037)	(56.146.719.490)
Nilai Buku Aset Tetap	25.309.897.762	29.937.788.580
5.3.6 ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN	1.380.919.626	1.280.999.716
Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari :		
- Sambungan Langganan	485.498.988	352.913.274
- Penyempurnaan jaringan pipa trans & distribusi	208.607.455	241.273.260
- Instalasi Sumber	171.976.000	171.976.000
- Instalasi Pengolahan	63.389.250	63.389.250
- Bangunan dan Gedung	451.447.933	451.447.933
Jumlah Aset Tetap dalam Penyelesaian	1.380.919.626	1.280.999.716

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.7 ASET TAK BERWUJUD	1.895.358.443	2.286.506.678
- Nilai Perolehan	4.095.636.020	4.095.636.020
- Akumulasi Amortisasi	(2.200.277.577)	(1.809.129.342)
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	1.895.358.443	2.286.506.678
5.3.8 ASET TETAP YANG TIDAK DAN BELUM DIGUNAKAN	492.112.835	492.112.835
Jumlah tersebut merupakan jumlah aset yang tidak digunakan yang dipisahkan dari aset tetap dalam tahun 1999 dan aset tetap eks proyek yang belum dioperasikan terdiri dari :		
Aset tetap tidak digunakan :		
- 2 unit pompa genset BEARWARD	59.919.200	59.919.200
- 9 unit panel listrik Cabang Wado	75.336.242	75.336.242
- Bangunan BPT Cimalela Cab. Wado	18.740.175	18.740.175
- 1 buah rumah genset Cabang Wado	52.760.807	52.760.807
- Bangunan Workshop Cimalela Wado	24.332.566	24.332.566
Jumlah Aset Tetap Tidak Digunakan	231.088.991	231.088.991
Aset tetap belum digunakan		
Instalasi Sumber:		
Instalasi Transmisi dan Distribusi:		
- Jlr. Distr. PVC 100mm Cikoneng-R.Purut	107.016.543	107.016.543
- Jlr. Distr. PVC 150mm Jatihurip-Asabri	42.612.033	42.612.033
- Jlr. Distr. PVC 200mm Kt Kulon-B.Asih	316.937.530	316.937.530
- Jlr. Distr. PVC 50mm Cikoneng-Ganeas	25.546.730	25.546.730
Jumlah Aset Tetap Belum Digunakan	492.112.835	492.112.835
Jumlah Aset Tetap Yang Tidak dan Belum Digunakan	723.201.826	723.201.826
- Akumulasi Penyisihan	(231.088.991)	(231.088.991)
Nilai Buku Aset Tetap Yang Tidak dan Belum Digunakan	492.112.835	492.112.835
Disamping Mengelola aset sendiri , PDAM juga diberi aset pengelolaan oleh instansi pemerintah Pusat maupun daerah yang untuk dikelola PDAM.		
5.3.9 PIUTANG LAIN-LAIN	99.349.190	111.758.273
Terdiri dari :		
- Piutang Pegawai	4.844.493	4.844.493
- Piutang Cabang/Pelaksana	94.504.697	106.913.780
- Rupa-rupa piutang lainnya	-	-
Jumlah Piutang Lain-lain	99.349.190	111.758.273
5.3.10 BIAYA DITANGGUHKAN	603.407.381	545.621.200
Jumlah tersebut merupakan biaya ditangguhkan Perumda d/h PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:		
- Nilai Perolehan	4.454.760.030	4.287.849.608
- Amortisasi	(3.851.352.649)	(3.742.228.409)
Nilai Buku	603.407.381	545.621.200

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.11 HUTANG USAHA	259.445.502	704.551.000
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang usaha terdiri dari :		
- CV. Garuda Mas	101.975.859	230.400.859
- PT. INDAH CIPTA KARYA GEMILANG	82.906.215	88.528.210
- CV. Maju Jaya Abadi	74.563.425	74.563.425
- PT. Brataco	1,50	-
- CV Karya Purna Abadi	1,44	350.511.161
- CV. Jaya Abadi	0,40	16.870.165
- PT. Adira Dinamika Multi Finance	-	430.361.000
- PT. Srikandi Diamon Motors	-	207.940.000
- CV. DUTA HARAPAN	-	41.500.000
- CV. Multi Langgeng Abadi	-	24.750.000
- PT. Anugerah Tirta Sukses	-	-
- CV. Muji Jaya	-	-
- CV.Haxa	-	-
- PT. Multi Insrumentasi	-	-
- PT. Panca Saroha Jaya	-	-
- PT. Muri	-	-
- PT. Abadi Sugih Perdana	-	-
- CV. Hera Dwi Jaya	-	-
- CV. Intan Jaya Mas	-	-
- CV. Nirwana	-	-
- CV. Moreska	-	-
- PT. Anugerah Lestari Kemindo	-	-
- CV. Narita	-	-
- PT. Banyu Persada Permai	-	-
- PT. Asia Indo Raya	-	-
- PT. Bestindo Putra Mandiri	-	-
- CV. Djoergi Arga Utama	-	-
- CV. Dua Putra	-	-
- CV. Planeet Pompa	-	-
- CV. Banyu Persada	-	-
- CV. Perdana CiPTa Kreasi	-	-
- PT. Niaga Raya Agung	-	-
Jumlah Hutang Usaha	259.445.502	704.551.000
5.3.12 HUTANG LAIN-LAIN	2.280.451.591	1.689.192.516
Terdiri dari		
- Hutang lain-lain	1.614.936.491	1.689.192.516
- Pembiayaan jangka pendek	665.515.100	-
5.3.13 HUTANG PAJAK DAN BEA MATERAI	-	-
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang pajak dan bea materai		
- Hutang Pajak	-	-
- Hutang Bea Materai	-	-
Jumlah Hutang Pajak dan Bea Materai	-	-

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.14 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	-	-
Jumlah tersebut merupakan beban yang masih harus dibayar pada bulan Desember 2021 dan 2020.		
- Biaya listrik	-	-
- Biaya Telepon	-	-
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
5.3.15 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	-	-
Terdiri dari		
- Pendapatan diterima dimuka	-	-
Jumlah Pendapatan diterima dimuka	-	-
5.3.16 HUTANG IURAN DANA PENSIUN	-	713.436.253
Terdiri dari		
- Hutang iuran dana pensiun Dapenma Pamsi	-	713.436.253
Jumlah Hutang Iuran Dana Pensiun	-	713.436.253
5.3.17 HUTANG ADB YANG JATUH TEMPO	-	-
5.3.18 HUTANG ADB BELUM JATUH TEMPO	-	-
5.3.19 MODAL PEMERINTAH DAERAH	45.163.204.582	43.663.204.582
Modal Pemerintah daerah berasal dari :		
- Penetapan Modal Awal	610.175.882	610.175.882
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2010	500.000.000	500.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2011 dan 2012	2.950.000.000	2.950.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2013	2.400.000.000	2.400.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2014	1.400.000.000	1.400.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2015	3.250.000.000	3.250.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2016	2.798.000.000	2.798.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2017	4.629.000.000	4.629.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2018	4.649.367.436	4.649.367.436
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2019	3.918.552.264	3.918.552.264
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2020	3.200.000.000	3.200.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2021	2.100.000.000	2.100.000.000
- Penyertaan Kabupaten Sumedang 2022	1.500.000.000	-
Jumlah Modal Penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	33.905.095.582	32.405.095.582
- Penyertaan Modal berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Eks ADB)	11.258.109.000	11.258.109.000
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang	45.163.204.582	43.663.204.582

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.20 PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT / DAERAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA	24.093.536.254	24.093.536.254
Penyertaan Pemerintah Pusat :		
- Sejak 1997 s/d 2004	7.845.810.807	7.845.810.807
- Prasedimentasi Genteng, Tanjungsari tahun 2000	892.071.000	892.071.000
- WTP Tomo tahun 2010	2.720.092.000	2.720.092.000
- No. S-1549/HK.03/1992 tanggal 23-12-1992	1.012.446.949	1.012.446.949
- No. 5-1897/A/52/0597 tanggal 05-05-1997	8.605.926.498	8.605.926.498
- Penyertaan Modal Asal Proyek WJUDSP Tahun 2003	1.333.396.000	1.333.396.000
Jumlah Penyertaan Pemerintah Pusat	22.409.743.254	22.409.743.254
Penyertaan Modal Propinsi Jawa Barat	285.329.000	285.329.000
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang		
Saldo penyertaan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp.1.398.464.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada proyek pengeboran sumur dalam (Arthesis) yang dikelola oleh Dinas PU Kabupaten Sumedang.	1.398.464.000	1.398.464.000
Jumlah Penyertaan Pemerintah Pusat / Daerah yang Belum Ditentukan Statusnya	24.093.536.254	24.093.536.254
5.3.21 MODAL DONASI	4.273.158.197	4.273.158.197
Modal Donasi / Hibah terdiri dari :		
Modal Donasi s.d. 31 Desember 2016	3.789.765.197	3.789.765.197
Mutasi donasi dari kementerian PUPR tahun 2017, terdiri dari :		
- Pengadaan dan pemasangan accessories di intake cgendel kec. Tanjungsari		
No. 030/005/25, 002/NPHD/DCKTRPP/2016	113.705.000	113.705.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories di WTP cigendel kec. Tanjungsari		
No. 030/009/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	50.703.000	50.703.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories di BPS lebak jati kec. Tanjungsari		
No. 030/008/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	53.687.000	53.687.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories perpompaan dan pipa dilingkungan unpad jatinangor		
No. 030/008/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	189.864.000	189.864.000
- Pengadaan dan pemasangan accessories perpompaan dan pipa dilingkungan perumahan griya jatinangor		
No. 030/008/25, 002/NPHD/DCKTRPP/perkim2016	75.434.000	75.434.000
Jumlah penambahan Modal Donasi	483.393.000	483.393.000
Jumlah Modal Donasi	4.273.158.197	4.273.158.197

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<p>Modal Hibah Dari Kementerian PUPR yang dikeluarkan Pencatatan Neraca dikarenakan Perumda Air Minum Titra Medal Kab. Sumedang belum menerima BA Serah Terima Aset dari Pemerintah Kab. Sumedang (BA Serah Terima Aset baru sebatas penyerahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah) hasil rekomendasi Audit KAP Tahun Buku 2020, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPAM ikk sumedang selatan (PKPAM -jabar-61) TA 2014 senilai Rp. 7.009.129.000,- - SPAM ikk sukasari (PKPAM -jabar-19) TA 2015 senilai Rp. 15.050.360.000 - SPAM ikk di kawasan kumuh sumedang utara (PKPAM -jabar-40) TA 2015 senilai Rp. 1.752.459.000 - SPAM MBR IKK sumedang selatan (PKPAM-Jabar-09) TA 2015 senilai Rp. 2.418.279.000 - SPAM MBR IKK sukasari (PKPAM-Jabar-45) TA 2015 senilai Rp. 2.753.387.000 		
5.3.22 CADANGAN UMUM	88.560.318	88.560.318

Cadangan Umum sebesar Rp. 53.567.240,16 berasal dari pembagian laba sesuai Perda Nomor : 6 Tahun 1985 tanggal 20 Maret 1985 yaitu :

Pembagian Laba	Cad Umum	Dansospen		
- Tahun 1989 s.d 1998	8.239.353	4.774.486	13.013.840	13.013.840
- Tahun 1990	4.711.602	3.141.067	7.852.669	7.852.669
- Tahun 1991	7.966.426	5.310.951	13.277.377	13.277.377
- Tahun 1992	17.684.694	11.789.796	29.474.490	29.474.490
- Tahun 1993	5.060.398	3.373.599	8.433.997	8.433.997
- Tahun 1994	9.904.767	6.603.178	16.507.945	16.507.945
Jumlah Cadangan	53.567.240	34.993.077	88.560.318	88.560.318

5.3.23 SALDO LABA/RUGI

Jumlah tersebut adalah akumulasi laba/rugi sebagai berikut :

- Akumulasi rugi sampai dengan tahun lalu	(30.234.785.854)	(28.011.419.076)
Koreksi saldo awal	-	-
Penyesuaian atas uang muka operasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan s.d. Tahun 2020	-	-
Saldo laba (rugi) tahun-tahun lalu setelah penyesuaian	(30.234.785.854)	(28.011.419.076)
- Laba/rugi Tahun Berjalan	243.178.421	(1.732.625.844)
Jumlah Saldo Laba/(Rugi)	(29.991.607.433)	(29.744.044.920)

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	<u>Tahun 2022</u> (Rp)	<u>Tahun 2021</u> (Rp)
5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN LABA RUGI		
5.4.1 <u>PENDAPATAN USAHA</u>	<u>44.566.358.006</u>	<u>41.921.762.974</u>
1). Pendapatan Air		
Jumlah tersebut merupakan pendapatan air terdiri dari :		
- Penjualan Air	37.636.079.100	35.544.137.250
- Jasa Administrasi	4.261.950.000	4.299.755.000
- Tangki Air	410.480.500	190.464.193
- Air Kemasan	391.354.630	300.304.790
- Lainnya (materai)	950.000	4.842.000
Jumlah Pendapatan Air	<u>42.700.814.230</u>	<u>40.339.503.233</u>
2). Pendapatan Non Air		
Jumlah tersebut merupakan pendapatan non air tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari :		
- Sumbangan Baru	1.279.489.000	683.625.000
- Pendaftaran dan Penelitian	8.502.000	5.932.000
- Biaya Izin	8.590.000	5.972.000
- Penyambungan kembali dan BBN	35.320.000	125.730.000
- Denda Rekening Air	261.205.000	11.370.000
- Penggantian Meter Air	6.077.500	4.837.500
- Non Air Lainnya	121.630.250	1.226.500
Jumlah Pendapatan Non Air	<u>1.720.813.750</u>	<u>838.693.000</u>
3). Pendapatan Lain-Lain		
Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain- lain tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :		
- Pendapatan Atas Penghapusan Utang Usaha	-	698.834.309
- Pendapatan Lainnya	144.730.026	44.732.432
Jumlah Pendapatan Lain-lain	<u>144.730.026</u>	<u>743.566.741</u>
5.4.2 <u>BEBAN USAHA</u>	<u>44.323.179.585</u>	<u>43.654.388.817</u>
1). Operasi Air		
Jumlah tersebut merupakan biaya operasi air yang terdiri dari pajak/retribusi air, pemakaian bahan kimia, dan pembelian air curah serta beban usaha pemasangan, dengan uraian sebagai berikut :		
1 Beban Pajak Air Bawah Tanah	-	-
2 Beban Pajak Air Permukaan Sumber	28.611.000	69.773.100
3 Beban Kontribusi Air	215.400.000	205.032.500
4 Beban bahan Kimia	1.333.776.379	1.322.233.025
5 Beban Kemitraan	179.684.425	306.935.550
6 Beban Operaasi Pengolahan Air Lainnya	7.665.000	20.029.000
7 Beban Pemeriksaan kualitas Air	81.948.500	81.324.000
8 Beban Operasi Transdist Lainnya	55.695.000	86.151.000
9 Beban Operasi Air Lainnya	-	5.425.500
Jumlah Operasi Air	<u>1.902.780.304</u>	<u>2.096.903.675</u>

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	<u>Tahun 2022</u> (Rp)	<u>Tahun 2021</u> (Rp)
2). Beban Pegawai		
Jumlah tersebut merupakan biaya pegawai yang terdiri dari gaji, tunjangan, kesejahteraan, rupa-rupa beban pegawai, dengan uraian sebagai berikut :		
1 Beban Pegawai Pengolahan	3.771.564.869	3.302.304.632
2 Beban Pegawai Transmisi Dan Distribusi	4.771.613.370	5.050.736.243
3 Beban Pegawai Umum	17.021.591.575	14.332.179.713
Jumlah Beban Pegawai	<u>25.564.769.814</u>	<u>22.685.220.588</u>
3). Beban Bahan Bakar		
Jumlah tersebut merupakan biaya bahan bakar pada instalasi sumber, pengolahan transmisi dan distribusi, dan Non pabrik air, dengan uraian sebagai berikut :		
1 Beban Bahan Bakar Sumber	-	2.822.000
2 Beban Bahan Bakar Pengolahan	-	2.472.000
3 Beban Bahan Bakar Transmisi Dan Distribusi	-	-
4 Beban Bahan Bakar Umum	-	50.273.750
Jumlah Beban Bahan Bakar	<u>-</u>	<u>55.567.750</u>
4). Beban Listrik		
Jumlah tersebut merupakan biaya listrik sumber, pembangkit listrik sumber, pengolahan, transmisi dan distribusi, umum, dan penerangan. Dengan uraian sebagai berikut :		
1 Beban Listrik Sumber	3.260.020.004	3.058.022.238
2 Beban Listrik Pengolahan	60.621.069	576.831.615
3 Beban Listrik Transmisi Dan Distribusi	204.131.230	216.656.276
4 Beban Listrik Umum	143.247.969	143.040.582
Jumlah Beban Listrik	<u>3.668.020.272</u>	<u>3.994.550.711</u>
5). Beban Pemeliharaan		
Jumlah tersebut merupakan biaya pemeliharaan, instalasi sumber pengolahan, pipa transmisi dan distribusi, pipa dinas, water meter, kendaraan, dll. Dengan uraian sebagai berikut :		
1 Pemeliharaan Instalasi Sumber	58.178.000	170.295.000
2 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan	98.712.890	108.505.000
3 Pemeliharaan Instalasi Transmisi & Distribusi	1.188.964.001	2.118.642.246
4 Pemeliharaan Instalasi Umum	85.937.500	134.174.472
Jumlah Beban Pemeliharaan	<u>1.431.792.391</u>	<u>2.531.616.718</u>
6). Beban Umum Kantor		
Jumlah tersebut merupakan biaya ATK, cetakan, foto copy, telepon dan faximile, beban rapat dan tamu, dan rupa-rupa beban kantor. Dengan uraian sebagai berikut:		
1 Beban ATK dan Fotocopy	214.692.547	227.042.358
2 Beban Barang Cetak	36.822.050	5.742.000
3 Beban Perlengkapan komputer	6.965.000	5.395.600

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4 Beban telepon & faximile	91.674.956	88.866.006
5 Beban Komunikasi Data	-	18.300.000
6 Beban rapat dan tamu	18.968.250	109.473.600
7 Benda Pos Dan Materai	4.654.000	8.708.500
8 Beban Cleaning Service	-	-
9 Beban rupa-rupa kantor	139.772.885	133.525.696
Jumlah Beban Umum Kantor	513.549.688	597.053.760
7). Beban Hubungan Langganan		
Jumlah tersebut merupakan biaya pembacaan meter penagihan rekening, penyusunan Perda, iklan, sosialisasi, dsb. Dengan uraian sebagai berikut :		
1 Beban penyusunan perda	22.500.000	67.405.000
2 Beban penagihan rekening	3.756.500	9.012.300
3 Beban Humas dan Pembinaan Masyarakat	11.129.000	-
4 Beban Tanki Air	147.205.351	136.496.703
5 Beban sosialisasi	-	9.000.000
6 Beban Promosi (Iklan)	40.700.000	6.000.000
7 Beban rupa-rupa Hublang	264.615.589	142.291.610
8 Beban Pembacaan Meter	27.660.000	
9 Beban Pembuatan DIL	875.150	
10 Rupa-rupa Beban Urusan Langganan	1.000.000	
Jumlah Beban Hubungan Langganan	519.441.590	370.205.613
8). Beban Penelitian dan Pengembangan		
Jumlah tersebut merupakan biaya penelitian dan survey perencanaan teknik, perencanaan bidang usaha dan keuangan, dsb.		
1 Beban Survey dan Penelitian	20.063.000	16.841.500
2 Beban Litbang Teknik Produksi	5.467.500	-
3 Beban Litbang Bid. Usaha & Keuangan	9.000.000	-
4 Beban Litbang Komputerisasi Dan Jaringan	-	15.000.000
5 Beban Litbang Sumber Daya Manusia	251.008.000	23.015.000
6 Beban Litbang Manajemen Perkantoran	-	-
7 Rupa-Rupa Penelitian dan Pengembangan	-	3.653.000
Jumlah Beban Penelitian dan Pengembangan	285.538.500	58.509.500
9). Beban Umum Keuangan		
- Beban Bunga Pinjaman	19.894.100	96.874.000
- Beban Asuransi	6.616.000	-
- Beban Administrasi	26.300.000	-
10). Rupa-Rupa Beban Umum		
Rupa-rupa beban umum tahun 2020 dan 2019 dengan rincian		
1 Beban Pajak Kendaraan	9.899.600	17.500.000
2 Beban Langganan Media Cetak	19.250.000	21.465.000
3 Beban Perjalanan Dinas Pegawai	182.882.326	71.693.000
4 Biaya Proses Perijinan	98.600.000	-
5 Beban Audit	91.300.000	100.700.000
6 Beban Sewa	116.200.000	88.425.000
7 Beban Asuransi	-	-
8 Beban Keamanan	66.750.000	54.450.000
9 Beban Pengobatan/BPJS	-	-

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
10 Beban PBB	23.679.909	25.676.166
11 Beban Bantuan Hukum		
12 Beban Koordinasi	761.410.301	701.823.176
13 Beban Bantuan Dan Sumbangan	146.468.000	126.028.500
14 Beban Dewan Pembina	-	-
15 Beban Dewan Pengawas	-	-
16 Beban Honor Dewan Pengawas	109.799.767	129.111.532
17 Beban Honor Anggota Dewan Pengawas	-	-
18 Beban Tunjangan Dewan Pengawas	-	-
19 Rupa-Rupa Beban Pengawas	-	6.000.000
20 Biaya Perjalanan Dinas Dewan Pengawas	-	-
21 Beban THR Dewan Pengawas	8.429.723	19.168.240
22 Beban Gaji Direksi	301.894.428	290.721.246
23 Beban Tunjangan Direksi	231.793.909	23.960.300
24 Beban Dana Representasi	-	74.743.540
25 Rupa-Rupa Beban Direksi	-	-
26 Beban Ongkos angkut Bahan Bakar	16.000.000	18.500.000
27 Beban Seminar Dan Latihan	-	-
28 Beban Perjalanan Dinas Direksi	-	24.833.750
29 Beban Bantuan Hukum	-	1.500.000
30 Pajak Penghasilan	360.000.000	467.133.271
31 Rupa-Rupa Beban Umum Lainnya	1.283.700.555	1.916.377.219
32 Beban Bahan Bakar Operasional	17.433.900	-
Jumlah Rupa-rupa Beban Umum	3.845.492.418	4.179.809.940
11). Beban Penyisihan Piutang		
Beban Penyisihan Piutang Usaha tahun 2020 dan 2019		
1 Beban penyisihan Piutang Air	165.007.526	524.206.381
2 Beban penyisihan Piutang Non Air	-	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	165.007.526	524.206.381
12). Beban Penyusutan Dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 dan 2019, terdiri dari		
1 Beban Penyusutan Sumber Air	351.171.476	347.651.390
2 Beban Penyusutan Pompa	239.068.253	273.532.795
3 Beban Penyusutan Pengolahan Air	1.380.162.775	1.388.565.473
4 Beban Penyusutan Trandis	3.427.432.227	3.583.913.748
5 Beban Penyusutan Instalasi Non Pabrik Air	460.721.816	376.848.919
Jumlah Beban Penyusutan	5.858.556.547	5.970.512.326
6 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	391.148.236	374.243.026
7 Beban Amortisasi Biaya Ditangguhkan	109.124.240	109.124.240
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.358.829.023	6.453.879.592
13). Beban Pajak	-	-
Merupakan beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tahun 2020 dan 2019		

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022**

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
14). Beban Lain-Lain		
Beban lain-lain adalah beban diluar usaha perusahaan tahun 2019 dan 2018 terdiri dari :		
1 Beban Administrasi Bank	312.000	2.095.424
2 Beban Bank Lainnya	1.912.500	22.500
3 Beban Bank Buku Cek Dan Giro	1.558.000	640.000
4 Beban Pajak Bank	11.365.460	7.232.665
5 Beban Lainnya	-	-
Jumlah Beban Lain-lain	15.147.960	9.990.589
15). Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak Penghasilan	243.178.421	(1.732.625.844)
Pajak Penghasilan	-	-
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	243.178.421	(1.732.625.844)

LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2022
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Hal.
PERNYATAAN AUDITOR INDEPENDEN	i
PERNYATAAN DIREKSI	ii
NERACA	2
LAPORAN LABA (RUGI)	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
LAPORAN ARUS KAS	5
 <i>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</i>	
1. UMUM	6
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI	7
3. PENJELASAN NERACA	12/17
4. PENJELASAN LABA (RUGI)	17/19
5. INFORMASI TAMBAHAN	20/20
6. TINGKAT KESEHATAN BANK	21/25

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nomor : 00014/2.0570/AU.2/07/1371-2/1/II/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Dewan Komisaris dan Direksi
PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
di Sumedang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Bank Sumedang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumda BPR Bank Sumedang tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke catatan 5.9. atas Laporan Keuangan terlampir yang menjelaskan ketidakpastian yang terkait dengan kelangsungan usaha perusahaan setelah tanggal neraca yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19, karena sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Perusahaan, Pandemi masih berlangsung. Opini tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi 1 bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, MSc. & Rekan
Rekan,



Mochammad Rivai, SE., Ak., CA., CPA.

No. Izin AP : 1371

No. Izin UKAP : KEP-353/KM/6/2003

Bandung, 06 Februari 2023



SURAT PERNYATAAN DIREKSI

**TENTANG
TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
PERUMDA BPR BANK SUMEDANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANTI KRISYANA DEWI, S.E.
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Mayor Abdurachman No. 78 Sumedang 45322

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Sumedang.
2. Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Sumedang telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Sumedang telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan Perumda BPR Bank Sumedang tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggungjawab atas Sistem Pengendalian Intern dalam Perumda BPR Bank Sumedang

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sumedang 06 Februari 2023

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG



YANTI KRISYANA DEWI, S.E.

Direktur Utama

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	AUDITED 31 DESEMBER 2022	AUDITED 31 DESEMBER 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	2c, 3.1.	5.987.019.387,92	4.702.308.975,00
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2d, 3.2.	2.204.368.631,00	1.959.833.108,00
Penempatan Pada Bank Lain	2e, 3.3.	73.051.114.155,69	67.084.268.622,13
Penyisihan Kerugian Tab. & Deposito	2g, 3.4.	(241.610.118,00)	(217.828.830,00)
Kredit Yang Diberikan	2f, 3.5.	265.972.320.888,00	243.643.325.177,00
Penyisihan Kerugian Kredit	2i, 3.6.	(11.320.582.582,96)	(9.730.975.279,44)
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	2h, 3.7.	745.855.850,00	838.355.850,00
JUMLAH ASET LANCAR		336.398.486.211,65	308.279.287.622,69
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap Dan Inventaris (Nilai Buku)	2j, 3.8.	6.461.132.018,67	7.003.334.326,67
Aset Tidak Berwujud	2l, 3.9.	1,00	1,00
Aset Lain-Lain	3.10.	3.685.838.325,13	3.649.212.046,00
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		10.146.970.344,80	10.652.546.373,67
TOTAL ASET		346.545.456.556,45	318.931.833.996,36
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	2m, 3.11.	1.145.028.603,70	1.132.817.063,26
Utang Bunga	3.12.	172.176.387,00	179.872.702,00
Utang Pajak	3.13.	3.816.904.207,36	3.966.689.139,98
Simpanan	2n, 3.14.	224.919.512.596,62	211.987.965.940,25
Simpanan Dari Bank Lain	3.15.	17.110.018.019,78	9.149.075.675,82
Pinjaman Yang Diterima	3.16	10.440.964.985,00	13.517.694.989,00
Kewajiban Imbal Kerja	2o, 3.17.	3.846.669.139,30	3.332.242.091,30
Kewajiban Lain-Lain	3.18.	11.398.670.124,32	9.639.184.572,69
JUMLAH KEWAJIBAN		272.849.944.063,08	252.905.542.174,30
EKUITAS			
Modal Disetor	3.19.	42.019.740.978,65	36.519.740.978,65
Cadangan	2p, 3.20.	18.332.254.233,78	15.538.680.080,78
Laba/Rugi Ditahan	3.21.	-	-
Laba/Rugi Tahun Berjalan Setelah Pajak	3.22.	13.343.517.280,94	13.967.870.762,63
JUMLAH EKUITAS		73.695.512.493,37	66.026.291.822,06
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		346.545.456.556,45	318.931.833.996,36

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Atas nama dan mewakili Direksi
06 Februari 2023



BANK SUMEDANG
 Perumda Bank Perkreditan Rakyat

YANTI KRISYANA DEWI, SE
Direktur Utama

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
LAPORAN LABA-RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
Dengan Angka Pembandingan Tahun 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	AUDITED 31 DESEMBER 2022	AUDITED 31 DESEMBER 2021
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Bunga Kontraktual	2q, 3.23.	50.659.831.348,60	50.090.036.232,34
Pendapatan Provisi & Administrasi	2r, 3.23.	4.274.811.595,00	4.063.644.855,00
Total Pendapatan Bunga		54.934.642.943,60	54.153.681.087,34
Beban Bunga	2q, 3.24.	(12.015.504.876,96)	(11.772.981.038,14)
Pendapatan Netto		42.919.138.066,64	42.380.700.049,20
Pendapatan Operasional Lainnya	3.25	2.919.185.519,60	3.333.274.541,25
Jumlah Pendapatan Operasional		45.838.323.586,24	45.713.974.590,45
Beban penyisihan kerugian/penyusutan			
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	3.26	3.180.419.455,84	2.886.034.533,20
Beban Peny. Aset tetap/ Ditangguhkan	3.27	857.533.154,00	1.029.936.884,90
Beban Pemasaran	3.28	511.382.716,00	373.949.732,00
Beban Administrasi dan Umum	3.29	23.931.224.122,99	23.252.278.729,89
Jumlah Beban Operasional		28.480.559.448,83	27.542.199.879,99
Laba (Rugi) Operasional		17.357.764.137,41	18.171.774.710,46
Pendapatan dan Beban Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	3.30	301.332.902,89	322.478.733,15
Beban Non Operasional	3.31	498.675.552,00	559.693.541,00
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(197.342.649,11)	(237.214.807,85)
Laba (Rugi) Setelah Pendapatan/Beban Operasional		17.160.421.488,30	17.934.559.902,61
Taksiran Pajak Penghasilan	2s, 3.32.	3.816.904.207,36	3.966.689.139,98
Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak		13.343.517.280,94	13.967.870.762,63

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Atas nama dan mewakili Direksi

06 Februari 2023



YANTI KRISYANA DEWI, SE
Direktur Utama

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
 LAPORAN PERUBAHAN POSISI EKUITAS
 PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Modal		Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Umum	Saldo Laba Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan	Jumlah
	Modal Disetor	Tambahan Modal						
Saldo Akhir 31 Desember 2020	32.669.740.978,50	-	320.468.648,83	-	7.811.077.211	5.299.031.644,37	48.393.589.401,07	57.932.865.961,88
Pembentukan cadangan	-	-	-	-	-	-	-	2.428.611.225,00
Dana setoran modal ekuitas	3.850.000.000,00	-	-	-	1.214.305.612,50	1.214.305.612,50	-	3.850.000.000,00
Laba (Rugi) periode tahun lalu	-	-	(12.143.056.327,45)	-	-	-	-	(12.143.056.327,45)
Laba (Rugi) periode berjalan	-	-	13.967.870.762,63	-	-	-	13.967.870.762,63	13.967.870.762,63
Saldo Per 31 Desember 2021	36.519.740.978,50	-	2.145.284.284,01	-	9.025.342.823,71	6.513.337.257,07	62.361.460.164	66.026.291.822,06
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	1.396.787.076,50	1.396.787.076,50	-	2.793.574.153,00
Pesembahan/Pengurangan	5.500.000.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000.000,00
Laba (Rugi) periode tahun lalu	-	-	(13.967.870.762,63)	-	-	-	-	(13.967.870.762,63)
Laba (Rugi) periode berjalan	-	-	13.343.517.280,94	-	-	-	13.343.517.280,94	13.343.517.280,94
Saldo Per 31 Desember 2022	42.019.740.978,50	-	1.520.929.802,32	-	10.422.129.900,21	7.910.124.333,57	75.764.977.445	73.695.512.493,37

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pakok

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-2022 Audited	31-Des-2021 Audited
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1. Saldo Laba/Rugi Setelah Pajak	13.343.517.280,94	13.967.870.762,63
2. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap/Aset tidak berwujud	857.533.154,00	1.029.936.884,90
Penyisihan Kerugian Kredit	1.589.607.303,52	(2.006.417.653,10)
3. Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(244.535.523,00)	443.767.101,00
Penempatan Pada Bank Lain	(5.966.845.533,56)	7.012.332.269,20
Penyisihan Kerugian Tabungan dan Deposito	23.781.288,00	(35.083.416,00)
Kredit Yang Diberikan	(22.328.995.711,00)	(36.877.196.388,00)
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	92.500.000,00	(274.053.400,00)
Aset lain-lain	(36.626.279,13)	(490.503.991,00)
Kewajiban segera	12.211.540,44	242.950.406,76
Utang Bunga	(7.696.315,00)	(29.988.372,00)
Utang Pajak	(149.784.932,62)	716.397.139,98
Simpanan	12.931.546.656,37	25.553.186.103,32
Simpanan Dari Bank Lain	7.960.942.343,96	560.945.577,14
Pinjaman Yang Diterima	(3.076.730.004,00)	(5.045.148.708,00)
Kewajiban Imbal Kerja	514.427.048,00	775.810.098,00
Kewajiban lain-lain	1.759.485.551,63	294.477.254,42
Arus kas neto dari aktivitas operasi	7.274.337.868,55	5.839.281.669,25
B. Arus Kas dari Aktivitas Inventaris		
1. Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(315.330.846,00)	(873.713.600,00)
2. Aset Tidak berwujud	-	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(315.330.846,00)	(873.713.600,00)
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
1. Setoran Modal	5.500.000.000,00	3.850.000.000,00
2. Cadangan Umum dan Khusus	2.793.574.153,00	-
3. Laba (Rugi) Tahun Lalu	(13.967.870.762,63)	-
4. Koreksi Laba	-	(9.714.444.902,45)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(5.674.296.609,63)	(5.864.444.902,45)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	1.284.710.412,92	(898.876.833,20)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	4.702.308.975,00	5.601.185.808,20
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	5.987.019.387,92	4.702.308.975,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

1 Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Laporan Keuangan tahun 2022 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2020 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam catatan atas laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan ikhtisar kebijakan akuntansi Perumda BPR Bank SUMEDANG Periode 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut :

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip kesinambungan (*going concern*) serta mengikuti konversi harga historis (*historical cost*). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar akrual (*accrual basis*), kecuali tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai non-performing dan dicatat secara dasar kas (*cash basis*).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK-ETAP (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

2.2 Transaksi Hubungan istimewa

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries)
- 2) Perusahaan asosiasi (*associated companies*)
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung satu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor).
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
- 5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam 3) dan 4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Hubungan istimewa terutama berkenaan dengan beberapa akun dalam laporan keuangan yaitu kredit yang diberikan, deposito berjangka, dan giro. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak ketiga.

Dalam kegiatan usahanya, bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sesuai dengan SK Direksi BI No. 31/61/KEP/DIR adalah sbb :

- a. Pemegang saham 10 % atau lebih dari modal disetor bank.
- b. Anggota Dewan Komisaris.
- c. Anggota Dewan Direksi.
- d. Keluarga dari pihak-pihak pada huruf a s/d c.
- e. Pejabat bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif.
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam huruf a sampai e yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan 25 % atau lebih dari modal disetor perusahaan.

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

- 2.3 Kas**
Kas meliputi seluruh uang kertas dan logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang berada di kas
- 2.4 Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima**
Pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit dengan kualitas lancar atau performing yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari bank lain.
- 2.5 Penempatan Pada Bank Lain**
Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari Giro pada bank umum, Tabungan pada bank lain, deposito berjangka pada bank lain, dan sertifikat deposito pada bank umum diakui sebagai nilai nominal. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas penempatan tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari saldo penempatan tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian)
- 2.6 Kredit Yang Diberikan**
Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah bruto tagihan Bank yang belum dilunasi oleh nasabah setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit dan amortisasi provisi kredit serta ditambah biaya kredit. Kredit yang diberikan dihapusbukkan pada saat Kredit tersebut dipastikan memenuhi persyaratan hapus buku dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Penerimaan dari kredit performing diakui melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit nonperforming yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan ketertagihannya sangat tipis.

- 2.7 Restrukturisasi Kredit**
Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsensi khusus kepada debitur, yaitu konsensi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.
- Rekstrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan masih memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Cara Restrukturisasi yaitu :
- . Modifikasi persyaratan kredit : penurunan suku bunga, perpanjangan, pengurangan tunggakan
 - . Penambahan fasilitas kredit : fresh money atau konversi tunggakan bunga.

2.8 Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih atau AYDA adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela pemilik agunan berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR (*debt to asset swap*)

Penyelesaian kredit terkait agunan :

1. Penyerahan agunan sebagai penyelesaian kredit. Pengambilalihan agunan merupakan penyelesaian kredit. AYDA dicatat hanya yang berasal dari penyelesaian kredit.
2. Penjualan agunan (bersama atau dengan persetujuan debitur) untuk melunasi kewajiban debitur. Pengambilalihan agunan merupakan bagian dari proses penyelesaian kredit.

Pengambilalihan Agunan :

1. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR tidak mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur tidak membayar kekurangannya maka perjanjian kredit selesai dan kemudian dicatat sebagai AYDA
2. Jika hasil penjualan agunan melebihi kewajiban debitur, BPR mengembalikan kelebihan kepada debitur atau jika hasil penjualan agunan kurang dari kewajiban debitur, debitur membayar kekurangannya maka perjanjian kredit belum selesai dan kemudian dicatat dalam Rekening Administratif.

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2.9 Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aset produktif pada akhir tahun dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai pembentukan penyisihan kerugian aset produktif.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan RI Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Perkreditan Rakyat Pasal 16 bahwa BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif. Adapun besarnya pembentukan penyisihan untuk masing-masing aktiva produktif menurut Peraturan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Cadangan Umum

- 0,50% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Lancar .
- Pada tahun 2020 terdapat ketentuan terbaru terkait adanya penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid -19) tercantum dalam POJK No. 34/POJK.03/2020 bahwa BPR dapat membentuk PPAP umum kurang dari 0,5% atau tidak membentuk PPAP Umum untuk PPAP Penempatan pada bank lain dan kredit/pembiayaan dengan kualitas lancar. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2022.

Cadangan Khusus

- 3% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan (Perlakuan berlaku sejak Desember 2021)
- 10% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurang dengan nilai agunan
- 50% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurang dengan nilai agunan
- 100% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan Macet

Penyisihan Kerugian aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sbb:

- 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia;
- 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- 50% (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;
- 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/ hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atas pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;
- 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit;
- 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris; dan

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

Penyisihan Kerugian aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi. (Lanjutan)

- 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pada tahun 2020 terdapat ketentuan terbaru terkait adanya penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid -19) tercantum dalam POJK No. 34/POJK.03/2020 mengenai perhitungan nilai agunan yang diambil alih. BPR menghitung persentase nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR menggunakan posisi laporan bulan Maret 2020. Peraturan ini berlaku sejak 1 April 2020 s.d 31 Maret 2022.

2.10 **Aset Tetap**

Aset tetap dibukukan berdasarkan nilai perolehannya. Berkaitan dengan Undang-undang No.10 tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991 (pasal 1), kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ke-13 Undang-undang No. 7 tahun 1983 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dala kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan, pengelompokan aktiva tetap bukan bangunan berdasarkan SK Menteri Keuangan No.138/KMK-03/2002, dan aset tetap & inventaris kecuali tanah diamortisasi pada bulan dilakukan pengeluaran dan atau selesainya pekerjaan. Prosentase penyusutan/amortisasi sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat Ekonomis	Penyusutan Tarif/Tahun
- Bangunan dan Gedung	20 Tahun	5,00%
- Kendaraan Roda 2	4 Tahun	25,00%
- Kendaraan Roda 4	8 Tahun	12,50%
- Peralatan kantor 1	4 Tahun	25,00%
- Peralatan kantor 2	8 Tahun	12,50%

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Aset tetap yang terjual dikeluarkan dari kelompok aset yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan tersebut dilaporkan dalam Laporan Aktivitas tahun yang bersangkutan.

Aset tetap yang dibuat sendiri dan sampai akhir periode akuntansi belum selesai dibukukan ke aset dalam proses.

2.11 **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.12 **Aset Tidak Berwujud**

Aktiva tidak berwujud diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama 8 tahun atau dengan tarif sebesar 12,5% per tahun.

2.13 **Kewajiban Segera**

Kewajiban Segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar antara lain : pajak dibayar dimuka, beban dibayar dimuka dan lainnya.

2.14 **Simpanan**

Tabungan, dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

2.15 Kewajiban Imbal Kerja

Imbalan Kerja merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja yang diterapkan BPR berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Kewajiban Imbalan Kerja adalah saldo kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Kewajiban Segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos yang di diskontokan.

Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu. Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*). Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah diskonto (*discounted amount*).

PERUMDA BPR SUMEDANG sampai saat ini mengadopsi ketentuan pemberian imbalan pasca kerja sesuai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke dalam peraturan intern perusahaan. Diimplementasikan dengan mencadangkan dalam akun kewajiban imbal kerja sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.846.669.139,3,-. Undang-undang ini merupakan perubahan dari ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003.

2.16 Cadangan

Akun ini dipergunakan untuk mencatat perkiraan cadangan umum dan tujuan yang berkaitan dengan penyisihan dari laba yang diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 94 Tahun 2017

2.17 Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode *akrual*. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai nonperforming (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (cash basis).

Pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

2.18 Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

2.19 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan ditentukan berdasarkan pendapatan yang sudah melebihi angka Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar), berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sesuai dengan peraturan perpajakan tarif yang dikenakan adalah 22% sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku pada Tahun 2020.

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

3. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
3.1. KAS		
- Kas Divisi Non Operasional Pusat	2.646.253.083,62	2.176.802.993,00
- Kas Cimalaka	582.294.504,30	228.764.682,00
- Kas Tanjungsari	1.050.601.800,00	766.662.200,00
- Kas Ranca Kalong	88.836.800,00	114.688.600,00
- Kas Buah Dua	289.200.000,00	199.100.000,00
- Kas Tomo	443.863.600,00	632.957.700,00
- Kas Darmaraja	557.087.100,00	285.790.600,00
- Kas Wado	328.882.500,00	297.542.200,00
	<u>5.987.019.387,92</u>	<u>4.702.308.975,00</u>
3.2. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA		
- Kantor Cabang Cimalaka	532.627.437,00	500.466.317,00
- Kantor Cabang Tanjungsari	377.214.302,00	315.319.347,00
- Kantor Cabang Ranca Kalong	245.478.927,00	152.103.500,00
- Kantor Cabang Buah Dua	295.414.494,00	214.416.200,00
- Kantor Cabang Tomo	208.192.650,00	214.600.937,00
- Kantor Cabang Darmaraja	289.649.370,00	260.294.067,00
- Kas Cabang Wado	255.791.451,00	302.632.740,00
	<u>2.204.368.631,00</u>	<u>1.959.833.108,00</u>
3.3. PENEMPATAN PADA BANK LAIN	73.051.114.155,69	67.084.268.622,13
- Giro	14.859.975.506,36	7.547.681.655,81
- Tabungan	31.691.138.649,33	42.186.586.966,32
- Deposito	26.500.000.000,00	17.350.000.000,00
	<u>73.051.114.155,69</u>	<u>67.084.268.622,13</u>
Penempatan Giro :		
- Rek. Giro Bank BRI	1.570.717.310,00	3.331.210.349,00
- Rek. Giro Bank JTRUST Indonesia	2.717.420.763,00	2.649.940.080,00
- Rek. Giro Bank JABAR	8.567.666.882,00	127.529.538,00
- Rek. Giro Bank Woori Bersaudara	1.506.954.008,85	1.383.935.416,49
- Rek. Giro Bank BUKOPIN	38.552.916,17	39.557.966,37
- Rek. Giro Bank ANDARA (Bank Oke Indonesia)	24.019.658,34	15.508.305,95
- Rek. Giro Bank Permata Syariah	434.643.968,00	-
	<u>14.859.975.506,36</u>	<u>7.547.681.655,81</u>
Penempatan Tabungan :		
- Rek. Tabungan Bank BRI	651.247.863,68	330.412.150,72
- Rek. Tabungan Bank Mandiri	10.029.056.139,76	4.100.698.861,42
- Rek. Tabungan Bank BNI	1.171.485.690,00	1.095.009.544,00
- Rek. Tabungan Bank Jabar	14.639.445.521,00	25.914.434.062,00
- Rek. Tabungan Bank BJB	1.445.167.217,00	1.452.231.913,00
- Rek. Tabungan Bank Mega	2.773.217.154,54	8.775.292.446,54
- Rek. Tabungan Bank Muamalat	206.634.964,35	518.507.988,64
- Rek. Tabungan Bank Jabar Banten	262.785.550,00	-
- Rek. Tabungan BPR Intan JABAR	512.098.549,00	-
	<u>31.691.138.649,33</u>	<u>42.186.586.966,32</u>

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

3.3.	PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)	-	-
	Penempatan Deposito :		
	- . Deposito Bank Permata	5.000.000.000,00	-
	- . Deposito Bank Andara (Bank Oke Indonesia)	-	350.000.000,00
	- . Deposito Bank Oke Indonesia	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	- . Deposito Bank Muamalat	13.000.000.000,00	5.500.000.000,00
	- . Deposito BPR Kertaraharja	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	- . Deposito BPR Intan Jabar	-	500.000.000,00
	- . Deposito PD BPR Serang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	- . Deposito PT Bank AMAR Indonesia	-	2.000.000.000,00
	- . Deposito BPR Raharja Wanayasa	500.000.000,00	500.000.000,00
	- . Deposito BPR Cipatujah Jabar Perseroda	1.000.000.000,00	-
		<u>26.500.000.000,00</u>	<u>17.850.000.000,00</u>
3.4.	PENY KERUGIAN TABUNGAN & DEPOSITO	(241.610.118,00)	(217.828.830,00)
3.5.	KREDIT YANG DIBERIKAN	265.972.320.888,00	243.643.325.177,00
	Kredit Yang Diberikan	270.262.357.790,00	248.016.203.350,00
	Pendapatan Provisi & Administrasi -/-	(4.290.036.902,00)	(4.372.878.173,00)
	Jumlah	<u>265.972.320.888,00</u>	<u>243.643.325.177,00</u>
	Jenis Kredit		
	- . Kredit Usaha Mikro	33.536.328.524,00	22.306.931.541,00
	- . Kredit Usaha Kecil	8.760.265.698,00	4.476.395.579,00
	- . Kredit Usaha Menengah	1.688.332.800,00	1.045.634.248,00
	- . Kredit Konsumtif	224.377.430.768,00	220.187.241.982,00
	- . Kredit PINTEK	1.900.000.000,00	-
		<u>270.262.357.790,00</u>	<u>248.016.203.350,00</u>
	Kolektibilitas		
	- . Lancar	247.936.160.970,00	225.324.020.143,00
	- . DPK	8.352.108.273,00	10.910.472.312,00
	- . Kurang Lancar	1.897.808.272,00	1.257.864.913,00
	- . Diragukan	1.429.345.234,00	1.162.377.106,00
	- . Macet	10.646.935.041,00	9.361.468.876,00
		<u>270.262.357.790,00</u>	<u>248.016.203.350,00</u>
	Informasi Pokok :		
a.	<i>Kredit dijamin dengan jaminan tunai (cash colateral) benda bergerak dan atau tidak bergerak dengan pengikatan secara hak tanggungan dan dibawah tangan serta jaminan lain yang umumnya diterima oleh bank.</i>		
b.	<i>Tingkat Suku Bunga Kredit berkisar antara 12% s/d 24% tarif flat</i>		
c.	<i>Kredit yang diberikan kepada pihak terkait sebesar Rp. 1.122.132.500,- atau sebesar 0,0042%.</i>		
d.	<i>Jumlah relaksasi kredit terkait dengan POJK 1No. 11/POJK.03/2020 sebanyak 56 debitur, sebesar Rp. 3.009.288.506 ,-</i>		
3.6.	PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT	(11.320.582.582,96)	(9.730.975.279,44)
3.7.	AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)	745.855.850,00	838.355.850,00
	Merupakan saldo AYDA terdiri dari :		
	- . Tanah	-	-
	- . Tanah dan Bangunan	745.855.850,00	838.355.850,00
		<u>745.855.850,00</u>	<u>838.355.850,00</u>

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

3.8.	ASET TETAP DAN INVENTARIS	6.461.132.018,67	7.003.334.326,67
-	Tanah	3.025.092.050,00	3.025.092.050,00
-	Bangunan	5.429.880.497,71	5.362.411.516,71
-	Kendaraan	4.857.971.385,00	4.826.651.385,00
-	Peralatan/Perlengkapan Kantor	5.935.146.764,71	5.718.604.899,71
	Nilai Perolehan	19.248.090.697,42	18.932.759.851,42
-	Bangunan	(2.673.794.887,71)	(2.396.477.514,71)
-	Kendaraan	(4.452.461.636,63)	(4.195.703.374,63)
-	Peralatan/Perlengkapan Kantor	(5.660.702.154,41)	(5.337.244.635,41)
	Akumulasi Penyusutan	(12.786.958.678,75)	(11.929.425.524,75)
	Nilai Buku Aset Tetap	6.461.132.018,67	7.003.334.326,67
3.9.	ASET TIDAK BERWUJUD		
	Nilai Perolehan (Software)	60.500.000,00	60.500.000,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(60.499.999,00)	(60.499.999,00)
		1,00	1,00
	ASET TIDAK TETAP		
3.10.	ASET LAIN-LAIN	3.685.838.325,13	3.649.212.046,00
-	Persediaan Materai	6.457.000,00	4.433.000,00
-	Persediaan Barang Promosi	62.677.500,00	31.822.500,00
-	Persediaan Barang Cetak	76.774.525,00	79.194.730,00
-	Titipan EDC	202.336.747,00	-
-	Pajak Dibayar Dimuka Psl 25	3.335.424.500,02	3.533.042.000,00
-	Penampung Qris	1.739.737,11	-
-	Aset lainnya (Elektronik Tol)	428.316,00	719.816,00
	Jumlah Aset Lain-Lain	3.685.838.325,13	3.649.212.046,00
	KEWAJIBAN		
3.11.	KEWAJIBAN SEGERA	1.145.028.603,70	1.132.817.063,26
-	PPH Pasal 4 ayat 2	113.357.163,36	109.650.391,36
-	PPH Pasal 21	361.763.560,68	415.119.656,82
-	Titipan Bunga Deposito/TDP/IBS Mobile	84.376	5.578.550,00
-	Titipan Notaris	39.803.631,00	28.918.631,00
-	Titipan Premi Asuransi	-	-
-	Titipan Jamsostek	6.262.765,00	5.229.453,00
-	Lainnya	623.757.107,66	568.320.381,08
	Jumlah Kewajiban Segera	1.145.028.603,70	1.132.817.063,26
3.12.	UTANG BUNGA	172.176.387,00	179.872.702,00
3.13.	UTANG PAJAK	3.816.904.207,36	3.966.689.139,98
-	PPH Pasal 25 Badan	3.816.904.207,36	3.966.689.139,98
	<i>Lihat pada lampiran 1</i>	3.816.904.207,36	3.966.689.139,98

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

3.14.	SIMPANAN	224.919.512.596,62	211.987.965.940,25
	Simpanan dalam tabungan terdiri dari :		
	- Tabungan Tandang	110.144.852.575,89	99.385.715.866,62
	- Tabungan Kotak	15.720.158.330,74	15.985.882.377,62
	- Tabungan Anak Sekolah	1.038.928.697,00	1.007.235.193,00
	- Tabungan Cahaya	3.070.632.211,17	3.092.399.794,17
	- Tabungan SIMAPAN	27.538.761.204,82	23.292.182.708,84
	- Tabungan Simpel	236.529.577,00	
	Jumlah Simpanan	157.749.862.596,62	142.763.415.940,25
	Simpanan Dalam Deposito	67.169.650.000,00	69.224.550.000,00
	Jumlah Simpanan	224.919.512.596,62	211.987.965.940,25
<p>Tingkat bunga Tabungan rata-rata antara 3 % s/d 4 % dan tingkat bunga Deposito rata-rata antara 5 % s/d 7 %. Atas saldo Tabungan yang mempunyai hubungan istimewa/pihak terkait sebesar Rp. 959.994.483,38 - atau sebesar 0,006 %. Atas saldo Deposito yang mempunyai hubungan istimewa/pihak terkait sebesar Rp. 150.000.000,- atau sebesar 0,002 %</p>			
3.15.	SIMPANAN DARI BANK LAIN	17.110.018.019,78	9.149.075.675,82
	Simpanan Dalam Tabungan		
	- PT. BPR MITRA KANAKA SANTOSA	1.110.018.019,78	1.049.075.675,82
	Simpanan Dalam Deposito		
	- PT. BPR Kerta Raharja	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	- PD. BPR Bank Sleman	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- PT. BPR Gunadhana Mitrasembada	1.000.000.000,00	600.000.000,00
	- PT. BPR Mulia Yuganta	-	500.000.000,00
	- PERUMDA BPR bank Kota Bogor	2.000.000.000,00	-
	- PERUMDA BPR Garut	2.000.000.000,00	-
	- PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama	4.000.000.000,00	-
	Jumlah	16.000.000.000,00	8.100.000.000,00
	Jumlah Simpanan Dari Bank Lain	17.110.018.019,78	9.149.075.675,82
3.16.	PINJAMAN DITERIMA	10.440.964.985,00	13.517.694.989,00
	Pinjaman Diterima Dari Bank :		
	- Bank BJB (Installment Loan)	10.499.999.999,00	13.599.999.999,00
		10.499.999.999,00	13.599.999.999,00
	- Biaya Provisi dan transaksi	(59.035.014,00)	(82.305.010,00)
	Jumlah Pinjaman Diterima	10.440.964.985,00	13.517.694.989,00

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

3.16. PINJAMAN DITERIMA (Lanjutan)

Perjanjian Kredit yang diterima dari Bank Lain :

1. Bank BJB (Installmen Loan)
Berdasarkan Persetujuan Kredit No. 451/KOM/2020 Tanggal 30 September 2022 Bank mendapat fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jenis Fasilitas Kredit	: KMK Cash Collateral Revolving
- Plafond	: Rp. 5.000.000.000,-
- Bunga	: 9,75%
- Jangka Waktu	: 12 Bulan

Perumda BPR Bank SUMEDANG telah mendapat Kredit dari Bank BJB yaitu Kredit Installmen Loan dan Demand Loan dengan Nilai Principal sebesar Rp. 15.000.000.000,-Tingkat Suku Bunga Efektive Rate 9.75 % p.a dan jangka waktu antara 1 tahun s/d 5 tahun.

3.17. KEWAJIBAN IMBAL KERJA	<u>3.846.669.139,30</u>	<u>3.332.242.091,30</u>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Merupakan Dana cadangan Pesangon s/d 31 Desember 2020.

*Lihat CALK Poin 2n tentang Kewajiban Imbal Kerja

3.18 KEWAJIBAN LAIN-LAIN	11.398.670.124,32	9.639.184.572,69
- Dana Pendidikan	391.911.703,00	755.000.637,00
- Dana CSR	131.186.965,91	267.150.842,91
- Dana Hari Tua (Penghargaan Kerja Direksi/DP)	1.212.317.525,62	700.317.525,62
- Dana Cuti Pengurus	74.456.610,50	41.456.610,50
- Dana Seragam Karyawan	78.590.000,00	-
- Titipan EDC	202.336.747,00	-
- Lainnya	64.055.472,29	92.342.256,66
- Bunga Tabungan Point	9.243.815.100,00	7.782.916.700,00
Jumlah Kewajiban Lain-Lain	<u>11.398.670.124,32</u>	<u>9.639.184.572,69</u>

E K U I T A S

3.19. MODAL	42.019.740.978,65	36.519.740.978,65
<u>Modal Disetor</u>		
- Modal Dasar	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
- Modal Belum Disetor	(57.980.259.021,35)	(63.480.259.021,35)
Jumlah Modal Disetor	<u>42.019.740.978,65</u>	<u>36.519.740.978,65</u>
3.20. CADANGAN		
- Cadangan Umum	10.422.129.900,21	9.025.342.823,71
- Cadangan Tujuan	7.910.124.333,57	6.513.337.257,07
Jumlah Cadangan	<u>18.332.254.233,78</u>	<u>15.538.680.080,78</u>

* Lihat Laporan Pada Posisi Ekuitas Halaman 4

3.22. LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	13.343.517.280,94	13.967.870.762,63
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

3.23.	PENDAPATAN BUNGA	54.934.642.943,60	54.153.681.087,34
	Pendapatan Bunga Kontraktual		
	<u>Bunga Dari Bank Lain</u>		
-	Pendapatan Bunga Tabungan	429.380.019,52	493.249.092,41
-	Pendapatan Bunga Giro	156.197.446,85	209.337.963,61
-	Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	688.990.312,23	970.468.239,32
	<u>Bunga Dari Pihak Ketiga Bukan Bank</u>		
-	Pendapatan Bunga Kredit	49.385.263.570,00	48.416.980.937,00
	Jumlah Pendapatan Bunga	50.659.831.348,60	50.090.036.232,34
-	Pendapatan Provisi & Administrasi	4.274.811.595,00	4.063.644.855,00
	Total Pendapatan Bunga	54.934.642.943,60	54.153.681.087,34
3.24.	BEBAN BUNGA	12.015.504.876,96	11.772.981.038,14
	<u>Kepada Bank Lain</u>		
-	Bunga Tabungan	60.942.343,96	60.945.577,14
-	Bunga Deposito	662.767.914,00	510.208.316,00
-	Bunga Pinjaman Diterima	857.480.557,00	1.233.896.793,00
-	Bunga Lainnya Pada Bank	48.269.996,00	63.598.923,00
	Jumlah	1.629.460.810,96	1.868.649.609,14
	<u>Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank</u>		
-	Bunga Tabungan	6.141.326.454,00	5.505.866.833,00
-	Bunga Deposito	3.794.835.551,00	4.015.862.876,00
-	Bunga Pinjaman	-	-
-	Bunga Lainnya	449.882.061,00	382.601.720,00
	Jumlah	10.386.044.066,00	9.904.331.429,00
	Totan Beban Bunga	12.015.504.876,96	11.772.981.038,14
	PENDAPATAN NETO	42.919.138.066,64	42.380.700.049,20
3.25.	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2.919.185.519,60	3.333.274.541,25
-	Sanksi/Denda Deposito Jatuh Ytempo	29.597.655,00	31.999.118,00
-	Administrasi Tabungan	526.686.379,09	461.124.096,95
-	Fee Kredit Chaneling	1.210.000,00	1.276.750,00
-	Kelebihan Penyisihan Kerugian	1.567.030.864,32	1.824.025.746,30
-	Pendapatan Debius/Hapus buku	677.372.039,00	979.596.683,00
-	Pendapatan Lainnya	117.288.582,19	35.252.147,00
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	2.919.185.519,60	3.333.274.541,25
	TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL	45.838.323.586,24	45.713.974.590,45
3.26.	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN	3.180.419.455,84	2.886.034.533,20
-	Beban penyisihan kerugian Aktiva Produktif	3.180.419.455,84	2.886.034.533,20
	Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	3.180.419.455,84	2.886.034.533,20

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

3.27.	BEBAN PENY. ASET TETAP/B.DITANGGUHKAN	857.533.154,00	1.029.936.884,90
-	Beban Penyusutan Bangunan	277.317.373,00	233.904.291,90
-	Beban Penyusutan Kendaraan	256.758.262,00	363.366.251,00
-	Beban Penyusutan Inventaris	323.457.519,00	432.666.342,00
	Jumlah Beban Penyusutan	857.533.154,00	1.029.936.884,90
-	Beban Ditangguhkan/Amortisasi aset Tidak Berwujud	-	-
	Jumlah Beban Peny.Aset tetap/B. Ditangguhkan	857.533.154,00	1.029.936.884,90
3.28.	BEBAN PEMASARAN	511.382.716,00	373.949.732,00
-	Beban Hadiah/Pemasaran	511.382.716,00	373.949.732,00
	Jumlah Beban Pemasaran	511.382.716,00	373.949.732,00
3.29.	BEBAN ADMINISTRASI & UMUM	23.931.224.122,99	23.252.278.729,89
	Beban Tenaga Kerja		
-	Beban Gaji dan Honorarium	12.424.654.862,00	12.220.838.615,00
	Beban Pendidikan	396.624.000,00	375.900.000,00
	Beban Tenaga Kerja Lainnya :		
-	Beban Lembur	103.726.556,80	76.083.794,48
-	Beban Pengabdian Direksi	368.000.000,00	264.000.000,00
-	Beban Pengabdian DP	144.000.000,00	180.000.000,00
-	Beban Pengabdian Karyawan	1.388.172.000,00	1.318.564.368,00
-	Beban Tunjangan Cuti/Kesehatan	276.020.637,00	319.147.301,00
-	Beban Insentif Kredit bermasalah	170.837.012,00	246.078.231,00
-	Iuran DPLK	296.991.124,00	301.063.732,00
-	Beban Lainnya	5.023.863.266,47	4.905.316.447,40
	Jumlah Beban Tenaga Kerja	20.592.889.458,27	20.206.992.488,88
	Biaya Premi Asuransi :		
-	Beban Premi Asuransi	59.743.606,63	58.293.892,00
	Jumlah Beban Premi Asuransi	59.743.606,63	58.293.892,00
	Beban Sewa Dan Pajak :		
-	Beban Sewa Gedung	50.678.282,00	25.973.400,00
-	Beban Pajak-Pajak	84.156.352,00	69.041.815,00
	Jumlah Beban Sewa dan Pajak	134.834.634,00	95.015.215,00
	Beban Pemeliharaan Gedung	33.072.690,75	65.137.450,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan/Inventaris Kantor	158.246.004,00	131.201.327,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	191.318.694,75	196.338.777,00
	Beban Barang dan Jasa Pihak ke III		
-	Beban Keperluan Kantor	177.963.009,00	185.377.365,00
-	Beban Perjalanan Dinas Direksi & Pegawai	103.988.500,00	61.450.000,00
-	Beban ATK/Cetak Blangko & FC/Jilid	352.799.751,00	293.981.407,00
-	Beban Pengiriman Surat Melalui Pos	15.106.300,00	19.039.250,00
-	Beban Telepon/Listrik/Air/Kebersihan	217.079.155,00	211.678.471,00
-	Beban Administrasi Bank	175.554.262,00	112.168.601,01
-	Beban Bensin/Transportasi	257.733.596,00	216.416.539,00
-	Beban Langganan Koran & Majalah	14.695.000,00	11.879.000,00
-	Beban Jasa Telekomunikasi	448.851.565,00	441.462.084,00
-	Beban Konsultan/Audit	55.000.000,00	102.000.000,00
-	Beban Lainnya	41.113.995,00	27.148.841,00
	Jumlah Beban Barang dan Jasa Pihak III	1.859.885.133,00	1.682.601.558,01

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

3.29.	BEBAN ADMINISTRASI & UMUM (Lanjutan)		
	Biaya Lainnya		
-	Beban Pakaian Seragam	204.500.000,00	206.200.000,00
-	Beban Rekreasi & Olah Raga	198.750.000,00	206.750.000,00
-	Beban Fee Kolektor	45.915.807,00	78.174.240,00
-	Beban Jamuan Tamu	96.763.164,00	89.087.203,00
-	Beban Penyelesaian Kredit	500.000,00	144.000,00
-	Beban Keamanan/Pengawasan Uang	500.000,00	800.000,00
-	Beban Lainnya	545.623.625,34	431.881.356,00
	Jumlah Beban Lainnya	1.092.552.596,34	1.013.036.799,00
	Jumlah Beban Administrasi dan Umum	23.931.224.122,99	23.252.278.729,89
3.30.	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	301.332.902,89	322.478.733,15
-	Pendapatan Lainnya	301.332.902,89	322.478.733,15
	Jumlah Pendapatan Non Operasional	301.332.902,89	322.478.733,15
3.31.	BEBAN NON OPERASIONAL	498.675.552,00	559.693.541,00
-	Beban Denda	2.920.000,00	20.186.853,00
-	Beban Sumbangan	128.800.650,00	110.543.542,00
-	Beban Partisipasi/Undangan	338.138.640,00	312.253.948,00
-	Beban Lain-lain	28.816.262,00	116.709.198,00
	Jumlah Beban Non Operasional	498.675.552,00	559.693.541,00
3.32.	TAKSIRAN PAJAK	3.816.904.207,36	3.966.689.139,98
	<i>Lihat Lampiran 1</i>		
3.33.	TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI		
a.	REKENING ADMINISTRATIF		
-	Bunga dalam penyelesaian	7.310.344.194,00	6.733.236.161,00
-	Aktiva Produktif yang dihapusbukukan	24.394.974.795,00	25.054.544.479,00
-	Penerusan Kredit (Chaneling)	8.881.979.545,00	8.879.369.545,00
-	Lain Bersifat Administratif	-	-
	Jumlah	40.587.298.534,00	40.667.150.185,00
b.	JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK		

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang berakhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah atas Kewajiban pada Bank lokal. dan untuk pelaksanaan program Penjaminan tersebut Pemerintah membentuk lembaga Independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah membebaskan Premi berkaitan dengan Program penjaminan tersebut sebesar 0,1 % dari rata-rata saldo bulanan simpanan dalam setiap periode yang dibayar 2(dua) kali setahun. Undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU RI No. 7 Th 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No.3 2008 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

c. PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN ANTI PENCUCIAN UANG

Dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Indonesia menerbitkan peraturan No. 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pengenalan "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)".

Prinsip Mengenal Nasabah adalah Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui Identitas Nasabah, memantau transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sesuai peraturan tersebut, Bank wajib memiliki sistem Informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi mencurigakan dan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi "KYC"/*Know Your Customer Principles* (Prinsip Mengenal Nasabah) berubah menjadi terminologi "CDD"/*Customer Due Dilligence*.

Dengan menerapkan program Customer Due Dilligence berarti Bank bertujuan meminimalkan resiko yang mungkin timbul yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan CDD dan Program APU PPT, dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK no.12/POJK.01/2017 tentang APU PPT.

d. Informasi Ratio Keuangan BPR

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

2. Kualitas Aktiva Produktif KAP

- Ratio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
- Non Performing Loan (NPL) Gross
- Non Performing Loan (NPL) Net

3. Likuiditas Ratio

- Loan to Deposit Ratio (LDR)
- Cash Ratio

4. Rentabilitas Ratio

- Ratio BOPO
- Ratio Return to Asset (ROA)

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA

5.1 Pendirian dan Informasi Umum

PD BPR SUMEDANG didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 6 Tahun 2006 Tanggal 5 Juni 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) SUMEDANG. Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan Konsolidasi terhadap 8 (Delapan) PD BPR menjadi PD BPR SUMEDANG yang selanjutnya kedelapan PD BPR tersebut dijadikan Kantor Cabang. PD BPR SUMEDANG juga telah mendapatkan ijin untuk menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat BANK INDONESIA No.11/8871DKBU/IDAd/Bd tanggal 16 September 2009.

Perusahaan Daerah BPR SUMEDANG telah berubah Badan Hukum dan Nama menjadi Perumda BPR Bank Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang No. 1 Tahun 2019 Tanggal 9 Januari 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PERUMDA BPR) BANK SUMEDANG dan diberikan ijin prinsip dengan Keputusan Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-274/KR.02/2019 serta ijin pengalihan badan usaha melalui Keputusan Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-274/KR.02/2019. Sebelum Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 6 Tahun 2006 tentang Konsolidasi terhadap 8 (Delapan) PD. BPR menjadi PD. BPR SUMEDANG. Kedelapan PD. BPR tersebut adalah PD. BPR Cikeuruh, PD. BPR Tanjungsari, PD. BPR Rancakalong, PD. BPR Cimalaka, PD BPR Darmaraja, PD. BPR Wado, PD. BPR Tomo dan PD. BPR Buah Dua. Selanjutnya kedelapan PD. BPR tersebut dijadikan Kantor Cabang PD BPR.

Pada tahun 2019 Modal Dasar PERUMDA BPR Bank Sumedang berubah menjadi Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) melalui Perda No. 2 tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penyertaan Modal.

Pada tahun 2022 Keputusan Bupati Sumedang nomor :131 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada PERUMDA Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah)

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

5.2 Tujuan Pendirian

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perumda BPR Bank SUMEDANG menjalankan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka.
- b. Memberikan Kredit
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan lainnya.
- d. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- e. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

5.3 Lokasi Kantor

Perumda BPR Bank SUMEDANG berlokasi di Jl. Mayor Abdurahman No. 78 Sumedang dan memiliki 7 Kantor Cabang terdiri dari Kc. Cimalaka, Kc. Tanjungsari, Kc. Rancakalong, Kc. Buahdua, Kc. Tomo, Kc. Darmaraja, Kc. Wado, serta 11 Kantor Kas.

5.4 Manajemen Organisasi

Pengangkatan Dewan Pengawas dimaksud berdasarkan :

- a. Keputusan Bupati Sumedang nomor: 539/kep.391-Huk/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pengangkatan Dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang Periode 2020 - 2024.
- b. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 539/Kep.476-Huk/2020 tentang pengangkatan Sdr.Taufik Hidayat,SH.,MH sebagai Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang.

Dasar hukum Pengangkatan Direksi dimaksud adalah :

- a. Keputusan Bupati Sumedang nomor: 584/Kep.273-HUK/2017 tentang Pemberhentian dengan hormat Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang periode 2017-2021. Keputusan Bupati Sumedang nomor;539/Kep.392-Huk/2020 tentang Pengangkatan Sdr. Bangbang Yoyon Hernayawan, SH sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang masa jabatan 2020-2025.
- b. Keputusan Bupati Sumedang nomor : 245 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Periode 2021-2026 Direktur Utama Dan Direktur Kepatuhan.

Dewan Pengawas

Ketua : NASAM, SE., Ak
Anggota : NURDIN ZAEN, SE
Anggota : TAUFIK HIDAYAT, SH., MH

Direksi

Direktur Utama : YANTI KRISYANA DEWI, SE
Direktur Kepatuhan : BUDI KAMSIN, SE
Direktur Operasional : H. BANGBANG YOYON H, SH

Modal Perusahaan

Modal dasar perusahaan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah). Dari jumlah tersebut telah disetor penuh oleh Pemilik Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp.42.019.740.978,65 (Empat puluh dua milyar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan enam puluh lima sen)

Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan pada Perumda BPR Sumedang sebanyak 128 Karyawan Dipinitif dan 10 karyawan kontrak

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun 2021
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

5.5 Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

5.9 Dampak Dari Covid-19

Dampak wabah penyakit COVID-19 berpotensi menurunkan permintaan dan harga karena ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia yang rendah, dan akan berdampak terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Kondisi ini juga dapat berdampak pada tingkat bunga, pemulihan piutang, penurunan nilai aset tidak lancar. Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul sebagai dampak dari ketidakpastian tersebut. Asumsi kelangsungan usaha perusahaan memiliki risiko dan ketidakpastian sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.

B. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Kualitas Aktiva Produktif Bank per 31 Desember 2022 adalah sbb :

1. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif

Aktiva Produktif

Kredit Yang Diberikan	270.262.357.790,00
Antar Bank Aktiva	73.051.114.155,69
Jumlah Aktiva Produktif	343.313.471.945,69

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan :

Antar Bank Aktiva	0%	73.051.114.155,69	-
Lancar	0%	247.936.160.970,00	-
DPK	0%	8.352.108.273,00	-
Kurang Lancar	50%	1.897.808.272,00	948.904.136,00
Diragukan	75%	1.429.345.234,00	1.072.008.925,50
Macet	100%	10.646.935.041,00	10.646.935.041,00
Jumlah AP Yang Diklasifikasikan			12.667.848.102,50
RASIO KAP			3,69%
Maksimum			10,35%

2. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk

(PPAPWD)

- Antar Bank Aktiva	0,50%	73.051.114.155,69	0,50%	241.610.118,00
- Lancar	0,50%	247.936.160.970,00	0,50%	1.236.827.295,00
- DPK	3,00%	8.352.108.273,00	3,00%	204.488.323,00
- Kurang Lancar	10%	1.897.808.272,00	10%	161.503.263,00
- Diragukan	50%	1.429.345.234,00	50%	481.098.603,00
- Macet	100%	10.646.935.041,00	100%	9.236.665.099,00
Jumlah PPAPWD				11.562.192.701,00
PPAP Yang Terbentuk				11.562.192.701,00
Kekurangan/Kelebihan				-
RASIO PPAP TERHADAP PPAPWD				100,00%
MINIMUM			81%	81%
				0,34

C. LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)

- Tabungan	157.749.862.596,62
- Deposito	67.169.650.000,00
- Pinjaman Yang Diterima > 3 Bulan	-
- Simpanan Bank Lain > 3 Bulan	15.499.999.999,00
- Modal Inti	66.650.825.928,25
Jumlah	307.070.338.523,87
- Kredit Yang Diberikan	270.262.357.790,00

LDR	88,01%
MAKSIMUM	94,75%

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun 2021
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

D.	CASH RATIO			
-	Kas		5.987.019.387,92	
-	Dana ABA		46.551.114.155,69	
	Tabungan ABP		(1.110.018.019,78)	
	Jumlah		51.428.115.523,83	
-	Kewajiban Segera		1.145.028.603,70	
-	Tabungan		157.749.862.596,62	
-	Deposito Berjangka		67.169.650.000,00	
-	Hutang Bunga		172.176.387,00	
-	Hutang Pajak		331.479.707,36	
-	Simpanan Bank Lain < 3 Bulan		-	
-	Pinjaman Yang Diterima < 3 Bulan		-	
	Jumlah		226.568.197.294,69	
	CASH RATIO			22,70%
	MINIMUM			4,05%
E.	BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)			
-	Biaya Operasional		40.496.064.325,79	
-	Pendapatan Operasional		57.853.828.463,20	
	BOPO			70,00%
	MAKSIMUM			93,52%
F.	RETURN ON ASSET (ROA)			
-	Laba Bersih Sebelum Pajak		17.160.421.488,30	
-	Total Aset		346.545.456.556,45	
	ROA			4,95%
	MINIMUM			1,22%
G.	RETURN ON EQUITY (ROE)			
-	Laba Bersih Setelah Pajak		13.343.517.280,94	
-	Modal Disetor		42.019.740.978,65	
	ROE			31,76%
	MINIMUM			1,22%
H.	NPL			
-	Kurang Lancar		1.897.808.272,00	
-	Diragukan		1.429.345.234,00	
-	Macet		10.646.935.041,00	
	Jumlah		13.974.088.547,00	
	Kredit Yang Diberikan		270.262.357.790,00	
	NPL			5,17%
	MAKSIMUM			5,00%

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
 Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2021
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

I	NPL Netto			
	- Kurang Lancar		1.897.808.272,00	
	- Diragukan		1.429.345.234,00	
	- Macet		10.646.935.041,00	
		Jumlah	13.974.088.547,00	
	PPAP		11.562.192.701,00	
	Kredit Yang Diberikan		270.262.357.790,00	
		NPL		0,89%
		MAKSIMUM		5,00%

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
 PERHITUNGAN ATMR
 Per 31 Desember 2022
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

NO.	Keterangan	Jumlah	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
1	Kas	5.987.019.388		5.987.019.388	0%	-
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)			-	0%	-
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid	570.701.970	-	570.701.970	0%	-
4	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	745.855.850		745.855.850	0%	-
5	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	*)			15%	
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain	73.051.114.156	241.610.118	72.809.504.038	20%	14.561.900.808
7	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	*)		-	20%	
	a. Kredit kepada bank lain			-		
	b. Kredit kepada pemerintah daerah			-		
	c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain			-		
	d. Bagian kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah			-		
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit			-	20%	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau	3.252.638.162	22.261.870	3.230.376.292	30%	969.112.888
10	Kredit kepada BUMN/BUMD			-	50%	-
11	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)			-	50%	-
12	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	135.137.234.582	918.959.321	134.218.275.261	50%	67.109.137.631
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	36.819.017.324	389.667.465	36.429.349.859	50%	18.214.674.930
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	2.816.150.250	72.516.785	2.743.633.465	70%	1.920.543.426
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			-	70%	-
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	80.665.846.511	665.702.890	80.000.143.621	100%	80.000.143.621
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	11.000.768.991	9.251.474.452	1.749.294.539	100%	1.749.294.539
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	6.840.729.837	6.141.571.057	699.158.780		
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	4.160.039.154	3.109.903.395	1.050.135.759		
18	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	6.461.132.020		6.461.132.020	100%	6.461.132.020
19	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan			-	100%	-
20	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 19	1.600.170.054		1.600.170.054	100%	1.600.170.054
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Setlshi Lebih PPAP Umum	358.107.649.257	11.562.192.701	346.545.456.557		192.586.110.114

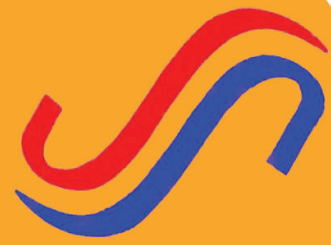
PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
PERMODALAN
Per 31 Desember 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGKAN	JUMLAH
MODAL			
I MODAL INTI			
I.1 Modal Inti Utama			
1.1.1 Modal disetor	42.019.740.979	100%	42.019.740.979
1.1.2 Cadangan tambahan modal		100%	-
1.1.2.1 Agio (Disagio)		100%	-
1.1.2.2 Modal sumbangan		100%	-
1.1.2.3 Dana Setoran Modal - Ekuitas	10.422.129.900	100%	10.422.129.900
1.1.2.4 Cadangan umum	7.910.124.334	100%	7.910.124.334
1.1.2.5 Cadangan tujuan		100%	-
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu			
1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran utang PPh atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP		Paling tinggi 50% apabila Laba atau 100% apabila Rugi	
1.1.2.7.1 Laba (Rugi) tahun berjalan	13.343.517.281	50%	6.671.758.640
1.1.2.7.2 Kekurangan pembentukan PPAP -/-			
1.1.2.7.3 Taksiran utang PPh -/-			
1.1.2.8 Pajak tangguhan -/-		100%	-
1.1.2.9 Goodwill -/-		100%	-
1.1.2.10 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			(372.927.925)
1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	745.855.850	50%	-
1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		75%	-
1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		100%	-
1.1.2.11 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya			
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		50%	-
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		100%	-
Sub Total Cadangan Tambahan Modal			24.631.064.949
Jumlah Modal Inti Utama		100%	66.650.825.928
I.2 Modal Inti Tambahan			-
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1+I.2)			66.650.825.928
II MODAL PELENGKAP			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu		Paling tinggi 50% dari modal inti	
II.2 Keuntungan revaluasi aset tetap		100%	
II.3 PPAP umum	2.407.326.376	Paling tinggi 1,25%	1.604.936.376
		dari ATMR	
II.4 JUMLAH MODAL PELENGKAP (II.1 + II.2 + II.3)		Paling tinggi 100% dari modal inti	1.604.936.376
III JUMLAH MODAL (I.3+II.4)			68.255.762.304
Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum			
Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap	(-)		
ATMR			68.255.762.304
Rasio KPMM (%) = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}}$			35,44
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)			192.586.110.114
			23.110.333.214
			45.145.429.090
Rasio Modal Inti (%) = $\frac{\text{Jumlah modal inti}}{\text{ATMR}}$			66.650.825.928
			192.586.110.114
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)			15.406.888.809
			52.848.873.495

PERUMDA BPR BANK SUMEDANG
PERHITUNGAN PPH BADAN
TAHUN 2022

(Dalam Rupiah)

1.	LABA KOMERSIL	Rp	17.160.421.488,30	
	KOREKSI POSITIF :			
	Pendapatan Provisi/Komisi/Adm yang ditangguhkan	Rp	82.841.271,00 ✓	
	Rekreasi/Olah Raga	Rp	198.750.000,00 ✓	
	Denda/Sanksi	Rp	2.920.000,00 ✓	
	Sumbangan	Rp	128.800.650,00	
	Partisipasi/Undangan	Rp	338.138.640,00	
	Biaya Transaksi Kredit	Rp	23.269.996,00	
			<u>Rp 774.720.557,00</u>	
			Rp 17.935.142.045,30 ✓	
	KOREKSI NEGATIF :			
	Jasa Giro Tabungan & Deposito Final	Rp	585.577.466,37	
			<u>Rp 585.577.466,37</u>	
	Penghasilan Kena Pajak		Rp 17.349.564.578,93	Intern
	Taksiran Hutang Pajak		Rp 3.816.904.207,36	3.775.293,000
	Uang Muka Pajak Ps 25			
	Januari sampai dengan November 2022	Rp	3.335.424.500,00	Rp 3.816.904.207,36
	Desember 2022 dibayarkan Januari 2023	Rp	150.000.000,00	
	Kekurangan Bayar Pajak	Saldo Hutang Pajak	Rp 331.479.707,36	13.343.517.280,94



PT. LKM SUMEDANG


LAPORAN KEUANGAN BULAN DESEMBER 2022

PT Lembaga Keuangan Mikro Sumedang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan Bulan Desember Tahun 2022. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh PT. LKM Sumedang dalam jangka waktu 1 Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, juga memuat Neraca yang terdiri dari Laporan Asset, Laporan Kewajiban, Laporan Ekuitas / Perubahan Modal, Laporan Operasional / Labarugi, Tingkat Kesehatan / Rasio Keuangan dan Laporan Arus Kas.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan perusahaan kami.

Ujungjaya, Januari 2023
PT LKM SUMEDANG
Direktur Utama 



IRWAN TEDJA PURNAWAN, S.E.

**LAPORAN KEUANGAN
NERACA
PT LKM SUMEDANG**
Untuk Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam rupiah)

No.	Nama Akun	Kode Akun	Realisasi	Target RKAT Desember 2022	Growth (Rp)	%
A.	Aset					
1.	Kas	110	Rp 219.346.000	Rp 357.117.662	Rp (137.771.662)	-63%
2.	Penempatan dana:					
	a. Tabungan Pada Bank	121	Rp 1.749.493.381	Rp 2.030.136.377	Rp (280.642.996)	-16%
	b. Deposito Berjangka Pada Bank	122			Rp -	
	c. Sertifikat Deposito Pada Bank	123			Rp -	
3.	Pinjaman Yang Diberikan:					
	a. Kepada Masyarakat	131	Rp 9.585.529.934	Rp 13.675.606.072	Rp (4.090.076.138)	-43%
	b. Kepada LKM Lain	132			Rp -	
	(Penyisihan Penghapusan Pinjaman)	133	Rp (1.595.774.937)	Rp (327.398.095)	Rp (248.447.736)	-16%
4.	Aset Tetap dan Inventaris (ATI)	140	Rp 804.953.055	Rp 885.930.337	Rp (80.977.282)	-10%
	(Akumulasi Penyusutan ATI)	141	Rp (483.569.117)	Rp (651.305.181)	Rp 167.736.064	-35%
5.	Aset Lain-Lain	150	Rp 203.891.174	Rp 398.639.665	Rp (194.748.491)	-96%
	Jumlah Aset		Rp 10.483.869.490	Rp 16.368.726.837	Rp (5.884.857.347)	-56%
B.	Liabilitas					
1.	Utang Yang Harus Segera Dibayar	210	Rp 71.061.332	Rp 315.687.244	Rp (244.625.912)	-344%
2.	Simpanan:					
	a. Tabungan	221	Rp 2.046.137.622	Rp 2.917.807.215	Rp (871.669.593)	-43%
	b. Deposito	222	Rp 4.285.950.000	Rp 8.304.528.228	Rp (4.018.578.228)	-94%
3.	Pinjaman Yang Diterima	230	Rp -	Rp -	Rp -	-
4.	Liabilitas Lain-Lain	240	Rp 290.589.670	Rp 160.389.571	Rp 130.200.099	45%
	Jumlah Liabilitas		Rp 6.693.738.624	Rp 11.698.412.258	Rp (5.004.673.634)	-75%
C.	Ekuitas					
	<u>Perseroan Terbatas :</u>					
1	Modal					
	a. Modal Disetor	311	Rp 4.120.000.000	Rp 3.120.000.000	Rp 1.000.000.000	24%
	b. Tambahan Modal Disetor	312	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Hibah	320			Rp -	
3	Cadangan					
	a. Cadangan Umum	331	Rp 1.033.972.579	Rp 1.022.710.669	Rp 11.261.910	1%
	b. Cadangan Tujuan	332				
4	Saldo Laba/(Rugi)					
	a. Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun	341	Rp -	Rp -	Rp -	
	b. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	342	Rp (1.363.841.713)	Rp 527.603.910	Rp (1.891.445.623)	-139%
	Jumlah Ekuitas		Rp 3.790.130.866	Rp 4.670.314.579	Rp (880.183.713)	-23%
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		Rp 10.483.869.490	Rp 16.368.726.837	Rp (5.884.857.347)	-56%

LAPORAN KINERJA KEUANGAN
LABA RUGI
PT. LKM SUMEDANG
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam rupiah)

No.	Nama Akun	Kode Akun	Realisasi	Target RKAT Desember 2022	Growth	%
A. Pendapatan Operasional						
1.	Pendapatan Bunga	410	Rp 2.083.964.530	Rp 3.239.424.574	Rp (1.155.460.044)	-55%
2.	Pendapatan Operasional Lainnya	420	Rp 86.154.169	Rp 32.000.000	Rp 54.154.169	63%
Jumlah Pendapatan Operasional			Rp 2.170.118.699	Rp 3.271.424.574	Rp (1.101.305.875)	-51%
B. Beban Operasional						
1.	Beban Bunga	510	Rp 344.905.582	Rp 608.800.450	Rp (263.894.868)	-77%
2.	Beban Penyisihan Penghapusan Pinjaman	520	Rp 1.124.259.503	Rp -	Rp 1.124.259.503	100%
3.	Beban Penyusutan ATI	530	Rp 62.315.959	Rp 95.701.826	Rp (33.385.867)	-54%
4.	Beban Tenaga Kerja	540	Rp 1.493.011.692	Rp 1.593.717.644	Rp (100.705.952)	-7%
5.	Beban Operasional Lainnya	550	Rp 502.567.676	Rp 279.622.719	Rp 222.944.957	44%
Jumlah Beban Operasional			Rp 3.527.060.412	Rp 2.577.842.639	Rp 949.217.773	27%
C. Laba/(Rugi) Operasional			Rp (1.356.941.713)	Rp 693.581.936	Rp (2.050.523.649)	151%
D. Pendapatan Non Operasional		600	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 4.000.000	100%
E. Beban Non Operasional		700	Rp 10.900.000	Rp 17.166.667	Rp (6.266.667)	-57%
F. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak			Rp (1.363.841.713)	Rp 676.415.269	Rp (2.040.256.982)	150%
G. Taksiran Pajak Penghasilan		800	Rp -	Rp 148.811.359		
H. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan			Rp (1.363.841.713)	Rp 527.603.910	Rp (1.891.445.623)	-139%

**Rekapitulasi Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan
PT LKM SUMEDANG
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

No.	Rasio	Realisasi	Target RKAT Desember 2022	Deviasi (%)	Growth (%)
1	Rasio kecukupan Modal/ CAR	42,85%	30,69%	12,16%	28,38%
2	NPL Gross	28,25%	1,50%	26,75%	94,69%
3	NPL Net	22,13%	1,00%	21,13%	95,48%
4	Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	22,59%	1,20%	21,39%	94,69%
5	ROA	-13,01%	4,13%	-17,14%	131,74%
6	ROE	-35,98%	14,48%	-50,46%	140,24%
7	BOPO	162,53%	78,80%	83,73%	51,52%
8	Cash Rasio	29,41%	20,45%	8,96%	30,47%
9	LDR	88,72%	87,50%	1,22%	1,38%
10	Likuiditas	175,53%	114,10%	61,43%	35,00%
11	Solvabilitas	151,38%	121,86%	29,52%	19,50%
12	NIM	15,18%	16,74%	-1,56%	-10,28%
13	Rasio PPAP	100,00%	174,11%	-74,11%	-74,11%

LAPORAN ARUS KAS
PT LKM SUMEDANG
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
(120) Pendapatan Bunga yang akan Diterima	85.121.126
(140) Kredit yang Diberikan	631.665.000
(230) Aset Antar Kantor	-13.617.171
(270) Aset Lain-lain	-2.040.010
(300) Kewajiban Segera	-5.545.844
(440) Kewajiban Antar Kantor	13.617.171
(545117) PBK KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	22.604.874
(545136) POL: Penerimaan Kredit Yang Dihapusbuku	2.124.000
(545139) POL: Lainnya	18.054
(545180) Beban Pemasaran	-1.250.000
(545201) BTK: Gaji Dan Upah	-2.871.523
(545203) BTK: Lainnya	-450.000
(545209) Beban Premi Asuransi	-1.964.318
(545210) Beban Pemeliharaan Dan Perbaikan	-555.500
(545211) Beban Barang Dan Jasa	-18.031.397
(545212) Pajak-pajak	-743.300
(545223) BOL: Lainnya	-5.294.000
(545359) BNO: Lainnya	-650.000
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasional	702.137.162
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
(130) Penempatan pada Bank Lain	-46.682.419
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	-46.682.419
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
(330) Tabungan	-685.695.443
(340) Deposito	-25.000.000
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-710.695.443
Penurunan Kas	-55.240.700
Kas dan Setara Kas Awal	274.586.700
Kas dan Setara Kas Akhir	219.346.000

LAPORAN KOLEKTIBILITAS
PT LKM SUMEDANG
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Rekapitulasi Kredit Berdasarkan 'Kualitas'
 Gabungan

per 30 Desember 2022

Nama Kualitas	Jumlah Rekening	Plafond	Baki	%	% Non	Tingkat Pengembalian	OSI
Lancar	973	9.431.200.000	7.000.181.000	72,11	0	25,78	194.094.129
Diragukan	70	722.100.000	586.227.000	6,04	100	18,82	70.961.000
Macet	190	2.753.065.000	2.121.348.937	21,85	100	22,95	519.183.500
Jumlah	1.233	12.906.365.000	9.707.756.937			24,78	784.238.629

Rekapitulasi Kredit Berdasarkan 'Sektor Ekonomi'
 Gabungan

per 30 Desember 2022

Nama Sektor Ekonomi	Jumlah Rekening	Plafond	Baki	%	% Non	Tingkat Pengembalian	OSI
() Kosong	1	6.000.000	6.000.000	0,06	0	0	112.259
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL	2	14.000.000	13.772.000	0,14	0	1,99	67.355
BUKAN LAPANGAN USAHA LAINNYA	441	5.650.500.000	4.489.146.500	45,83	24,37	21,26	239.081.308
INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	1	26.000.000	24.100.000	0,25	100	7,31	8.248.500
INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	2	10.000.000	10.000.000	0,1	0	0	90.324
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2	8.000.000	8.000.000	0,08	0	0	120.775
PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN DAN PERIKAMAN LAINNYA	1	2.000.000	2.000.000	0,02	0	0	32.259
PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	1	5.000.000	5.000.000	0,05	0	0	58.065
PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	1	5.000.000	4.166.000	0,04	0	16,68	32.259
PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	1	3.000.000	3.000.000	0,03	0	0	17.420
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA	2	8.000.000	8.000.000	0,08	0	0	56.775
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	2	8.000.000	8.000.000	0,08	0	0	134.194
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	6	102.000.000	102.000.000	1,05	0	0	1.501.615
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	754	6.930.665.000	4.959.327.583	51,09	30,91	28,44	506.580.774
PERTANIAN BUAH PISANG	1	2.000.000	2.000.000	0,02	0	0	32.259
PERTANIAN PADI	14	121.200.000	98.294.854	1,01	67,44	18,9	26.809.905
PETERNAKAN LAINNYA	1	5.000.000	5.000.000	0,05	0	0	35.484
Jumlah	1.233	12.906.365.000	9.707.756.937			24,78	784.011.530

No	Realisasi	Hambatan	Langkah Strategis
1	<p>Aset : Realisasi Aset di bulan Desember 2022 sebesar Rp. 10.483.869.490,-. Turun 3% sebesar Rp. 336.310.824,- dibandingkan bulan sebelumnya Rp 10.820.180.314,- Jika dibandingkan dengan target RKAT Bulan Desember 2022 Rp. 16.368.726.837 masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 5.884.857.347,- atau (56%).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghimpunan DPK : <ol style="list-style-type: none"> a. Belum dijamin LPS b. Keberadaan LKM belum dikenal luas (brand). 2. Penyaluran Kredit yang belum optimal. 3. Peningkatan kredit bermasalah (NPL). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghimpunan DPK : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan penarikan DPK melalui sekolah-sekolah. b. Mengoptimalkan kemitraan dalam penghimpunan DPK. c. Progress peningkatan IT System LKM. (m-banking dan Corporate Web LKM). 2. Penyaluran Kredit : <ol style="list-style-type: none"> a. Bekerjasama dengan Bendahara/pemotong gaji pegawai (payroll)/ pemilik perusahaan. b. Optimalisasi pemakaian plafond Channeling BPRS Al Masoem untuk plafond diatas Rp 100 juta. 3. Penyelesaian NPL : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Satgas Penyelesaian Kredit Bermasalah. b. DATUN c. Koreksi perhitungan PPAPdi core system LKM.
2	<p>Pinjaman yang diberikan : Realisasi Pinjaman yang diberikan dibulan Desember 2022 sebesar Rp. 9.585.529.934,-. Meningkatkan 2% sebesar Rp. 212.939.148,- dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan target RKAT Desember 2022 Rp. 13.675.606.072,- masih ada kekurangan sebesar Rp. 4.090.076.138,- atau (43%).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan AO dan Pinca dalam melakukan analisa kredit. 2. Bersaing dengan Pelaku usaha sejenis/bank Umum baik dalam penentuan jasa atau pun jangka waktu dan syarat-syarat lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Inhouse Training</i> dan <i>eksternal training</i> (jika ada). 2. Perluasan kerjasama dengan pemilik PAUD tidak hanya menerima setoran tabungan. 3. Bermitra dengan SKPD (Kredit Siltap). 4. Rekrut 1 orang AO. 5. Rotasi dan Promosi AO dengan tidak menambah biaya pegawai. 6. Bermitra dengan Asuransi Bumiputera. 7. Melakukan MOU/ kemitraan baik dengan instansi/perusahaan ataupun masyarakat yang punya potensi mendukung pengembangan LKM. 8. Perbaiki sistem insentif termasuk pemberian punishment sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan.

No.	Realisasi	Hambatan	Langkah Strategis
3	<ul style="list-style-type: none"> • DPK Tabungan : Realisasi dibulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.046.137.622,- . Meningkat 23% sebesar Rp. 381.167.110,- dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan RKAT Tabungan dibulan Desember 2022 sebesar Rp 2.917.807.215,- masih terdapat kekurangan sebesar Rp 871.669.593,- atau (43%). • DPK Deposito: Realisasi dibulan Desember 2022 Rp 4.285.950.000,-. Meningkat 13% sebesar Rp. 485.000.000,- dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan RKAT Deposito dibulan Desember 2022 sebesar Rp 8.304.528.228,- masih terdapat kekurangan sebesar Rp 4.018.578.228 atau (94%). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dijamin LPS 2. Keberadaan LKM belum dikenal luas (brand). 3. Belum optimalnya penggalangan dana terutama di sekolah-sekolah dan DKM Mesjid. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi yang maksimal mengenai LKM terhadap masyarakat, Instansi- instansi, dan lembaga-lembaga yang ada di Wilayah kabupaten Sumedang. 2. Bermitra dengan DKM Mesjid.
4	<p>Pendapatan Operasional : Realisasi Pendapatan dari Bunga pada bulan Desember 2022sebesar Rp. 2.083.964.530,- Meningkat 12% sebesar Rp. 215.984.119,- dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan realisasi Pendapatan Operasional Lainnya pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 86.154.169,- mengalami peningkatan 147% dibanding bulan sebelumnya. Target pendapatan dari bunga di RKAT Desember 2022 sebesar Rp. 3.239.424.574,- dan target pendapatan operasional lainnya di Bulan Desember sebesar Rp 32.000.000,-. Sehingga dapat masih terdapat kekurangan untuk pendapatan bunga sebesar Rp. 1.155.460.044,- atau (55%) dan terdapat kelebihan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 54.154.169,- atau (55%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portofolio kredit masih dibawah ekspetasi. 2. Penurunan Kolektibilitaskredit. 3. Menambah fee baseincome. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan portofolio kredit dengan peningkatan Rp. 500 juta, optimalisasi DPK yang ada. 2. Penambahan fee base income dari BPJS TK, Asuransi Bumiputera dan BPRS Al Masoem. 3. Menyelesaikan NPL yang terjadi dengan melakukan restrukturisasi.


No.	Realisasi	Hambatan	Langkah Strategis
5	<p>Beban Biaya Operasional : Realisasi di bulan Desember 2022 sebesar Rp. 3.527.060.412,- Meningkat 94% sebesar Rp. 1.708.304.954,- dibandingkan bulan sebelumnya. Target RKAT Desember 2022 sebesar Rp. 2.577.842.639,- sehingga masih ada kelebihan Biaya sebesar Rp. 949.217.773,- ata (27%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban Tenaga kerja tidak seimbang dengan portofolio kredit. 2. Penurunan Kualitas Kredit . 3. Adanya Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) per 20 Desember 2022 sebesar Rp 1.124.259.503,- 4. Beban Tunjangan Pensiun 2 orang ditahun 2022 dan 3 orang yang akan pensiun tahun 2023. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi dibeban operasional lainnya, didalamnya termasuk menjaga kualitas kredit jangan sampai turun kolektibilitas / kualitas. 2. Meningkatkan portofolio kredit minimal 1 orang karyawan berbanding Rp. 500 Juta pengeluaran kredit, dan sementara ini baru terealisasi rata-rata 1 berbanding 250 juta
6	<p>Laba bersih : Realisasi rugi berjalan sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp.(1.363.841.713),- turun 1832% sebesar Rp. 1.442.583.124,- dibandingkan bulan sebelumnya. Target RKAT Desember 2022 sebesar Rp. 527.603.910,-sehingga terdapat kekurangan laba sebesar Rp. 1.891.445.623,- atau (139%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portofolio kredit belum optimal. 2. NPL masih tinggi sekitar 28,25% sedangkan target RKAT NPL di Bulan Desember 1,50%. 3. BOPO tinggi yaitu 162,53%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Unit Remedial untuk penyelesaian kredit bermasalah. 2. Meningkatkan portofolio kredit dengan sistem target Individu. 3. Efisiensi Biaya 4. Melakukan tata kelola perusahaan dari pembenahan job description. 5. Menjaga Kualitas Kredit agar tetap Lancar 6. Melakukan pemanggilan kepada debitur macet secara continue 7. Melakukan peningkatan penghasilan dari <i>Feebase</i>.



2022

Laporan **TAHUNAN** (Unaudited)

PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

 Jl. Serma Muchtar, No.121, Kel. Situ, Kec.
Sumedang Utara, Kab. Sumedang, 45323

 Kampungmakmur.bumd@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Tahunan PT. Kampung Makmur (Perseroda) Tahun 2022 unaudited telah dapat diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 Undang – undang RI Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut tersebut diatas, dengan ini PT Kampung Makmur (Perseroda) menyampaikan Laporan Tahunan Tahun 2022, Harapan kami, Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan dan kinerja Perusahaan selama tahun buku 2022.

Sumedang, 13 Februari 2023
PT. Kampung Makmur (Perseroda)



Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si.
Plt. Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN	1
1.1 Laba Rugi Komprehensif	1
1.2 Neraca.....	5
1.3 Laporan Arus Kas.....	9
1.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	10
1.5 Pajak dan Deviden	10
1.5.1 Pajak.....	10
1.5.2 Deviden.....	10
1.5.3 Devisa	10
1.6 Laporan Dewan Komisaris	11
1.6.1 Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 PT. Kampung Makmur (Perseroda).....	11
1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja PT. Kampung Makmur (Perseroda).....	11
1.6.3 Upaya Memperbaiki Kinerja PT. Kampung Makmur (Perseroda).....	11
1.6.4 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Komisaris Terhadap PT. Kampung Makmur (Perseroda)	11
1.7 Laporan Dewan Direksi	11
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN	19
2.1 Riwayat Singkat Perusahaan	19
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	20
2.3 Tata Nilai Perusahaan (<i>Corporate Value</i>)	21
2.4 Kegiatan Usaha	22
2.5 Wilayah Operasional	22
2.6 Komposisi Pemegang Saham.....	23
2.7 Lembaga Profesi dan Penunjang Perseroan Periode Tahun 2020 – 2022	24
2.8 Struktur Organisasi.....	25
2.9 Pengurus Perseroan	25

BAB 3	KINERJA PERUSAHAAN.....	28
3.1	Kondisi Umum.....	28
3.2	Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan.....	29
BAB 4	TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	34
4.1	Kerangka Kerja dan Model Bisnis.....	34
4.2	Manajemen, Organisasi dan Sistem.....	35
4.3	Rapat Umum Pemegang Saham.....	41
4.4	Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Perseroan.....	43
4.5	Sumber Daya Manusia.....	45
4.6	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan.....	47
4.7	Restrukturisasi.....	47
4.8	Privatisasi.....	47
BAB 5	PENUTUP.....	48
5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran.....	48
	<i>Lampiran - Lampiran</i>	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Dana Perseroan.....	13
Tabel 1. 2 Perbandingan Laporan Keuangan Tahun 2021 dan 2022.....	14
Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Perseroan Selama 3 Tahun (dalam juta)	14
Tabel 1. 4 Aset dan Kewajiban tahun 2022.....	16
Tabel 2. 1 Komposisi Pemegang Saham Perseroan.....	23
Tabel 2. 2 Lembaga Profesi dan Penunjang Perseroan.....	24
Tabel 3. 1 Tabel Financial Ratio Indicator	28
Tabel 3. 2 Rencana Bisnis Perseroan 2020-2025.....	28
Tabel 3. 3 Kinerja Keuangan 2021 Audited dan RKA 2022	30
Tabel 4. 1 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Level Jabatan	46
Tabel 4. 2 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 4. 3 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Usia	46
Tabel 4. 4 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Status Kepegawaian	46
Tabel 4. 5 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Jenis Kelamin	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Corporate Value</i> Perseroan.....	21
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perseroan	25
Gambar 4. 1 Alur Diagram Tahapan Pengelolaan Manajemen Resiko	36
Gambar 4. 2 <i>Balanced Scorecard Analysis</i>	39
Gambar 4. 3 <i>Costumer Perspective</i>	39
Gambar 4. 4 <i>Learning Growth Perspective</i>	40
Gambar 4. 5 <i>Internal Process Perspective</i>	40

BAB 1
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

1.1 Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif perseroan tahun 2022 tersaji dalam tabel dibawah berikut:

PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)
Laba/Rugi (Standar)
Dari 01 Jan 2022 ke 31 Dec 2022

Description	1 Jan-31 Des 2022
Pendapatan	
PENDAPATAN	1.396.001.260,00
PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA	267.826.615,00
Pendapatan Wisata Burnong	267.826.615,00
Pendapatan Tiket Masuk Pengunjung	156.909.500,00
Pendapatan Tiket Masuk Motor	3.442.000,00
Pendapatan Tiket Masuk Mobil	1.505.000,00
Pendapatan Tiket Camping/Berkemah	1.764.300,00
Pendapatan Sewa Gedung Burnong	4.250.000,00
Pendapatan Food & Beverage Burnong	5.490.000,00
Pendapatan Retail Burnong	35.000,00
Pendapatan Tenant Burnong	1.875.000,00
Pendapatan IPL Burnong	309.000,00
Pendapatan Event Pariwisata	73.015,00
Pendapatan Burnong	92.173.800,00
PENDAPATAN JASA	283.920.627,00
Pendapatan Gedung GIM	283.920.627,00
Pendapatan Sewa Gedung Utama GIM	156.243.327,00
Pendapatan Sewa Ruangan GIM	3.962.200,00
Pendapatan Sewa Kantor GIM	79.810.600,00
Pendapatan Sewa Tenant GIM	32.279.500,00
Pendapatan Parkir GIM	5.035.000,00
Pendapatan Iklan & Promosi	100.000,00
Pendapatan Peralatan GIM	6.090.000,00
Pendapatan Pinjam Kursi/Pinjam alat lainnya	4.690.000,00
Pendapatan Peralatan	1.400.000,00
Pendapatan Di Luar Usaha GIM	400.000,00
PENDAPATAN SEKTOR PERDAGANGAN	848.000,00
Pendapatan Produk UMKM	848.000,00
PENDAPATAN SEKTOR AGRIBISNIS	229.421.990,00
Pendapatan Agribisnis	229.421.990,00
PENDAPATAN SEKTOR KONSTRUKSI	620.000.000,00
Pendapatan Perumahan	620.000.000,00
Retur Penjualan	-6.016.158,20
Potongan Penjualan	186,20
Jumlah Pendapatan	1.396.001.260,00
Harga Pokok Penjualan	
BEBAN POKOK	863.791.998,50
Hpp Gudang Tomo	138.303.026,20
Biaya Gaji Management Gudang Tomo	53.633.779,00
Biaya Operasional Gudang Tomo	905.500,00
Biaya Koordinasi Gudang Tomo	577.400,00
Biaya Sosialisasi Gudang Tomo	1.577.200,00
Biaya Perjalanan Dinas Gudang Tomo	2.902.400,00
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Gudang Tomo	330.000,00
Biaya Dryer	2.895.500,00
Biaya Perbaikan Dryer	2.745.500,00
Biaya Pemeliharaan Dryer	150.000,00
Biaya Materai Gudang Tomo	46.400,00
Biaya Promosi & Iklan Gudang Tomo	500.000,00
Biaya Penyusutan Bangunan SRG Tomo	73.337.625,00
Biaya Penyusutan Peralatan/Mesin SRG Tomo	1.597.222,20
Hpp Perdagangan Retail	2.130.000,00
Hpp Retail	2.130.000,00
Hpp GIM	335.570.262,30
Biaya Gaji Management GIM	130.595.000,00
Biaya Operasional GIM	19.828.431,00
Biaya Operasional GIM	13.955.411,00
Biaya Listrik GIM	4.679.820,00

Description	1 Jan-31 Des 2022
Biaya PDAM GIM	246.000,00
Biaya Rumah Tangga GIM	557.000,00
Biaya BBM GIM	390.200,00
Biaya Koordinasi GIM	419.000,00
Biaya Sosialisasi GIM	287.791,00
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan GIM	16.916.500,00
Biaya Promosi & Iklan GIM	12.546.000,00
Biaya Marketing (Cash Back)	4.580.000,00
Biaya Kebersihan & Keamanan GIM	9.846.000,00
Biaya Perlengkapan GIM	3.770.082,00
Biaya Perizinan GIM	3.375.000,00
Biaya Tenaga Kerja Harian GIM	6.882.000,00
Biaya Pinjam Pakai GIM	6.050.000,00
Biaya Event GIM	2.000.000,00
Biaya Koordinasi Event	2.000.000,00
Biaya Sumbangan GIM	1.380.000,00
Biaya Penyusutan Bangunan GIM	108.554.875,00
Biaya Penyusutan Peralatan GIM	8.539.583,30
Hpp Burnong	292.388.650,00
Biaya Gaji Management Burnong	144.670.500,00
Biaya Gaji Burnong	132.563.500,00
Biaya Gaji Burnong	131.063.500,00
Biaya Operasional Khusus GM	1.500.000,00
Uang makan pegawai Burnong	12.107.000,00
Biaya Pendidikan & Pelatihan Burnong	1.125.000,00
Biaya Operasional Burnong	10.437.100,00
Biaya Operasional Burnong	5.583.100,00
BBM New Burnong	1.830.000,00
Biaya Makan & Minum (konsumsi) New	2.243.000,00
Biaya Pinjam Motor Burnong	60.000,00
Biaya Listrik Burnong	721.000,00
Biaya ATK dan perlengkapan Burnong	7.228.600,00
Biaya ATK dan perlengkapan Burnong	1.605.100,00
Biaya Pembuatan Tiket	5.623.500,00
Biaya Koordinasi Burnong	15.995.700,00
Biaya Gaji Pegawai Burnong	1.235.000,00
Biaya Lembur Pegawai Burnong	1.235.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Burnong	4.344.100,00
BBM Perjalanan Dinas Burnong	1.920.000,00
Biaya Makan Perjalanan Dinas Burnong	2.424.100,00
Biaya Perizinan New Burnong	59.471.600,00
Biaya Iklan & Promosi New Burnong	2.339.500,00
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan New Burnong	2.420.000,00
Biaya Kebersihan New Burnong	860.400,00
Biaya Keamanan New Burnong	243.000,00
Biaya Kesehatan New Burnong	136.400,00
Biaya Food & Beverage Burnong	3.415.000,00
Biaya Sosial (CSR)	8.333.750,00
Biaya Sumbangan Burnong	560.000,00
Biaya Burnong Lainnya	29.573.000,00
Hpp Agribisnis	24.122.885,00
Biaya Perjalanan Dinas Agribisnis	4.383.800,00
Biaya Packaging Agribisnis	300.000,00
Biaya Transportasi Agribisnis	4.217.000,00
Biaya Perlengkapan Agribisnis	768.510,00
Biaya Sample Agribisnis	66.075,00
Biaya Pemeliharaan Agribisnis	50.000,00
Biaya Tenaga Kerja Harian Agribisnis	1.600.000,00
Biaya Bongkar Muat Agribisnis	12.737.500,00

Description	1 Jan-31 Des 2022
Hpp Perumahan	71.277.175,00
Biaya Gaji Management Perumahan	70.275.000,00
Biaya Operasional Perumahan	150.000,00
Biaya Koordinasi Perumahan	150.000,00
Biaya Sosialisasi Perumahan	200.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Perumahan	502.175,00
Jumlah Harga Pokok Penjualan	863.791.998,50
LABA KOTOR	532.209.261,50
Beban Operasi	
BEBAN POKOK	230.215,00
Biaya Burnong	230.215,00
Biaya Operasional Burnong	210.000,00
BBM New Burnong	210.000,00
Biaya Burnong Lainnya	20.215,00
BIAYA PEMASARAN	-32.064.360,00
Biaya Promosi dan Iklan	80.000,00
Biaya Promosi dan Iklan	80.000,00
Biaya Insentif/Fee Management	-32.954.360,00
Biaya Right Issue	810.000,00
Biaya Rapat & Koordinasi Right Issue	97.900,00
Biaya Perjalanan Dinas Right Issue	712.100,00
BIAYA UMUM & ADM	63.124.895,00
Biaya Alat Tulis Kantor	3.044.420,00
Biaya Fotocopy	546.750,00
Biaya ATK	1.732.600,00
Biaya Materai	765.070,00
Biaya Rumah Tangga Kantor	3.093.475,00
Biaya Listrik, PDAM, Telepon/Internet	9.695.539,00
Biaya Ekspedisi	29.000,00
Biaya Konsumsi Kantor	1.390.000,00
Biaya Kebersihan & Keamanan	450.000,00
Biaya Perlengkapan Kantor	184.799,00
Biaya Pajak	2.103.962,00
Biaya Pajak PPh Final 4(2)	1.103.962,00
Biaya Denda Pajak	1.000.000,00
Biaya Sewa	18.440.000,00
Biaya Sewa Kendaraan	18.440.000,00
Biaya Sumbangan	550.100,00
Biaya Jasa Konsultan	24.143.600,00
Biaya Akuntan Publik	24.143.600,00
Biaya Fee Audit	17.500.000,00
Biaya Akomodasi & Transportasi Auditor	6.643.600,00
Biaya Umum & Adm Lainnya	23.438.731,00
BIAYA GAJI & TUNJANGAN KARYAWAN	578.698.782,00
Biaya Gaji & Tunjangan	475.761.945,00
Biaya Gaji Komisaris	39.000.000,00
Biaya Gaji Direktur	154.695.145,00
Biaya Gaji Manager	213.757.000,00
Biaya Gaji Asst. Manager	13.645.000,00
Biaya Gaji Staff	50.257.500,00
Biaya Insentif Karyawan	2.404.300,00
Biaya Potongan Absensi	662.500,00
Biaya Punishment Atas Kinerja	190.500,00
Biaya Insentif Assisten Manager	1.150.000,00
Biaya Lembur Karyawan	100.000,00
Biaya Kesejahteraan Karyawan	47.841.837,00
Biaya Suka Duka	350.000,00
Biaya BPJS	46.293.837,00
Biaya Kesehatan	1.198.000,00

Description	1 Jan-31 Des 2022
Biaya Kesehatan	1.198.000,00
Biaya THR	54.995.000,00
Biaya THR Direktur	14.500.000,00
Biaya THR Manager	30.500.000,00
Biaya THR Asst. Manager	3.250.000,00
Biaya THR Staff	6.745.000,00
BIAYA OPERASIONAL	7.055.500,00
Biaya Perjalanan Dinas	2.147.000,00
Biaya BBM Perjalanan Dinas	412.000,00
Biaya Makan/Minum Perjalanan Dinas	336.000,00
Biaya Transport Perjalanan Dinas	1.399.000,00
Biaya BBM Kantor	877.700,00
Biaya Parkir & Tol Kantor	9.600,00
Biaya Rapat & Koordinasi Kantor Pusat	3.736.200,00
Biaya Tenaga Kerja Harian	50.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Lokal	235.000,00
BIAYA PENYUSUTAN	164.185.681,53
Biaya Penyusutan Bangunan Kantor	18.673.970,00
Biaya Penyusutan Bangunan SRG Tomo	14.667.525,00
Beban Penyusutan Bangunan Sekarwangi	61.819.887,00
Beban Penyusutan Bangunan GIM	21.710.975,00
Biaya Penyusutan Kendaraan	875.000,00
Biaya Penyusutan Peralatan/Mesin	319.444,47
Biaya Penyusutan Peralatan/Mesin SRG Tomo	319.444,47
Biaya Penyusutan Peralatan Unit Usaha	46.118.880,06
Biaya Penyusutan Peralatan GIM	5.644.652,81
Biaya Penyusutan Peralatan Burnong	-348.166,66
Biaya Penyusutan Peralatan/Perlengkapan	40.822.393,91
BIAYA PERBAIKAN & PEMELIHARAAN	6.033.500,00
Biaya Perbaikan	525.000,00
Biaya Perbaikan Kendaraan	525.000,00
Biaya Pemeliharaan	5.508.500,00
Biaya Pemeliharaan Kantor	2.093.500,00
Biaya Pemeliharaan Unit Usaha	2.000.000,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	1.415.000,00
Biaya Refund	88.025,00
Jumlah Beban Operasi	810.790.969,53
PENDAPATAN OPERASI	-278.581.708,03
Pendapatan dan Beban Lain	
Pendapatan lain	
PENDAPATAN DILUAR USAHA	10.009.486,23
Pendapatan Jasa Giro	699.486,23
Pendapatan Bunga Deposito	4.900.000,00
Pendapatan Lain-Lain	4.410.000,00
Pendapatan Lain-Lain	4.410.000,00
Jumlah Pendapatan lain	10.009.486,23
Beban lain-lain	
BIAYA DILUAR USAHA	-3.462.575,83
Biaya Adm Bank	2.813.726,40
Biaya Adm Bank	2.284.726,40
Biaya Kliring/RTGS	60.000,00
Biaya Administrasi Kartu	244.000,00
Biaya Saldo Minimal	225.000,00
Pajak Jasa Giro	108.864,44
Gain/Loss Disposal F.A	1.020.833,33
Beban Lain-Lain	-7.406.000,00
Jumlah Beban lain-lain	-3.462.575,83
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain	13.472.062,06
LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)	-265.109.645,97

1.2 Neraca

Neraca perseroan untuk tahun 2022 tersaji sebagai berikut:

PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)

Neraca (Standar)

Per Tgl. 31 Dec 2022

Description	Balance
Aktiva	
Aktiva Lancar	
Kas dan Bank	
KAS & BANK	292.770.867,96
Kas Kecil	18.546.500,00
Kas Kecil	6.032.700,00
Kas Kecil	6.032.700,00
Kas Kecil GIM	11.681.077,00
Kas Besar	613.723,00
Kas Kecil Burnong	219.000,00
Giro BNI Pusat 2011002999	262.643.461,00
Giro BJB Pusat 0000020112999	3.309.579,00
BNI Taplus Burnong 2011002296	1.500.000,00
Giro BNI Burnong 2011000298	990.698,00
Tabungan Mandiri GIM 1310017794837	2.500.714,36
BNI Taplus Pusat 2011002988	230.957,00
Giro BRI Burnong 009401002645300	1.716.004,60
Giro BRI Opr. Burnong 009401002644304	1.332.954,00
Jumlah Kas dan Bank	292.770.867,96
Piutang Dagang	
PIUTANG	1.150.486.660,00
Piutang Usaha IDR	1.055.863.779,00
Piutang Usaha IDR	599.839.779,00
Piutang Usaha IDR	599.839.779,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	456.024.000,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	456.024.000,00
Piutang Karyawan	94.622.881,00
Jumlah Piutang Dagang	1.150.486.660,00
Persediaan	
Jumlah Persediaan	0,00
Aktiva lancar lainnya	
PEMBIAYAAN	440.550.000,00
Pembiayaan Project	440.550.000,00
Jumlah Aktiva lancar lainnya	440.550.000,00
Jumlah Aktiva Lancar	1.883.807.527,96
Aktiva Tetap	
Nilai historis	
Aktiva Tetap	34.785.969.966,00
Tanah	28.581.400.000,00
Tanah Kantor Pusat	820.000.000,00
Tanah SRG Tomo	1.515.297.000,00
Tanah Sekarwangi	1.627.320.000,00
Tanah GIM	24.618.783.000,00
Bangunan	5.974.084.040,00
Bangunan Kantor Pusat	372.266.300,00
Bangunan SRG Tomo	1.760.103.000,00
Bangunan Sekarwangi	1.236.397.740,00
Bangunan GIM	2.605.317.000,00
Kendaraan	-7.000.000,00
Peralatan	237.485.926,00
Peralatan Kantor Pusat	177.698.326,00
Peralatan GIM	48.695.600,00
Peralatan SRG	5.750.000,00
Peralatan Burnong	5.342.000,00
Jumlah Nilai historis	34.785.969.966,00
Akumulasi Penyusutan	
AKUMULASI PENYUSUTAN	-681.771.695,68
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	-681.771.695,68
Akumulasi Penyusutan Bangunan Kantor	-33.401.825,83

Description	Balance
Akumulasi Penyusutan Bangunan SRG	-183.344.062,50
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-108.184.802,25
Akumulasi Penyusutan Bangunan GIM	-227.965.237,50
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	2.041.666,72
Akumulasi Penyusutan Peralatan	-130.917.434,32
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	-108.566.087,10
Akumulasi Penyusutan Peralatan GIM	-19.360.625,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan SRG	-2.555.555,56
Akumulasi Penyusutan Peralatan Burnong	-435.166,67
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-681.771.695,68
Jumlah Aktiva Tetap	34.104.198.270,32
OTHER ASSETS	
AKTIVA LANCAR LAINNYA	160.920.660,00
Piutang Lain Lain	30.074.177,00
Biaya Dibayar Dimuka	110.949.983,00
Pajak Dibayar Dimuka	110.949.983,00
PPn Masukan	108.932.503,00
Pajak PPh Badan 26/29	2.017.480,00
Uang Muka Pembelian Barang/Jasa	12.886.500,00
Uang Muka Pembelian Barang/Jasa	9.541.000,00
Uang Muka Perjalanan Dinas	3.345.500,00
Deposit	7.010.000,00
PROYEK DALAM PROSES	2.253.116.904,54
Wisata Sekarwangi	130.086.531,25
Biaya Perizinan Sekarwangi & Konsultan	469.499,00
Biaya Managemen Sekarwangi	76.300.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Sekarwangi	647.000,00
Modal Kerja Sekarwangi	94.830,00
Penyusutan Pra Project Sekarwangi	46.364.915,25
Operasional Sekarwangi	1.710.287,00
Biaya Sewa Kendaraan Sekarwangi	4.500.000,00
Wisata Burnong	107.227.542,00
Biaya Perizinan & Konsultan Publik Proyek	17.525.000,00
Biaya Pembangunan Fasilitas Burnong	9.964.000,00
Biaya Managemen Burnong	51.500.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Burnong	2.703.800,00
Biaya Koordinasi Burnong	4.807.000,00
Penyusutan Pra Project Burnong	11.500.000,00
Biaya Operasional Burnong	227.742,00
Biaya Sewa Kendaraan Burnong	9.000.000,00
KEK Jati Gede	290.908.933,51
Biaya Perizinan & Konsultan Publlik KEK	20.080.000,00
Biaya Gaji Managemen KEK	201.548.897,00
Biaya Perjalanan Dinas KEK	40.321.997,00
Penyusutan Pra Project KEK	14.203.272,51
Biaya Koordinasi Pusat Awal Pendirian	14.754.767,00
Gedung GIM	193.353.394,27
Biaya Pembangunan Fasilitas GIM	88.868.650,00
Modal Kerja GIM	125.000,00
Penyusutan Pra Project GIM	104.303.622,19
Operasional GIM	56.122,08
Gudang Tomo	237.504.060,00
Biaya Pembangunan Fasilitas Gudang Tomo	33.344.860,00
Biaya Managemen Gudang Tomo	55.075.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Gudang Tomo	979.300,00
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Gudang Tomo	204.000,00
Biaya Koordinasi Gudang Tomo	1.948.000,00
Penyusutan Pra Project Gudang Tomo	128.755.150,00
Modal Kerja Gudang Tomo	4.150.000,00

Description	Balance
Operasional Gudang Tomo	5.897.750,00
Biaya Perbaikan Mesin Gudang Tomo	2.650.000,00
Biaya Sewa Kendaraan Gudang Tomo	4.500.000,00
Perumahan	386.500,00
Biaya Perjalanan Dinas Perumahan	200.000,00
Biaya Operasional Perumahan	186.500,00
Proyek Agribisnis	17.843.600,00
PERTANIAN	8.896.300,00
Beras	4.500.000,00
Biaya Sewa Kendaraan Beras	4.500.000,00
Kopi	4.396.300,00
Biaya Pelatihan & Pendidikan Kopi	1.375.000,00
Biaya Koordinasi Kopi	547.000,00
Operasional Kopi	974.300,00
Biaya Perijinan & Konsultasi Publik Kopi	1.000.000,00
Biaya Desain & Kemasan Kopi	500.000,00
PETERNAKAN	8.947.300,00
Operasional Peternakan	1.337.400,00
Biaya Koordinasi Peternakan	3.109.900,00
Biaya Sewa Kendaraan Peternakan	4.500.000,00
PLTA WADO	141.861.024,00
Biaya Koordinasi PLTA Wado	362.500,00
Biaya Perjalanan Dinas PLTA Wado	2.394.524,00
Biaya Gaji Manajemen PLTA Wado	139.000.000,00
Biaya Operasional PLTA Wado	104.000,00
Saham Portepel/Right Issue	93.649.376,00
Perlengkapan Right Issue	3.545.600,00
Seragam Right Issue	12.541.000,00
Prospektus & Konsultan Publik Right Issue	22.126.000,00
Foto & Video Right Issue	9.230.500,00
Rapat & Koordinasi Right Issue	3.955.200,00
Sponsorship Right Issue	1.000.000,00
Perjalanan Dinas Right Issue	11.124.010,00
Hotel Right Issue	4.074.666,00
Marketing Right Issue	12.402.000,00
Sosialisasi Right Issue	1.777.100,00
Operasional Right Issue	2.373.300,00
Biaya Konsultan Right Issue	500.000,00
Biaya Sewa Kendaraan Right Issue	9.000.000,00
Perdagangan/Retail	6.263.603,00
Biaya Perijinan & Konsultan Publik Retail	115.000,00
Biaya Koordinasi Retail	350.000,00
Biaya Sample Retail	50.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Retail	1.534.900,00
Biaya Operasional Retail	1.213.703,00
Biaya Marketing Retail	3.000.000,00
TOL	132.137.526,51
Biaya Perijinan & Konsultan Publik Tol	2.000.000,00
Biaya Management Tol	117.000.000,00
Biaya Koordinasi Tol	2.197.930,00
Biaya Operasional Tol	820.796,51
Biaya Perbaikan Tol	5.118.800,00
Biaya Sewa Kendaraan Tol	5.000.000,00
Proyek Dalam Proses 2020	901.894.814,00
Intangible Asset	23.369.400,00
Lisensi Software Accurate	13.200.000,00
Biaya Pelatihan & Training Software	10.169.400,00
Jumlah OTHER ASSETS	2.437.406.964,54
Jumlah Aktiva	38.425.412.762,82

Description	Balance
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban lancar	
Hutang Dagang	
HUTANG	2.721.500,00
Hutang Usaha IDR	221.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka IDR	2.500.000,00
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka GIM	2.500.000,00
Jumlah Hutang Dagang	2.721.500,00
Kewajiban lancar lain	
Hutang Pajak	-652.053,00
PPn Keluaran	5.575.497,00
Hutang PPh 23	175.000,00
Hutang Pajak PPN	4.458.190,00
Hutang PPh Badan 26/29	-10.860.740,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	144.946.631,00
Hutang Gaji	144.946.631,00
Hutang Gaji Komisaris	138.000.000,00
Hutang Gaji Management Perumahan	8.126.300,00
Hutang Gaji GM Perumahan	8.126.300,00
Hutang Gaji Management Agribisnis	-1.179.669,00
Hutang Gaji GM Agribisnis	-1.179.669,00
Hutang Lain-Lain	1.452.196.190,00
Hutang Imbal Jasa	7.808.227,00
Hutang Pihak Ke 3	1.444.387.963,00
Jumlah Kewajiban lancar lain	1.596.490.768,00
Jumlah Kewajiban lancar	1.599.212.268,00
Kewajiban jangka panjang	
Jumlah Kewajiban jangka panjang	0,00
Jumlah Kewajiban	1.599.212.268,00
Ekuitas	
EKUITAS	37.091.310.140,79
Modal Disetor	37.251.937.740,00
Modal Disetor	37.251.937.740,00
Modal Tunai	2.750.000.000,00
Modal Aset	34.501.937.740,00
Dana Talangan	111.598.800,00
Laba Ditahan	-227.353.787,60
OPENING BALANCE EQUITY	-44.872.611,61
Laba tahun ini	-265.109.645,97
Jumlah Ekuitas	36.826.200.494,82
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	38.425.412.762,82

1.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas perseroan tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut:

PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)
Rincian Laporan Arus Kas (Metode Tak Langsung)
Period Januari 2022 to Desember 2022

No. No. Akun	Nama No. Akun	Saldo
Aktivitas Operasi		
Laba Bersih	(Dari Laporan Laba & Rugi)	-265.109.645,97
Tambah		
Akumulasi Penyusutan		
1700.002.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	40.822.393,91
1700.002.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan GIM	13.509.236,11
1700.002.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan SRG	1.916.666,67
1700.002.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Burnong	435.166,67
1700.001.001.1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kantor Pusat	18.673.970,00
1700.001.001.2	Akumulasi Penyusutan Bangunan SRG Tomo	88.005.150,00
1700.001.001.3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sekarwangi	61.819.887,00
1700.001.001.4	Akumulasi Penyusutan Bangunan GIM	130.265.850,00
Total dari Akumulasi Penyusutan		355.448.320,36
Selain Penyusutan		
2000.002.002	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka GIM	550.000,00
1100.002	Piutang Karyawan	119.532.675,00
1100.001.003	Piutang Materai	110.000,00
1100.001.001.1	Piutang Usaha IDR	186.682.062,00
1100.001.007.001	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	100.000.000,00
2100.001	PPn Keluaran	84.800,00
2100.004	Hutang PPh 23	175.000,00
2100.005	Hutang Pajak PPN	4.458.190,00
1200.001.001	Persediaan Barang Dagang	57.419.858,82
2200.002.001	Hutang Gaji Komisaris	39.000.000,00
2200.007.005	Hutang Pihak Ke 3	18.050.000,00
2200.002.006.01	Hutang Gaji GM Perumahan	8.126.300,00
Total dari Selain Penyusutan		534.188.885,82
Total dari Tambah		889.637.206,18
Kurang		
Akumulasi Penyusutan		
1700.001.002	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-1.604.166,67
Total dari Akumulasi Penyusutan		-1.604.166,67
Selain Penyusutan		
2000.001	Hutang Usaha IDR	-15.478.500,00
2200.007.001	Hutang Dana Operasional Divisi	-7.000.000,00
2200.007.004	Hutang BPJS	-5.367.220,00
2200.002.008.01	Hutang Gaji GM Agribisnis	-1.179.669,00
2200.001.003.001	Hutang Insentif Manager (all)	-74.202.400,00
2200.008.008.003.0	Hutang Unit Perumahan	-761.340,00
1300.001	Pembiayaan Project	-40.550.000,00
Total dari Selain Penyusutan		-144.539.129,00
Total dari Kurang		-146.143.295,67
Total dari Aktivitas		478.384.264,54
Investasi		
Tambah		
Investasi		
1400.100.002	Sewa Dibayar Dimuka	0,31
1600.003	Kendaraan	3.500.000,00
1800.002.006	Biaya Koordinasi Burnong	2.000.000,00
1800.005.002	Biaya Pembangunan Fasilitas GIM	30.700.000,00
Total dari Investasi		36.200.000,31
Total dari Tambah		36.200.000,31
Kurang		
Investasi		
1400.100.001.01	PPn Masukan	-11.538.190,00
1400.100.006.002	Uang Muka Pembelian Barang/Jasa	-9.541.000,00
1400.100.006.003	Uang Muka Perjalanan Dinas	-3.345.500,00
1600.004.002	Peralatan GIM	-18.569.000,00
1600.004.004	Peralatan Burnong	-5.342.000,00

No. No. Akun	Nama No. Akun	Saldo
1800.001.010	Biaya Sewa Bangunan Sekarwangi	-0,31
1800.001.009	Operasional Sekarwangi	-540.862,00
1800.002.004	Biaya Perjalanan Dinas Burnong	-132.000,00
1800.005.007	Penyusutan Pra Project GIM	-108.333,33
Total dari Investasi		-49.116.885,64
Total dari Kurang		-49.116.885,64
Total dari Investasi		-12.916.885,33
Pendanaan		
Tambah		
Pendanaan		
3000.007	Dana Talangan	63.088.800,00
Total dari Pendanaan		63.088.800,00
Total dari Tambah		63.088.800,00
Kurang		
Pendanaan		
3000.99	OPENING BALANCE EQUITY	-57.583.958,82
3000.009	Laba Ditahan	-364.849.514,00
Total dari Pendanaan		-422.433.472,82
Total dari Kurang		-422.433.472,82
Total dari Pendanaan		-359.344.672,82
Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini		106.122.706,39
Total dari Kas & Setara Kas di Awal period		186.648.161,57
Total dari Kas & Setara Kas di Akhir period		292.770.867,96

1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas perseroan tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut:

PT. KAMPUNG MAKMUR (PERSERODA)
Perubahan Ekuitas Pemilik
Dari 01 Jan 2022 ke 31 Dec 2022

Keterangan	Saldo	
Ekuitas pemilik awal periode		37.450.654.813,61
Pendapatan Bersih	-265.109.645,97	
Investasi kurun periode	495.181.401,00	
Penarikan	854.526.073,82	
Penambahan Ekuitas pemilik		-624.454.318,79
Ekuitas pemilik di akhir periode		36.826.200.494,82

1.5 Pajak dan Deviden

1.5.1 Pajak

Untuk tahun 2022, perusahaan belum bisa menghitung besaran pajak tahunan, dikarenakan sedang menunggu rekonsiliasi data dengan pihak KPP Pratama.

1.5.2 Deviden

Untuk tahun 2022, perusahaan tidak menyetorkan deviden, dikarenakan laba perusahaan dalam posisi minus/ negatif.

1.5.3 Devisa

Selama tahun 2021 Perusahaan tidak mempunyai Devisa, karena keseluruhan transaksi menggunakan rupiah

1.6 Laporan Dewan Komisaris

1.6.1 Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 PT. Kampung Makmur (Perseroda)

1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja PT. Kampung Makmur (Perseroda)

1.6.3 Upaya Memperbaiki Kinerja PT. Kampung Makmur (Perseroda)

1.6.4 Laporan Pelaksanaan Pengawasan Komisaris Terhadap PT. Kampung Makmur (Perseroda)

1.7 Laporan Dewan Direksi

Para pemegang saham yang kami hormati

Kami menyadari bahwa tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi, baik pada lingkup nasional maupun global. Kondisi ini pada satu sisi masih menyisakan berbagai tantangan yang tidak mudah, namun di sisi lain juga menghadirkan peluang bagi pertumbuhan usaha.

Pada tahun 2022, Perseroan berhasil merealisasikan berbagai langkah strategis sebagai upaya penting untuk mendorong pertumbuhan usaha secara kuat pada jangka panjang. Salah satunya adalah upaya kami memasuki bidang baru di industri pariwisata yakni pengelolaan Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong . Langkah ini ke depannya kami harapkan akan menjadi pintu untuk perkembangan Perseroan yang lebih cerah di masa depan. Melalui kesempatan ini, kami selaku Direksi akan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2022. Laporan ini memuat sejumlah penjelasan mengenai analisis kinerja, perbandingan target dan realisasi, hingga analisis prospek usaha Perseroan untuk tahun 2023. Penyampaian hal-hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban kami kepada pemangku kepentingan Perseroan, sekaligus sebagai pemenuhan aspek keterbukaan informasi sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2022 setelah penyertaan modal dari Pemkab berupa asset dan dana tunai, perseroan mengelola beberapa unit bisnis diantaranya sebagai berikut :

1) Pengelolaan Gedung Graha Insun Medal (GIM)

Tahun 2022, setelah perseroan melakukan beberapa item *renovasi minor*, pendapatan Gedung Graha Insun Medal mulai mengalami kenaikan, seiring dengan mulai longgarnya kebijakan PPKM. Rata-rata pendapatan Gedung Graha Insun Medal per bulan sekitar Rp. 15 sd 20 juta. Sisi lain, unit Gedung Graha Insun Medal masih memiliki cukup banyak piutang sewa ruangan dari para komunitas *non profit*, dimana saat ini posisi piutang per bulan Desember 2022 sekitar Rp. 283.920.627,-.

Pendapatan Gedung Graha Insun Medal selama ini hanya dapat menutupi biaya *overhead* unit, dan belum dapat berkontribusi secara optimal kepada perseroan, salah satu langkah yang harus dilakukan yakni:

- a. Relokasi komunitas *non profit* yang selama ini tidak membayar sewa tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan potensi pendapatan bila disewakan kembali pada perusahaan lain secara komersil.
- b. Renovasi mayor gedung utama yang lebih representatif lagi sehingga harga sewa gedung dapat lebih kompetitif.

2) Pengelolaan Gedung Sistem Resi Gudang (SRG) Tomo

Terkendalanya kerjasama dengan PT. Kita Maju Sejahtera menyebabkan rencana pengelolaan system resi gudang dan mesin *rice milling unit* tidak dapat terealisasi di tahun ini. Namun perseroan telah mengambil langkah solusi dengan menggandeng PT. Global Makmur Perdana untuk melakukan kerjasama operasional (kso) jual beli komoditi jagung pada bulan Maret 2022. PT. Global Makmur Perdana telah memberikan modal kerja kerjasama operasional (kso) sebesar Rp. 300 juta untuk pembelian jagung, yang rencananya akan disimpan dengan metode SRG. Namun demikian karena terkendala situasi harga komoditi jagung yang terus turun, maka persediaan jagung tersebut dijual cepat oleh perseroan untuk mengurangi resiko kualitas barang yang semakin menurun. Hasil dari penjualan jagung yang lebih rendah dari harga pembelian, menyebabkan kerjasama operasional (kso) mengalami kerugian sekitar Rp. 50 juta.

3) Pembiayaan Perumahan Bersubsidi

Selama tahun 2022 pembiayaan rumah bersubsidi masih dalam kondisi lancar, dimana total pembiayaan saat ini masih dibesarkan Rp. 400 juta untuk 10 unit rumah. Selama periode bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022. perseroan telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 165 juta. Potensi peningkatan keuntungan dari pembiayaan perumahan bersubsidi masih potensial di tahun 2023, mengingat pihak developer yakni PT EKS Group masih membuka peluang pada perseroan untuk menambah unit rumah yang akan dibiayai, namun demikian perseroan memiliki keterbatasan permodalan.

4) Pengelolaan Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong

Pada bulan Mei 2022, perseroan telah mendapatkan penugasan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengelola kawasan desa wisata kampung buricak burinong, melalui kerjasama dengan Dinas Priwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Sebagai salah satu syarat kerjasama pengelolaan, perseroan diwajibkan menyetorkan kontribusi tetap kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 59.471.600,-/tahun.

Perseroan telah melakukan penyetoran ke kas daerah pada bulan 28 April 2022 yang bersumber dari dana pinjaman Komisaris, namun sampai saat ini perseroan belum dapat melunasi dana pinjaman tersebut karena kondisi *cashflow* perseroan yang belum memungkinkan. Sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Desember 2022, pendapatan dari unit bisnis kawasan desa wisata kampung buricak burinong dinilai masih dibawah target, dan hanya dapat menutupi biaya operasional unit, dimana total pendapatan hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp. 267.826.614. Sebagai turunan dari kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang, perseroan juga harus menjalin kerjasama dengan KPH Perhutani sumedang sebagai pemilik lahan area *forest walk*. Namun demikian hingga saat ini, perseroan belum dapat melaksanakan kerjasama tersebut karena beberapa kendala diantaranya perseroan harus membangun sarana prasarana wajib di area *forest walk*, yang tentunya membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

Pencapaian Kinerja Keuangan

1) Sumber Pendanaan Perseroan

Pendanaan perusahaan diperoleh dari 2 sumber yakni berupa Modal Disetor oleh pemilik saham dan berupa pinjaman Pihak Ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Dana Perseroan

No.	Struktur Pendanaan	Jenis Modal	Nominal
1.	Modal Disetor	Uang Tunai	Rp. 2.750.000.000,-
2.	Modal Disetor	Aset Tetap	Rp. 34.501.500.000,-
3.	Pinjaman Pihak Ketiga	Uang Tunai	Rp. 1.500.000.000,-

Pada awal berdirinya yaitu tahun 2020, perseroan mendapatkan modal awal berupa dana tunai dari penyertaan Saham Sdr. Hendri Heryanto yang juga merangkap Direktur sebesar Rp. 250.000.000,- yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan/perlengkapan kantor dan kegiatan operasional perusahaan. Dana awal tersebut dinilai tidak cukup sebagai modal usaha yang dirintis perusahaan, oleh karena itu direksi mengambil langkah untuk melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga yakni PT. Dirga Marga Sakti dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.500.000.000,- pada tahun 2020. Dana tersebut digunakan untuk modal usaha perdagangan alat kesehatan dan perdagangan komoditi kopi pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Pemkab Sumedang selaku pemilik saham melakukan penyertaan modal sekaligus berupa Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan berupa asset tetap (Tanah dan Bangunan) sebesar Rp. 34.501.500.000,-.

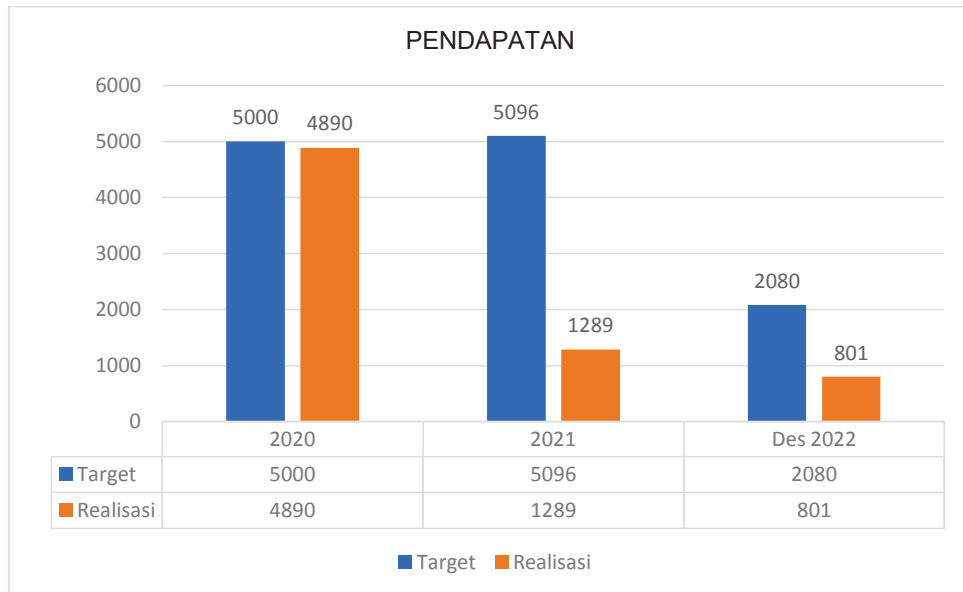
Tabel 1. 2 Perbandingan Laporan Keuangan Tahun 2021 dan 2022

	TAHUN 2021 (Auditted)	UNAUDITED
		31 Des 2022
Pendapatan Usaha	1.289.406.169	1.393.261.260
Beban Pokok Pendapatan	1.237.037.661	857.542.799
Laba Kotor	52.368.508	535.718.462
Beban Usaha		
Beban Penjualan	83.669.900	130.215
Beban Pegawai	379.593.809	578.698.782
Beban Administrasi dan Umum	235.877.034	230.575.573
Jumlah Beban Usaha	699.140.743	809.404.570
Laba (Rugi) Usaha	- 646.772.235 -	273.686.108
Pendapatan (Beban) Lain-lain :		
Pendapatan Lain-Lain	16.140.005	10.009.486
Beban Lain-lain	- 6.988.844 -	3.509.076
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	9.151.161	13.518.562
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	- 637.621.074 -	260.167.546
LABA (RUGI) BERSIH	- 637.621.074 -	260.167.546

(dalam juta)

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Perseroan Selama 3 Tahun (dalam juta)

Komponen	2020		2021		2022 (unaudited)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Des 2022)
Penjualan	5.000	4,89	5.096	1.289	2.080	801
Beban Operasi	1.200	512	787	699	761	686
Laba	1.000	24	321	-637	499	-626



Pencapaian target pendapatan tahun 2020 mencapai 196% dari target Rp. 2,5 Milyar. Sumber pendapatan tahun 2020 diperoleh dari 3 unit usaha yakni perdagangan alat kesehatan, perdagangan komoditi kopi, dan pekerjaan proyek *planter box* Tol Cisumdawu. Kontribusi terbesar pendapatan tersebut diperoleh dari penjualan alat kesehatan penanganan covid-19 yang mencapai lebih dari Rp. 2 Milyar.

Tahun 2021 realisasi pendapatan hanya tercapai 43% dari target, dimana hasil pendapatan perseroan diperoleh dari 4 unit usaha yakni pengelolaan Gedung GIM, Wisata Buricak Burinong, Pembiayaan FLPP, Perdagangan Retail dan Agribisnis. Faktor penyebab tidak tercapainya target pendapatan yakni bahwa beberapa unit bisnis belum dapat direalisasikan di tahun 2021. Berdasarkan RKA 2021, pembangunan Wisata Sekarwangi dengan target pendapatan sebesar Rp. 1 Milyar belum terealisasi mengingat aspek legalitas, social, dan dana investasi yang cukup menghambat.

Selain itu, perseroan juga memproyeksikan pendapatan dari pekerjaan konstruksi Tol Cisumdawu dengan target sebesar Rp. 1 Milyar, namun demikian proyeksi tersebut tidak terealisasi mengingat resiko kelancaran pembayaran dari bowheer dinilai terlalu besar. Target pendapatan dari kawasan desa wisata kampung buricak burinong sebesar Rp. 1 Milyar juga tidak sesuai rencana, mengingat pengoperasian wisata hanya dapat dilaksanakan selama 2 hari pada bulan Mei 2021 yang disebabkan karena factor teknis pembangunan dan perizinan yang belum selesai. Tahun 2022 target pendapatan baru mencapai 19% dengan realisasi periode Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp. 801 juta. Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target pendapatan tahun 2022 diantaranya adalah rencana pendapatan dari penjualan unit rumah subsidi masih nihil, pengelolaan Gudang Sistem Resi

Gudang (SRG)Tomo belum optimal mengingat belum ada pembangunan rice milling unit (RMU).

Tabel 1. 4 Aset dan Kewajiban tahun 2022

No.	Uraian	TAHUN 2021 (Auditted)	TAHUN 2022 (Unaudited)	
			Realisasi	
1	2	3	31 Des 2022	
			4	
I	ASET			
A	Aset Lancar			
	Kas dan Setara kas	181.036.935		292.770.868
	Piutang Usaha	738.821.841		599.839.779
	Persediaan	31.297.500		-
	Biaya Dibayar Dimuka	-		-
	Piutang Lain-Lain	233.469.733		94.622.881
	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	556.024.000		456.024.000
	Piutang Pembiayaan Proyek	400.000.000		440.550.000
	Uang Muka Pajak	99.811.793		-
	Jumlah Aset Lancar	2.240.461.802		1.883.807.528
B	Aset Tidak Lancar			
	Aset tetap Berwujud	34.419.043.867		34.104.198.270
	Aset Lancar Lainnya	17.527.050		160.920.660
	Proyek Dalam Proses dan Biaya Ditangguhkan	1.571.306.737		2.253.116.905
	Uang Jaminan	7.010.000		-
	Asset Lainnya	-		23.369.400
	Jumlah Aset Tidak Lancar	36.014.887.654		36.541.605.234
	JUMLAH ASET	38.255.349.456		38.425.412.762
II	Liabilitas dan Ekuitas			
A	Liabilitas			
	Liabilitas Lancar			
	Hutang Usaha	-		221.500
	Pendapatan Diterima Dimuka	950.000		2.500.000
	Hutang Lain-lain	1.437.072.403		1.452.196.190
	Biaya YMH Dibayar	190.702.400		144.946.631
	Hutang Pajak	20.842.652		652.053
	Jumlah Liabilitas Lancar	1.649.567.455		1.599.212.268
	Liabilitas Tidak Lancar			
	Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Karyawan	15.616.454		-
	Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	15.616.454		-
	JUMLAH LIABILITAS	1.665.183.909		1.599.212.268
B	Ekuitas			
	Modal Disetor	37.251.500.000		37.251.937.740
	Modal Tambahan	-		-
	Dana Talangan	-		111.598.800
	Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	48.264.925		227.353.788
	Laba (Rugi) Tahun Lalu	24.551.546		44.872.612
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	637.621.074		265.109.646
	Jumlah Ekuitas	36.590.165.547		36.826.200.495
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	38.255.349.456		38.425.412.763

Review Posisi Aktiva

Posisi *current ratio* pada tahun 2020 sebesar 0.6 Kali sedangkan standar rasio *current ratio* minimal 1 Kali. Kondisi *current ratio* perseroan berada dibawah 1 kali disebabkan karena sumber dana untuk menyediakan aset lancar sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga sebesar Rp. 1,5 Milyar. Posisi *current ratio* pada tahun 2021 dan 2022 mendekati angka 1 Kali, hal ini berarti tingkat likuiditas perseroan masih dalam kategori lancar, mengingat pada tahun 2021 perseroan mendapatkan permodalan baru berupa uang tunai sebesar Rp. 2,5 Milyar yang berasal dari penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Posisi piutang usaha perseroan sejak tahun 2020 sd saat ini masih cukup besar yakni sekitar Rp. 617 juta, namun demikian sebagian besar piutang tersebut masuk dalam kategori kurang lancar karena perseroan cukup kesulitan dalam melakukan penagihan.

Rincian saldo piutang yang dinilai kurang lancar sebagai berikut :

- 1) Piutang hasil penjualan alat penanganan covid-19 di Pemkab Sumedang dengan saldo sekitar Rp. 327 juta. Piutang ini telah ditagihkan sejak tahun 2020, namun karena kendala administrasi maka kemungkinan besar piutang ini sulit tertagih, sehingga secara akuntansi harusnya saldo piutang ini harus segera dihapusbukukan.
- 2) Piutang Hasil penjualan komoditi kopi tahun 2020 dari Koperasi Gunung Luhur Berkah Kabupaten Subang dengan sisa saldo tagihan sebesar Rp. 200 juta. Piutang ini masih dapat dilakukan penagihan, mengingat pihak terhutang telah melakukan pembayaran secara bertahap.

Perseroan masih mempunyai saldo pendapatan yang masih akan diterima sebesar Rp. 456 juta. Saldo tersebut merupakan pembayaran dari mitra PT. Kita Maju Sejahtera yang menjalankan kejasama operasional dengan perseroan, dimana PT. Kita Maju Sejahtera harus menyetorkan biaya *goodwill* selama 5 tahun dengan total sebesar Rp. 651 juta dan baru disetorkan sebesar Rp. 250 juta pada awal tahun 2022.

Pada posisi bulan Oktober 2022, perseroan juga masih memiliki tagihan pembiayaan rumah bersubsidi sebesar Rp. 400 juta berikut keuntungan yang diperoleh Rp. 55 juta, sehingga total potensi dana masuk dari pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar Rp. 455 juta yang diproyeksikan masuk pada awal bulan Desember 2022.

Pada akun aktiva lainnya, perseroan memiliki saldo biaya proyek dalam proses. Akun ini merupakan biaya yang ditanggungkan dalam melakukan inisiasi proyek-proyek jangka panjang selama periode berjalan. Tahun 2020 total biaya proyek dalam proses sebesar Rp. 901 juta dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.480 juta.

Review Posisi Hutang

Posisi 31 Desember 2022 perseroan masih memiliki beberapa kewajiban yang harus segera dibayarkan, diantaranya yaitu hutang kepada pihak ketiga yakni PT. Dirga Marga Sakti sebesar Rp. 1,780.947.527 yang merupakan pinjaman modal tahun 2020. yang di dalamnya juga ada hutang kewajiban pembayaran gaji/insentif pegawai dengan total +/- Rp. 319.381.890. Hutang gaji tersebut merupakan sisa gaji pegawai yang belum dibayarkan selama periode tahun 2022.

Review Posisi Modal

Posisi tahun 2020 total modal perseroan sebesar Rp. 5.549 juta yang terdiri dari modal tunai sebesar Rp. 2.750 juta dan sebesar Rp. 1.025 juta dalam bentuk asset tetap. Tahun 2021 Pemkab Sumedang menambahkan modal dalam bentuk asset tetap, sehingga total modal dalam bentuk asset bertambah menjadi sebesar Rp. 34.501 juta.

Pada tahun 2021 perseroan mengalami kerugian sebesar Rp. -637 juta, sehingga saldo modal perseroan mengalami penurunan menjadi Rp. 36.590 juta, dan pada posisi Desember 2022 perseroan membukukan kerugian sebesar Rp. -375.070.951 yang menyebabkan saldo modal perseroan kembali menurun menjadi Rp. 36.581 juta.

BAB 2
PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Riwayat Singkat Perusahaan

PT Kampung Makmur (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), maksud didirikan Perseroan adalah untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset Daerah Kabupaten. dan tujuan didirikan Perseroan yaitu:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kabupaten berdasarkan tata kelola Perseroan yang baik;
3. terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan; dan
4. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Informasi Tentang Perseroan tersaji dalam tabel berikut:

Nama Perusahaan	Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda)
Kegiatan Usaha	Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, bidang pertambangan dan penggalian, bidang industri pengolahan, bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, bidang konstruksi, bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobildan sepeda motor, bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, bidang aktivitas keuangan dan asuransi, bidang real estat, bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, bidang aktivitas kesehata manusia dan aktivitas sosila, dan usaha bidang kesenian, hiburan dan rekreasi.
Kepemilikan Saham (per 31 Desember 2022)	- Pemerintah Kabupaten Sumedang Rp. 37.Milyar (99%) - Masyarakat Rp. 250 Juta (1%)

Tanggal	13 Februari 2020
Pendirian	
Dasar Hukum	- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda)
Pendirian	- Akta Notaris Isep Rahmayadi, S.H., M.Kn. Nomor 30 Tanggal 13 Februari 2020, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009989.AH.01.01.Tahun 2020
Modal Dasar	Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)
Modal Ditempatkan	Rp. 37.251.500.000 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
Alamat	Jl. Serma Muchtar No. 121 Sumedang 45323 Telepon : 0261 2401346 Email : kampungmakmur.bumd@gmail.com Website : www.kampungmakmur.co.id

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Visi Perusahaan adalah “Menjadi Perusahaan Daerah Berskala Global dan Berstandar Internasional, Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Sumedang”.

Misi

Guna mewujudkan visi Perusahaan tersebut, PT Kampung Makmur memiliki 5 (lima) misi utama yang dirangkum ke dalam istilah “*BLOG INSIDE*” yang terdiri dari:

1. *Business Creator*

Misi pertama Perusahaan yaitu menciptakan unit bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan dari berbagai sektor ekonomi potensial di Sumedang.

2. *Local Distribution Channel*

Misi kedua Perusahaan yaitu sebagai jaringan penyedia kebutuhan barang dan jasa khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, serta sebagai intermedator antara pemasok (supplier) bahan baku / jadi dengan para konsumen (buyer).

3. *Government Partner*

Misi ketiga Perusahaan yaitu sebagai partner pemerintah daerah, dalam mewujudkan program efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang.

4. *Integrated Partnership*

Misi keempat Perusahaan yaitu menjadi partner usaha terbaik yang dapat menciptakan ekosistem bisnis terintegrasi antara BUMN, BUMD, BUMDES, Investor, dan Masyarakat khususnya Kab. Sumedang.

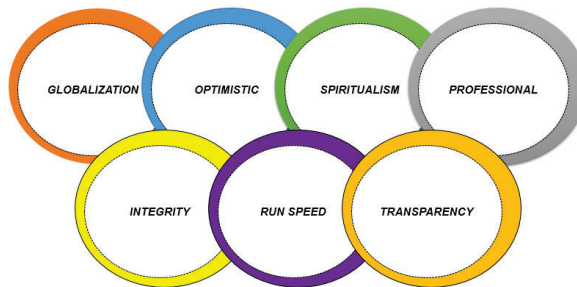
5. *Sumedang Development Agent*

Misi kelima Perusahaan yaitu berperan aktif sebagai agen perubahan bagi kemajuan sumber daya masyarakat Sumedang

2.3 Tata Nilai Perusahaan (*Corporate Value*)

Perusahaan memiliki 7 nilai dan budaya kerja yang disingkat dengan istilah “The 7 Value of *GO SPIRIT*” yang terdiri dari:

CORPORATE VALUE



Gambar 2. 1 *Corporate Value* Perseroan

1. *Globalization*

Mempunyai makna bahwa kapasitas Perusahaan harus berskala global dan berstandar internasional.

2. *Optimistic*

Bermakna bahwa seluruh SDM Perusahaan harus bersikap optimis dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Perusahaan.

3. *Spiritualism*

Bermakna bahwa agama harus menjadi pondasi dasar dan utama bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas Perusahaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan budaya

4. *Profesional*

Bersikap profesional di setiap aspek, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

5. *Integrity*

Memiliki sikap integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajiban Perusahaan, serta mengedepankan azas taat aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. *Run Speed*

Bermakna lincah dan pro aktif dalam menangkap setiap peluang yang ada

7. *Transparency*

Bersikap transparan dan terbuka dalam membuat dan menyampaikan laporan Perseroan kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan.

2.4 Kegiatan Usaha

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), serta Anggaran Dasar yang telah diperbaharui dan dicatat dalam *database* administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0024104.AH.01.02.TAHUN 2021 untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan, Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, bidang pertambangan dan penggalan, bidang industri pengolahan, bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, bidang konstruksi, bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobildan sepeda motor, bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, bidang aktivitas keuangan dan asuransi, bidang real estat, bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, bidang aktivitas kesehata manusia dan aktivitas sosila, dan usaha bidang kesenian, hiburan dan rekreasi.

2.5 Wilayah Operasional

Pada tahun 2022, jangkauan operasional Perseroan telah hanya mencakup wilayah Kabupaten Sumedang, namun Sejalan dengan pertumbuhan teknologi di era digital, Perseroan memanfaatkan kanal online e-commerce untuk menyalurkan produk-produk terbaik Perseroan, salah satunya melakukan bisnis trading dengan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya, yaitu berupa pengiriman komoditi agribinsi (beras) dan pengiriman produk-produk Usaha Mikro Kecil, dan Menengah asli Sumedang.

2.6 Komposisi Pemegang Saham

Tabel 2. 1 Komposisi Pemegang Saham Perseroan

Deskripsi	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal	Persentase
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	100%
Pemerintah Kabupaten Sumedang	370.015	37.001.500.000	99,3%
Masyarakat	2.500	250.000.000	0,67%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	372.155	37.251.500.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portapel	227.500	56.875.000.000	38%

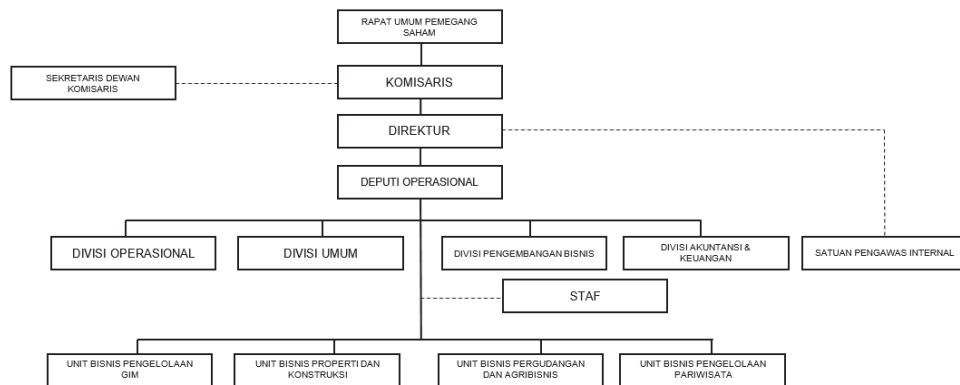
2.7 Lembaga Profesi dan Penunjang Perseroan Periode Tahun 2020 – 2022

Tabel 2. 2 Lembaga Profesi dan Penunjang Perseroan

Lembaga	Nama Lembaga	Periode Penugasan	Jasa yang diberikan
Notaris	Kantor Notaris Isep Rahmayadi, S.H., M.Kn. Jl. Pangeran Kornel No.225 Sumedang Telepon: (0261) 2141836	2020 - 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Akta Pendirian Nomor 30 Tanggal 13 Februari 2020 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Kampung Makmur - Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kampung Makmur (Perseroda) Nomor 01 Tanggal 2 Februari 2021 - Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kampung Makmur (Perseroda) Nomo 27 Tanggal 22 Maret 2021 - Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kampung Makmur (Perseroda) Nomor 66 Tanggal 15 Agustus 2022
Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Agus, Indra, Jeri & Rekan Jl. Otista Raya No 390, Jatinegara, Jakarta Timur 13330 Telepon (021) 50110830	2021	Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020
Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan Jl. Angkrek 3 No 28 Larangan Indah Tangerang 15154	2022	Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021

2.8 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Direktur PT Kampung Makmur (Perseroda) Nomor : 063/SK/PTKM/Dir/ix/2022 tanggal 1 September 2022 tentang perubahan struktur organisasi PT Kampung Makmur (Perseroda), struktur organisasi yang digunakan selengkapnya sebagaimana tampak pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perseroan

2.9 Pengurus Perseroan

Profil Komisaris



Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si.

Warga Negara Republik Indonesia,
bertempat tinggal di Sumedang.
saat ini berusia 53 Tahun

Riwayat Penunjukan Sebagai Komisaris

Menjabat sebagai Komisaris sejak 15 Agustus 2022 berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tanggal 15 Agustus 2022. Menggantikan Komisaris Sebelumnya Drs. Herman Suryatman, M.Si.

Rangkap Jabatan

Sebagai representasi dari Pemerintah daerah yang memiliki Saham 99% di perseroan, saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Pendidikan

Memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi *dari* Short Course Tsinghua University in China.

Profil Direktur



HENDRI HARYANTO, S.E,

Warga Negara Republik Indonesia,
bertempat tinggal di Sumedang. saat ini
berusia 37 Tahun

Riwayat Penunjukan Direktur

Periode tahun 2020-2022, Direktur dijabat oleh Hendri Haryanto, S.E. sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 539/KEP.81-HUK/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan Akta Pendirian Perseroan Notaris Isep Rahmayadi, S.H., M.Kn. Nomor 30 Tanggal 13 Februari 2020, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009989.AH.01.01.Tahun 2020. pada agenda Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Desember 2022, beliau mengundurkan diri dari jabatan Direktur. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, saat ini jabatan Direktur dijabat oleh Komisaris selaku pelaksana tugas, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam hal ini kaitannya sebagai pemilik perseroan sedang melaksanakan seleksi Direksi berdasarkan pengumuman Nomor BP.04/131/2023 tentang Penerimaan Seleksi Calon Direksi PT Kampung Makmur (Perseroda) Kabupaten Sumedang periode 2023-2028.

Riwayat Profesi

Beliau dilahirkan di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1984. Merupakan alumnus Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Mengawali karir di BUMN spesifiknya di Bank Negera Indonesia 46 dari tahun 2007, jabatan terakhir yang dipegang yaitu Pimpinan Cabang BNI Prabumulih Sumatera Selatan

Rangkap Jabatan

Hendri Haryanto tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan pengendali, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pendidikan

Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2007.

BAB 3
KINERJA PERUSAHAAN

3.1 Kondisi Umum

Ada 2 hal yang menjadi acuan menilai kinerja perusahaan, yaitu capaian terhadap target-target di dalam rencana bisnis dan indikator kinerja perusahaan. secara singkat capaian terhadap rencana bisnis dapat kami sajikan berikut:

Financial Ratio Indicator

Tabel 3. 1 Tabel Financial Ratio Indicator

Ratio	Indicator	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi	Deviasi
Revenue	Dim Rp.	2.500.000.000	4.890.205.977	2.390.205.977	3.000.000.000	1.289.406.169	- 1.710.593.831	5.000.000.000	962.323.752	- 4.037.676.248
Nett Profit	Dim Rp.	250.000.000	24.551.546	- 225.448.454	500.000.000	637.621.074	- 1.137.621.074	1.000.000.000	749.459.005	- 1.749.459.005
PAD	Dim Rp.	100.000.000	-	100.000.000	250.000.000	-	250.000.000	500.000.000	-	500.000.000
Export Comodities	Saluan	1	1	-	2	0	- 2	3	0	- 3
Business Unit	Jmh Unit	2	4	2	4	6	2	6	4	- 2
BOPO	%	85	-	85	85	-	85	80	-	80
Capital Size	Dim Rp.	10.000.000.000	5.676.275.184	- 4.323.724.816	10.000.000.000	38.255.349.455	28.255.349.455	25.000.000.000	38.392.358.451	13.392.358.451

Dari tahun 2020, 2021 dan 2022, target tercapai di tahun 2020, dari sisi pendapatan untung sebesar Rp. 2,3 Milyar, ini terjadi karena ada bisnis perdagangan alat kesehatan antisipasi covid-19 di tahun tersebut, selanjutnya dari ratio manapun, terjadi minus hingga oktober 2022.

Target Kinerja/Pencapaian

Tabel 3. 2 Rencana Bisnis Perseroan 2020-2025

Tahun	Kondisi Yang Diiinginkan	Pencapaian	Keterangan
2020	Menyusun organ BUMD / manajemen dan memperluas jaringan bisnis yang terintegrasi, dengan melibatkan kerjasama investor;	Tercapai	Nihil
	Menciptakan pertumbuhan laba yang signifikan melalui perluasan & pemerataan lini bisnis	Belum Tercapai	Pada tahun 2020 laba perusahaan baru mencetak laba Rp. 24 juta sementara target Laba tahun 2020 Rp. 500 juta
2021	Merealisasikan program RIPPARDA dengan menjadi "Agent of Tourism Development Centre"	Tercapai Proporsional	Tahun 2021 perseroan memiliki 2 sasaran membangun 2 obnjek wisata yakni Air Panas Sekarwangi dan Buricak Burinong, namun sasaran yang baru tercapai yaitu pengelolaan Buricak Burinong
	Menciptakan nilai tambah ekonomi di sektor industri pariwisata yang terintegrasi	Belum Tercapai	Nilai tambah ekonomi dari pengelolaan pariwisata belum terlaksana sepenuhnya, mengingat perseroan masih dalam tahap uji coba pengelolaan Buricak Burinong
2022	Menjadi penggerak roda ekonomi dengan membangun ekosistem bisnis melalui kerjasama korporasi	Tercapai Proporsional	Perseroan telah menjalin kerjasama terintegrasi di sektor perdagangan dengan melibatkan UMKM dan antar BUMD, dan di sektor agribisnis melibatkan gapoktan komoditi kopi/jagung/beras dengan mitra bisnis perseroan
	Memberikan kontribusi PAD yang signifikan bagi pemerintah kabupaten	Belum Tercapai	Target PAD belum tercapai mengingat perusahaan masih dalam kondisi merugi.
2023	Menjadi BUMD Terbaik skala nasional	Belum Tercapai	Tahun berjalan belum dilalui.
	Kontributor PAD yang dominan dengan bersaing antar BUMD provinsi	Belum Tercapai	
2024-2025	Menjadi BUMD profesional dan berstandar internasional	Belum	
	Menjadi BUMD Terbaik berskala global	Belum	

3.2 Gambaran Singkat Kinerja Perusahaan

Menurut Jumingan (2006), kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Alat untuk menganalisa suatu laporan keuangan berupa rasio-rasio keuangan. Beberapa tujuan analisis keuangan adalah sebagai berikut :

1. Investasi Pada Saham
2. Pemberian kredit
3. Kesehatan Pemasok (*supplier*)
4. Kesehatan Pelanggan (*customer*)
5. Kesehatan Perusahaan ditinjau dari Karyawan
6. Pemerintah
7. Analisis Internal
8. Analisis Pesaing
9. Penilaian Kerusakan

Rasio-rasio keuangan umumnya terdiri dari :

- a. Rasio Likuiditas
- b. Rasio Aktivitas
- c. Rasio Solvabilitas
- d. Rasio Profitabilitas

Analisis berdasarkan laporan keuangan akan melibatkan beberapa perbandingan baik terhadap perusahaan lainnya atau terhadap data pada periode-periode sebelumnya. Data-data tersebut dengan demikian harus bisa diperbandingkan satu sama lain (*comparable*) baik terhadap perusahaan lainnya atau terhadap data periode sebelumnya (Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan, 2003).

Tabel 3. 3 Kinerja Keuangan 2021 Audited dan RKA 2022

No.	Uraian	Standar	Tahun 2021 Audited	TAHUN 2022	
				Unaudited	
1	2	3	4	5	
1	RASIO LIKUIDITAS (CASH RATIO) :				
	Rasio Lancar (Current Ratio)	2	1,36		1,18
	Rasio Quick (Quick Ratio)	2	1,34		1,18
2	RASIO AKTIVITAS (ACTIVITY RATIO) :				
	Perputaran Piutang	> 3 kali	1,75		2,32
	Perputaran Persediaan	> 3 kali	39,53		-
	Perputaran Aktiva Tetap	> 4 kali	0,04		0,04
	Perputaran Total Aktiva	> 1	0,03		0,04
3	RASIO SOLVABILITAS (DEBT RATIO) :				
	Rasio Hutang thd Modal (DER Ratio)	90%	0,05		0,04
	Rasio Hutang thd Aset (DAR Ratio)	50%	0,04		0,04
4	RASIO PROFITABILITAS (PROFITABILITY RATIO) :				
	Rasio atas Laba Bersih (<i>Nett Profit Margin Ratio</i>)	20%	- 0,49	-	0,19
	Rasio atas Laba Kotor (<i>Gross Profit Margin</i>)	30%	0,04		0,38
	Rasio atas Modal ke pemegang saham (ROE)	8%	- 0,02	-	0,01
	Rasio atas Aset (<i>Return on Assets Ratio /ROA</i>)	5,98%	- 0,02	-	0,01

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Rasio ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat jatuh tempo.

Rasio yang biasanya/lazim digunakan untuk mengukur likuiditas dalam laporan keuangan, adalah Rasio lancar (*Current Ratio*), dan *Quick Ratio*, dengan masing-masing rumus sebagai berikut:

a. Rumus Rasio lancar (current Ratio): $\text{Aktiva lancar (current assets)} / \text{Hutang lancar (current liabilities)}$

b. Rumus Quick Ratio: $(\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}) / \text{Hutang lancar}$

Berdasarkan Tabel diatas Kinerja Keuangan 2021 Audited dan RKA 2022 diatas, penjelasan mengenai rasio likuiditas perusahaan adalah sebagai berikut :

Pada laporan keuangan 2021 Audited tertera angka rasio likuiditas perusahaan sebesar 1,36 dan RKAP R 2022 tertera 1,18, yang berarti pada tahun 2021 setiap Rp 1 hutang dijamin oleh 1,36 aktiva lancar perusahaan dan tahun 2022 setiap Rp 1 hutang dijamin 1,18 aktiva lancar perusahaan. Standar industri yang disarankan untuk rasio likuiditas berkisar 2, sehingga rasio likuiditas perusahaan dengan 2 periode akuntansi diatas belum memenuhi standar industri yang berlaku umum. Untuk Quick Ratio, pada tahun 2021 tertera nilai 1,34 dan 1,18 pada tahun 2022. Ini berarti Rp 1 hutang dijamin 1,34 pada tahun 2021 dan 1,18 pada tahun 2022 aktiva lancar diluar persediaan. Secara umum Rasio likuiditas yang rendah

menunjukkan resiko likuiditas tinggi. Karakteristik rasio ini adalah semakin tinggi rasio semakin baik, karena menunjukkan kemampuan manajemen dengan baik, tetapi jika nilai rasio ini sangat tinggi atau terlalu tinggi, hal ini tidak baik juga, karena menunjukkan kelebihan aktiva lancar perusahaan, yang akan berpengaruh tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.

2. Mengetahui tingkat Aktivitas. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap dan aktiva lancar diluar Kas & Setara Kas yang dimiliki perusahaan.

Rasio yang biasanya/lazim digunakan untuk mengukur aktivitas dalam laporan keuangan, adalah Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turn over*), Rasio Perputaran Persediaan (*Inventory Turn over*), Rasio Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn over*) dan Rasio Perputaran Total Aktiva (*Assets Turn over*), dengan masing-masing rumus sebagai berikut:

- a. Rumus Rasio Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*) : $\frac{\text{Piutang}}{(\text{Penjualan}/365)}$
- b. Rumus Rasio Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*) : $\frac{\text{HPP (Harga Pokok Penjualan)}}{\text{Persediaan}}$
- c. Rasio Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn Over*): $\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva Tetap}}$
- d. Rasio Perputaran Total Aktiva (*Assets Turn Over*): $\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$

Berdasarkan Tabel diatas Kinerja Keuangan 2021 Audited dan RKA 2022 diatas, penjelasan mengenai rasio aktivitas perusahaan adalah sebagai berikut :

Pada laporan keuangan 2021 Audited tertera angka rasio perputaran piutang perusahaan sebesar 1,75 dan RKAP R 2022 tertera 2,32, yang berarti pada tahun 2021 perputaran piutang hanya 1,75 kali, dan tahun 2022 perputaran piutang hanya 2,32 kali, sedangkan standar industri untuk rasio perputaran piutang adalah lebih dari 3 kali. Angka perputaran piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat dan ini akan menurunkan penjualan dari yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Untuk perputaran persediaan, angka yang tertera pada tahun 2021 39,53 kali dan pada tahun 2022 tertera 0 kali, sedangkan standar industri untuk rasio ini adalah diatas 3 kali. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun dan ini menandakan efektivitas manajemen persediaan, sebaliknya perputaran rendah menandakan kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Sedangkan untuk perputaran aktiva tetap dan total

aktiva, semakin tinggi rasio biasanya menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi, pemasaran dan pengeluaran untuk modal/investasi.

3. Mengetahui tingkat Solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang perusahaan.

Terdapat tiga jenis rasio solvabilitas, diantaranya adalah debt to equity ratio, debt to assets ratio, dan times interest earned ratio.:

- a. Rumus *debt to equity ratio (DER)* adalah = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas (Modal)}} \times 100\%$
- b. Rumus *debt to Assets ratio (DAR)* adalah : $\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$
- c. Rumus Times Interest Earned ratio adalah = $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Beban Bunga}} \times 100\%$

Berdasarkan Tabel diatas Kinerja Keuangan 2021 Audited dan RKA 2022 diatas, penjelasan mengenai rasio Solvabilitas perusahaan adalah sebagai berikut :

Pada laporan keuangan 2021 Audited tertera angka rasio perputaran hutang terhadap total Ekuitas/modal perusahaan sebesar 0,05 (50%) dan untuk RKAP R 2022 sebesar 0,04 (40%), hal ini berarti modal yang digunakan oleh perusahaan bersumber dari hutang perusahaan, sedangkan standar industri untuk rasio ini adalah 90%, hal ini mengindikasikan bahwa modal perusahaan tidak terserap dengan baik diperusahaan. Untuk rasio DAR, tahun 2021 hanya senilai 0,04 (40%) dan 0,04 (40%) pada tahun 2022, standar industri untuk rasio ini sebesar 50%, hal ini tercapai di tahun 2022. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan (financial leverage) yang tinggi. Rasio ini mengartikan bahwa setiap Rp 0,05 hutang perusahaan dijamin oleh Rp 1 aset perusahaan. Untuk rasio ini, rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang 'aman', sebaliknya rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen.

4. Mengetahui tingkat Profitabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Terdapat lima jenis rasio profitabilitas, diantaranya adalah *Net Profit Margin*, *Gross Profit Margin*, *Return of Investment (ROI)* dan *Return on Assets (ROA)*. Adapun rumusnya sebagai berikut ini :

- a. Rumus Net Profit Margin: $\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$

- b. Rumus Gross Profit Margin: $\text{Laba kotor} / \text{Total Penjualan} \times 100\%$
- c. Return of Investment: $(\text{Total Penjualan} - \text{Investasi}) / \text{Investasi} \times 100\%$
- d. Rumus Return on Assets (ROA): $\text{Laba setelah pajak} / \text{Total Aktiva}$
- e. Rumus Return on Equity (ROE): $\text{Laba setelah pajak} / \text{Modal Saham}$
- f. Rumus Return on Sales (ROS): $\text{Laba setelah pajak} / \text{Penjualan} \times 100\%$
- g. Rumus Return on Capital Employed (ROCE): $\text{Laba setelah pajak} / \text{Total Aset} - \text{Total Hutang}$

Berdasarkan Tabel diatas Kinerja Keuangan 2021 Audited dan RKA 2022 diatas, penjelasan mengenai rasio Profitabilitas perusahaan adalah sebagai berikut :

Pada laporan keuangan 2021 Audited tertera angka rasio *Net profit margin* sebesar minus -0,49 (- 49%) dan *Gross profit Margin* tertera sebesar 0,04 (4%) dan pada tahun 2022 tertera sebesar minus -0,19 (- 19%) dan *Gross profit Margin* tertera sebesar 0,38 (38%), sedangkan standar industri untuk rasio *Net profit Margin* dan *Gross profit Margin* sebesar 20% dan 30%. Hal ini menggambarkan perusahaan tidak memiliki kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi (bahkan tidak mampu menghasilkan laba pd tahun 2021) pada tingkat penjualan tertentu, dan hal ini mencerminkan biaya yang sangat tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, dan perusahaan di tahun 2022 menunjukkan sangat efisien dalam mengelola operasinya. Sedangkan untuk rasio atas modal maupun rasio atas ekuitas, pada tahun 2021 dan 2022, nilai rasio perusahaan mengalami minus yang seharusnya plus. Hal ini menggambarkan bahwa selama tahun 2021 dan 2022 perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dari asset dan modal yang ada, bahkan justru tergerus dengan nilai penyusutan dari asset tetap yang dimiliki perusahaan, yang pada awalnya diprediksi akan menghasilkan profit. Hal ini juga tergambarkan dalam ROCE dan ROS perusahaan yang memiliki angka rasio minus, karena laba bersih perusahaan tahun 2021 membukakan kerugian, sehingga sangat berdampak terhadap rasio ROCE dan ROS, sedangkan untuk ROI perusahaan, tahun 2021 memiliki angka 2,22 % dan 1 % pada tahun 2022. Standar industri untuk ROI adalah 30%, sehingga secara keseluruhan rasio profitabilitas perusahaan mencerminkan manajemen yang kurang baik dalam mengelola asset, modal, penjualan serta investasi dalam perusahaan.

BAB 4 TATA KELOLA PERUSAHAAN

4.1 Kerangka Kerja dan Model Bisnis

Mengingat perseroan akan menjalankan bisnisnya di beberapa sektor, maka kerangka kerja yang diterapkan oleh Perseroan adalah pola integrasi bisnis berbasis proyek. Dimana Setiap proyek yang dijalankan harus dapat mengelola operasional secara mandiri, termasuk target keuangan baik itu revenue, biaya operasional, maupun laba yang dihasilkan. Kantor pusat akan melakukan konsolidasi dan monitoring secara terintegrasi ke setiap unit bisnis. Kebijakan-kebijakan bisnis yang harus dilaksanakan oleh setiap unit akan ditentukan oleh kantor pusat perseroan. Terdapat 6 elemen sebagai kerangka kerja yang menjadi acuan perseroan dalam mengelola usaha dan menghasilkan profit yakni:

1. *Project Analysis*

Analisis proyek merupakan kerangka kerja awal bagi perseroan untuk merencanakan dan memutuskan suatu proyek/unit bisnis. Pada tahapan ini kantor pusat akan melakukan perencanaan bisnis/proyek, membuat studi kelayakan investasi, serta menetapkan timeline pelaksanaannya. Dari tahapan ini perseroan/direksi dapat memutuskan apakah rencana proyek layak dijalankan atau tidak.

2. *Cost Structure*

Setelah perseroan melakukan analisa proyek, maka tahapan selanjutnya adalah merumuskan struktur biaya yang harus diformulakan dalam proyek tersebut. Perencanaan biaya dimaksud terdiri dari penentuan biaya proyek, strategi mengontrol biaya rutin, serta kebutuhan investasi proyek. Rencana anggaran biaya yang telah dirumuskan selanjutnya disetujui oleh Direksi untuk dianggarkan ke dalam RKAP perseroan.

3. *Business Operational*

Tahapan kerangka kerja selanjutnya yaitu merencanakan alur operasional proyek. Pada tahapan ini, perseroan akan merumuskan SOP proyek, perencanaan kebutuhan SDM, infrastruktur, serta pemasaran untuk keberhasilan target bisnis pada proyek tersebut.

4. *Profitability Target*

Pada tahapan ini, perseroan akan melakukan *targetting* bisnis dengan metode *financial engineering*, penetapan target laba, formula laporan keuangan, serta analisa keuangan per proyek.

5. *Risk Management*

Tahapan ini merupakan proses akhir dalam kerangka kerja bisnis perseroan yakni melakukan identifikasi potensi risiko, memastikan kontrol internal terhadap

pengelolaan proyek dapat dijalankan sesuai SOP, serta melakukan evaluasi risiko proyek.

6. *Stakeholder Value*

Tahapan akhir dari kerangka kerja yakni berhubungan dengan stakeholder perseroan. Pada tahapan ini perseroan akan merumuskan bagaimana menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk kepada pemegang saham. Keberlangsungan kondusifitas hubungan dengan stakeholder akan mempengaruhi kinerja dan reputasi perseroan secara korporasi.

Implementasi enam tahapan kerangka kerja perseroan diatas, pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan khususnya dalam pencapaian target *profit* secara keseluruhan

4.2 **Manajemen, Organisasi dan Sistem**

Untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan, pada tahun 2021 digunakan:

1. Sistem Manajemen Resiko

Banyaknya sektor usaha yang dijalankan oleh perusahaan menyebabkan risiko yang dihadapi Perseroan pada setiap proses bisnisnya akan semakin kompleks. Risiko-risiko pada Perseroan, baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam pengembangan bisnis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, Perseroan akan mengembangkan suatu kerangka pengelolaan risiko perusahaan yang menyeluruh, *Enterprise Risk Management (ERM)*, guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, menciptakan Nilai Perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong standar praktik terbaik tata kelola Perusahaan, serta menjadikan budaya risiko sebagai bagian dari Budaya Perseroan.

Penerapan Manajemen Resiko

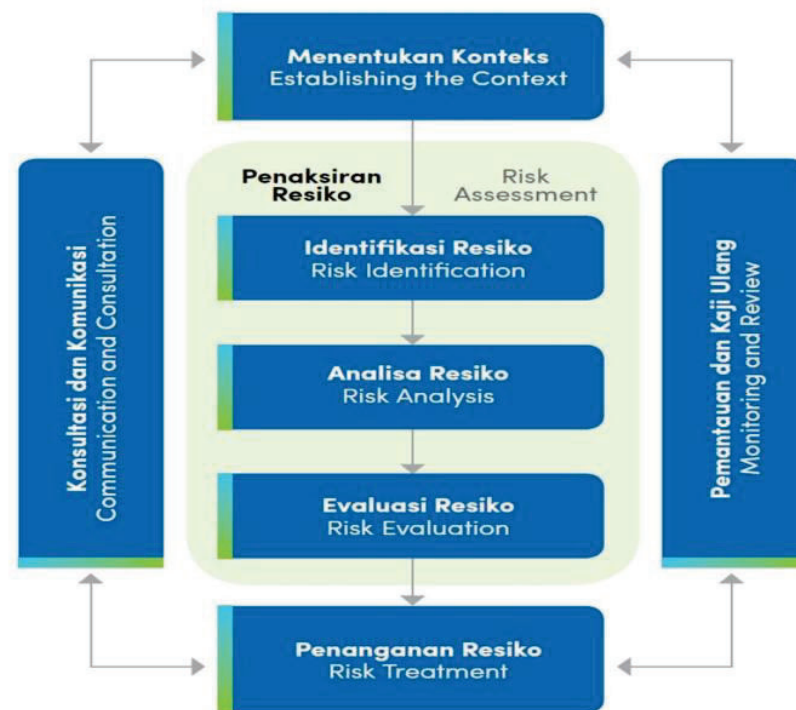
Kedepan, model bisnis perusahaan akan mengarah kepada bisnis konglomerasi. Dimana perusahaan akan menjadi sebuah holding company yang terdiri dari beberapa anak perusahaan/SBU di berbagai sektor usaha. Oleh karena itu, Kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko Perseroan di tingkat korporasi dilaksanakan oleh *Risk Management Committee* yang terdiri atas *Board of Directors* serta didukung oleh jajaran pejabat satu tingkat dibawah Direksi sebagai anggota.

Secara umum Fungsi Manajemen Risiko Kantor Pusat/Holding bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan tindak lanjut terhadap laporan manajemen risiko, melakukan pemantauan profil risiko Perseroan termasuk rencana penanganannya, memberikan rekomendasi kepada *Risk Management Committee*,

mengevaluasi kebijakan strategis, memantau pelaksanaan manajemen risiko, serta bersama-sama dengan pengelola risiko di lingkungan Kantor Pusat untuk melaksanakan proses Manajemen Risiko.

Pada tingkat anak perusahaan/SBU juga terdapat fungsi Manajemen Risiko yang bersama-sama dengan Pemilik Risiko (*Risk Owner*) perusahaan anak melaksanakan proses Manajemen Risiko dengan tahapan melaksanakan identifikasi, analisis, evaluasi, menentukan penanganan risiko serta melakukan monitoring terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi.

Tahapan Pengelolaan Manajemen Risiko



Gambar 4. 1 Alur Diagram Tahapan Pengelolaan Manajemen Risiko

Penjelasan alur Diagram Tahapan Pengelolaan Manajemen Risiko diatas sebagai berikut:

Penetapan konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Unit Pemilik Risiko (UPR) sebagai lingkungan tempat Manajemen Risiko akan diterapkan. Dalam proses ini diidentifikasi pihak-pihak yang paling berkepentingan (stakeholders utama) dengan proses penerapan manajemen risiko, ruang lingkup dan tujuan proses, kondisi yang membatasi, serta hasil yang diharapkan dari penerapan manajemen risiko. Sebagai bagian dari penetapan konteks, akan disusun kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko. Konteks secara

umum menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko dan Proses Manajemen Risiko tidak boleh keluar dari konteks yang ditetapkan.

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran perusahaan. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran yang ada.

Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. Proses analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi (level Konsekuensi) dan kemungkinan (Level Frekuensi) terjadinya.

Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. Evaluasi risiko dilakukan agar para pengambil keputusan dalam hal ini Unit Pemilik Risiko (UPR) bisa mempertimbangkan perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Penanganan Risiko

Proses penanganan risiko bertujuan menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia (Mengurangi Kemungkinan terjadinya Risiko, menurunkan dampak Risiko, Menerima Risiko, Menghindari Risiko dan Mengalihkan/Mentransfer Risiko) dan memutuskan opsi penanganan risiko yang terbaik yang dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi risiko.

Monitoring dan Reviu

Monitoring dan Reviu risiko bertujuan untuk mendeteksi dan mengantisipasi adanya perubahan dalam hal : Konteks organisasi, Profil Risiko, Level setiap risiko dan Efektivitas mitigasi risiko. Proses Monitoring dan Reviu dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan risiko, strategi, dan sistem manajemen risiko secara berkala.

Komunikasi dan Konsultasi

Proses komunikasi dan konsultasi bertujuan memperoleh informasi yang relevan serta mengkomunikasikan setiap tahapan proses Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Proses yang melekat pada seluruh proses manajemen risiko ini dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternal.

Tanggungjawab proses Manajemen Risiko ini ada pada para Pemilik Risiko dibantu oleh Koordinator dan Administrator Manajemen Risiko, serta tim yang terdiri dari para pejabat/pegawai yang menguasai business proses di UPR masing-masing. Peta risiko yang telah tersusun menggambarkan berbagai risiko yang mungkin dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi sekaligus upaya untuk mitigasinya. Dengan demikian diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai

2. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan bertujuan untuk:

- 3) Mengevaluasi prosedur – prosedur operasional Perusahaan dan melakukan perbaikan- perbaikan apabila dipandang perlu;
- 4) Membuat *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan dokumen – dokumen lainnya yang diperlukan;
- 5) Memantau, mengawasi dan mengambil tindakan–tindakan yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan penerapan GCG;
- 6) Menjadi salah satu bahan laporan kepada Direksi dalam hal mengambil dan memutuskan sebuah kebijakan dalam menjalankan operasional perusahaan.

3. Penerapan *Balanced Scorecard Analysis*

Dalam mengukur kinerja perusahaan, PT. Kampung Makmur (Perseroda) menerapkan konsep *Balanced Scorecard* melalui pengukuran dari empat perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. *Balanced Scorecard* ini sebagai acuan untuk menerjemahkan strategi dan tujuan perusahaan dalam jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan



Gambar 4. 2 *Balanced Scorecard Analysis*

4. *Costumer Perspective*

Perusahaan menerapkan strategi *costumer oriented* dalam setiap *project business*, identifikasi kebutuhan pasar untuk kemudian dibuatkan sebuah proyek. Penerapan *costumer perspective* di Perusahaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 3 *Costumer Perspective*

5. *Learning Growth Perspective*

Pendekatan *balanced scorecard* dalam pengukuran kinerja perusahaan, terdapat 4 (empat) persepektif yang dapat diukur, yaitu *perspektif financial*, *perspektif customer*, *perspektif internal process*, dan *perspektif learning and growth*. *perspektif learning and growth* merupakan salah satu *perspektif* yang bersifat *intangible* / tidak dapat diraba, namun merupakan perspektif mendasar yang dapat mendukung ketiga perspektif lainnya. Dengan kata lain, pengetahuan, kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh karyawan dalam sebuah perusahaan

merupakan aset perusahaan yang tidak dapat dinilai dengan nominal rupiah, namun sangat berperan penting dalam menghasilkan sebuah output yang diharapkan oleh perusahaan. *Learning growth perspective yang diterapkan oleh perusahaan* tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 4. 4 *Learning Growth Perspective*

6. *Internal Process Perspective*

Dalam *internal process perspective*, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omzet dan keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. *Internal Process Perspective* yang diterapkan di perusahaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 5 *Internal Process Perspective*

4.3 Rapat Umum Pemegang Saham

Selama Kurun Waktu dari Tahun 2020 sampai dengan 2022, PT. Kampung Makmur (Perseroda) telah menyelenggarakan beberapa kali agenda Rapat Umum Pemegang saham, diantaranya yaitu:

1. Keputusan Rapat umum pemegang saham tahunan 2 Februari 2021:
 - 1) Bahwa untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetorkan uang tunai kedalam kas Perusahaan sejumlah:
 - 250 (dua ratus lima puluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Telah disetorkan ke rekening perusahaan oleh pemegang saham yang dalam hal ini bertindak sekaligus Direktur Perseroan, demikian surat bukti setor yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Sumedang tertanggal transaksi dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua puluh (25-02-2020)
 - 2) Bahwa untuk saham yang berjumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) atau seluruhnya dengan nominal 2.250.000.000,- (dua milya dua ratus lima puluh juta rupiah), disetor dalam bentuk asset/ inbreng oleh Komisaris dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumedang, kedalam perusahaan, demikian berdasarkan Surat Berita Acara Serat Terima Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor: 028/64/BAST/PBD, tertanggal enam Januari tahun dua ribu dua puluh satu (06-01-2021) berupa tanah dan Bangunan Sistem Resi Gudang (SRG) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat, sesuai dengan hasil appraisal yang dikeluarkan dari Kantor Jasa Penilai Publik DINO SUHARIANTO & REKAN tertanggal 14 Desember 2020, Nomor: 00299/0164-00/PI/12/0447/1/XII/2020. Atas tanah dan bangunan tersebut senilai RP. 3.275.400.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dari nilai tersebut di inbrengkan kedalam kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban setor modal dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milya dua ratus lima puluh juta rupiah).sedangkan sisanya dari nilai asset tersebut yaitu sejumlah Rp. 1.025.400.000,- (satu milyar dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dititipkan di perusahaan untuk secepatnya diproses sebagai penambahan modal di setor oleh pihak Komisaris (Pemerintah Kabupaten Sumedang) pada RUPS berikutnya.
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Maret 2021:
 - 1) Menyetujui penetapan dan penambahan bidang usaha dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia yang semula tertera dalamKBLI pada akta awal sebanyak 40 (empat puluh) bidang usaha ada penambahan 45 (empat puluh

- lima) bidang usaha baru sehingga total bidang usaha menjadi 85 (delapan puluh lima) bidang.
- 2) Menyetujui perubahan Modal Dasar dari RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta perubahan modal disetor dari sebelumnya dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nominal seluruhnya Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi 372.515. (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 37.251.500.000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3) Menyetujui penetapan *stock split* dari 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham menjadi 1.000.000 (satu juta) lembar saham. Sehingga merubah nilai nominal persaham menjadi semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar.
 - 4) Menyetujui penambahan Pasal 5 “jenis saham menjadi 2 (dua) jenis yaitu: saham seri A (saham Insun Medal) sebanyak 1 (satu) lembar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan saham seri B atas nama sebanyak 999.999 lembar”.
 - 5) Menyetujui penambahan pasal 7 “Tata cara penjualan saham diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi”.
 - 6) Menyetujui perubahan dalam pasal 9 dalam Anggaran Dasar.
 - 7) Menyetujui perubahan pasal 14 angka 3 mengenai Masa Jabatan Komisaris yang semula 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun.
 - 8) Menyetujui penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.
 - 9) Menyetujui pelepasan/ penggantian kepemilikan saham seri B atas nama yang dimiliki oleh Direktur Perseroan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham senilai nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - 10) Menyetujui untuk memberikan penugasan kepada Direksi untuk melaksanakan *Right Issue*.
3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 15 Agustus 2022:
- 1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun 2021
 - 2) Persetujuan dan pengesahan perubahan pengurusan perseroan, dengan keputusan rapat yakni “Menerima pengunduran diri Tuan Doktorandus HERMAN SURYATMAN, Magister Sains, tersebut selaku Komisaris Perseroan Terbatas PT. Kampung Makmur Periode 2020-2025 dan menyetujui untuk mengangkat Nyonya Hajjah, TUTI RUSWATI, Sarjana

Sosial, Magister Sains, tersebut, sebagai Komisaris Perseroan Terbatas PT Kampung Makmur (Perseroda) Periode 2022-2025”.

- 3) Pengesahan Penghasilan tahun buku 2021 serta penetapan penghasilan tahun buku 2022 untuk direktur dan komisaris.
- 4) Pengusulan akuntan publik dan/ atau penetapan kantor akuntan public untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022.

4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Perseroan

Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

1. Prinsip Dasar Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan Umum Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan Dewan Komisaris berkewajiban:
 - 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang khusus dihadiri oleh Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - 2) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perusahaan lain pada saat pengangkatan dan diperbaharui setiap akhir tahun.
 - 3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 - 4) Menetapkan batasan-batasan nilai perbuatan hukum Direksi, yang memerlukan persetujuan tertulis Komisaris.
 - 5) Memberikan putusan terhadap usulan perbuatan hukum Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis.
 - 6) Memberikan tanggapan tertulis, untuk memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atau usulan perbuatan hukum yang akan dilaksanakan oleh Direksi yang diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
 - 7) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan selambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tahun buku berikutnya dimulai.
 - 8) Mengusulkan penunjukan akuntan untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk mendapat persetujuan RUPS.
 - 9) Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat

informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain (bila ada), termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan, serta menandatangani Laporan Tahunan.

- 10) Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal;
- 11) Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan dilaporkan kepada RUPS;

Direksi

Tugas dan Kewajiban Direksi

Prinsip dasar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan;
3. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
4. Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.

Kebijakan Umum

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

1. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan;
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
3. Menerapkan good corporate governance secara konsisten;
4. Mematuhi peraturan internal Perusahaan;
5. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.
6. Menetapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
7. Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan;

8. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
9. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
10. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
11. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
12. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dengan pembatasan tertentu;
13. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham Direktur dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
14. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

4.5 Sumber Daya Manusia

Perusahaan menerapkan prinsip *Effectiveness Human Resources*, dimana setiap Sumber Daya Manusia yang ditempatkan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan Sumber Daya Manusia didasarkan pada kemampuan dasar baik *hard skill* maupun *soft skill* yang dimiliki pegawai (kompetensi), sehingga tugas dan fungsi setiap lini organisasi dapat berjalan sesuai tujuan Perusahaan. Dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai, Perusahaan senantiasa mempertimbangkan rasio *EPE (Earning per Employee)*. Rasio ini akan memperhitungkan seberapa besar 1 orang pegawai dapat menghasilkan profit bagi Perusahaan, sehingga produktivitas organisasi dapat sebanding dengan laba perusahaan yang akan dihasilkan. Struktur organisasi yang ditampilkan diatas, merupakan formasi organisasi kantor pusat. Sedangkan kebutuhan Sumber Daya Manusia di setiap unit bisnis, akan ditentukan sesuai dengan rencana proyek yang akan dijalankan perusahaan selanjutnya. Selaras dengan Visi Perusahaan akan menjadi "*Become A World Class Regional Company*" Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset utama yang memiliki fungsi penting, sehingga harus senantiasa dikembangkan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan professional, dan Misi Perusahaan "*Sumedang Development Agent*" yaitu berperan aktif sebagai agen perubahan bagi kemajuan sumber daya masyarakat Sumedang, hal ini membawa konsekuensi kehormatan dan tanggung jawab yang besar untuk Divisi SDM dan Umum, untuk mewujudkan misi besar tersebut ke dalam langkah-langkah nyata yang terukur dalam kurun waktu 2020-2025. Struktur organisasi perseroan (kantor pusat dan unit bisnis) mengalami perubahan dari tahun

ke tahun seiring dengan kebutuhan SDM yang menyesuaikan dengan unit bisnis. Berikut merupakan komposisi pegawai perseroan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4. 1 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Level Jabatan

Jabatan	2022		2021		2020	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Direktur	1	4%	1	6%	1	8%
Manager	5	21%	5	31%	4	31%
Supervisor	1	4%	1	6%	1	8%
Staf	17	71%	9	56%	7	54%
Jumlah/Total	24	100%	16	100%	13	100%

Tabel 4. 2 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	2022		2021		2020	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Pascasarjana	2	8%	2	13%	1	8%
Sarjana	9	38%	9	56%	10	77%
Diploma	1	4%	1	6%	0	0%
SMA	12	50%	4	25%	2	15%
Jumlah/Total	24	100%	16	100%	13	100%

Tabel 4. 3 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Usia

Usia	2022		2021		2020	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
< 25	3	13%	3	19%	1	8%
25 - 30	4	17%	4	25%	4	31%
31 - 40	5	21%	5	31%	4	31%
> 40	12	50%	4	25%	4	31%
Jumlah/Total	24	100%	16	100%	13	100%

Tabel 4. 4 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Status Kepegawaian

Status	2022		2021		2020	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Tetap	7	29%	7	44%	5	38%
Kontrak	17	71%	9	56%	8	62%
Jumlah/Total	24	100%	16	100%	13	100%

Tabel 4. 5 Komposisi pegawai Perseroan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2022		2021		2020	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Laki-laki	20	83%	13	81%	8	62%
Perempuan	4	17%	3	19%	5	38%
Jumlah/Total	24	100%	16	100%	13	100%

4.6 Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan

Untuk tahun 2022, perusahaan belum bisa menunaikan salah satu kewajibannya terkait dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

4.7 Restrukturisasi

Untuk tahun 2022 kaitan dengan permodalan, asset serta sumber daya manusia dan organisasi, perusahaan tidak melakukan restrukturisasi.

4.8 Privatisasi

Selama tahun 2022, perusahaan tidak melakukan privatisasi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tahun 2022 bagi perseroan adalah tahun pembuktian, tidak adanya penyertaan modal di tahun 2022 ini berbeda dengan tahun 2021 dengan pemda memberikan penyertaan modal sebesar Rp. 2,5 Milyar. Bila tahun 2021 hasil audit independen, perseroan mengalami kerugian sebesar Rp. – 637.621.074 maka tahun 2022 data hasil laporan keuangan unaudited sebesar Rp. -375.070.951,64. artinya ada penurunan kerugian secara signifikan walau belum masih jauh dari mendapat keuntungan. Hasil ini tentu saja buah dari beberapa keputusan perseroan di semua lini, langkah-langkah tersebut adalah penghematan, efisiensi, focus usaha hingga pengurangan pegawai. Perseroan dengan 10 bidang usaha terdiri dari 80 sub bidang usaha tentu tidak mudah, dengan segala keterbatasan, 3 hal yang sudah dilakukan selama tahun 2022, 1. mencari partner untuk bidang usaha yang spesifik, 2. pencairan sumber pendanaan (Investor), 3. memilih bidang-bidang yang cepat menghasilkan dengan resiko rendah.

5.2 Saran


Selama rentang tahun 2022, saran yang harus dilakukan di tahun selanjutnya (2023), sekaligus evaluasi selama tahun 2022 adalah, 1. memantapkan usaha yang sudah berjalan, 2. mencari rekan kerja/partner yang kompeten di bidangnya, terutama untuk optimalisasi aset/imbreng yang sudah di berikan kepada kita. 3. selektif dalam menentukan bidang usaha, dengan secara ketat melakukan analisis untuk mitigasi resiko kerugian perusahaan, dan 4. Penghematan di segala sisi. Selain itu, di tahun 2023 nanti perseroan harus juga menyelesaikan beberapa catatan hasil dari evaluasi 2022, ini berupa; 1. Aspek legalitas asset imbreng harus di dorong kepada pemda untuk segera diselesaikan, 2. Menyesaikan masalah-masalah hutang dan piutang, dan 3. beban kepada pihak ketiga harus ada keputusan.

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 30/06/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	9.656.783.862,00	3.036.139.632,00	6.620.644.230,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.452.510.617,00	215.107.482,00	1.237.403.135,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	3.984.129.100,00	1.337.927.156,00	2.646.201.944,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	622.522.000,00	32.000.000,00	590.522.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	3.597.622.145,00	1.451.104.994,00	2.146.517.151,00
1.2.	Pendapatan Transfer	418.317.314.200,00	195.842.885.179,00	222.474.429.021,00
1.2.1.	Dana Desa	237.654.884.000,00	121.154.837.831,00	116.500.046.169,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	26.039.092.300,00	14.458.775.127,00	11.580.317.173,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	116.657.294.900,00	56.449.272.221,00	60.208.022.679,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	36.000.000.000,00	780.000.000,00	35.220.000.000,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.966.043.000,00	3.000.000.000,00	(1.033.957.000,00)
1.3.	Pendapatan Lain-lain	3.465.138.676,00	619.409.638,00	2.845.729.038,00
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ket	929.000.000,00	10.342.072,00	918.657.928,00
1.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokas	300.600.000,00	81.300.000,00	219.300.000,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	304.017.208,00	259.129.478,00	44.887.730,00
1.3.6.	Bunga Bank	28.244.668,00	94.635.298,00	(66.390.630,00)
1.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.833.276.800,00	104.002.790,00	1.729.274.010,00
	JUMLAH PENDAPATAN	431.439.236.738,00	199.498.434.449,00	231.940.802.289,00
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Pegawai	121.560.817.806,31	52.169.394.337,16	69.391.423.469,15
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	14.991.596.400,00	6.375.231.028,62	8.616.365.371,38
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	85.016.457.100,00	36.848.826.113,42	48.167.630.986,58
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.340.422.306,31	3.179.675.895,12	4.160.746.411,19
2.1.4.	Tunjangan BPD	14.212.342.000,00	5.765.661.300,00	8.446.680.700,00
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.158.199.987,69	44.068.403.549,00	79.089.796.438,69
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.569.148.690,69	9.956.577.120,00	16.612.571.570,69
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	47.535.849.170,00	17.762.025.702,00	29.773.823.468,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.056.076.400,00	443.992.950,00	612.083.450,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.103.526.831,00	293.657.200,00	809.869.631,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.979.130.164,00	5.510.435.559,00	10.468.694.605,00
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.101.712.822,00	440.472.478,00	1.661.240.344,00
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	28.812.755.910,00	9.661.242.540,00	19.151.513.370,00
2.3.	Belanja Modal	82.560.406.161,00	27.671.886.099,00	54.888.520.062,00
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.280.015.114,00	1.090.230.000,00	189.785.114,00
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alai	10.823.185.748,44	5.220.516.609,00	5.602.669.139,44
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	587.543.000,00	50.000.000,00	537.543.000,00
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	24.008.947.825,00	6.962.195.800,00	17.046.752.025,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	26.032.679.650,00	8.787.485.365,00	17.245.194.285,00
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	730.567.600,00	114.479.900,00	616.087.700,00
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	11.650.935.168,56	3.847.842.745,00	7.803.092.423,56
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	2.433.234.235,00	515.888.600,00	1.917.345.635,00
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.013.297.820,00	1.083.247.080,00	3.930.050.740,00
2.4.	Belanja Tidak Terduga	102.749.175.707,00	47.783.431.792,00	54.965.743.915,00
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	102.749.175.707,00	47.783.431.792,00	54.965.743.915,00
	JUMLAH BELANJA	430.028.599.662,00	171.625.950.027,16	258.402.649.634,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.410.637.076,00	27.872.484.421,84	26.461.847.345,84
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.223.565.522,00	2.456.511.633,00	3.767.053.889,00
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.715.667.068,00	2.452.213.179,00	1.263.453.889,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
3.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	2.898.454,00	701.546,00	3.600.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.031.508.528,00	1.642.550.957,00	3.388.957.571,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	112.591.511,00	50.000,00	112.541.511,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	4.870.974.340,00	1.641.056.400,00	3.229.917.940,00
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	47.942.677,00	1.444.557,00	46.498.120,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	1.192.056.994,00	813.960.676,00	378.096.318,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2.602.694.070,00	28.686.445.097,84	(26.083.751.027,84)

Sumedang, 01 August 2022
 Bupati Sumedang

 Dr. H. Dopy Ahmad Munir, ST., M.M



LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
01	KECAMATAN WADO	18.043.749.000	7.952.458.233	44,1	17.859.006.684	6.909.552.529	38,7	(184.003.207)	(259.285.891)	140,9	739.109	783.619.813	022,2
01.2001.	PEMERINTAH DESA CIMUNGKAL	2.006.984.000	947.417.468	47,2	2.006.984.000	839.913.624	41,8	0	(100.000.000)	0,0	0	7.503.844	0,0
01.2002.	PEMERINTAH DESA GANJARESİK	1.763.696.000	651.848.548	37,0	1.757.647.372	568.951.312	32,4	(6.048.628)	0	0,0	0	82.897.236	0,0
01.2003.	PEMERINTAH DESA CILENGKRANG	1.939.356.000	702.309.593	36,2	1.938.756.000	637.613.416	32,9	0	0	0,0	600.000	64.696.177	782,7
01.2004.	PEMERINTAH DESA CIKAREO SELATAN	1.577.805.000	700.337.296	44,4	1.577.805.000	575.735.412	36,5	0	0	0,0	0	124.601.884	0,0
01.2005.	PEMERINTAH DESA CIKAREO UTARA	1.566.537.000	662.762.300	42,3	1.566.540.312	631.569.982	40,3	3.312	0	0,0	0	31.192.318	0,0
01.2006.	PEMERINTAH DESA WADO	2.495.989.000	1.470.250.408	58,9	2.347.317.000	1.295.500.392	55,2	(148.672.000)	(150.000.000)	100,9	0	24.750.016	0,0
01.2007.	PEMERINTAH DESA MULYAJAYA	1.628.279.000	752.447.400	46,2	1.648.854.000	732.473.380	44,4	20.714.109	40.714.109	196,6	139.109	60.688.129	626,3
01.2009.	PEMERINTAH DESA SUKAJADI	1.727.590.000	718.613.526	41,6	1.727.590.000	648.634.200	37,5	0	0	0,0	0	69.979.326	0,0
01.2010.	PEMERINTAH DESA CISURAT	1.819.096.000	702.746.015	38,6	1.769.096.000	464.383.470	26,2	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	188.362.545	0,0
01.2011.	PEMERINTAH DESA SUKAPURA	1.518.417.000	643.725.679	42,4	1.518.417.000	514.777.341	33,9	0	0	0,0	0	128.948.338	0,0
02	KECAMATAN JATINUNGGAL	15.656.451.200	7.405.128.884	47,3	15.468.732.060	6.557.025.725	42,4	(183.667.678)	(108.667.678)	59,2	4.051.462	739.435.481	251,1
02.2001.	PEMERINTAH DESA SIRNASARI	1.655.208.500	907.089.015	54,8	1.630.208.500	645.020.834	39,6	(24.436.639)	563.361	(2,3)	563.361	262.631.542	618,7
02.2002.	PEMERINTAH DESA TARIKOLOT	1.602.505.000	906.965.182	56,6	1.560.799.936	734.305.017	47,0	(41.322.513)	(41.322.513)	100,0	382.551	131.337.652	332,1
02.2003.	PEMERINTAH DESA PAWENANG	1.985.783.000	989.870.072	49,8	1.996.668.300	904.194.432	45,3	10.905.078	10.905.078	100,0	19.778	96.580.718	324,0
02.2004.	PEMERINTAH DESA SARIMEKAR	1.739.399.000	751.635.948	43,2	1.739.399.000	736.045.100	42,3	363.946	363.946	100,0	363.946	15.954.794	383,8
02.2005.	PEMERINTAH DESA BANJARSARI	1.742.394.000	748.542.102	43,0	1.643.046.671	619.472.513	37,7	(97.251.555)	(97.251.555)	100,0	2.095.774	31.818.034	518,2
02.2006.	PEMERINTAH DESA KIRISIK	1.887.382.400	1.078.719.954	57,2	1.839.278.485	986.017.970	53,6	(48.103.915)	1.896.085	(3,9)	0	94.598.069	0,0
02.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMANAH	1.649.527.000	693.087.845	42,0	1.649.754.045	675.821.571	41,0	770.164	770.164	100,0	543.119	18.036.438	320,9
02.2008.	PEMERINTAH DESA CIPEUNDEUY	1.762.166.000	675.275.409	38,3	1.766.070.619	645.330.968	36,5	3.904.619	3.904.619	100,0	0	33.849.060	0,0
02.2009.	PEMERINTAH DESA CIMANINTIN	1.632.086.300	653.943.357	40,1	1.643.506.504	610.817.320	37,2	11.503.137	11.503.137	100,0	82.933	54.629.174	871,5
03	KECAMATAN DARMARAJA	17.673.859.083	10.596.050.869	60,0	17.616.953.659	8.328.799.319	47,3	(56.905.424)	98.655.176	73,4)	0	2.365.906.726	0,0
03.2001.	PEMERINTAH DESA DARMARAJA	1.415.177.503	792.374.887	56,0	1.416.097.679	646.866.072	45,7	920.176	920.176	100,0	0	146.428.991	0,0
03.2002.	PEMERINTAH DESA DARMAJAYA	1.460.832.128	923.543.083	63,2	1.460.832.128	752.132.645	51,5	0	0	0,0	0	171.410.438	0,0
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKAMENAK	1.333.251.303	734.363.498	55,1	1.333.251.303	513.853.258	38,5	0	0	0,0	0	220.510.240	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
03.2005.	PEMERINTAH DESA SUKARATU	2.155.137.077	1.518.193.690	70,4	2.155.137.077	1.477.719.832	68,6	0	0	0,0	0	40.473.858	0,0
03.2006.	PEMERINTAH DESA CIKEUSI	1.353.005.039	963.752.134	71,2	1.341.357.039	758.203.184	56,5	(11.648.000)	0	0,0	0	205.548.950	0,0
03.2007.	PEMERINTAH DESA CIPEUTEUY	1.368.575.513	756.743.152	55,3	1.328.575.513	553.601.720	41,7	(40.000.000)	0	0,0	0	203.141.432	0,0
03.2009.	PEMERINTAH DESA CIEUNTEUNG	1.503.228.739	950.520.763	63,2	1.453.228.739	655.805.169	45,1	(50.000.000)	0	0,0	0	294.715.594	0,0
03.2010.	PEMERINTAH DESA KARANGPAKUAN	1.428.954.192	801.881.101	56,1	1.428.954.192	581.187.269	40,7	0	0	0,0	0	220.693.832	0,0
03.2011.	PEMERINTAH DESA PAKUALAM	1.287.328.922	697.763.448	54,2	1.287.328.922	557.448.095	43,3	0	28.300.000	0,0	0	168.615.353	0,0
03.2013.	PEMERINTAH DESA NEGLASARI	1.373.889.733	758.318.384	55,2	1.375.611.733	549.514.978	39,9	1.722.000	1.722.000	100,0	0	210.525.406	0,0
03.2015.	PEMERINTAH DESA TARUNAJAYA	1.542.856.470	882.847.294	57,2	1.584.956.870	670.113.522	42,3	42.100.400	67.713.000	160,8	0	280.446.772	0,0
03.2016.	PEMERINTAH DESA RANGGON	1.451.622.464	815.749.435	56,2	1.451.622.464	612.353.575	42,2	0	0	0,0	0	203.395.860	0,0
04	KECAMATAN CIBUGEL	11.109.807.238	5.563.621.103	50,1	10.888.961.827	4.497.171.069	41,3	(220.771.800)	(128.056.400)	58,0	73.611	938.393.634	800,8
04.2001.	PEMERINTAH DESA JAYAMEKAR	1.866.690.000	791.806.395	42,4	1.759.879.840	614.985.764	34,9	(106.810.160)	(102.666.700)	96,1	0	74.153.931	0,0
04.2002.	PEMERINTAH DESA BUANAMEKAR	1.542.858.000	877.088.831	56,8	1.542.858.000	648.401.064	42,0	0	0	0,0	0	228.687.767	0,0
04.2003.	PEMERINTAH DESA CIBUGEL	1.601.695.211	686.689.699	42,9	1.601.621.600	603.568.410	37,7	0	0	0,0	73.611	83.121.289	919,7
04.2004.	PEMERINTAH DESA SUKARAJA	1.561.601.000	877.708.776	56,2	1.561.601.000	652.264.364	41,8	0	0	0,0	0	225.444.412	0,0
04.2005.	PEMERINTAH DESA CIPASANG	1.541.297.000	656.816.233	42,6	1.477.335.360	524.209.766	35,5	(63.961.640)	0	0,0	0	132.606.467	0,0
04.2006.	PEMERINTAH DESA TAMANSARI	1.578.405.000	886.293.700	56,2	1.578.405.000	874.008.164	55,4	0	0	0,0	0	12.285.536	0,0
04.2007.	PEMERINTAH DESA JAYAMANDIRI	1.417.261.027	787.217.469	55,5	1.367.261.027	579.733.537	42,4	(50.000.000)	(25.389.700)	50,8	0	182.094.232	0,0
05	KECAMATAN CISITU	14.518.400.000	6.123.052.668	42,2	14.663.542.860	5.849.557.007	39,9	155.744.865	205.744.865	132,1	10.602.005	479.240.526	520,3
05.2001.	PEMERINTAH DESA CISITU	1.387.929.000	581.984.589	41,9	1.418.326.500	577.612.691	40,7	31.465.458	31.465.458	100,0	1.067.958	35.837.356	355,7
05.2002.	PEMERINTAH DESA SITUMEKAR	1.428.910.000	609.665.663	42,7	1.430.680.300	573.787.700	40,1	1.913.613	1.913.613	100,0	143.313	37.791.576	370,0
05.2003.	PEMERINTAH DESA PAJAGAN	1.407.408.000	589.609.795	41,9	1.421.917.000	554.988.238	39,0	14.825.559	14.825.559	100,0	316.559	49.447.116	620,2
05.2004.	PEMERINTAH DESA CIGINTUNG	1.439.258.000	614.913.275	42,7	1.446.622.000	605.937.655	41,9	7.482.152	7.482.152	100,0	118.152	16.457.772	929,3
05.2005.	PEMERINTAH DESA SUNDAMEKAR	1.423.262.000	592.453.654	41,6	1.423.628.248	579.644.593	40,7	1.793.822	1.793.822	100,0	1.427.574	14.602.883	022,9
05.2006.	PEMERINTAH DESA LINGGAJAYA	1.773.049.000	757.317.023	42,7	1.773.828.532	723.458.332	40,8	4.455.321	4.455.321	100,0	3.675.789	38.314.012	042,3
05.2007.	PEMERINTAH DESA RANJENG	1.373.422.000	597.885.331	43,5	1.387.139.880	508.172.368	36,6	14.089.818	64.089.818	454,9	371.938	153.802.781	351,7
05.2008.	PEMERINTAH DESA CILOPANG	1.447.486.000	597.303.064	41,3	1.507.486.000	648.031.322	43,0	61.144.861	61.144.861	100,0	1.144.861	10.416.603	909,9
05.2009.	PEMERINTAH DESA CIMARGA	1.354.178.000	551.512.168	40,7	1.354.178.000	511.701.474	37,8	254.792	254.792	100,0	254.792	40.065.486	724,8
05.2010.	PEMERINTAH DESA CINANGSI	1.483.498.000	630.408.106	42,5	1.499.736.400	566.222.634	37,8	18.319.469	18.319.469	100,0	2.081.069	82.504.941	964,5
06	KECAMATAN SITURAJA	22.577.062.020	10.845.409.345	48,0	22.483.199.710	8.584.873.051	38,2	(93.862.310)	146.939.833	56,5)	0	2.407.476.127	0,0
06.2001.	PEMERINTAH DESA SITURAJA UTARA	1.536.442.500	732.501.338	47,7	1.486.442.500	701.530.474	47,2	(50.000.000)	0	0,0	0	30.970.864	0,0
06.2002.	PEMERINTAH DESA SITURAJA	1.910.701.000	826.821.360	43,3	1.895.536.000	712.126.360	37,6	(15.165.000)	34.775.000	229,3)	0	149.470.000	0,0
06.2003.	PEMERINTAH DESA MEKARMULYA	1.392.730.620	754.921.848	54,2	1.343.030.620	452.017.743	33,7	(49.700.000)	(50.000.000)	100,6	0	252.904.105	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
06.2004.	PEMERINTAH DESA CIKADU	1.694.760.000	981.514.100	57,9	1.659.760.000	627.626.305	37,8	(35.000.000)	(35.000.000)	100,0	0	318.887.795	0,0
06.2005.	PEMERINTAH DESA BANGBAYANG	1.370.206.000	696.063.528	50,8	1.467.254.450	630.822.951	43,0	97.048.450	98.479.333	101,5	0	163.719.910	0,0
06.2006.	PEMERINTAH DESA KADUWULUNG	1.698.657.400	695.399.910	40,9	1.698.657.400	629.477.167	37,1	0	0	0,0	0	65.922.743	0,0
06.2007.	PEMERINTAH DESA KARANGHEULEUT	1.586.938.000	883.369.182	55,7	1.586.938.000	613.494.592	38,7	0	0	0,0	0	269.874.590	0,0
06.2008.	PEMERINTAH DESA CIJELER	1.457.704.000	522.756.764	35,9	1.398.818.240	433.453.766	31,0	(58.885.760)	0	0,0	0	89.302.998	0,0
06.2009.	PEMERINTAH DESA AMBIT	1.350.280.000	577.914.289	42,8	1.373.280.000	581.026.100	42,3	23.000.000	60.782.000	264,3	0	57.670.189	0,0
06.2010.	PEMERINTAH DESA JATIMEKAR	1.390.437.000	544.887.200	39,2	1.347.373.500	448.253.600	33,3	(43.063.500)	0	0,0	0	96.633.600	0,0
06.2011.	PEMERINTAH DESA CIJATI	1.378.257.000	757.394.960	55,0	1.378.257.000	539.392.853	39,1	0	0	0,0	0	218.002.107	0,0
06.2012.	PEMERINTAH DESA PAMULIHAN	1.347.194.500	565.672.867	42,0	1.347.194.500	477.405.760	35,4	0	0	0,0	0	88.267.107	0,0
06.2013.	PEMERINTAH DESA MALAKA	1.661.861.000	705.155.300	42,4	1.666.661.000	639.505.472	38,4	4.800.000	4.800.000	100,0	0	70.449.828	0,0
06.2014.	PEMERINTAH DESA SUKATALI	1.475.073.000	866.996.000	58,8	1.518.176.500	627.900.220	41,4	43.103.500	43.103.500	100,0	0	282.199.280	0,0
06.2015.	PEMERINTAH DESA CICARIMANAH	1.325.820.000	734.040.699	55,4	1.315.820.000	470.839.688	35,8	(10.000.000)	(10.000.000)	100,0	0	253.201.011	0,0
07	KECAMATAN CONGGEANG	16.906.816.000	8.759.099.963	51,8	16.941.389.508	7.767.530.059	45,8	34.573.508	12.031.110	34,8	0	1.003.601.014	0,0
07.2001.	PEMERINTAH DESA CONGGEANG KULON	1.416.823.000	602.149.946	42,5	1.374.594.800	552.773.810	40,2	(42.228.200)	0	0,0	0	49.376.136	0,0
07.2002.	PEMERINTAH DESA CONGGEANG WETAN	1.318.816.000	548.803.646	41,6	1.309.240.090	543.329.542	41,5	(9.575.910)	0	0,0	0	5.474.104	0,0
07.2003.	PEMERINTAH DESA CIPAMEKAR	1.491.211.000	814.380.825	54,6	1.491.211.000	677.704.287	45,4	0	0	0,0	0	136.676.538	0,0
07.2004.	PEMERINTAH DESA CIBEUREUYEUH	1.272.574.000	805.546.163	63,3	1.334.574.000	827.296.517	62,0	62.000.000	62.000.000	100,0	0	40.249.646	0,0
07.2005.	PEMERINTAH DESA JAMBU	1.378.971.000	876.836.499	63,6	1.320.310.468	545.249.080	41,3	(58.660.532)	(58.660.532)	100,0	0	272.926.887	0,0
07.2006.	PEMERINTAH DESA BABAKAN ASEM	1.432.430.000	787.014.969	54,9	1.432.430.000	669.449.982	46,7	0	0	0,0	0	117.564.987	0,0
07.2007.	PEMERINTAH DESA PADAASIH	1.486.429.000	627.130.108	42,2	1.533.429.000	663.498.292	43,3	47.000.000	(31.900.000)	(67,9)	0	(68.268.184)	0,0
07.2008.	PEMERINTAH DESA UNGKAL	1.350.652.000	695.706.794	51,5	1.350.652.000	647.403.634	47,9	0	0	0,0	0	48.303.160	0,0
07.2009.	PEMERINTAH DESA KARANG LAYUNG	1.434.837.000	790.098.113	55,1	1.461.880.000	656.520.954	44,9	27.043.000	27.043.000	100,0	0	160.620.159	0,0
07.2010.	PEMERINTAH DESA CACABAN	1.359.216.000	491.912.671	36,2	1.398.877.500	524.677.478	37,5	39.661.500	7.661.500	19,3	0	(25.103.307)	0,0
07.2011.	PEMERINTAH DESA NARIMBANG	1.510.919.000	961.044.200	63,6	1.510.919.000	889.350.892	58,9	0	1.553.492	0,0	0	73.246.800	0,0
07.2012.	PEMERINTAH DESA CIBUBUAN	1.453.938.000	758.476.029	52,2	1.423.271.650	570.275.591	40,1	(30.666.350)	4.333.650	(14,1)	0	192.534.088	0,0
08	KECAMATAN PASEH	16.741.392.350	6.893.193.558	41,2	17.038.727.195	6.355.039.754	37,3	2.847.510.985	492.510.985	17,3	2.550.176.140	1.030.664.789	40,4
08.2001.	PEMERINTAH DESA PASEHKIDUL	1.414.941.000	604.325.145	42,7	1.454.941.000	561.158.666	38,6	40.000.000	40.000.000	100,0	0	83.166.479	0,0
08.2002.	PEMERINTAH DESA PASEH KALER	1.721.085.000	841.479.637	48,9	1.734.785.100	715.514.298	41,2	13.700.100	18.700.100	136,5	0	144.665.439	0,0
08.2003.	PEMERINTAH DESA LEGOK KIDUL	1.495.411.000	657.768.255	44,0	1.428.469.000	543.257.308	38,0	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	41.942.000	89.510.947	213,4
08.2004.	PEMERINTAH DESA LEGOK KALER	2.694.008.000	838.857.546	31,1	2.694.008.000	752.827.262	27,9	2.500.000.000	0	0,0	2.500.000.000	86.030.284	3,4
08.2005.	PEMERINTAH DESA BONGKOK	1.686.920.350	904.181.473	53,6	1.686.920.350	708.622.459	42,0	0	0	0,0	0	195.559.014	0,0
08.2006.	PEMERINTAH DESA PADANAN	1.465.962.000	617.645.543	42,1	1.445.962.000	563.367.550	39,0	(20.000.000)	0	0,0	0	54.277.993	0,0
08.2007.	PEMERINTAH DESA PASIRREUNGIT	1.389.570.000	586.767.673	42,2	1.465.023.845	586.396.321	40,0	75.453.845	75.453.845	100,0	0	75.825.197	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
08.2008.	PEMERINTAH DESA CIJAMBE	2.003.271.000	613.593.674	30,6	1.952.676.700	575.644.614	29,5	(50.594.300)	49.405.700	(97,7)	0	87.354.760	0,0
08.2009.	PEMERINTAH DESA HAURKUNING	1.538.446.000	662.419.209	43,1	1.894.163.200	889.326.400	47,0	355.717.200	355.717.200	100,0	0	128.810.009	0,0
08.2010.	PEMERINTAH DESA CITEPOK	1.331.778.000	566.155.403	42,5	1.281.778.000	458.924.876	35,8	(41.765.860)	(21.765.860)	52,1	8.234.140	85.464.667	037,9
09	KECAMATAN SURIAN	12.499.314.601	4.776.013.364	38,2	12.571.627.751	4.307.882.556	34,3	82.000.785	129.754.220	158,2	9.687.635	597.885.028	171,6
09.2001.	PEMERINTAH DESA WANASARI	1.307.522.000	544.291.672	41,6	1.307.522.000	498.748.670	38,1	0	0	0,0	0	45.543.002	0,0
09.2002.	PEMERINTAH DESA WANAJAYA	1.420.816.000	562.229.400	39,6	1.461.536.930	463.441.000	31,7	40.720.930	0	0,0	0	98.788.400	0,0
09.2003.	PEMERINTAH DESA PAMEKARSARI	1.500.615.601	601.979.653	40,1	1.526.124.601	616.953.850	40,4	25.509.000	25.509.000	100,0	0	10.534.803	0,0
09.2004.	PEMERINTAH DESA TANJUNG	1.389.734.000	486.107.707	35,0	1.348.572.000	465.121.460	34,5	(41.162.000)	0	0,0	0	20.986.247	0,0
09.2005.	PEMERINTAH DESA SURIAN	1.481.670.000	629.478.448	42,5	1.536.070.500	423.498.200	27,6	62.909.656	54.400.500	86,5	8.509.156	260.380.748	060,0
09.2006.	PEMERINTAH DESA SURIAMUKTI	1.324.612.000	480.063.547	36,2	1.327.612.000	431.466.032	32,5	4.178.479	0	0,0	1.178.479	48.597.515	123,7
09.2007.	PEMERINTAH DESA SURIAMEDAL	1.351.084.000	474.846.491	35,1	1.351.084.000	418.985.944	31,0	0	0	0,0	0	55.860.547	0,0
09.2008.	PEMERINTAH DESA RANGGASARI	1.329.113.000	482.319.445	36,3	1.318.957.720	483.592.020	36,7	(10.155.280)	49.844.720	(90,8)	0	48.572.145	0,0
09.2009.	PEMERINTAH DESA NANJUNG WANGI	1.394.148.000	514.697.001	36,9	1.394.148.000	506.075.380	36,3	0	0	0,0	0	8.621.621	0,0
10	KECAMATAN BUAHDUA	21.226.790.117	8.877.731.591	41,8	21.324.857.788	6.699.724.524	31,4	110.098.755	150.768.754	136,9	12.031.084	2.328.775.821	356,3
10.2001.	PEMERINTAH DESA BUAHDUA	1.409.530.367	779.645.555	55,3	1.499.199.662	356.460.765	23,8	89.669.295	88.972.491	99,2	0	512.157.281	0,0
10.2002.	PEMERINTAH DESA HARIANG	1.677.296.000	641.766.944	38,3	1.677.296.000	579.792.245	34,6	0	0	0,0	0	61.974.699	0,0
10.2003.	PEMERINTAH DESA KARANGBUNGUR	1.456.707.000	614.386.412	42,2	1.406.707.000	610.866.348	43,4	(50.000.000)	0	0,0	0	3.520.064	0,0
10.2004.	PEMERINTAH DESA MEKARUMUKTI	1.388.344.000	564.862.531	40,7	1.388.344.000	476.775.604	34,3	0	0	0,0	0	88.086.927	0,0
10.2005.	PEMERINTAH DESA CITALEUS	1.421.744.000	596.161.135	41,9	1.421.744.000	580.027.596	40,8	0	0	0,0	0	16.133.539	0,0
10.2006.	PEMERINTAH DESA NAGRAK	1.332.497.000	558.111.366	41,9	1.332.540.880	436.875.090	32,8	43.880	43.880	100,0	0	121.280.159	0,0
10.2007.	PEMERINTAH DESA CIBITUNG	1.382.510.295	578.787.381	41,9	1.382.510.295	392.681.467	28,4	0	0	0,0	0	186.105.914	0,0
10.2008.	PEMERINTAH DESA SEKARWANGI	1.367.773.000	550.970.240	40,3	1.355.742.000	336.148.887	24,8	0	0	0,0	12.031.000	214.821.353	785,6
10.2009.	PEMERINTAH DESA GENDEREH	1.450.526.000	804.822.657	55,5	1.459.526.000	511.971.369	35,1	9.000.000	9.000.000	100,0	0	301.851.288	0,0
10.2010.	PEMERINTAH DESA PANYINDANGAN	1.347.739.000	519.365.610	38,5	1.347.739.000	403.735.300	30,0	0	0	0,0	0	115.630.310	0,0
10.2011.	PEMERINTAH DESA CILANGKAP	1.440.189.000	612.921.320	42,6	1.451.894.000	567.306.144	39,1	11.705.000	0	0,0	0	45.615.176	0,0
10.2012.	PEMERINTAH DESA BOJONGLOA	1.450.724.628	612.042.609	42,2	1.450.724.628	568.034.159	39,2	0	23.150.911	0,0	0	67.159.361	0,0
10.2013.	PEMERINTAH DESA CIKURUBUK	2.668.510.000	740.023.188	27,7	2.671.448.838	714.651.950	26,8	2.938.922	29.601.472	007,2	84	54.972.710	702,4
10.2014.	PEMERINTAH DESA CIAWITALI	1.432.699.827	703.864.640	49,1	1.479.441.485	164.397.600	11,1	46.741.658	0	0,0	0	539.467.040	0,0
11	KECAMATAN TANJUNGSARI	20.801.220.100	9.611.410.102	46,2	20.559.112.694	7.786.015.081	37,9	(242.107.406)	(92.689.487)	38,3	0	1.732.705.534	0,0
11.2001.	PEMERINTAH DESA GUDANG	1.642.338.800	798.062.827	48,6	1.690.239.000	633.896.905	37,5	47.900.200	47.900.200	100,0	0	212.066.122	0,0
11.2002.	PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI	1.959.138.000	746.982.079	38,1	1.969.871.200	667.231.500	33,9	10.733.200	0	0,0	0	79.750.579	0,0
11.2003.	PEMERINTAH DESA JATISARI	1.504.117.000	652.743.175	43,4	1.500.687.979	604.042.755	40,3	(3.429.021)	6.570.979	91,6)	0	55.271.399	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
11.2004.	PEMERINTAH DESA MARGALUYU	1.583.832.300	665.486.462	42,0	1.643.597.469	495.183.965	30,1	59.765.169	(59.765.169)	00,0	0	110.537.328	0,0
11.2005.	PEMERINTAH DESA KUTAMANDIRI	1.678.029.000	713.366.898	42,5	1.648.029.000	695.157.675	42,2	(30.000.000)	0	0,0	0	18.209.223	0,0
11.2006.	PEMERINTAH DESA MARGAJAYA	1.807.131.000	1.055.246.764	58,4	1.707.452.250	631.984.786	37,0	(99.678.750)	(99.678.750)	100,0	0	323.583.228	0,0
11.2007.	PEMERINTAH DESA RAHARJA	2.128.781.000	785.955.176	36,9	2.128.791.600	757.151.724	35,6	10.600	10.600	100,0	0	28.814.052	0,0
11.2008.	PEMERINTAH DESA CIJAMBU	1.606.441.000	880.750.198	54,8	1.532.315.245	668.338.222	43,6	(74.125.755)	25.016.502	(33,7)	0	237.428.478	0,0
11.2009.	PEMERINTAH DESA PASIGARAN	1.733.055.000	876.547.325	50,6	1.659.591.551	724.207.777	43,6	(73.463.449)	6.536.551	(8,9)	0	158.876.099	0,0
11.2010.	PEMERINTAH DESA GUNUNGMANIK	1.805.054.000	762.208.558	42,2	1.805.954.000	662.897.191	36,7	900.000	0	0,0	0	99.311.367	0,0
11.2011.	PEMERINTAH DESA KADAKAJAYA	1.561.935.000	659.911.676	42,2	1.561.935.000	635.297.592	40,7	0	0	0,0	0	24.614.084	0,0
11.2012.	PEMERINTAH DESA CINANJUNG	1.791.368.000	1.014.148.964	56,6	1.710.648.400	610.624.989	35,7	(80.719.600)	(19.280.400)	23,9	0	384.243.575	0,0
12	KECAMATAN SUKASARI	11.212.819.651	6.249.188.853	55,7	11.229.881.414	4.685.129.923	41,7	17.063.763	44.134.295	258,6	2.000	1.608.193.225	661,3
12.2001.	PEMERINTAH DESA SUKASARI	1.675.232.000	951.480.310	56,8	1.675.232.000	916.869.582	54,7	0	0	0,0	0	34.610.728	0,0
12.2002.	PEMERINTAH DESA GENTENG	1.743.877.451	992.537.478	56,9	1.713.877.451	926.697.788	54,1	(30.000.000)	(30.000.000)	100,0	0	35.839.690	0,0
12.2003.	PEMERINTAH DESA BANYURESMI	1.467.515.000	748.675.819	51,0	1.491.524.380	430.633.976	28,9	24.009.380	48.018.760	200,0	0	366.060.603	0,0
12.2004.	PEMERINTAH DESA NANGGERANG	1.507.158.200	844.788.600	56,1	1.507.158.200	467.454.600	31,0	0	0	0,0	0	377.334.000	0,0
12.2005.	PEMERINTAH DESA MEKARSARI	1.588.368.000	892.844.183	56,2	1.606.777.152	602.392.580	37,5	18.409.152	0	0,0	0	290.451.603	0,0
12.2006.	PEMERINTAH DESA SINDANGSARI	1.654.600.000	935.510.297	56,5	1.658.198.000	700.040.397	42,2	3.600.000	0	0,0	2.000	235.469.900	495,0
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUKARAPIH	1.576.069.000	883.352.166	56,0	1.577.114.231	641.041.000	40,6	1.045.231	26.115.535	498,5	0	268.426.701	0,0
13	KECAMATAN PAMULIHAN	18.432.963.000	7.731.373.118	41,9	18.377.522.885	6.891.354.828	37,5	(55.440.115)	26.635.085	(48,0)	0	866.653.375	0,0
13.2001.	PEMERINTAH DESA CIGENDEL	2.083.057.000	1.000.659.303	48,0	2.089.257.000	921.796.720	44,1	6.200.000	6.200.000	100,0	0	85.062.583	0,0
13.2002.	PEMERINTAH DESA CIJERUK	1.709.952.000	714.852.532	41,8	1.709.952.000	665.760.728	38,9	0	0	0,0	0	49.091.804	0,0
13.2003.	PEMERINTAH DESA PAMULIHAN	1.711.912.000	715.311.166	41,8	1.716.312.000	659.584.998	38,4	4.400.000	4.400.000	100,0	0	60.126.168	0,0
13.2004.	PEMERINTAH DESA HAURGOMBONG	1.615.158.000	641.831.325	39,7	1.580.595.200	552.510.734	35,0	(34.562.800)	(34.562.800)	100,0	0	54.757.791	0,0
13.2005.	PEMERINTAH DESA CILEMBU	1.648.923.000	655.495.340	39,8	1.603.323.000	540.514.283	33,7	(45.600.000)	(45.600.000)	100,0	0	69.381.057	0,0
13.2006.	PEMERINTAH DESA CIMARIAS	1.564.475.000	620.030.531	39,6	1.584.700.600	579.714.293	36,6	20.225.600	20.225.600	100,0	0	60.541.838	0,0
13.2007.	PEMERINTAH DESA CINANGGERANG	1.547.496.000	626.924.290	40,5	1.561.604.219	514.790.000	33,0	14.108.219	44.108.219	312,6	0	156.242.509	0,0
13.2008.	PEMERINTAH DESA MEKARBAKTI	1.697.574.000	684.661.680	40,3	1.715.599.000	650.014.905	37,9	18.025.000	18.025.000	100,0	0	52.671.775	0,0
13.2009.	PEMERINTAH DESA SUKAWANGI	1.684.597.000	703.505.817	41,8	1.684.597.000	615.724.386	36,6	0	2.075.200	0,0	0	89.856.631	0,0
13.2010.	PEMERINTAH DESA CIPTASARI	1.571.570.000	626.987.486	39,9	1.578.407.114	485.951.719	30,8	6.837.114	6.837.114	100,0	0	147.872.881	0,0
13.2011.	PEMERINTAH DESA CITALI	1.598.249.000	741.113.648	46,4	1.553.175.752	704.992.062	45,4	(45.073.248)	4.926.752	(10,9)	0	41.048.338	0,0
14	KECAMATAN CIMANGGUNG	22.273.512.176	10.471.559.803	47,0	21.979.844.442	9.514.022.097	43,3	(293.667.734)	(72.536.722)	24,7	0	885.000.984	0,0
14.2001.	PEMERINTAH DESA CIMANGGUNG	2.215.638.000	970.911.654	43,8	2.165.638.000	947.462.300	43,7	(50.000.000)	0	0,0	0	23.449.354	0,0
14.2002.	PEMERINTAH DESA SINDANGPAKUON	1.738.750.176	848.717.700	48,8	1.739.891.564	723.045.706	41,6	1.141.388	0	0,0	0	125.671.994	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
14.2003.	PEMERINTAH DESA TEGALMANGGUNG	1.966.610.000	855.839.927	43,5	1.993.337.600	763.461.092	38,3	26.727.600	0	0,0	0	92.378.835	0,0
14.2004.	PEMERINTAH DESA SINDULANG	1.805.533.000	768.266.834	42,6	1.834.296.278	678.030.600	37,0	28.763.278	28.763.278	100,0	0	118.999.512	0,0
14.2005.	PEMERINTAH DESA SINDANGGALIH	2.285.767.000	980.942.104	42,9	2.210.767.000	782.268.366	35,4	(75.000.000)	(50.000.000)	66,7	0	148.673.738	0,0
14.2006.	PEMERINTAH DESA SAWAHDADAP	1.923.987.000	969.432.785	50,4	1.883.987.000	961.785.683	51,1	(40.000.000)	0	0,0	0	7.647.102	0,0
14.2007.	PEMERINTAH DESA CIKAHURIPAN	2.174.892.000	937.327.000	43,1	2.099.892.000	861.675.364	41,0	(75.000.000)	0	0,0	0	75.651.636	0,0
14.2008.	PEMERINTAH DESA SUKADANA	2.093.228.000	1.046.765.400	50,0	2.100.928.000	955.201.064	45,5	7.700.000	7.700.000	100,0	0	99.264.336	0,0
14.2009.	PEMERINTAH DESA MANGUNARGA	1.895.800.000	957.757.569	50,5	1.876.800.000	915.525.986	48,8	(19.000.000)	0	0,0	0	42.231.583	0,0
14.2010.	PEMERINTAH DESA CIHANJUANG	2.092.719.000	1.079.604.226	51,6	1.992.719.000	927.535.536	46,5	(100.000.000)	(60.000.000)	60,0	0	92.068.690	0,0
14.2011.	PEMERINTAH DESA PASIRNANJUNG	2.080.588.000	1.055.994.604	50,8	2.081.588.000	998.030.400	47,9	1.000.000	1.000.000	100,0	0	58.964.204	0,0
15	KECAMATAN JATINANGOR	22.383.133.765	9.414.330.023	42,1	22.435.790.605	8.329.766.042	37,1	51.697.245	66.750.134	129,1	(959.595)	1.151.314.115	979,2
15.2001.	PEMERINTAH DESA CIKERUH	2.087.731.000	948.416.633	45,4	2.088.021.982	797.747.320	38,2	290.982	280.932	96,5	0	150.950.245	0,0
15.2002.	PEMERINTAH DESA HEGARMAH	2.182.192.000	1.045.218.713	47,9	2.182.458.670	754.846.038	34,6	266.670	266.670	100,0	0	290.639.345	0,0
15.2003.	PEMERINTAH DESA CIBEUSI	1.756.235.000	726.201.953	41,3	1.756.235.000	723.253.752	41,2	533.840	533.840	100,0	533.840	3.482.041	652,3
15.2004.	PEMERINTAH DESA CIPACING	1.938.447.000	826.761.557	42,7	1.943.032.000	546.334.586	28,1	4.585.000	4.585.000	100,0	0	285.011.971	0,0
15.2005.	PEMERINTAH DESA SAYANG	1.721.503.000	738.769.668	42,9	1.760.704.600	621.997.472	35,3	39.201.600	39.357.887	100,4	0	156.130.083	0,0
15.2006.	PEMERINTAH DESA MEKARGALIH	1.625.742.000	672.447.556	41,4	1.625.929.162	596.762.904	36,7	187.162	187.162	100,0	0	75.871.814	0,0
15.2007.	PEMERINTAH DESA CINTAMULYA	2.309.346.000	879.162.775	38,1	2.315.160.043	880.103.364	38,0	5.814.043	5.814.043	100,0	0	4.873.454	0,0
15.2008.	PEMERINTAH DESA JATIMUKTI	1.594.497.000	642.976.948	40,3	1.594.589.443	623.405.522	39,1	92.443	92.443	100,0	0	19.663.869	0,0
15.2009.	PEMERINTAH DESA CISEMPUR	1.786.524.000	739.337.220	41,4	1.786.524.000	735.515.752	41,2	0	14.845.745	0,0	0	18.667.213	0,0
15.2010.	PEMERINTAH DESA JATIROKE	1.932.890.765	663.958.944	34,4	1.934.690.765	633.524.818	32,7	306.565	306.565	100,0	(1.493.435)	30.740.691	058,4
15.2011.	PEMERINTAH DESA CILELES	1.851.089.000	923.545.034	49,9	1.851.295.165	906.143.216	48,9	206.165	206.165	100,0	0	17.607.983	0,0
15.2012.	PEMERINTAH DESA CILAYUNG	1.596.937.000	607.533.022	38,0	1.597.149.775	510.131.298	31,9	212.775	273.682	128,6	0	97.675.406	0,0
16	KECAMATAN RANCAKALONG	16.254.258.646	7.988.833.724	49,1	16.017.142.017	7.059.988.055	44,1	(236.936.636)	(61.818.143)	26,1	179.993	867.027.526	700,7
16.2001.	PEMERINTAH DESA NAGARAWANGI	1.496.807.775	634.085.803	42,4	1.487.944.125	573.733.334	38,6	(8.863.650)	0	0,0	0	60.352.469	0,0
16.2002.	PEMERINTAH DESA CIBUNAR	1.696.883.000	972.880.010	57,3	1.650.859.904	723.701.538	43,8	(46.023.096)	0	0,0	0	249.178.472	0,0
16.2003.	PEMERINTAH DESA PANGADEGAN	1.649.083.000	705.928.894	42,8	1.660.659.592	684.240.103	41,2	11.576.592	30.092.592	259,9	0	51.781.383	0,0
16.2004.	PEMERINTAH DESA SUKAHAYU	1.489.238.000	641.172.478	43,1	1.459.238.000	604.448.130	41,4	(30.000.000)	0	0,0	0	36.724.348	0,0
16.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAMAJU	1.845.350.437	927.954.284	50,3	1.800.682.438	807.776.627	44,9	(44.667.999)	6.625.088	(14,8)	0	126.802.745	0,0
16.2006.	PEMERINTAH DESA PAMEKARAN	1.525.383.600	749.921.683	49,2	1.525.383.600	684.099.192	44,8	0	0	0,0	0	65.822.491	0,0
16.2007.	PEMERINTAH DESA RANCAKALONG	1.751.501.634	874.070.752	49,9	1.756.872.534	787.403.800	44,8	5.370.900	(55.000.000)	(24,0)	0	31.666.952	0,0
16.2008.	PEMERINTAH DESA SUKASIRNARASA	1.525.004.000	647.826.112	42,5	1.526.468.177	552.990.114	36,2	1.464.177	1.464.177	100,0	0	96.300.175	0,0
16.2009.	PEMERINTAH DESA CIBUNGUR	1.777.284.200	874.686.408	49,2	1.701.310.647	726.812.917	42,7	(75.793.560)	(45.000.000)	59,4	179.993	102.873.491	154,2
16.2010.	PEMERINTAH DESA PASIRBIRU	1.497.723.000	960.307.300	64,1	1.447.723.000	914.782.300	63,2	(50.000.000)	0	0,0	0	45.525.000	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
17	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	16.235.946.000	7.506.774.193	46,2	16.140.107.837	7.088.551.848	43,9	(95.838.163)	(81.373.826)	84,9	0	336.848.519	0,0
17.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAGALIH	1.712.132.000	728.783.000	42,6	1.712.132.000	684.282.720	40,0	0	0	0,0	0	44.500.280	0,0
17.2006.	PEMERINTAH DESA BAGINDA	1.537.283.000	747.043.086	48,6	1.458.494.000	663.859.399	45,5	(78.789.000)	(78.788.676)	100,0	0	4.395.011	0,0
17.2007.	PEMERINTAH DESA CIPANCAR	1.393.770.000	587.131.931	42,1	1.352.479.000	577.238.194	42,7	(41.291.000)	8.709.000	(21,1)	0	18.602.737	0,0
17.2008.	PEMERINTAH DESA CITENGAH	1.474.101.000	709.406.631	48,1	1.474.101.000	706.255.340	47,9	0	0	0,0	0	3.151.291	0,0
17.2009.	PEMERINTAH DESA GUNASARI	1.661.484.000	837.707.099	50,4	1.670.613.677	761.082.183	45,6	9.129.677	0	0,0	0	76.624.916	0,0
17.2010.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	1.930.760.000	1.100.296.733	57,0	1.991.665.850	1.101.037.619	55,3	60.905.850	39.825.850	65,4	0	39.084.964	0,0
17.2011.	PEMERINTAH DESA MARGAMEKAR	1.585.923.000	673.354.960	42,5	1.596.303.000	650.349.029	40,7	10.380.000	10.380.000	100,0	0	33.385.931	0,0
17.2012.	PEMERINTAH DESA CIHERANG	1.720.361.000	731.472.312	42,5	1.724.387.310	723.245.636	41,9	4.026.310	3.500.000	86,9	0	11.726.676	0,0
17.2013.	PEMERINTAH DESA MARGALAKSANA	1.549.845.000	649.143.344	41,9	1.554.645.000	579.560.556	37,3	4.800.000	0	0,0	0	69.582.788	0,0
17.2014.	PEMERINTAH DESA MEKAR RAHAYU	1.670.287.000	742.435.097	44,4	1.605.287.000	641.641.172	40,0	(65.000.000)	(65.000.000)	100,0	0	35.793.925	0,0
18	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	16.347.975.000	8.013.767.933	49,0	16.115.164.522	6.672.269.931	41,4	(232.010.478)	(86.708.878)	37,4	800.000	1.254.789.124	848,6
18.2004.	PEMERINTAH DESA PADASUKA	1.460.022.000	623.110.316	42,7	1.459.222.000	506.204.580	34,7	0	0	0,0	800.000	116.905.736	613,2
18.2005.	PEMERINTAH DESA MULYASARI	1.564.303.000	1.009.710.979	64,5	1.581.594.122	674.144.120	42,6	17.291.122	13.291.122	76,9	0	348.857.981	0,0
18.2006.	PEMERINTAH DESA GIRIMUKTI	1.901.920.000	803.478.554	42,2	1.851.920.000	789.955.947	42,7	(50.000.000)	0	0,0	0	13.522.607	0,0
18.2007.	PEMERINTAH DESA MEKARJAYA	1.826.528.000	1.029.351.157	56,4	1.801.528.000	841.695.732	46,7	(25.000.000)	0	0,0	0	187.655.425	0,0
18.2008.	PEMERINTAH DESA MARGAMUKTI	1.585.903.000	789.645.238	49,8	1.485.903.000	656.955.714	44,2	(100.000.000)	(100.000.000)	100,0	0	32.689.524	0,0
18.2009.	PEMERINTAH DESA SIRNAMULYA	1.585.780.000	1.000.622.525	63,1	1.585.780.000	673.947.912	42,5	0	0	0,0	0	326.674.613	0,0
18.2010.	PEMERINTAH DESA KEBONJATI	1.467.640.000	641.711.451	43,7	1.467.640.000	532.725.556	36,3	0	0	0,0	0	108.985.895	0,0
18.2011.	PEMERINTAH DESA JATIHURIP	1.737.165.000	741.156.401	42,7	1.712.165.000	722.663.035	42,2	(25.000.000)	0	0,0	0	18.493.366	0,0
18.2012.	PEMERINTAH DESA JATIMULYA	1.575.240.000	665.921.391	42,3	1.525.938.400	586.085.357	38,4	(49.301.600)	0	0,0	0	79.836.034	0,0
18.2013.	PEMERINTAH DESA RANCAMULYA	1.643.474.000	709.059.921	43,1	1.643.474.000	687.891.978	41,9	0	0	0,0	0	21.167.943	0,0
19	KECAMATAN GANEAS	11.931.378.145	5.153.024.706	43,2	11.894.399.363	4.389.529.052	36,9	(36.978.782)	63.368.313	71,4	0	826.863.967	0,0
19.2001.	PEMERINTAH DESA GANEAS	1.463.845.145	724.670.959	49,5	1.491.049.533	677.044.903	45,4	27.204.388	27.204.388	100,0	0	74.830.444	0,0
19.2002.	PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR	1.611.698.000	592.311.524	36,8	1.566.698.000	536.649.418	34,3	(45.000.000)	0	0,0	0	55.662.106	0,0
19.2003.	PEMERINTAH DESA CIKONENG	1.441.985.000	621.964.938	43,1	1.408.570.000	381.860.827	27,1	(33.415.000)	0	0,0	0	240.104.111	0,0
19.2004.	PEMERINTAH DESA SUKALUYU	1.453.032.000	620.783.423	42,7	1.443.564.500	503.268.019	34,9	(9.467.500)	12.460.400	31,6	0	129.975.804	0,0
19.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAWENING	1.382.574.200	584.997.588	42,3	1.382.574.200	525.922.644	38,0	0	0	0,0	0	59.074.944	0,0
19.2006.	PEMERINTAH DESA TANJUNGHURIP	1.649.446.000	789.546.420	47,9	1.655.597.650	635.836.575	38,4	6.151.650	6.151.650	100,0	0	159.861.495	0,0
19.2007.	PEMERINTAH DESA CIKONDANG	1.544.563.000	651.590.640	42,2	1.562.110.680	577.077.666	36,9	17.547.680	17.551.875	100,0	0	92.064.849	0,0
19.2008.	PEMERINTAH DESA CIKONENGGULON	1.384.234.800	567.159.214	41,0	1.384.234.800	551.869.000	39,9	0	0	0,0	0	15.290.214	0,0
20	KECAMATAN TANJUNGGERTA	17.946.354.865	10.374.880.927	57,8	17.842.572.656	9.382.754.001	52,6	(92.999.475)	26.359.856	(28,3)	10.782.734	1.018.486.782	445,5

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
20.2001.	PEMERINTAH DESA SUKAMANTRI	1.482.101.000	901.236.212	60,8	1.462.101.000	709.964.170	48,6	(18.807.131)	1.192.869	(6,3)	1.192.869	192.464.911	134,6
20.2002.	PEMERINTAH DESA CIPANAS	1.845.363.000	1.222.518.784	66,2	1.835.363.000	1.039.514.001	56,6	(10.000.000)	71.564	(0,7)	0	183.076.347	0,0
20.2003.	PEMERINTAH DESA GUNTURMEKAR	1.474.749.000	861.497.500	58,4	1.464.749.000	856.330.522	58,5	(10.000.000)	86.395	(0,9)	0	5.253.373	0,0
20.2004.	PEMERINTAH DESA MULYAMEKAR	1.348.913.000	801.546.950	59,4	1.344.913.000	775.514.338	57,7	2.000.000	202.256	10,1	6.000.000	26.234.868	437,2
20.2005.	PEMERINTAH DESA BANYUASIH	1.593.028.000	909.758.180	57,1	1.581.778.000	792.015.608	50,1	(11.250.000)	2.922.243	(26,0)	0	120.664.815	0,0
20.2006.	PEMERINTAH DESA KERTAMEKAR	1.560.087.000	896.569.314	57,5	1.550.087.000	869.809.135	56,1	(10.000.000)	1.104.715	(11,0)	0	27.864.894	0,0
20.2007.	PEMERINTAH DESA KERTAHARJA	1.379.485.000	756.923.217	54,9	1.369.687.256	681.506.266	49,8	(9.797.744)	1.501.955	(15,3)	0	76.918.906	0,0
20.2008.	PEMERINTAH DESA CIGENTUR	1.341.518.000	743.470.060	55,4	1.331.518.000	699.482.940	52,5	(10.000.000)	1.511.134	(15,1)	0	45.498.254	0,0
20.2009.	PEMERINTAH DESA TANJUNGMEKAR	1.509.601.865	833.540.787	55,2	1.491.012.000	813.278.000	54,5	(15.000.000)	(15.000.000)	100,0	3.589.865	5.262.787	146,6
20.2010.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MULYA	1.382.285.000	753.275.932	54,5	1.374.640.400	626.604.735	45,6	(7.644.600)	2.624.023	(34,3)	0	129.295.220	0,0
20.2011.	PEMERINTAH DESA BAROS	1.668.083.000	944.963.887	56,6	1.658.083.000	793.439.248	47,9	(10.000.000)	0	0,0	0	151.524.639	0,0
20.2012.	PEMERINTAH DESA AWILEGA	1.361.141.000	749.580.104	55,1	1.378.641.000	725.295.038	52,6	17.500.000	30.142.702	172,2	0	54.427.768	0,0
21	KECAMATAN TANJUNG MEDAR	13.256.714.625	5.673.107.383	42,8	13.210.860.909	4.764.001.684	36,1	(45.853.716)	16.054.740	(35,0)	0	925.160.439	0,0
21.2001.	PEMERINTAH DESA CIKARAMAS	1.536.193.000	726.247.904	47,3	1.536.193.000	632.777.531	41,2	0	1.908.456	0,0	0	95.378.829	0,0
21.2002.	PEMERINTAH DESA WARGALUYU	1.542.934.000	648.549.860	42,0	1.557.080.284	589.736.360	37,9	14.146.284	14.146.284	100,0	0	72.959.784	0,0
21.2003.	PEMERINTAH DESA JINGKANG	1.552.324.913	649.135.854	41,8	1.552.324.913	529.559.398	34,1	0	0	0,0	0	119.576.456	0,0
21.2004.	PEMERINTAH DESA KAMAL	1.545.114.548	648.779.390	42,0	1.545.114.548	562.036.003	36,4	0	0	0,0	0	86.743.387	0,0
21.2005.	PEMERINTAH DESA KERTAMUKTI	1.445.018.169	600.549.278	41,6	1.445.018.169	486.717.576	33,7	0	0	0,0	0	113.831.702	0,0
21.2006.	PEMERINTAH DESA TANJUNGWANGI	1.431.039.341	602.438.316	42,1	1.431.039.341	596.618.870	41,7	0	0	0,0	0	5.819.446	0,0
21.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMUKTI	1.446.827.776	608.438.072	42,1	1.446.827.776	454.026.094	31,4	0	0	0,0	0	154.411.978	0,0
21.2008.	PEMERINTAH DESA SUKATANI	1.366.656.481	573.552.281	42,0	1.366.656.481	492.857.415	36,1	0	0	0,0	0	80.694.866	0,0
21.2009.	PEMERINTAH DESA TANJUNG MEDAR	1.390.606.397	615.416.428	44,3	1.330.606.397	419.672.437	31,5	(60.000.000)	0	0,0	0	195.743.991	0,0
22	KECAMATAN CIMALAKA	23.788.506.898	9.717.356.277	40,8	23.888.274.889	8.820.566.148	36,9	99.768.315	123.178.775	123,5	324	1.019.968.904	217,3
22.2001.	PEMERINTAH DESA CIMALAKA	1.904.668.000	947.113.828	49,7	1.932.762.441	887.233.042	45,9	28.094.441	28.094.441	100,0	0	87.975.227	0,0
22.2002.	PEMERINTAH DESA GALUDRA	1.472.194.000	619.339.546	42,1	1.472.194.000	497.293.633	33,8	0	0	0,0	0	122.045.913	0,0
22.2003.	PEMERINTAH DESA CIBEUREUM KULON	3.698.586.000	981.445.786	26,5	3.701.717.983	936.634.628	25,3	3.131.983	13.131.983	419,3	0	57.943.141	0,0
22.2004.	PEMERINTAH DESA NALUK	1.644.430.000	709.843.393	43,2	1.648.916.217	695.160.616	42,2	4.486.217	0	0,0	0	14.682.777	0,0
22.2005.	PEMERINTAH DESA NYALINDUNG	1.446.393.242	628.038.303	43,4	1.434.630.842	541.249.784	37,7	(11.762.400)	43.678.591	(71,3)	0	130.467.110	0,0
22.2006.	PEMERINTAH DESA TRUNAMANGGALA	1.663.811.445	702.040.901	42,2	1.623.403.323	626.249.591	38,6	(40.408.122)	0	0,0	0	75.791.310	0,0
22.2007.	PEMERINTAH DESA CIKOLE	1.460.410.000	616.063.701	42,2	1.463.765.000	560.357.700	38,3	3.355.000	0	0,0	0	55.706.001	0,0
22.2008.	PEMERINTAH DESA CIBEUREUM WETAN	1.532.561.000	645.339.389	42,1	1.536.466.470	551.980.709	35,9	3.905.470	0	0,0	0	93.358.680	0,0
22.2009.	PEMERINTAH DESA MANDALAHERANG	1.572.341.000	668.846.736	42,5	1.592.824.108	593.964.365	37,3	20.483.108	20.483.108	100,0	0	95.365.479	0,0
22.2010.	PEMERINTAH DESA LICIN	1.669.210.000	714.047.845	42,8	1.645.813.216	662.890.426	40,3	(23.396.784)	17.790.636	(76,0)	0	68.948.055	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

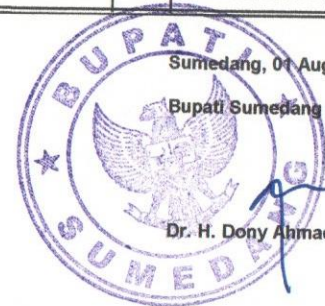
KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
22.2011.	PEMERINTAH DESA CITIMUN	1.585.209.780	752.262.402	47,5	1.585.209.472	624.245.088	39,4	16	16	100,0	324	128.017.330	521,6
22.2012.	PEMERINTAH DESA SERANG	1.371.544.431	569.678.480	41,5	1.373.843.456	560.606.479	40,8	2.299.025	0	0,0	0	9.072.001	0,0
22.2013.	PEMERINTAH DESA PADASARI	1.393.072.000	506.337.101	36,3	1.437.389.860	476.531.720	33,2	44.317.860	0	0,0	0	29.805.381	0,0
22.2014.	PEMERINTAH DESA CIMUJA	1.374.076.000	656.958.866	47,8	1.439.338.501	606.168.367	42,1	65.262.501	0	0,0	0	50.790.499	0,0
23	KECAMATAN CISARUA	9.861.254.300	4.140.316.731	42,0	9.809.687.387	3.587.169.593	36,6	(51.566.913)	18.035.595	(35,0)	0	571.182.733	0,0
23.2001.	PEMERINTAH DESA CISARUA	1.478.901.000	643.266.436	43,5	1.486.701.000	567.149.700	38,1	7.800.000	7.800.000	100,0	0	83.916.736	0,0
23.2002.	PEMERINTAH DESA CIUYAH	1.403.349.000	591.990.500	42,2	1.406.430.093	519.652.779	36,9	3.081.093	3.081.093	100,0	0	75.418.814	0,0
23.2003.	PEMERINTAH DESA CIMARA	1.364.981.000	567.362.123	41,6	1.346.215.069	456.759.127	33,9	(18.765.931)	1.219.747	(6,5)	0	111.822.743	0,0
23.2004.	PEMERINTAH DESA BANTARMARA	1.274.196.000	533.002.407	41,8	1.226.832.097	463.210.477	37,8	(47.363.903)	2.252.927	(4,8)	0	72.044.857	0,0
23.2005.	PEMERINTAH DESA CIPANDANWANGI	1.286.016.300	523.674.901	40,7	1.287.986.727	489.745.440	38,0	1.970.427	1.970.427	100,0	0	35.899.888	0,0
23.2006.	PEMERINTAH DESA CISALAK	1.485.029.000	633.346.167	42,6	1.486.740.401	563.465.743	37,9	1.711.401	1.711.401	100,0	0	71.591.825	0,0
23.2007.	PEMERINTAH DESA KEBONKALAPA	1.568.782.000	647.674.197	41,3	1.568.782.000	527.186.327	33,6	0	0	0,0	0	120.487.870	0,0
24	KECAMATAN TOMO	13.810.455.258	6.333.257.068	45,9	13.707.933.804	4.779.562.161	34,9	(97.993.886)	18.247.518	(18,6)	4.527.568	1.571.942.425	719,4
24.2001.	PEMERINTAH DESA TOMO	1.428.702.000	543.635.407	38,1	1.378.702.000	527.442.637	38,3	(50.000.000)	0	0,0	0	16.192.770	0,0
24.2002.	PEMERINTAH DESA TOLENGAS	1.653.896.000	446.610.823	27,0	1.656.891.296	319.835.423	19,3	2.995.296	0	0,0	0	126.775.400	0,0
24.2003.	PEMERINTAH DESA DARMAWANGI	1.902.414.000	1.067.658.865	56,1	1.902.414.000	1.024.452.610	53,9	0	0	0,0	0	43.206.255	0,0
24.2004.	PEMERINTAH DESA MARONGGE	1.452.760.000	787.367.873	54,2	1.452.760.000	558.433.715	38,4	4.527.568	4.527.468	100,0	4.527.568	233.461.626	156,4
24.2005.	PEMERINTAH DESA JEMBARWANGI	1.646.112.858	614.607.338	37,3	1.659.832.908	385.878.230	23,2	13.720.050	13.720.050	100,0	0	242.449.158	0,0
24.2006.	PEMERINTAH DESA BUGEL	1.366.046.000	467.613.483	34,2	1.341.046.000	437.566.650	32,6	(25.000.000)	0	0,0	0	30.046.833	0,0
24.2007.	PEMERINTAH DESA CIPELES	1.358.759.000	753.800.751	55,5	1.371.709.000	268.398.176	19,6	12.950.000	0	0,0	0	485.402.575	0,0
24.2008.	PEMERINTAH DESA KARYAMUKTI	1.646.204.400	914.405.228	55,5	1.646.204.400	763.530.720	46,4	0	0	0,0	0	150.874.508	0,0
24.2010.	PEMERINTAH DESA MEKARWANGI	1.355.561.000	737.557.300	54,4	1.298.374.200	494.024.000	38,0	(57.186.800)	0	0,0	0	243.533.300	0,0
25	KECAMATAN UJUNGJAYA	13.995.776.000	6.870.834.881	49,1	13.996.209.190	6.060.314.105	43,3	433.190	50.433.190	642,3	0	860.953.966	0,0
25.2001.	PEMERINTAH DESA UJUNGJAYA	2.031.740.000	1.071.246.476	52,7	2.031.740.000	961.841.042	47,3	0	0	0,0	0	109.405.434	0,0
25.2002.	PEMERINTAH DESA PALABUAN	1.380.610.000	759.156.838	55,0	1.380.610.000	754.033.752	54,6	0	0	0,0	0	5.123.086	0,0
25.2003.	PEMERINTAH DESA PALASARI	1.456.472.000	809.878.148	55,6	1.468.705.940	719.359.900	49,0	12.233.940	12.233.940	100,0	0	102.752.188	0,0
25.2004.	PEMERINTAH DESA KEBONCAU	1.510.991.000	638.813.921	42,3	1.510.991.000	628.511.187	41,6	0	0	0,0	0	10.302.734	0,0
25.2005.	PEMERINTAH DESA SAKURJAYA	1.491.144.000	629.553.383	42,2	1.491.144.000	586.280.049	39,3	0	0	0,0	0	43.273.334	0,0
25.2006.	PEMERINTAH DESA KUDANGWANGI	1.417.646.000	598.244.260	42,2	1.455.845.250	586.132.394	40,3	38.199.250	38.199.250	100,0	0	50.311.111	0,0
25.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMULYA	1.364.521.000	746.699.347	54,7	1.314.521.000	551.031.330	41,9	(50.000.000)	0	0,0	0	195.668.017	0,0
25.2008.	PEMERINTAH DESA CIPELANG	1.492.716.000	680.829.373	45,6	1.492.716.000	663.233.959	44,4	0	0	0,0	0	17.595.414	0,0
25.2009.	PEMERINTAH DESA CIBULUH	1.849.936.000	936.413.135	50,6	1.849.936.000	609.890.492	33,0	0	0	0,0	0	326.522.643	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 30/06/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
26	KECAMATAN JATIGEDE	15.953.326.700	6.456.659.149	40,5	15.967.096.006	6.058.565.635	37,9	13.769.306	15.495.257	112,5	0	413.588.771	0,0
26.2001.	PEMERINTAH DESA CIJEUNGJING	1.428.785.000	602.516.998	42,2	1.428.785.000	556.171.223	38,9	0	0	0,0	0	46.345.775	0,0
26.2002.	PEMERINTAH DESA KADUJAYA	1.312.106.000	536.896.294	40,9	1.313.906.000	500.117.075	38,1	1.800.000	1.800.000	100,0	0	38.579.219	0,0
26.2003.	PEMERINTAH DESA LEBAKSIUH	1.417.817.000	581.969.975	41,0	1.417.817.000	520.920.101	36,7	0	0	0,0	0	61.049.874	0,0
26.2004.	PEMERINTAH DESA CINTAJAYA	1.397.331.000	601.596.363	43,1	1.397.331.000	564.758.130	40,4	0	0	0,0	0	36.838.233	0,0
26.2005.	PEMERINTAH DESA CIPICUNG	1.776.232.000	606.050.205	34,1	1.777.032.000	562.249.886	31,6	800.000	0	0,0	0	43.800.319	0,0
26.2006.	PEMERINTAH DESA MEKARASIH	1.393.044.000	583.947.711	41,9	1.393.044.000	531.408.850	38,1	0	0	0,0	0	52.538.861	0,0
26.2008.	PEMERINTAH DESA CIRANGGEM	1.403.574.000	591.779.898	42,2	1.403.574.000	575.463.941	41,0	0	0	0,0	0	16.315.957	0,0
26.2009.	PEMERINTAH DESA CISAMPIH	1.525.807.000	635.697.979	41,7	1.507.057.000	559.201.873	37,1	(18.750.000)	1.250.000	(6,7)	0	77.746.106	0,0
26.2010.	PEMERINTAH DESA JEMAH	1.361.005.700	551.152.152	40,5	1.373.313.100	545.027.391	39,7	12.307.400	12.445.257	101,1	0	18.570.018	0,0
26.2011.	PEMERINTAH DESA KAREDOK	1.559.433.000	585.591.372	37,6	1.572.993.700	578.152.010	36,8	13.560.700	0	0,0	0	7.439.362	0,0
26.2012.	PEMERINTAH DESA KADU	1.378.192.000	579.460.202	42,0	1.382.243.206	565.095.155	40,9	4.051.206	0	0,0	0	14.365.047	0,0
	JUMLAH	431.439.236.738	199.498.434.449	46,2	430.028.599.662	171.726.715.777	39,9	1.192.056.994	813.960.676	68,3	2.602.694.070	28.585.679.348	098,3



Sumedang, 01 August 2022

Bupati Sumedang

Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., M.M

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	11.277.943.043,00	10.554.309.256,00	723.633.787,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.257.501.617,00	1.041.620.311,00	215.881.306,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	3.860.822.100,00	3.568.956.445,00	291.865.655,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	526.732.481,00	418.627.500,00	108.104.981,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5.632.886.845,00	5.525.105.000,00	107.781.845,00
1.2.	Pendapatan Transfer	425.778.693.800,00	425.154.041.338,00	624.652.462,00
1.2.1.	Dana Desa	237.957.369.800,00	237.362.181.178,00	595.188.622,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.487.248.000,00	29.488.536.033,00	(1.288.033,00)
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	116.200.076.000,00	116.169.324.127,00	30.751.873,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	35.625.500.000,00	35.625.500.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	6.508.500.000,00	6.508.500.000,00	0,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	2.328.972.535,00	2.113.727.354,00	215.245.181,00
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ket	959.183.500,00	638.025.572,00	321.157.928,00
1.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokas	252.500.000,00	194.700.000,00	57.800.000,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	418.943.060,00	428.667.590,00	(9.724.530,00)
1.3.6.	Bunga Bank	30.735.863,00	249.579.420,00	(218.843.557,00)
1.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	587.610.112,00	522.754.772,00	64.855.340,00
	JUMLAH PENDAPATAN	439.385.609.378,00	437.822.077.948,00	1.563.531.430,00
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Pegawai	121.328.631.487,96	119.129.251.006,96	2.199.380.481,00
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	15.070.196.700,00	14.872.574.244,40	197.622.455,60
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	84.913.260.500,00	83.076.903.288,60	1.836.357.211,40
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.168.509.287,96	7.070.347.473,96	98.161.814,00
2.1.4.	Tunjangan BPD	14.176.665.000,00	14.109.426.000,00	67.239.000,00
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.838.197.563,86	120.210.466.017,86	2.627.731.546,00
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.368.557.729,04	25.379.487.214,04	989.070.515,00
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	49.138.560.531,00	48.521.032.697,00	617.527.834,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	994.634.800,00	950.353.800,00	44.281.000,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.234.320.471,00	1.137.912.349,00	96.408.122,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.761.971.222,82	15.612.524.186,82	149.447.036,00
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.190.169.480,00	1.130.436.741,00	59.732.739,00
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	28.149.983.330,00	27.478.719.030,00	671.264.300,00
2.3.	Belanja Modal	91.327.854.034,18	89.697.762.775,18	1.630.091.259,00
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.245.501.114,00	1.105.191.114,00	140.310.000,00
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	11.524.106.695,18	11.262.125.456,18	261.981.239,00
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	228.143.000,00	223.250.000,00	4.893.000,00
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	26.206.912.480,00	25.622.418.700,00	584.493.780,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	30.776.564.112,00	30.450.813.932,00	325.750.180,00
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	1.080.956.700,00	1.080.956.700,00	0,00
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	13.244.930.008,00	13.050.619.378,00	194.310.630,00
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	2.619.819.075,00	2.575.604.075,00	44.215.000,00
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	4.400.920.850,00	4.326.783.420,00	74.137.430,00
2.4.	Belanja Tidak Terduga	102.364.326.802,00	99.327.217.184,00	3.037.109.618,00
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	102.364.326.802,00	99.327.217.184,00	3.037.109.618,00
	JUMLAH BELANJA	437.859.009.888,00	428.364.696.984,00	9.494.312.904,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.526.599.490,00	9.457.380.964,00	7.930.781.474,00
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.405.258.447,00	3.765.253.319,00	2.640.005.128,00
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.921.443.493,00	3.732.754.865,00	188.688.628,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	2.451.316.500,00	0,00	2.451.316.500,00
3.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	2.898.454,00	2.898.454,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.414.193.153,00	4.277.319.455,00	1.136.873.698,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	577.273.314,00	258.883.481,00	836.156.795,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	4.786.467.362,00	4.490.335.459,00	296.131.903,00
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	50.452.477,00	45.867.477,00	4.585.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	991.065.294,00	512.066.136,00	1.503.131.430,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2.517.664.784,00	8.945.314.828,00	(6.427.650.044,00)

Sumedang, 07 February 2023
 Bupati Sumedang

 Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., M.M



LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/
TAHUN ANGGARAN 2022

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
01	KECAMATAN WADO	17.853.971.591	17.717.198.933	99,2	17.769.457.815	17.508.561.220	98,5	(84.003.207)	(88.674.891)	105,6	510.569	119.962.822	495,9
01.2001.	PEMERINTAH DESA CIMUNGKAL	2.012.297.000	2.012.297.000	100,0	2.112.297.000	2.102.960.328	99,6	100.000.000	100.000.000	100,0	0	9.336.672	0,0
01.2002.	PEMERINTAH DESA GANJARESIK	1.786.367.000	1.786.367.000	100,0	1.780.318.372	1.768.940.663	99,4	(6.048.628)	(10.717.000)	177,2	0	6.709.337	0,0
01.2003.	PEMERINTAH DESA CILENGKRANG	1.944.082.591	1.944.046.595	100,0	1.943.711.131	1.938.264.739	99,7	0	0	0,0	371.460	5.781.856	556,5
01.2004.	PEMERINTAH DESA CIKAREO SELATAN	1.590.473.000	1.590.473.000	100,0	1.590.473.000	1.580.941.814	99,4	0	0	0,0	0	9.531.186	0,0
01.2005.	PEMERINTAH DESA CIKAREO UTARA	1.582.389.000	1.582.389.000	100,0	1.582.392.312	1.569.993.852	99,2	3.312	0	0,0	0	12.395.148	0,0
01.2006.	PEMERINTAH DESA WADO	2.504.208.000	2.369.364.418	94,6	2.355.536.000	2.211.167.384	93,9	(148.672.000)	(148.672.000)	100,0	0	9.525.034	0,0
01.2007.	PEMERINTAH DESA MULYAJAYA	1.649.288.000	1.649.643.737	100,0	1.669.863.000	1.658.399.200	99,3	20.714.109	20.714.109	100,0	139.109	11.958.646	596,6
01.2009.	PEMERINTAH DESA SUKAJADI	1.696.707.000	1.696.707.000	100,0	1.696.707.000	1.669.447.088	98,4	0	0	0,0	0	27.259.912	0,0
01.2010.	PEMERINTAH DESA CISURAT	1.546.627.000	1.544.239.589	99,8	1.496.627.000	1.491.385.480	99,6	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	2.854.109	0,0
01.2011.	PEMERINTAH DESA SUKAPURA	1.541.533.000	1.541.671.594	100,0	1.541.533.000	1.517.060.672	98,4	0	0	0,0	0	24.610.922	0,0
02	KECAMATAN JATINUNGGAL	16.088.781.200	16.085.015.383	100,0	15.735.836.560	15.405.055.666	97,9	(348.826.326)	(333.826.326)	95,7	4.118.314	346.133.391	404,7
02.2001.	PEMERINTAH DESA SIRNASARI	1.688.144.500	1.689.108.949	100,1	1.663.144.500	1.629.612.854	98,0	(24.436.639)	(24.436.639)	100,0	563.361	35.059.456	223,3
02.2002.	PEMERINTAH DESA TARIKOLOT	1.623.533.000	1.624.112.051	100,0	1.581.827.936	1.527.676.578	96,6	(41.322.513)	(41.322.513)	100,0	382.551	55.112.960	406,7
02.2003.	PEMERINTAH DESA PAWENANG	2.264.128.000	2.255.406.294	99,6	2.125.013.300	2.069.930.596	97,4	(139.094.922)	(139.094.922)	100,0	19.778	46.380.776	506,9
02.2004.	PEMERINTAH DESA SARIMEKAR	1.752.373.000	1.752.811.896	100,0	1.752.373.000	1.689.259.000	96,4	363.946	363.946	100,0	363.946	63.916.842	562,2
02.2005.	PEMERINTAH DESA BANJARSARI	1.769.835.000	1.770.487.257	100,0	1.655.487.671	1.649.562.308	99,6	(112.251.555)	(97.251.555)	86,6	2.095.774	23.673.394	129,6
02.2006.	PEMERINTAH DESA KIRISIK	1.904.273.400	1.904.041.428	100,0	1.856.169.485	1.818.581.767	98,0	(48.103.915)	(48.103.915)	100,0	0	37.355.746	0,0
02.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMANAH	1.655.354.000	1.656.172.607	100,0	1.655.581.045	1.624.643.374	98,1	865.227	865.227	100,0	638.182	32.394.460	076,1
02.2008.	PEMERINTAH DESA CIPEUNDEUY	1.767.615.000	1.768.414.924	100,0	1.771.519.619	1.749.123.740	98,7	3.904.619	3.904.619	100,0	0	23.195.803	0,0
02.2009.	PEMERINTAH DESA CIMANINTIN	1.663.525.300	1.664.459.977	100,1	1.674.720.004	1.646.665.449	98,3	11.249.426	11.249.426	100,0	54.722	29.043.954	075,5
03	KECAMATAN DARMARAJA	18.617.224.155	18.619.822.396	100,0	18.560.318.731	18.422.847.101	99,3	(56.555.296)	(56.555.296)	100,0	350.128	140.419.999	105,3
03.2001.	PEMERINTAH DESA DARMARAJA	1.434.376.515	1.434.683.950	100,0	1.435.296.691	1.427.310.644	99,4	920.176	920.176	100,0	0	8.293.482	0,0
03.2002.	PEMERINTAH DESA DARMAJAYA	1.583.568.128	1.583.568.128	100,0	1.583.568.128	1.574.707.188	99,4	350.128	350.128	100,0	350.128	9.211.068	630,8
03.2003.	PEMERINTAH DESA SUKAMENAK	1.542.784.113	1.542.784.113	100,0	1.542.784.113	1.536.069.929	99,6	0	0	0,0	0	8.714.184	0,0

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
06.2004.	PEMERINTAH DESA CIKADU	1.712.646.000	1.713.677.871	100,1	1.757.058.500	1.750.392.109	99,6	44.412.500	44.412.500	100,0	0	7.698.262	0,0
06.2005.	PEMERINTAH DESA BANGBAYANG	1.491.676.000	1.495.242.964	100,2	1.584.094.450	1.531.489.837	96,7	97.048.450	97.048.450	100,0	4.630.000	60.801.577	313,2
06.2006.	PEMERINTAH DESA KADUWULUNG	1.645.336.400	1.646.293.638	100,1	1.645.336.400	1.631.960.815	99,2	0	0	0,0	0	14.332.823	0,0
06.2007.	PEMERINTAH DESA KARANGHEULEUT	1.521.509.000	1.522.308.380	100,1	1.521.509.000	1.513.663.602	99,5	0	0	0,0	0	8.644.778	0,0
06.2008.	PEMERINTAH DESA CIJELER	1.466.789.000	1.468.106.825	100,1	1.407.903.240	1.386.910.980	98,5	(58.885.760)	(58.885.760)	100,0	0	22.310.085	0,0
06.2009.	PEMERINTAH DESA AMBIT	1.376.740.800	1.377.015.414	100,0	1.406.965.000	1.406.185.000	99,9	30.224.200	30.782.000	101,8	0	1.612.414	0,0
06.2010.	PEMERINTAH DESA JATIMEKAR	1.417.506.000	1.417.506.000	100,0	1.387.506.000	1.377.166.440	99,3	(30.000.000)	(30.000.000)	100,0	0	10.339.560	0,0
06.2011.	PEMERINTAH DESA CIJATI	1.385.048.000	1.386.309.069	100,1	1.385.048.000	1.376.760.664	99,4	0	0	0,0	0	9.548.405	0,0
06.2012.	PEMERINTAH DESA PAMULIHAN	1.356.835.500	1.358.664.177	100,1	1.356.835.500	1.350.017.834	99,5	0	0	0,0	0	8.646.343	0,0
06.2013.	PEMERINTAH DESA MALAKA	1.671.919.000	1.673.364.030	100,1	1.676.719.000	1.660.103.792	99,0	4.800.000	4.800.000	100,0	0	18.060.238	0,0
06.2014.	PEMERINTAH DESA SUKATALI	1.559.716.500	1.560.964.544	100,1	1.602.890.166	1.514.298.940	94,5	43.173.666	43.173.666	100,0	0	89.839.270	0,0
06.2015.	PEMERINTAH DESA CICARIMANAH	1.364.914.000	1.367.124.561	100,2	1.329.914.000	1.312.035.635	98,7	(35.000.000)	(35.000.000)	100,0	0	20.088.926	0,0
07	KECAMATAN CONGGEANG	17.221.639.000	17.042.697.942	99,0	17.194.812.508	16.893.779.959	98,2	(26.826.492)	86.276.878	21,6	0	235.194.861	0,0
07.2001.	PEMERINTAH DESA CONGGEANG KULON	1.421.453.000	1.421.781.358	100,0	1.379.224.800	1.370.786.184	99,4	(42.228.200)	(42.228.200)	100,0	0	8.766.974	0,0
07.2002.	PEMERINTAH DESA CONGGEANG WETAN	1.323.233.000	1.313.709.396	99,3	1.313.657.090	1.305.507.602	99,4	(9.575.910)	0	0,0	0	8.201.794	0,0
07.2003.	PEMERINTAH DESA CIPAMEKAR	1.545.791.000	1.523.287.518	98,5	1.508.791.000	1.478.454.129	98,0	(37.000.000)	(33.334.710)	90,1	0	11.498.679	0,0
07.2004.	PEMERINTAH DESA CIBEUREUYEUH	1.277.005.000	1.260.581.359	98,7	1.339.005.000	1.315.058.258	98,2	62.000.000	67.019.109	108,1	0	12.542.210	0,0
07.2005.	PEMERINTAH DESA JAMBU	1.473.435.000	1.468.549.184	99,7	1.399.774.468	1.380.440.640	98,6	(73.660.532)	(73.660.532)	100,0	0	14.448.012	0,0
07.2006.	PEMERINTAH DESA BABAKAN ASEM	1.573.046.000	1.562.360.822	99,3	1.539.046.000	1.518.674.814	98,7	(34.000.000)	664.579	(2,0)	0	44.350.587	0,0
07.2007.	PEMERINTAH DESA PADAASIH	1.487.846.000	1.489.862.183	100,1	1.559.446.000	1.544.907.384	99,1	71.600.000	125.800.000	175,7	0	70.754.799	0,0
07.2008.	PEMERINTAH DESA UNGKAL	1.355.132.000	1.289.266.257	95,1	1.355.132.000	1.281.565.954	94,6	0	0	0,0	0	7.700.303	0,0
07.2009.	PEMERINTAH DESA KARANG LAYUNG	1.439.532.000	1.428.737.946	99,3	1.466.575.000	1.455.512.743	99,2	27.043.000	28.573.104	105,7	0	1.798.307	0,0
07.2010.	PEMERINTAH DESA CACABAN	1.393.680.000	1.383.994.959	99,3	1.433.341.500	1.422.122.643	99,2	39.661.500	41.868.622	105,6	0	3.740.938	0,0
07.2011.	PEMERINTAH DESA NARIMBANG	1.505.909.000	1.503.416.868	99,8	1.505.909.000	1.494.310.384	99,2	0	1.553.492	0,0	0	10.659.976	0,0
07.2012.	PEMERINTAH DESA CIBUBUAN	1.425.577.000	1.397.150.092	98,0	1.394.910.650	1.326.439.224	95,1	(30.666.350)	(29.978.586)	97,8	0	40.732.282	0,0
08	KECAMATAN PASEH	16.395.010.378	16.565.215.943	101,0	16.842.730.724	16.509.878.237	98,0	2.901.798.666	455.482.166	15,7	2.454.078.320	510.819.872	20,8
08.2001.	PEMERINTAH DESA PASEHKIDUL	1.440.304.000	1.437.637.535	99,8	1.480.304.000	1.471.025.782	99,4	40.000.000	40.000.000	100,0	0	6.611.753	0,0
08.2002.	PEMERINTAH DESA PASEH KALER	1.771.631.300	1.774.741.526	100,2	1.785.331.400	1.767.597.979	99,0	13.700.100	18.700.100	136,5	0	25.843.647	0,0
08.2003.	PEMERINTAH DESA LEGOK KIDUL	1.518.216.000	1.519.136.760	100,1	1.493.216.000	1.482.622.112	99,3	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	11.514.648	0,0
08.2004.	PEMERINTAH DESA LEGOK KALER	2.496.629.500	2.498.151.235	100,1	2.496.629.500	2.370.301.343	94,9	2.451.316.500	0	0,0	2.451.316.500	127.849.892	5,2
08.2005.	PEMERINTAH DESA BONGKOK	1.809.931.350	1.973.409.912	109,0	1.809.931.350	1.753.892.344	96,9	0	0	0,0	0	219.517.568	0,0
08.2006.	PEMERINTAH DESA PADANAN	1.485.708.500	1.486.086.825	100,0	1.465.795.054	1.454.084.974	99,2	(17.151.626)	(17.151.626)	100,0	2.761.820	14.850.225	537,7
08.2007.	PEMERINTAH DESA PASIRREUNGIT	1.418.959.000	1.419.999.234	100,1	1.494.412.845	1.481.767.627	99,2	75.453.845	75.453.845	100,0	0	13.685.452	0,0

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
11.2004.	PEMERINTAH DESA MARGALUYU	1.697.955.000	1.700.546.385	100,2	1.757.720.169	1.625.679.620	92,5	59.765.169	59.765.169	100,0	0	134.631.934	0,0
11.2005.	PEMERINTAH DESA KUTAMANDIRI	1.679.745.000	1.680.475.623	100,0	1.649.745.000	1.642.019.502	99,5	(30.000.000)	(30.000.000)	100,0	0	8.456.121	0,0
11.2006.	PEMERINTAH DESA MARGAJAYA	1.824.290.000	1.825.568.226	100,1	1.724.611.250	1.715.974.415	99,5	(99.678.750)	(99.678.750)	100,0	0	9.915.061	0,0
11.2007.	PEMERINTAH DESA RAHARJA	1.833.652.000	1.834.850.641	100,1	1.833.662.600	1.825.184.453	99,5	10.600	10.600	100,0	0	9.676.788	0,0
11.2008.	PEMERINTAH DESA CIJAMBU	1.603.394.000	1.592.454.620	99,3	1.512.268.245	1.474.347.998	97,5	(91.125.755)	(74.125.755)	81,3	0	43.980.867	0,0
11.2009.	PEMERINTAH DESA PASIGARAN	1.765.264.000	1.767.229.429	100,1	1.691.800.551	1.680.184.412	99,3	(73.463.449)	(73.463.449)	100,0	0	13.581.568	0,0
11.2010.	PEMERINTAH DESA GUNUNGMANIK	1.809.955.000	1.811.106.992	100,1	1.810.855.000	1.801.638.328	99,5	900.000	900.000	100,0	0	10.368.664	0,0
11.2011.	PEMERINTAH DESA KADAKAJAYA	1.566.624.000	1.567.221.145	100,0	1.566.624.000	1.558.125.546	99,5	0	0	0,0	0	9.095.599	0,0
11.2012.	PEMERINTAH DESA CINANJUNG	1.797.037.000	1.798.326.783	100,1	1.716.317.400	1.701.180.625	99,1	(80.719.600)	(80.719.600)	100,0	0	16.426.558	0,0
12	KECAMATAN SUKASARI	11.277.901.200	11.304.428.222	100,2	11.297.418.504	10.889.319.880	96,4	19.517.304	(4.492.076)	(23,0)	0	410.616.266	0,0
12.2001.	PEMERINTAH DESA SUKASARI	1.688.506.000	1.688.899.863	100,0	1.688.506.000	1.667.937.468	98,8	0	0	0,0	0	20.962.395	0,0
12.2002.	PEMERINTAH DESA GENTENG	1.746.757.000	1.747.110.539	100,0	1.719.140.237	1.681.322.079	97,8	(27.616.763)	(27.616.763)	100,0	0	38.171.697	0,0
12.2003.	PEMERINTAH DESA BANYURESMI	1.472.116.000	1.494.140.949	101,5	1.496.125.380	1.452.245.334	97,1	24.009.380	0	0,0	0	41.895.615	0,0
12.2004.	PEMERINTAH DESA NANGGERANG	1.511.809.200	1.511.809.200	100,0	1.511.809.200	1.328.280.733	87,9	0	0	0,0	0	183.528.467	0,0
12.2005.	PEMERINTAH DESA MEKARSARI	1.601.613.000	1.603.427.327	100,1	1.620.022.152	1.573.791.266	97,1	18.409.152	18.409.152	100,0	0	48.045.213	0,0
12.2006.	PEMERINTAH DESA SINDANGSARI	1.667.961.000	1.668.535.498	100,0	1.671.561.000	1.666.041.000	99,7	3.600.000	3.600.000	100,0	0	6.094.498	0,0
12.2007.	PEMERINTAH DESA SUKARAPIH	1.589.139.000	1.590.504.846	100,1	1.590.254.535	1.519.702.000	95,6	1.115.535	1.115.535	100,0	0	71.918.381	0,0
13	KECAMATAN PAMULIHAN	19.436.206.900	19.460.663.571	100,1	19.414.627.985	19.285.866.843	99,3	(21.578.915)	(21.578.915)	100,0	0	153.217.813	0,0
13.2001.	PEMERINTAH DESA CIGENDEL	2.094.834.000	2.098.536.406	100,2	2.101.034.000	2.091.817.328	99,6	6.200.000	6.200.000	100,0	0	12.919.078	0,0
13.2002.	PEMERINTAH DESA CIJERUK	1.761.411.000	1.763.062.181	100,1	1.761.411.000	1.753.257.579	99,5	0	0	0,0	0	9.804.602	0,0
13.2003.	PEMERINTAH DESA PAMULIHAN	1.772.837.000	1.776.284.260	100,2	1.777.237.000	1.769.381.926	99,6	4.400.000	4.400.000	100,0	0	11.302.334	0,0
13.2004.	PEMERINTAH DESA HAURGOMBONG	1.622.879.000	1.623.873.075	100,1	1.570.964.200	1.563.344.985	99,5	(51.914.800)	(51.914.800)	100,0	0	8.613.290	0,0
13.2005.	PEMERINTAH DESA CILEMBU	1.672.991.000	1.674.426.825	100,1	1.627.391.000	1.624.411.134	99,8	(45.600.000)	(45.600.000)	100,0	0	4.415.691	0,0
13.2006.	PEMERINTAH DESA CIMARIAS	2.091.480.000	2.091.756.562	100,0	2.110.843.600	2.084.390.173	98,7	19.363.600	19.363.600	100,0	0	26.729.989	0,0
13.2007.	PEMERINTAH DESA CINANGGERANG	1.565.883.000	1.567.660.475	100,1	1.579.991.219	1.550.421.609	98,1	14.108.219	14.108.219	100,0	0	31.347.085	0,0
13.2008.	PEMERINTAH DESA MEKARBAKTI	1.699.311.000	1.701.586.983	100,1	1.717.336.000	1.708.118.812	99,5	18.025.000	18.025.000	100,0	0	11.493.171	0,0
13.2009.	PEMERINTAH DESA SUKAWANGI	1.726.163.900	1.731.156.509	100,3	1.728.239.100	1.720.027.417	99,5	2.075.200	2.075.200	100,0	0	13.204.292	0,0
13.2010.	PEMERINTAH DESA CIPTASARI	1.584.126.000	1.586.075.915	100,1	1.590.963.114	1.579.537.716	99,3	6.837.114	6.837.114	100,0	0	13.375.313	0,0
13.2011.	PEMERINTAH DESA CITALI	1.844.291.000	1.846.244.380	100,1	1.849.217.752	1.841.158.164	99,6	4.926.752	4.926.752	100,0	0	10.012.968	0,0
14	KECAMATAN CIMANGGUNG	22.986.082.176	22.981.748.974	100,0	22.692.560.554	22.416.253.425	98,8	(292.517.734)	(292.517.734)	100,0	1.003.888	272.977.815	192,1
14.2001.	PEMERINTAH DESA CIMANGGUNG	2.257.716.000	2.251.749.495	99,7	2.207.716.000	2.193.311.250	99,3	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	8.438.245	0,0
14.2002.	PEMERINTAH DESA SINDANGPAKUON	1.718.441.176	1.718.623.457	100,0	1.720.728.676	1.708.993.234	99,3	2.291.388	2.291.388	100,0	3.888	11.921.611	625,8

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
17	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	16.482.750.000	16.457.906.522	99,8	16.329.911.837	16.049.893.615	98,3	(152.838.163)	(158.386.991)	103,6	0	249.625.916	0,0
17.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAGALIH	1.716.586.000	1.717.222.603	100,0	1.716.586.000	1.708.471.574	99,5	0	0	0,0	0	8.751.029	0,0
17.2006.	PEMERINTAH DESA BAGINDA	1.641.889.000	1.638.222.545	99,8	1.563.100.000	1.448.765.398	92,7	(78.789.000)	(78.788.676)	100,0	0	110.668.471	0,0
17.2007.	PEMERINTAH DESA CIPANCAR	1.398.295.000	1.398.766.511	100,0	1.407.004.000	1.399.343.008	99,5	8.709.000	8.709.000	100,0	0	8.132.503	0,0
17.2008.	PEMERINTAH DESA CITENGAH	1.578.622.000	1.538.609.291	97,5	1.546.622.000	1.498.276.440	96,9	(32.000.000)	(28.419.475)	88,8	0	11.913.376	0,0
17.2009.	PEMERINTAH DESA GUNASARI	1.666.231.000	1.667.157.209	100,1	1.675.360.677	1.665.886.547	99,4	9.129.677	0	0,0	0	1.270.662	0,0
17.2010.	PEMERINTAH DESA SUKAJAYA	1.935.535.000	1.944.720.823	100,5	1.996.440.850	1.987.161.694	99,5	60.905.850	60.905.850	100,0	0	18.464.979	0,0
17.2011.	PEMERINTAH DESA MARGAMEKAR	1.590.843.000	1.594.943.509	100,3	1.601.223.000	1.591.951.166	99,4	10.380.000	10.380.000	100,0	0	13.372.343	0,0
17.2012.	PEMERINTAH DESA CIHERANG	1.725.203.000	1.727.129.090	100,1	1.654.229.310	1.645.719.560	99,5	(70.973.690)	(70.973.690)	100,0	0	10.435.840	0,0
17.2013.	PEMERINTAH DESA MARGALAKSANA	1.554.519.000	1.555.297.116	100,1	1.559.319.000	1.501.692.436	96,3	4.800.000	4.800.000	100,0	0	58.404.680	0,0
17.2014.	PEMERINTAH DESA MEKAR RAHAYU	1.675.027.000	1.675.837.825	100,0	1.610.027.000	1.602.625.792	99,5	(65.000.000)	(65.000.000)	100,0	0	8.212.033	0,0
18	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	17.070.789.300	17.079.029.305	100,0	16.841.288.822	16.674.829.511	99,0	(212.010.478)	(216.010.478)	101,9	17.490.000	188.189.316	076,0
18.2004.	PEMERINTAH DESA PADASUKA	1.486.904.000	1.487.495.277	100,0	1.486.904.000	1.474.014.086	99,1	0	0	0,0	0	13.481.191	0,0
18.2005.	PEMERINTAH DESA MULYASARI	1.713.222.000	1.715.071.555	100,1	1.730.513.122	1.712.953.072	99,0	17.291.122	13.291.122	76,9	0	15.409.605	0,0
18.2006.	PEMERINTAH DESA GIRIMUKTI	1.887.469.000	1.888.197.312	100,0	1.857.469.000	1.845.306.122	99,3	(30.000.000)	(30.000.000)	100,0	0	12.891.190	0,0
18.2007.	PEMERINTAH DESA MEKARJAYA	1.953.103.000	1.954.726.594	100,1	1.928.103.000	1.916.072.116	99,4	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	13.654.478	0,0
18.2008.	PEMERINTAH DESA MARGAMUKTI	1.708.546.000	1.709.054.709	100,0	1.608.546.000	1.602.376.714	99,6	(100.000.000)	(100.000.000)	100,0	0	6.677.995	0,0
18.2009.	PEMERINTAH DESA SIRNAMULYA	1.720.164.000	1.720.852.304	100,0	1.702.674.000	1.637.277.430	96,2	0	0	0,0	17.490.000	83.574.874	477,8
18.2010.	PEMERINTAH DESA KEBONJATI	1.517.615.000	1.518.017.619	100,0	1.517.615.000	1.510.335.396	99,5	0	0	0,0	0	7.682.223	0,0
18.2011.	PEMERINTAH DESA JATIHURIP	1.740.304.000	1.740.679.986	100,0	1.715.304.000	1.708.032.468	99,6	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	7.647.518	0,0
18.2012.	PEMERINTAH DESA JATIMULYA	1.667.761.000	1.668.582.689	100,0	1.618.459.400	1.605.963.177	99,2	(49.301.600)	(49.301.600)	100,0	0	13.317.912	0,0
18.2013.	PEMERINTAH DESA RANCAMULYA	1.675.701.300	1.676.351.260	100,0	1.675.701.300	1.662.498.930	99,2	0	0	0,0	0	13.852.330	0,0
19	KECAMATAN GANEAS	11.869.308.258	11.903.105.332	100,3	11.872.329.476	11.610.360.130	97,8	3.532.494	3.534.189	100,0	511.276	296.279.391	949,0
19.2001.	PEMERINTAH DESA GANEAS	1.551.868.145	1.547.707.895	99,7	1.579.072.533	1.542.330.704	97,7	27.204.388	27.204.388	100,0	0	32.581.579	0,0
19.2002.	PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR	1.277.693.900	1.311.615.173	102,7	1.272.693.900	1.247.276.836	98,0	(4.488.724)	(4.488.724)	100,0	511.276	59.849.613	705,9
19.2003.	PEMERINTAH DESA CIKONENG	1.456.979.000	1.456.979.000	100,0	1.423.564.000	1.384.232.676	97,2	(33.415.000)	(33.415.000)	100,0	0	39.331.324	0,0
19.2004.	PEMERINTAH DESA SUKALUYU	1.478.061.000	1.479.319.380	100,1	1.468.593.500	1.445.819.996	98,4	(9.467.500)	(9.467.500)	100,0	0	24.031.884	0,0
19.2005.	PEMERINTAH DESA SUKAWENING	1.446.923.413	1.447.600.826	100,0	1.446.923.413	1.426.935.353	98,6	0	0	0,0	0	20.665.473	0,0
19.2006.	PEMERINTAH DESA TANJUNGHURIP	1.665.813.000	1.666.716.050	100,1	1.671.964.650	1.639.098.163	98,0	6.151.650	6.151.650	100,0	0	33.769.537	0,0
19.2007.	PEMERINTAH DESA CIKONDANG	1.598.562.000	1.599.284.637	100,0	1.616.109.680	1.558.376.101	96,4	17.547.680	17.549.375	100,0	0	58.457.911	0,0
19.2008.	PEMERINTAH DESA CIKONENGGULON	1.393.407.800	1.393.882.371	100,0	1.393.407.800	1.366.290.301	98,1	0	0	0,0	0	27.592.070	0,0
20	KECAMATAN TANJUNGGERTA	18.170.572.075	18.173.674.289	100,0	18.171.875.406	18.082.720.816	99,5	4.812.740	7.217.154	150,0	3.509.409	98.170.627	797,4

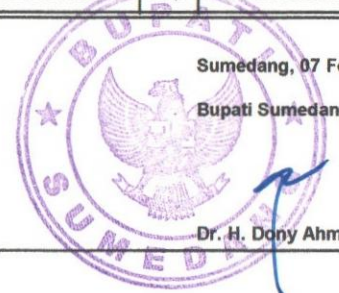
KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
22.2011.	PEMERINTAH DESA CITIMUN	1.589.721.780	1.591.055.017	100,1	1.589.721.472	1.581.518.429	99,5	16	16	100,0	324	9.536.604	396,3
22.2012.	PEMERINTAH DESA SERANG	1.580.019.431	1.580.453.353	100,0	1.582.318.456	1.572.657.594	99,4	2.299.025	2.299.025	100,0	0	10.094.784	0,0
22.2013.	PEMERINTAH DESA PADASARI	1.417.927.270	1.418.108.124	100,0	1.462.245.130	1.452.751.743	99,4	44.317.860	44.309.209	100,0	0	9.665.590	0,0
22.2014.	PEMERINTAH DESA CIMUJA	1.458.516.000	1.459.977.158	100,1	1.523.778.501	1.505.166.082	98,8	65.262.501	67.458.847	103,4	0	22.269.923	0,0
23	KECAMATAN CISARUA	9.996.600.000	9.971.329.858	99,7	9.945.747.002	9.845.955.656	99,0	(50.852.998)	(50.853.168)	100,0	0	74.521.034	0,0
23.2001.	PEMERINTAH DESA CISARUA	1.524.915.000	1.524.915.000	100,0	1.532.715.000	1.522.617.088	99,3	7.800.000	7.800.000	100,0	0	10.097.912	0,0
23.2002.	PEMERINTAH DESA CIUYAH	1.416.617.000	1.416.973.766	100,0	1.407.993.093	1.393.649.116	99,0	(8.623.907)	(8.623.907)	100,0	0	14.700.743	0,0
23.2003.	PEMERINTAH DESA CIMARA	1.381.184.000	1.381.584.516	100,0	1.372.403.747	1.360.325.631	99,1	(8.780.253)	(8.780.253)	100,0	0	12.478.632	0,0
23.2004.	PEMERINTAH DESA BANTARMARA	1.294.559.000	1.295.412.045	100,1	1.248.195.097	1.240.803.174	99,4	(46.363.903)	(46.364.073)	100,0	0	8.244.798	0,0
23.2005.	PEMERINTAH DESA CIPANDANWANGI	1.297.800.000	1.268.260.641	97,7	1.299.770.427	1.261.853.224	97,1	1.970.427	1.970.427	100,0	0	8.377.844	0,0
23.2006.	PEMERINTAH DESA CISALAK	1.500.106.000	1.501.486.437	100,1	1.501.817.401	1.490.504.058	99,2	1.711.401	1.711.401	100,0	0	12.693.780	0,0
23.2007.	PEMERINTAH DESA KEBONKALAPA	1.581.419.000	1.582.697.453	100,1	1.582.852.237	1.576.203.365	99,6	1.433.237	1.433.237	100,0	0	7.927.325	0,0
24	KECAMATAN TOMO	14.319.210.258	14.254.658.948	99,5	14.271.148.408	13.987.981.407	98,0	(43.534.282)	(28.933.745)	66,5	4.527.568	237.743.796	251,0
24.2001.	PEMERINTAH DESA TOMO	1.468.955.000	1.468.955.000	100,0	1.418.955.000	1.401.344.168	98,8	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	17.610.832	0,0
24.2002.	PEMERINTAH DESA TOLENGAS	1.652.704.000	1.652.813.292	100,0	1.655.622.100	1.633.822.401	98,7	2.918.100	3.663.737	125,6	0	22.654.628	0,0
24.2003.	PEMERINTAH DESA DARMAWANGI	2.033.343.000	1.971.025.375	96,9	2.033.343.000	1.963.050.301	96,5	0	0	0,0	0	7.975.074	0,0
24.2004.	PEMERINTAH DESA MARONGGE	1.527.234.000	1.527.322.236	100,0	1.527.234.000	1.519.591.088	99,5	4.527.568	4.202.468	92,8	4.527.568	11.933.616	263,6
24.2005.	PEMERINTAH DESA JEMBARWANGI	1.650.660.858	1.651.282.152	100,0	1.664.380.908	1.612.827.348	96,9	13.720.050	27.900.050	203,4	0	66.354.854	0,0
24.2006.	PEMERINTAH DESA BUGEL	1.370.662.000	1.367.258.007	99,8	1.345.662.000	1.327.985.000	98,7	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	14.273.007	0,0
24.2007.	PEMERINTAH DESA CIPELES	1.402.895.000	1.403.246.486	100,0	1.438.195.000	1.367.177.461	95,1	35.300.000	35.300.000	100,0	0	71.369.025	0,0
24.2008.	PEMERINTAH DESA KARYAMUKTI	1.740.743.400	1.740.743.400	100,0	1.740.743.400	1.715.170.640	98,5	0	0	0,0	0	25.572.760	0,0
24.2010.	PEMERINTAH DESA MEKARWANGI	1.472.013.000	1.472.013.000	100,0	1.447.013.000	1.447.013.000	100,0	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	0	0,0
25	KECAMATAN UJUNGJAYA	14.059.738.000	14.046.420.329	99,9	14.062.156.921	13.983.991.052	99,4	2.418.921	2.418.921	100,0	0	64.848.198	0,0
25.2001.	PEMERINTAH DESA UJUNGJAYA	2.036.530.000	2.026.530.000	99,5	2.036.530.000	2.018.749.440	99,1	0	0	0,0	0	7.780.560	0,0
25.2002.	PEMERINTAH DESA PALABUAN	1.385.113.000	1.385.342.600	100,0	1.387.098.731	1.378.943.714	99,4	1.985.731	1.985.731	100,0	0	8.384.617	0,0
25.2003.	PEMERINTAH DESA PALASARI	1.460.997.000	1.461.514.926	100,0	1.473.230.940	1.465.203.771	99,5	12.233.940	12.233.940	100,0	0	8.545.095	0,0
25.2004.	PEMERINTAH DESA KEBONCAU	1.515.698.000	1.515.881.573	100,0	1.515.698.000	1.515.244.135	100,0	0	0	0,0	0	637.438	0,0
25.2005.	PEMERINTAH DESA SAKURJAYA	1.518.149.000	1.518.149.000	100,0	1.518.149.000	1.510.368.440	99,5	0	0	0,0	0	7.780.560	0,0
25.2006.	PEMERINTAH DESA KUDANGWANGI	1.422.220.000	1.422.562.608	100,0	1.460.419.250	1.452.509.014	99,5	38.199.250	38.199.250	100,0	0	8.252.844	0,0
25.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMULYA	1.369.016.000	1.364.016.000	99,6	1.319.016.000	1.306.235.440	99,0	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	7.780.560	0,0
25.2008.	PEMERINTAH DESA CIPELANG	1.497.357.000	1.497.581.640	100,0	1.497.357.000	1.488.798.384	99,4	0	0	0,0	0	8.783.256	0,0
25.2009.	PEMERINTAH DESA CIBULUH	1.854.658.000	1.854.841.982	100,0	1.854.658.000	1.847.938.714	99,6	0	0	0,0	0	6.903.268	0,0

PROVINSI : 32 PROVINSI JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 32.11 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

REALISASI S/D 31/12/2022

KODE	NAMA DESA	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
24.2008.	PEMERINTAH DESA KARYAMUKTI	1.740.743.400	1.740.743.400	100,0	1.740.743.400	1.715.170.640	98,5	0	0	0,0	0	25.572.760	0,0
24.2010.	PEMERINTAH DESA MEKARWANGI	1.472.013.000	1.472.013.000	100,0	1.447.013.000	1.447.013.000	100,0	(25.000.000)	(25.000.000)	100,0	0	0	0,0
25	KECAMATAN UJUNGJAYA	14.059.738.000	14.046.420.329	99,9	14.062.156.921	13.983.991.052	99,4	2.418.921	2.418.921	100,0	0	64.848.198	0,0
25.2001.	PEMERINTAH DESA UJUNGJAYA	2.036.530.000	2.026.530.000	99,5	2.036.530.000	2.018.749.440	99,1	0	0	0,0	0	7.780.560	0,0
25.2002.	PEMERINTAH DESA PALABUAN	1.385.113.000	1.385.342.600	100,0	1.387.098.731	1.378.943.714	99,4	1.985.731	1.985.731	100,0	0	8.384.617	0,0
25.2003.	PEMERINTAH DESA PALASARI	1.460.997.000	1.461.514.926	100,0	1.473.230.940	1.465.203.771	99,5	12.233.940	12.233.940	100,0	0	8.545.095	0,0
25.2004.	PEMERINTAH DESA KEBONCAU	1.515.698.000	1.515.881.573	100,0	1.515.698.000	1.515.244.135	100,0	0	0	0,0	0	637.438	0,0
25.2005.	PEMERINTAH DESA SAKURJAYA	1.518.149.000	1.518.149.000	100,0	1.518.149.000	1.510.368.440	99,5	0	0	0,0	0	7.780.560	0,0
25.2006.	PEMERINTAH DESA KUDANGWANGI	1.422.220.000	1.422.562.608	100,0	1.460.419.250	1.452.509.014	99,5	38.199.250	38.199.250	100,0	0	8.252.844	0,0
25.2007.	PEMERINTAH DESA SUKAMULYA	1.369.016.000	1.364.016.000	99,6	1.319.016.000	1.306.235.440	99,0	(50.000.000)	(50.000.000)	100,0	0	7.780.560	0,0
25.2008.	PEMERINTAH DESA CIPELANG	1.497.357.000	1.497.581.640	100,0	1.497.357.000	1.488.798.384	99,4	0	0	0,0	0	8.783.256	0,0
25.2009.	PEMERINTAH DESA CIBULUH	1.854.658.000	1.854.841.982	100,0	1.854.658.000	1.847.938.714	99,6	0	0	0,0	0	6.903.268	0,0
26	KECAMATAN JATIGEDE	16.467.118.381	15.999.968.763	97,2	16.232.959.706	15.609.052.956	96,2	(234.124.696)	234.547.266	00,2	33.979	625.463.073	734,2
26.2001.	PEMERINTAH DESA CIJEUNGJING	1.414.000.000	1.414.693.365	100,0	1.414.000.000	1.402.840.390	99,2	0	0	0,0	0	11.852.975	0,0
26.2002.	PEMERINTAH DESA KADUJAYA	1.285.268.000	1.285.817.385	100,0	1.287.068.000	1.279.796.468	99,4	1.800.000	1.800.000	100,0	0	7.820.917	0,0
26.2003.	PEMERINTAH DESA LEBAKSIUH	1.391.166.000	1.391.842.960	100,0	1.391.166.000	1.382.717.384	99,4	0	0	0,0	0	9.125.576	0,0
26.2004.	PEMERINTAH DESA CINTAJAYA	1.409.158.000	1.409.786.324	100,0	1.409.158.000	1.380.981.167	98,0	0	0	0,0	0	28.805.157	0,0
26.2005.	PEMERINTAH DESA CIPICUNG	1.765.549.000	1.442.281.248	81,7	1.766.349.000	1.433.033.775	81,1	800.000	800.000	100,0	0	10.047.473	0,0
26.2006.	PEMERINTAH DESA MEKARASIH	1.402.971.000	1.391.797.659	99,2	1.402.971.000	1.384.746.552	98,7	33.979	33.979	100,0	33.979	7.085.086	851,4
26.2008.	PEMERINTAH DESA CIRANGGEM	1.411.744.000	1.410.738.704	99,9	1.411.744.000	1.395.438.672	98,8	0	0	0,0	0	15.300.032	0,0
26.2009.	PEMERINTAH DESA CISAMPIH	1.538.717.000	1.504.946.856	97,8	1.519.967.000	1.468.447.010	96,6	(18.750.000)	(18.750.000)	100,0	0	17.749.846	0,0
26.2010.	PEMERINTAH DESA JEMAH	1.429.445.700	1.368.325.963	95,7	1.441.753.100	1.371.062.382	95,1	12.307.400	12.307.400	100,0	0	9.570.981	0,0
26.2011.	PEMERINTAH DESA KAREDOK	2.030.569.681	1.994.991.081	98,2	1.809.794.400	1.758.268.605	97,2	(220.775.281)	247.896.681	112,3	0	484.619.157	0,0
26.2012.	PEMERINTAH DESA KADU	1.388.530.000	1.384.747.218	99,7	1.378.989.206	1.351.720.551	98,0	(9.540.794)	(9.540.794)	100,0	0	23.485.873	0,0
	JUMLAH	439.385.609.378	437.822.077.948	99,6	437.859.009.888	428.364.696.984	97,8	991.065.294	(512.066.136)	(51,7)	2.517.664.784	8.945.314.828	355,3



Sumedang, 07 February 2023

Bupati Sumedang

Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., M.M